



PEMERINTAH KAB. SOPPENG

LPPD 2021

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



**Tahun Anggaran
2022**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Sebagai umat yang beragama perkenankanlah Kami panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga Pemerintah Kabupaten Soppeng dapat menyelesaikan kewajiban konstitusional Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Penyampaian LPPD Tahun 2021 merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat (1) mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Khusus untuk LKPJ pada pasal 71 ayat (2) dinyatakan bahwa penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada pasal 69 ayat (1) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan dijabarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ruang lingkup Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diatur pada pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Selain sebagai pemenuhan amanat konstitusional, penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) juga sebagai bentuk pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Soppeng kepada masyarakat yang memberikan gambaran kinerja pembangunan sepanjang tahun 2021 yang merupakan implementasi kebijakan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021 yang menjadi penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021–2026.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai implementasi kebijakan publik (*Public Policy*) adalah proses secara terus menerus yang dilakukan pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik (*Public Service*) dengan memastikan ketersediaan barang dan jasa (*goods and service*) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Implementasi dijabarkan dalam tindakan-tindakan

berbentuk program/kegiatan guna tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pencapaian tujuan dapat diukur dari pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, strategi yang diterapkan dengan membuka ruang-ruang publik bagi pemangku kepentingan (*Stakeholders*) termasuk masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif mulai dari tataran perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/pengendalian pembangunan. Strategi ini telah mendorong terciptanya rasa memiliki masyarakat (*Sense of Belonging*) terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah yang kita cintai ini. Oleh karena itu, keberhasilan kinerja dan permasalahan yang masih terdapat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Tahun 2021 merupakan keberhasilan dan tanggung jawab bersama dibawah koordinasi Bupati selaku Kepala Daerah.

Melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih objektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan Tahun Anggaran 2021. Pada tahun mendatang pemerintah daerah dapat meningkatkan capaian kinerja yang belum tercapai pada tahun 2021.

Semoga Laporan ini dapat mendukung terbangunnya hubungan kerjasama yang *sinergis, sipakatau, sipakalebbi, sipakainge', sipatokkong* antara Pemerintah Daerah dan DPRD guna mewujudkan Soppeng Yang Lebih Baik.

Sekian dan terimakasih.

Wallahul Muaffiq Ilaa Aqwamin Tarieq

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Watansoppeng, Maret 2022

BUPATI SOPPENG,



H. A. KASWADI RAZAK, SE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I.....	
1.1 PENJELASAN UMUM.....	1
1.1.1 PENJELASAN UMUM.....	1
1.1.1.1 Dasar Hukum.....	1
1.1.1.2 Data Geografis Wilayah.....	4
1.1.1.3 Jumlah Penduduk.....	9
1.1.1.4 Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.....	14
1.1.1.5 Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah.....	16
1.1.1.6 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	25
1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	33
1.1.2.1 Permasalahan dan Starategis Pemerintahan Daerah.....	33
1.1.2.2 Visi Misi Kepala Daerah.....	56
1.1.2.3 Sasaran Pembangunan Daerah.....	58
1.1.2.4 Program Pembangunan Daerah.....	41
1.1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	91
1.1.3.1 Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan.....	91
1.1.3.2 Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan.....	92
1.1.3.3 Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum.....	93
1.1.3.4 Pelayanan Dasar Urusan Perumahan dan Pemukiman.....	94
1.1.3.5 Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.....	94
1.1.3.6 Pelayanan Dasar Urusan Sosial.....	96
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	1
2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO.....	1
2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN.....	2
2.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib.....	3
2.2.2 Urusan Penunjang Pemerintahan.....	68
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci.....	89
2.2.4 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.....	162

BAB III	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....	1
3.1	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN.....	2
3.2	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENEGAH.....	8
BAB IV	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	1
4.1	URUSAN PENDIDIKAN.....	1
4.1.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	1
4.1.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	4
4.1.3	Realisasi.....	6
4.1.4	Alokasi anggaran.....	20
4.1.5	Dukungan personil.....	21
4.1.6	Permasalahan dan solusi.....	25
4.2	URUSAN KESEHATAN.....	28
4.2.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	28
4.2.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	30
4.2.3	Realisasi.....	35
4.2.4	Alokasi anggaran.....	36
4.2.5	Dukungan personil.....	37
4.2.6	Permasalahan dan solusi.....	40
4.3	URUSAN PEKERJAAN UMUM.....	40
4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	40
4.3.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	40
4.3.3	Realisasi.....	41
4.3.4	Alokasi anggaran.....	42
4.3.5	Dukungan personil.....	42
4.3.6	Permasalahan dan solusi.....	42
4.4	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT.....	43
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	43
4.4.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	43
4.4.3	Realisasi.....	44
4.4.4	Alokasi anggaran.....	46
4.4.5	Dukungan personil.....	46
4.4.6	Permasalahan dan solusi.....	47

4.5	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.....	47
4.5.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	48
4.5.1.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	48
4.5.1.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	49
4.5.1.3	Realisasi.....	51
4.5.1.4	Alokasi anggaran.....	52
4.5.1.5	Dukungan personil.....	52
4.5.1.6	Permasalahan dan solusi.....	54
4.5.2	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.....	54
4.5.2.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	55
4.5.2.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah.....	56
4.5.2.3	Realisasi.....	58
4.5.2.4	Alokasi anggaran.....	59
4.5.2.5	Dukungan personil.....	62
4.5.2.6	Permasalahan dan solusi.....	63
4.6	URUSAN SOSIAL.....	64
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	64
4.6.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	65
4.6.3	Realisasi.....	65
4.6.4	Alokasi anggaran.....	66
4.6.5	Dukungan personil.....	66
4.6.6	Permasalahan dan solusi.....	67
BAB V PENUTUP.....		1

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimana Kepala Daerah secara konstitusional wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian Kepala Daerah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

1.1.1 PENJELASAN UMUM

Adapun muatan dan sistematika dari penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini mengacu pada BAB III Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dengan uraian sebagai berikut :

1.1.1.1 Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik, Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 tahun 2004, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5344);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4609); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 90) ;
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 98 Tahun 2009);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
23. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021–2026
24. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 139); dan
26. Peraturan Bupati Kabupaten Soppeng Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 39 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021.

1.1.1.2 Data geografis wilayah

Gambaran umum Kabupaten Soppeng dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain dari aspek geografis, aspek potensi pembangunan wilayah, aspek kerawanan bencana, aspek demografi wilayah dan aspek kondisi ekonomi. Kelima aspek tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Keadaan Georafis Daerah

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak diantara 40 060 000 - 40 320 000 Lintang Selatan 1190 420 180 - 1200 060 130 Bujur Timur dan berada sekitar 180 km di sebelah utara Kota Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan). Luas wilayah Kabupaten Soppeng tercatat 1.500 Km². Kabupaten Soppeng merupakan daerah daratan dan perbukitan, dengan luas daratan 700 Km² berada pada ketinggian rata-rata kurang lebih 60 M diatas permukaan laut dan perbukitan yang luasnya 800 Km² berada pada ketinggian rata-rata 200 M diatas permukaan laut.

Secara administrative Kabupaten Soppeng terbagi atas 8 Kecamatan, 21 Kelurahan, 49 Desa, 39 Lingkungan, 124 Dusun, 438 Rukun Kampung, dan 1.163 Rukun Tetangga dengan Ibukota Kabupaten Soppeng yaitu Kota Watansoppeng. Adapun batas wilayah Kabupaten Soppeng terdiri dari :

- Sebelah Utara : Kabupaten Sidenreng Rappang dan Wajo,
- Sebelah Timur : Kabupaten Wajo dan Bone,
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bone
- Sebelah Barat : Kabupaten Barru

Di Kabupaten Soppeng terdapat beberapa gunung dan gunung tertinggi adalah Gunung Nene Conang dengan ketinggian 1.463 m dpl. Seluruh gunung tersebut tidak menunjukkan ciri-ciri sebagai jenis gunung berapi. Ketinggian masing-masing gunung tersebut adalah sebagai berikut :

- Gunung Nene Conang + 1.463 mdpl
- Gunung Sewo + 860 m dpl
- Gunung Lapancu + 850 m dpl
- Gunung Bulu Dua + 800 m dpl
- Gunung Paowengeng + 760 m dpl

Puluhan sungai-sungai yang terletak di Kabupaten Soppeng yang cukup banyak berpotensi untuk mengairi tanah-tanah pertanian di sekitarnya. Sungai-sungai tersebut antara lain :

- Sungai Langkemme, berhulu di Gunung Lapacu bermuara di Sungai Walannae.
- Sungai Soppeng, berhulu di Gunung Matanre dan bermuara di Sungai Walannae.

- Sungai Lawo, berhulu di Gunung Lapancu dan bermuara di Danau Tempe.
- Sungai Paddangeng, berhulu di Gunung Malemping dan bermuara di Danau Tempe.
- Sungai Lajaroko, berhulu di Gunung Addeppungeng dan bermuara di Danau tempe.

Ditinjau dari kondisi jenis tanah, jenis-jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Soppeng antara lain Litosol, Gromusol, Mediteran Coklat, Regusol, Alluvial, Litosol Coklat Tua; dengan variasi penyebaran jenis tanah pada setiap kecamatan, sebagai berikut :

- Kecamatan Marioriwawo: Litosol, Gromusol dan Mediteran Coklat.
- Kecamatan Liliraja, Citta, Ganra: Gromusol/ Kelabu Tua, Mediteran Coklat dan Regusol.
- Kecamatan Lilirilau: Aluvial, Coklat Kelabuan, Gromusol/ Kelabu Tua Kekuning-kuningan
- Kecamatan Lalabata: Aluvial Hidromorf, Gromusol, Coklat Tua Rensina, Litosol, Mediteran Coklat, Regusol dan Litosol.
- Kecamatan Marioriawa dan Kec. Donri-Donri: Aluvial Hidromorf Kelabu Tua, Mediteran Regusol dan Litosol.

Temperatur udara di Kabupaten Soppeng berada pada kisaran $\pm 25^{\circ}$ sampai dengan $\pm 35^{\circ}$ dan keadaan angin berada pada kecepatan lemah sampai sedang. Berdasarkan data Badan Meteorologi dan Geofisika curah hujan rata-rata pada tahun 2020 sekitar 170 mm dan 10 hari hujan/bulan. Jumlah hari hujan tertinggi yaitu pada bulan September sebanyak 15 hari hujan, sedangkan terendah pada bulan Desember yaitu 3 hari hujan.

2. Potensi Pembangunan Wilayah

Kabupaten Soppeng memiliki potensi pengembangan wilayah cukup prospektif. Potensi ini dituangkan dalam kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Soppeng (RTRW Kabupaten Soppeng 2012-2032) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032. Arah pengembangan wilayah Kabupaten Soppeng sebagai berikut:

a. Kawasan Peruntukan Pertanian Dan Perkebunan.

Kawasan peruntukan pertanian yang telah dirancang Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032 meliputi :

- 1) Kawasan pertanian tanaman pangan seluas kurang lebih 46.491 ha yang terdapat tersebar di seluruh kecamatan;
 - 2) Kawasan pertanian hortikultura seluas kurang lebih 21.549 ha yang terdapat tersebar di seluruh kecamatan
 - 3) Kawasan perkebunan tersebar di wilayah kecamatan sebagai berikut :
 - Kawasan perkebunan kakao dan kelapa terdapat tersebar di seluruh kecamatan;
 - Kawasan perkebunan kopi, terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Citta, Lilirilau, Donri-Donri;
 - kawasan perkebunan cengkeh, terdapat di di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, dan Citta;
 - kawasan perkebunan lada terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Citta, Lilirilau, Donri-Donri;
 - kawasan perkebunan aren terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Citta, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa;
 - kawasan perkebunan jambu mente terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Citta, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa;
 - kawasan perkebunan kemiri terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa, Citta;
 - kawasan perkebunan tembakau terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa;
 - kawasan perkebunan kelapa sawit terdapat di Kecamatan Marioriawa dan Donri-Donri; dan
 - tanaman murbei tersebar di Kecamatan Marioriawa dan Donri-Donri
- b. Kawasan Peruntukan Perikanan.
- Kawasan peruntukan perikanan yang telah dirancang Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032 meliputi :
- 1) Kawasan peruntukan perikanan tangkap tersebar di Kecamatan Liliriaja, Lilirilau, Donri-Donri, Ganra, Citta dan Marioriawa;
 - 2) Kawasan peruntukan budidaya perikanan tersebar diseluruh wilayah kecamatan;
 - 3) Kawasan pengolahan ikan ditetapkan dan dikembangkan diseluruh wilayah Kecamatan; dan

- 4) Kawasan pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) ditetapkan akan dikembangkan di BBI Ompo Kecamatan Lalabata, BBI Lajoa Kecamatan Liliraja dan BBI Citta Kecamatan Citta.

c. Kawasan Peruntukan Pariwisata.

Kawasan peruntukan perindustrian yang telah dirancang Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032 meliputi :

- 1) Kawasan peruntukan industri sedang terdiri atas industri penggilingan padi tersebar di setiap Kecamatan, industri pemintalan sutra alam di Kecamatan Donri-Donri dan industri tembakau di Kecamatan Lilirilau; dan
- 2) Peruntukan industri rumah tangga terdiri atas industri pembuatan gula merah tersebar di Kecamatan Lalabata, Marioriwawo, Citta, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa, industri pertenunan di Kecamatan Donri-Donri, Lilirilau, Marioriawa, Lalabata.

d. Kawasan Peruntukan Pariwisata.

Kawasan peruntukan pariwisata yang telah dirancang Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032 meliputi :

- 1) Peruntukan pariwisata budaya atau sejarah terdiri atas :
 - Villa Yuliana atau Museum Latemmamala, Kawasan Makam Kuno Jera Lompoe, Kompleks Istana Datu Soppeng, Makam Syekh Abdul Majid (Tuang Uddungeng), Makam Petta Bulu Matanre, Situs Megalitik Lawo, Tinco, Sewo dan Umpungeng, Makam Petta Seppang, Kompleks Makam Datu Soppeng, Makam Tuang Uddungeng, Gereja Khatolik Patung Bunda Maria, Rumah Tradisional Batu Laiya, Kompleks Makam Jera'Caddie, Menhir Latemmamala, di Kecamatan Lalabata.
 - Makam Petta Sering, Situs Tomanurung Sanyili, Makam Petta Abbaraningnge, Makam Petta Balubue, Bulu Bottingnge, Appejenge di Kecamatan Donri-Donri.
 - Makam Datu Mario, Makam Petta Jangko, Kompleks Sao Mario, Situs Tampaning, Makam Kuno Padali, Makam Petta Kajua di Kecamatan Marioriawa.
 - Makam Kuno Datu Lompulle, Kompleks Makam Pakka Saloe, Makam Petta Sara'e, Makam Sullewatang dan Petta Karame, di Kecamatan Ganra.

- Museum Calio, Situs Kecce, Marale, dan Situs Paroto, Kompleks Makam Datu Salaonro, Makam Arung Baringeng, Makam Abbanuange, Situs Megalitik Samoling, Situs Paleolitik Jampu di Kecamatan Lilirilau.
 - Situs Talepu, Lonrong, Lenrang, Kompleks Makam Abbanuangne, Kompleks Makam Datu Pattojo, Benteng Pattojo, Saoraja Seng, Gua Lakaroci di Kecamatan Liliraja.
 - Situs Paleolitik Lakibong, Makam Datu Citta di Kecamatan Citta.
 - Makam Kalokoe Watu, Makan Lato Garimpang, Situs Goarie, Situs Megalitik Madenra, Sumur Tua Tettikenrarae, Makam Arung Sekkang, Rumah Arrajang di Kecamatan Marioriwawo.
- 2) Peruntukan pariwisata alam berupa Taman Wisata Alam (TWA) meliputi :
- TWA Lejja dan TWA Danau Tempe (Kecamatan Marioriwawo).
 - TWA Citta (Kecamatan Citta).
 - TWA Lereng Hijau Bulu Dua (Kecamatan Marioriwawo), Goa Coddong (Kecamatan Citta).
 - Populasi Kelelawar di pusat kota Watansoppeng (Kecamatan Lalabata).
 - Kawasan Pesuteraan Alam (Kecamatan Donri-Donri).
- 3) Peruntukan pariwisata buatan di Kawasan Wisata Ompo, di Kawasan Taman Kota, di Kawasan Taman Kalong.
- 4) Peruntukan wisata agro di Desa Mariorilau dan Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo.
- e. Kawasan Strategis Kabupaten Yang Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi
- Kawasan strategis kabupaten yang sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang telah dirancang Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032 meliputi :
- 1) Kawasan strategis perkotaan dan pusat pemerintahan ditetapkan di Kecamatan Lalabata.
 - 2) Kawasan strategis simpul transportasi dan perdagangan ditetapkan di Kawasan Cabenge Kecamatan Lilirilau.
 - 3) Kawasan strategis pengembangan lahan pertanian dan kawasan agropolitan ditetapkan di Kecamatan Liliraja, Marioriwawo, Ganra;
- f. Kawasan Strategis Kabupaten Yang Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup.

Kawasan strategis kabupaten yang sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang telah dirancang Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032 meliputi :

- 1) Kawasan Danau Tempe di Kecamatan Marioriawa.
- 2) Kawasan wisata alam Lejja di Kecamatan Marioriawa.
- 3) Kawasan hutan lindung yang meliputi Kecamatan Marioriawa, Lalabata, Liliriaja, Lilirilau, Donri-Donri, Citta.

Dari potensi pengembangan wilayah tersebut, pengembangan wilayah yang sudah disesuaikan dengan penataan ruang yang berwawasan lingkungan hidup dengan konsisten dalam pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang yang ada, namun kondisi topografis Kabupaten Soppeng yang bergunung-gunung dan memiliki wilayah dataran rendah serta bentang wilayah yang luas selain memiliki potensi keindahan dan kesuburan juga memiliki potensi rawan bencana berupa banjir, longsor, dan puting beliung.

Kawasan rawan bencana tersebut meliputi Daerah Aliran Sungai Walanae melewati sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau, Liliriaja, Donri-Donri, Marioriawa, Citta dan Ganra yang sering terkena bencana banjir, wilayah Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo, Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata, Desa Citta Kecamatan Citta yang merupakan kawasan pegunungan dan perbukitan yang sering terkena bencana tanah longsor dan wilayah Desa Pajalesang, Desa Tetewatu, Desa Palangiseng, Desa Paroto Kecamatan Lilirilau; desa Donri-donri. Desa Pesse Kecamatan Donri-Donri, Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata; Desa Pattojo Kecamatan Liliriaja; Desa Limpomajang, Kelurahan Kaca, Kelurahan Attang Salo, Kelurahan Batu-batu Kecamatan Marioriawa sering terkena bencana angin puting beliung yang merupakan dataran rendah di wilayah Kabupaten Soppeng.

1.1.1.3 Jumlah Penduduk

Penyebaran penduduk Kab.Soppeng tahun 2021 didominasi di Kec.Marioriwawo sebanyak 20,83% yang merupakan kecamatan dengan jumlah desa dan kelurahan terbanyak. Sebaran terbanyak kedua sebesar 20,36 % berada di Kec.Lalabata yang merupakan ibu kota kabupaten atau pusat pemerintahan. Sedangkan distribusi penduduk yang paling rendah di Kec.Citta sebesar 3,40%. Dengan Luas wilayah sebesar 1.500 Km², kepadatan penduduk Kab.Soppeng pada tahun 2020 sebesar 182,04 jiwa/km². Kec.Liliriaja merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi sebesar 298,57 jiwa/km², sementara kepadatan terendah berada di Kec.Marioriawa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 91,19 jiwa/km².

Rata-rata kepadatan Penduduk Kab. Soppeng Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Rata-Rata Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas	Penduduk		
	Area	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Marioriwawo	300	23.652	25.215	48.867
Liliriaja	96	13.543	14.824	28.367
Lilirilau	187	18.214	20.065	38.279
Lalabata	278	23.929	25.014	48.943
Marioriawa	320	14.235	14.987	29.222
Donri-Donri	222	11.677	12.730	24.407
Ganra	57	5.577	6.146	11.723
Citta	40	3.857	4.210	8.067
TOTAL	1.500	114.684	123.191	237.875

Sumber: Dinas Dukcapil

Potensi tenaga kerja dapat dicermati dari komposisi penduduk menurut umur karena umur seseorang sangat mempengaruhi kemampuan fisiknya sehingga akan menentukan produktivitasnya. Penduduk dengan usia yang sangat mudah (umur 0-14 tahun) umumnya belum produktif karena selain kemampuan fisiknya yang masih kurang, juga karena mereka pada umumnya masih sekolah dan belum bekerja. Begitu pula penduduk yang berusia lanjut (umur 60 tahun ke atas), produktivitasnya sudah menurun dan bahkan sebagian dari mereka sudah tidak bekerja lagi. Bila di hitung jumlah penduduk pada kelompok usia produktif (15-59 tahun) yaitu sebesar 13.936 jiwa maka dapat diketahui bahwa pada umumnya penduduk Kabupaten Soppeng masih dalam usia produktif.

Berikut data perkembangan penduduk berdasarkan kohor semester 2 tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jumlah perkembangan penduduk per kohor umur
Tahun 2021

KELOMPOK UMUR TUNGGAL (KOHOR)	JENIS KELAMIN				PENDUDUK	
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
	n(JIWA)	(%)	n(JIWA)	(%)	n(JIWA)	(%)
00-01	736	0,31	640	0,27	1.376	0,57
01-02	1.372	0,57	1.260	0,53	2.632	1,1

KELOMPOK UMUR TUNGGAL (KOHOR)	JENIS KELAMIN				PENDUDUK	
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
	n(JIWA)	(%)	n(JIWA)	(%)	n(JIWA)	(%)
02-03	1.458	0,61	1.393	0,58	2.851	1,19
03-04	1.533	0,64	1.423	0,59	2.956	1,23
04-05	1.476	0,62	1.429	0,6	2.905	1,21
05-06	1.629	0,68	1.515	0,63	3.144	1,31
06-07	1.638	0,68	1.552	0,65	3.190	1,33
07-08	1.765	0,74	1.622	0,68	3.387	1,41
08-09	1.753	0,73	1.743	0,73	3.496	1,46
09-10	1.843	0,77	1.670	0,7	3.513	1,47
10-11	1.931	0,81	1.720	0,72	3.651	1,53
11-12	1.855	0,77	1.766	0,74	3.621	1,51
12-13	1.914	0,8	1.879	0,78	3.793	1,58
13-14	1.973	0,82	1.780	0,74	3.753	1,57
14-15	1.890	0,79	1.830	0,76	3.720	1,55
15-16	1.908	0,8	1.916	0,8	3.824	1,6
16-17	2.153	0,9	1.934	0,81	4.087	1,71
17-18	2.255	0,94	2.120	0,89	4.375	1,83
18-19	2.216	0,93	2.101	0,88	4.317	1,8
19-20	2.073	0,87	2.078	0,87	4.151	1,73
20-21	2.239	0,94	2.162	0,9	4.401	1,84
21-22	2.092	0,87	2.081	0,87	4.173	1,74
22-23	2.092	0,87	1.996	0,83	4.088	1,71
23-24	2.024	0,85	1.956	0,82	3.980	1,66
24-25	2.005	0,84	1.934	0,81	3.939	1,65
25-26	1.852	0,77	1.746	0,73	3.598	1,5
26-27	1.746	0,73	1.652	0,69	3.398	1,42
27-28	1.651	0,69	1.496	0,62	3.147	1,31
28-29	1.700	0,71	1.696	0,71	3.396	1,42
29-30	1.484	0,62	1.536	0,64	3.020	1,26
30-31	1.449	0,61	1.467	0,61	2.916	1,22
31-32	1.453	0,61	1.420	0,59	2.873	1,2
32-33	1.357	0,57	1.423	0,59	2.780	1,16
33-34	1.412	0,59	1.432	0,6	2.844	1,19
34-35	1.409	0,59	1.406	0,59	2.815	1,18

KELOMPOK UMUR TUNGGAL (KOHOR)	JENIS KELAMIN				PENDUDUK	
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
	n(JIWA)	(%)	n(JIWA)	(%)	n(JIWA)	(%)
35-36	1.579	0,66	1.625	0,68	3.204	1,34
36-37	1.554	0,65	1.558	0,65	3.112	1,3
37-38	1.453	0,61	1.609	0,67	3.062	1,28
38-39	1.663	0,69	1.791	0,75	3.454	1,44
39-40	1.343	0,56	1.427	0,6	2.770	1,16
40-41	1.851	0,77	1.878	0,78	3.729	1,56
41-42	1.643	0,69	1.735	0,72	3.378	1,41
42-43	1.537	0,64	1.684	0,7	3.221	1,35
43-44	1.577	0,66	1.636	0,68	3.213	1,34
44-45	1.406	0,59	1.547	0,65	2.953	1,23
45-46	1.869	0,78	2.025	0,85	3.894	1,63
46-47	1.588	0,66	1.796	0,75	3.384	1,41
47-48	1.676	0,7	1.848	0,77	3.524	1,47
48-49	1.777	0,74	1.936	0,81	3.713	1,55
49-50	1.405	0,59	1.619	0,68	3.024	1,26
50-51	2.186	0,91	2.271	0,95	4.457	1,86
51-52	1.802	0,75	1.945	0,81	3.747	1,57
52-53	1.646	0,69	1.807	0,75	3.453	1,44
53-54	1.486	0,62	1.650	0,69	3.136	1,31
54-55	1.145	0,48	1.324	0,55	2.469	1,03
55-56	1.618	0,68	1.929	0,81	3.547	1,48
56-57	1.129	0,47	1.457	0,61	2.586	1,08
57-58	1.126	0,47	1.447	0,6	2.573	1,07
58-59	1.156	0,48	1.510	0,63	2.666	1,11
59-60	735	0,31	909	0,38	1.644	0,69
60-61	1.668	0,7	2.165	0,9	3.833	1,6
61-62	922	0,39	1.286	0,54	2.208	0,92
62-63	1.028	0,43	1.415	0,59	2.443	1,02
63-64	968	0,4	1.322	0,55	2.290	0,96
64-65	727	0,3	976	0,41	1.703	0,71
65-66	1.067	0,45	1.433	0,6	2.500	1,04
66-67	748	0,31	958	0,4	1.706	0,71
67-68	712	0,3	904	0,38	1.616	0,68

KELOMPOK UMUR TUNGGAL (KOHOR)	JENIS KELAMIN				PENDUDUK	
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
	n(JIWA)	(%)	n(JIWA)	(%)	n(JIWA)	(%)
68-69	769	0,32	1.034	0,43	1.803	0,75
69-70	445	0,19	529	0,22	974	0,41
70-71	1.191	0,5	1.583	0,66	2.774	1,16
71-72	476	0,2	692	0,29	1.168	0,49
72-73	501	0,21	749	0,31	1.250	0,52
73-74	538	0,22	866	0,36	1.404	0,59
74-75	362	0,15	515	0,22	877	0,37
75-76	851	0,36	1.322	0,55	2.173	0,91
76-77	271	0,11	354	0,15	625	0,26
77-78	322	0,13	489	0,2	811	0,34
78-79	423	0,18	636	0,27	1.059	0,44
79-80	185	0,08	300	0,13	485	0,2
80-81	545	0,23	841	0,35	1.386	0,58
81-82	163	0,07	281	0,12	444	0,19
82-83	179	0,07	247	0,1	426	0,18
83-84	192	0,08	263	0,11	455	0,19
84-85	71	0,03	165	0,07	236	0,1
85-86	213	0,09	423	0,18	636	0,27
86-87	79	0,03	154	0,06	233	0,1
87-88	99	0,04	120	0,05	219	0,09
88-89	107	0,04	218	0,09	325	0,14
89-90	39	0,02	93	0,04	132	0,06
90-91	193	0,08	335	0,14	528	0,22
91-92	46	0,02	56	0,02	102	0,04
92-93	32	0,01	51	0,02	83	0,03
93-94	42	0,02	57	0,02	99	0,04
94-95	15	0,01	17	0,01	32	0,01
95-96	30	0,01	64	0,03	94	0,04
96-97	15	0,01	20	0,01	35	0,01
97-98	14	0,01	21	0,01	35	0,01
98-99	15	0,01	24	0,01	39	0,02
99-100	9	0	22	0,01	31	0,01
> 100	32	0,01	64	0,03	96	0,04

KELOMPOK UMUR TUNGGAL (KOHOR)	JENIS KELAMIN				PENDUDUK	
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
	n(JIWA)	(%)	n(JIWA)	(%)	n(JIWA)	(%)
JUMLAH	115.590	48,29	123.801	51,71	239.391	100

Sumber data Dukcapil 2020

1.1.1.4 Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng mempunyai satuan pemerintahan dari kecamatan sampai tingkat desa, merupakan perpanjangan tangan pemerintah kabupaten dalam penyebaran informasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Selain itu juga kecamatan dan desa/kelurahan menjadi sasaran pembangunan daerah dalam pengembangan SDM masyarakat, objek sarana dan prasarana umum dan pelayanan masyarakat.

Wilayah Kabupaten Soppeng membawahi beberapa wilayah kecamatan dan kecamatan membawahi beberapa wilayah desa dan kelurahan yang diakui sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, maka wilayah Kabupaten Soppeng memiliki 8 kecamatan, 49 desa dan 21 Kelurahan yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Jumlah Kecamatan di Kabupaten Soppeng
- Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan, bahwa Pemerintahan Kabupaten Soppeng mempunyai administrasi pemerintahan kecamatan sebagai berikut:

Tabel 1.4
Jumlah Kecamatan di Kabupaten Soppeng

NO	KECAMATAN	KETERANGAN
1	LALABATA	
2	LILIRILAU	
3	LILIRIAJA	
4	MARIORIWAWO	
5	MARIORIAWA	
6	CITTA	
7	DONRI-DONRI	
8	GANRA	

Sumber data Setda Bagian Pemerintahan

- b. Jumlah Desa di Kabupaten Soppeng
- Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan, bahwa k sebagai berikut:

Tabel 1.5
Jumlah Desa di Kabupaten Soppeng

NO	KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	6
1	DESA MACCILE	LALABATA
2	DESA MATTABULU	LALABATA
3	DESA UMPUNGENG	LALABATA
4	DESA TETEWATU	LILIRILAU
5	DESA ABBANUANGGE	LILIRILAU
6	DESA PARENRING	LILIRILAU
7	DESA KEBO	LILIRILAU
8	DESA BARIGENG	LILIRILAU
9	DESA PALAGISENG	LILIRILAU
10	DESA PAROTO	LILIRILAU
11	DESA MASING	LILIRILAU
12	DESA BARANG	LILIRIAJA
13	DESA TIMUSU	LILIRIAJA
14	DESA PATTOJO	LILIRIAJA
15	DESA JAMPU	LILIRIAJA
16	DESA ROMPEGADING	LILIRIAJA
17	DESA MARIORIAJA	MARIORIWAWO
18	DESA GATTARENG	MARIORIWAWO
19	DESA GATTARENG TOA	MARIORIWAWO
20	DESA WATU	MARIORIWAWO
21	DESA WATU TOA	MARIORIWAWO
22	DESA BARAE	MARIORIWAWO
23	DESA CONGKO	MARIORIWAWO
24	DESA GOARIE	MARIORIWAWO
25	DESA MARIORITENGGA	MARIORIWAWO
26	DESA SOGA	MARIORIWAWO
27	DESA MARIORILAU	MARIORIWAWO
28	DESA PATAMPANUA	MARIORIAWA
29	DESA BULUE	MARIORIAWA
30	DESA LARINGGI	MARIORIAWA
31	DESA TELLULIMPOE	MARIORIAWA
32	DESA PANINCONG	MARIORIAWA
33	DESA KAMPIRI	CITTA
34	DESA TINCO	CITTA
35	DESA CITTA	CITTA
36	DESA LABAE	CITTA
37	DESA SERING	DONRI-DONRI
38	DESA KESSING	DONRI-DONRI
39	DESA LABOKONG	DONRI-DONRI
40	DESA LEWORENG	DONRI-DONRI
41	DESA DONRI-DONRI	DONRI-DONRI
42	DESA LALABATA RIAJA	DONRI-DONRI
43	DESA PESSE	DONRI-DONRI
44	DESA PISING	DONRI-DONRI
45	DESA TOTTONG	DONRI-DONRI
46	DESA GANRA	GANRA
47	DESA BELO	GANRA
48	DESA LOMPULLE	GANRA

NO	KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	6
49	DESA ENREKENG	GANRA

Sumber data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

c. Jumlah Kelurahan di Kabupaten Soppeng

Tabel 1. 6
Jumlah Kelurahan di Kabupaten Soppeng

NO	KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	6
1	KEL. BOTTO	LALABATA
2	KEL. LEMBA	LALABATA
3	KEL. BILA	LALABATA
4	KEL. LALABATA RILAU	LALABATA
5	KEL. LAPAJUNG	LALABATA
6	KEL. OMPO	LALABATA
7	KEL.SALOKARAJA	LALABATA
8	KEL. CABBENG	LILIRILAU
9	KEL. PAJALESANG	LILIRILAU
10	KEL. MACANRE	LILIRILAU
11	KEL. UJUNG	LILIRILAU
12	KEL. GALUNG	LILIRIAJA
13	KEL. JENNAE	LILIRIAJA
14	KEL. APPANANG	LILIRIAJA
15	KEL. TETTIKENRARAE	MARIORIWAWO
16	KEL. LABESSI	MARIORIWAWO
17	KEL.LIMPOMAJANG	MARIORIAWA
18	KEL. KACA	MARIORIAWA
19	KEL.MANORANGSALO	MARIORIAWA
20	KEL. ATTANG SALO	MARIORIAWA
21	KEL. BATU-BATU	MARIORIAWA

Sumber data Setda Bagian Pemerintahan

1.1.1.5 Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perbahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 tentang pedoman analisis jabatan yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 73 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Soppeng, maka jumlah

perangkat, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah diuraikan sebagai berikut:

1. Jumlah Perangkat Daerah
- Jumlah Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebanyak 34 Organisasi Perangkat Daerah yang merencanakan, melaksanakan dan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Soppeng. Berikut daftar organisasi perangkat daerah sesuai tabel 1.7 sebagai berikut:

Tabel 1.7
Jumlah Perangkat Daerah
Pemerintahan Daerah Kabupaten Soppeng

NO	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	SEKRETARIAT DAERAH
2	SEKRETARIAT DPRD
3	INSPEKTORAT
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
7	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
10	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
11	DINAS KESEHATAN
12	DINAS SOSIAL
13	DINAS PERHUBUNGAN
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
16	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
17	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
18	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
19	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
20	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
22	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,

NO	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
23	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
24	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
25	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
26	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
27	KECAMATAN LALABATA
28	KECAMATAN LILIRILAU
29	KECAMATAN LILIRIAJA
30	KECAMATAN MARIORIWAWO
31	KECAMATAN MARIORIAWA
32	KECAMATAN DONRI-DONRI
33	KECAMATAN GANRA
34	KECAMATAN CITTA

Sumber data Setda Bagian Organisasi

2. Jumlah Unit Kerja Perangkat Daerah
- Jumlah Unit Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 1.8
Jumlah Unit Perangkat Daerah
Pemerintahan Daerah Kabupaten Soppeng

NO	UNIT PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
1	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WILAYAH KEC. LALABATA	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
2	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WILAYAH KEC. LILIRILAU	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
3	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WILAYAH KEC. LILIRIAJA	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
4	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WILAYAH KEC. MARIORIWAWO	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WILAYAH KEC. MARIORIAWA	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
6	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WILAYAH KEC. DONRI-DONRI	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
7	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI	BADAN PENGELOLAAN

NO	UNIT PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
	DAERAH WILAYAH KEC. GANRA	KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
8	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WILAYAH KEC. CITTA	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
9	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	DINAS KESEHATAN
10	UPTD PUSKESMAS TANJONGE	DINAS KESEHATAN
11	UPTD PUSKESMAS TAKALALA	DINAS KESEHATAN
12	UPTD PUSKESMAS GOARIE	DINAS KESEHATAN
13	UPTD PUSKESMAS CABENGE	DINAS KESEHATAN
14	UPTD PUSKESMAS CAKKURIDI	DINAS KESEHATAN
15	UPTD PUSKESMAS BARINGENG	DINAS KESEHATAN
16	UPTD PUSKESMAS CANGADI	DINAS KESEHATAN
17	UPTD PUSKESMAS PACONGKANG	DINAS KESEHATAN
18	UPTD PUSKESMAS SALOTUNGO	DINAS KESEHATAN
19	UPTD PUSKESMAS MALAKA	DINAS KESEHATAN
20	UPTD PUSKESMAS SEWO	DINAS KESEHATAN
21	UPTD PUSKESMAS TAJUNCU	DINAS KESEHATAN
22	UPTD PUSKESMAS LEWORENG	DINAS KESEHATAN
23	UPTD PUSKESMAS PANINCONG	DINAS KESEHATAN
24	UPTD PUSKESMAS BATU-BATU	DINAS KESEHATAN
25	UPTD PUSKESMAS GANRA	DINAS KESEHATAN
26	UPTD PUSKESMAS CITTA	DINAS KESEHATAN
27	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	DINAS KESEHATAN
28	UPTD PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU 119 (PSC)	DINAS KESEHATAN
29	KEPALA UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SOPPENG SELATAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
30	KEPALA UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SOPPENG TENGAH	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
31	KEPALA UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SOPPENG UTARA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
32	UPTD BALAI PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
33	UPTD BALAI PERBENIHAN DAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR	DINAS PETERNAKAN , KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
34	UPTD TEMPAT PELELANGAN IKAN	DINAS PETERNAKAN , KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
35	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN	DINAS PETERNAKAN , KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN

Sumber data Setda Bagian Organisasi

Unit Perangkat Daerah tersebut bertanggung jawab kepada perangkat daerah yang membawahnya, untuk membantu melaksanakan program kegiatan yang telah direncanakan dalam peningkatan pendapatata asli daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Pegawai Pemerintah
- Berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 73 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Soppeng jumlah pegawai daerah adalah 5.192 pegawai negeri sipil, dengan penyebaran pada organisasi perangkat daerah sesuai dengan pada tabel berikut :

Tabel 1.9
Jumlah Pegawai Pemerintah
Dengan Sebaran Pada Satuan Perangkat Daerah
Pemerintahan Daerah Kabupaten Soppeng

NO	SKPD	JABATAN
1	2	3
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1 ESELON I 2 ESELOM II 1 3 ESELON III 5 4 ESELON IV 9 5 FUNGSIONAL TERTENTU 2088 6 FUNGSIONAL UMUM 377 JUMLAH 2480
2	DINAS KESEHATAN	1 ESELON I 2 ESELOM II 1 3 ESELON III 5 4 ESELON IV 7 5 FUNGSIONAL TERTENTU 373 6 FUNGSIONAL UMUM 190 JUMLAH 576
3	DINAS PEKERJAAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1 ESELON I 2 ESELOM II 1 3 ESELON III 7 4 ESELON IV 9 5 FUNGSIONAL TERTENTU 17 6 FUNGSIONAL UMUM 102 JUMLAH 136
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	1 ESELON I 2 ESELOM II 1 3 ESELON III 3 4 ESELON IV 2 5 FUNGSIONAL TERTENTU 8 6 FUNGSIONAL UMUM 7

NO	SKPD	JABATAN	
1	2	3	
		JUMLAH	21
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1 ESELON I	
		2 ESELOM II	1
		3 ESELON III	4
		4 ESELON IV	3
		5 FUNGSIONAL TERTENTU	5
		6 FUNGSIONAL UMUM	10
		JUMLAH	23
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PMK	1 ESELON I	
		2 ESELOM II	1
		3 ESELON III	4
		4 ESELON IV	11
		5 FUNGSIONAL TERTENTU	4
		6 FUNGSIONAL UMUM	35
		JUMLAH	55
7	DINAS SOSIAL	1 ESELON I	
		2 ESELOM II	1
		3 ESELON III	4
		4 ESELON IV	2
		5 FUNGSIONAL TERTENTU	9
		6 FUNGSIONAL UMUM	15
		JUMLAH	31
8	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI	1 ESELON I	
		2 ESELOM II	1
		3 ESELON III	5
		4 ESELON IV	3
		5 FUNGSIONAL TERTENTU	12
		6 FUNGSIONAL UMUM	14
		JUMLAH	35
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1 ESELON I	
		2 ESELOM II	1
		3 ESELON III	5
		4 ESELON IV	4
		5 FUNGSIONAL TERTENTU	12
		6 FUNGSIONAL UMUM	13
		JUMLAH	35
10	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN	1 ESELON I	
		2 ESELOM II	1
		3 ESELON III	5
		4 ESELON IV	5
		5 FUNGSIONAL TERTENTU	70
		6 FUNGSIONAL UMUM	30
		JUMLAH	111
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1 ESELON I	
		2 ESELOM II	1

NO	SKPD	JABATAN	
1	2	3	
		3	ESELON III 5
		4	ESELON IV 5
		5	FUNGSIONAL TERTENTU 10
		6	FUNGSIONAL UMUM 34
			JUMLAH 55
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	ESELON I
		2	ESELOM II 1
		3	ESELON III 4
		4	ESELON IV 2
		5	FUNGSIONAL TERTENTU 9
		6	FUNGSIONAL UMUM 12
			JUMLAH 28
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	ESELON I
		2	ESELOM II 1
		3	ESELON III 3
		4	ESELON IV 2
		5	FUNGSIONAL TERTENTU 6
		6	FUNGSIONAL UMUM 8
			JUMLAH 20
14	DINAS PERHUBUNGAN	1	ESELON I
		2	ESELOM II 1
		3	ESELON III 2
		4	ESELON IV 7
		5	FUNGSIONAL TERTENTU 3
		6	FUNGSIONAL UMUM 33
			JUMLAH 46
15	DINAS PARIWISATA DAN PEMUDA OLAHRAGA	1	ESELON I
		2	ESELOM II 1
		3	ESELON III 5
		4	ESELON IV 3
		5	FUNGSIONAL TERTENTU 10
		6	FUNGSIONAL UMUM 25
			JUMLAH 44
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	ESELON I
		2	ESELOM II 1
		3	ESELON III 4
		4	ESELON IV 2
		5	FUNGSIONAL TERTENTU 8
		6	FUNGSIONAL UMUM 18
			JUMLAH 33
17	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENEGAH	1	ESELON I
		2	ESELOM II 1
		3	ESELON III 5
		4	ESELON IV 3
		5	FUNGSIONAL TERTENTU 14
		6	FUNGSIONAL UMUM 30

NO	SKPD	JABATAN	
1	2	3	
		JUMLAH	53
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1 ESELON I	
		2 ESELOM II	1
		3 ESELON III	4
		4 ESELON IV	2
		5 FUNGSIONAL TERTENTU	16
		6 FUNGSIONAL UMUM	11
		JUMLAH	34
19	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN	1 ESELON I	
		2 ESELOM II	1
		3 ESELON III	6
		4 ESELON IV	7
		5 FUNGSIONAL TERTENTU	12
		6 FUNGSIONAL UMUM	26
		JUMLAH	52
20	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	1 ESELON I	
		2 ESELOM II	1
		3 ESELON III	6
		4 ESELON IV	29
		5 FUNGSIONAL TERTENTU	5
		6 FUNGSIONAL UMUM	60
		JUMLAH	101
21	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1 ESELON I	
		2 ESELOM II	1
		3 ESELON III	4
		4 ESELON IV	2
		5 FUNGSIONAL TERTENTU	12
		6 FUNGSIONAL UMUM	24
		JUMLAH	43
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1 ESELON I	
		2 ESELOM II	1
		3 ESELON III	4
		4 ESELON IV	2
		5 FUNGSIONAL TERTENTU	9
		6 FUNGSIONAL UMUM	20
		JUMLAH	36
23	INSPEKTORAT DAERAH	1 ESELON I	
		2 ESELOM II	1
		3 ESELON III	5
		4 ESELON IV	2
		5 FUNGSIONAL TERTENTU	39
		6 FUNGSIONAL UMUM	13
		JUMLAH	60
24	BADAN KESATUAN BANGSA DAN	1 ESELON I	

NO	SKPD	JABATAN	
1	2	3	
	POLITIK	2 ESELOM II	1
		3 ESELON III	4
		4 ESELON IV	3
		5 FUNGSIONAL TERTENTU	6
		6 FUNGSIONAL UMUM	15
		JUMLAH	29
25	SEKRETARIAT DAERAH	1 ESELON I	
		2 ESELOM II	7
		3 ESELON III	9
		4 ESELON IV	4
		5 FUNGSIONAL TERTENTU	28
		6 FUNGSIONAL UMUM	61
		JUMLAH	109
26	SEKRETARIAT DPRD	1 ESELON I	
		2 ESELOM II	1
		3 ESELON III	3
		4 ESELON IV	2
		5 FUNGSIONAL TERTENTU	4
		6 FUNGSIONAL UMUM	24
		JUMLAH	34
27	KECAMATAN LALABATA	1 ESELON I	
		2 ESELOM II	
		3 ESELON III	2
		4 ESELON IV	42
		5 FUNGSIONAL TERTENTU	0
		6 FUNGSIONAL UMUM	41
		JUMLAH	85
28	KECAMATAN LILIRILAU	1 ESELON I	
		2 ESELOM II	
		3 ESELON III	2
		4 ESELON IV	27
		5 FUNGSIONAL TERTENTU	0
		6 FUNGSIONAL UMUM	16
		JUMLAH	45
29	KECAMATAN LILIRIAJA	1 ESELON I	
		2 ESELOM II	
		3 ESELON III	2
		4 ESELON IV	22
		5 FUNGSIONAL TERTENTU	0
		6 FUNGSIONAL UMUM	22
		JUMLAH	46
30	KECAMATAN MARIORIWAWO	1 ESELON I	
		2 ESELOM II	
		3 ESELON III	2

NO	SKPD	JABATAN	
1	2	3	
		4	ESELON IV 17
		5	FUNGSIONAL TERTENTU 0
		6	FUNGSIONAL UMUM 22
			JUMLAH 41
31	KECAMATAN MARIORIAWA	1	ESELON I
		2	ESELOM II
		3	ESELON III 1
		4	ESELON IV 32
		5	FUNGSIONAL TERTENTU 0
		6	FUNGSIONAL UMUM 17
			JUMLAH 50
32	KECAMATAN DONRI-DONRI	1	ESELON I
		2	ESELOM II
		3	ESELON III 2
		4	ESELON IV 7
		5	FUNGSIONAL TERTENTU 0
		6	FUNGSIONAL UMUM 14
			JUMLAH 23
33	KECAMATAN GANRA	1	ESELON I
		2	ESELOM II
		3	ESELON III 2
		4	ESELON IV 7
		5	FUNGSIONAL TERTENTU 0
		6	FUNGSIONAL UMUM 12
			JUMLAH 21
33	KECAMATAN CITTA	1	ESELON I
		2	ESELOM II
		3	ESELON III 1
		4	ESELON IV 7
		5	FUNGSIONAL TERTENTU 0
		6	FUNGSIONAL UMUM 8
			JUMLAH 16
33	UPTD RSUD LA TEMMAMALA	1	ESELON I
		2	ESELOM II
		3	ESELON III 1
		4	ESELON IV 7
		5	FUNGSIONAL TERTENTU 12
		6	FUNGSIONAL UMUM 228
			JUMLAH 248

Sumber data Dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun 2021

1.1.1.6 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak

perlu dibayar kembali oleh daerah. Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional secara signifikan yaitu terhadap Pendapatan Asli Daerah, terutama sektor pajak daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi.

Daerah dibentuk dalam rangka mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang lebih cepat dengan tujuan untuk terciptanya kesejahteraan, kedamaian, keamanan dan keadilan secara merata bagi seluruh masyarakat di daerah. Sehubungan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya yaitu fungsi pengaturan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk memaksimalkan kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan tersebut, diperlukan dukungan pembiayaan yang cukup memadai, yang pada gilirannya sumber daya aparatur dapat mengelola secara profesional dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, terlebih lagi pada saat diimplementasikannya sistem Otonomi Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka beban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap masyarakat semakin besar pula. Hal ini membawa konsekuensi logis semakin tinggi akan kebutuhan daerah terhadap ketersediaan dana pembangunan yang besar.

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Kinerja pendapatan Pemerintah Kabupaten Soppeng menunjukkan angka yang fluktuatif. Dimana pendapatan daerah menurun yang diakibatkan adanya pengurangan dana transfer. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap sumber pendapatan dari luar daerah, khususnya transfer keuangan dari pemerintah masih sangat dominan, tetapi menunjukkan kinerja yang membaik.

Menurunnya ketergantungan pada sumber pendapatan daerah dari dana perimbangan menggambarkan kinerja yang baik bagi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Khususnya terkait kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan peningkatan tajam. Kinerja yang sama pada komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah juga meningkat. Fakta ini mengindikasikan selain kinerja pengelola pendapatan daerah yang kian membaik, juga menggambarkan dampak kemajuan ekonomi daerah yang mendorong peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya, terutama terkait dengan pajak dan retribusi daerah, serta sumber pendapatan daerah lainnya dari masyarakat.

Sumber utama PAD Kabupaten Soppeng berasal dari lain-lain PAD (LLPAD) Yang Sah dan selanjutnya dari pajak daerah, kemudian disusul dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sedangkan dari retribusi daerah, selain kontribusinya yang masih minim, juga nampak tidak menunjukkan kinerja peningkatan yang stabil. Untuk komponen LLPD Yang Sah, sumber utamanya berasal dari dana penyesuaian dan otonomi khusus, tapi sumber dari LLPD ini

memiliki tingkat keleluasaan fiskal yang rendah, sehingga tidak dapat dikutak-katik oleh pemerintah daerah. Selanjutnya sumber LLPD Yang Sah yang juga tergolong besar adalah dana bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah daerah lainnya yang juga meningkat tajam dan memberi kontribusi yang signifikan dalam peningkatan PAD Kabupaten Soppeng.

Pendapatan daerah yang bersumber dari transfer fiskal masih dominan berupa dana alokasi umum (DAU). Kemudian disusul dana alokasi khusus (DAK), serta terakhir berupa bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak yang sejatinya juga menunjukkan sumber pendapatan yang berasal dari Kabupaten Soppeng itu sendiri tapi pengelolaannya oleh pemerintah dan untuk itu Kabupaten Soppeng memperoleh bagian dari penerimaan pemerintah tersebut.

1. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 154 ayat (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi: (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; (2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; (3) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; (4) Keadaan darurat; dan (5) Keadaan luar biasa. Dalam perjalanannya Perubahan APBD Tahun 2021 dilakukan karena:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA 2021

Asumsi dasar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, pada perkembangannya mengalami perubahan, meliputi:

- 1) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
- 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

b. Asumsi Pendapatan Daerah

Perubahan asumsi pendapatan daerah yang mengalami kenaikan disebabkan adanya perubahan pendapatan. Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada APBD TA 2021, Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp. 1.204.604.425.314,00 dan setelah perubahan menjadi Rp. 1.186.545.478.840,00.

2. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng

Sumber-sumber pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah :

Pendapatan asli daerah terdiri dari :

- 1) Hasil Pajak Daerah :

- a) Pajak Hotel;
 - b) Pajak Restoran;
 - c) Pajak Hiburan;
 - d) Pajak Reklame;
 - e) Pajak Penerangan jalan;
 - f) Pajak Parkir;
 - g) Pajak Air Tanah;
 - h) Pajak Sarang Burung Walet;
 - i) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
 - k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- 2) Hasil Retribusi Daerah :
- a) Retribusi Jasa Umum;
 - b) Retribusi Jasa Usaha;
 - c) Retribusi Perizinan Tertentu.
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Di Pisahkan:
- a) Bagian Laba yang di Bagikan Kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD;
- 4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- a) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b) Jasa Giro;
 - c) Pendapatan Bunga;
 - d) Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - e) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - f) Pendapatan Denda Pajak;
 - g) Pendapatan Denda Retribusi;
 - h) Pendapatan dari Pengembalian;
 - i) Pendapatan Badan Layanan Umum (BLUD);
 - j) Pendapatan Dana Kapitasi JKN.

b. Pendapatan Transfer :

Pendapatan Transfer sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
- 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah :

- 1) Pendapatan Hibah
 - a) Pendapatan Hibah dari Pemerintah;
 - b) Pendapatan Hibah Dana BOS.

2) Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

3. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Pada APBD pokok tahun 2021, target penerimaan pendapatan sebesar Rp.1.204.604.425.314.,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 127.827.066.724,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp.1.047.208.180.871,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp.29.569.177.719.00,- secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.
Kondisi Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Sebelum dan Setelah Perubahan

NO	JENIS PENDAPATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	127,827,066,724.00	133.499.021.086,00	5.671.945.362,00
1	Pajak Daerah	19,740,000,000.00	20.020.300.000,00	280.300.000,00
2	Retribusi Daerah	5,726,236,410.00	9.923.680.060,00	4.197.443.650,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18,396,001,683.00	19.163.344.683,00	767.343.000,00
4	Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	83,964,828,631.00	84.391.687.343,00	426.858.712,00
II	PENDAPATAN TRANSFER	1,047,208,180,871.00	1.015.698.976.346,00	(31.509.204.525,00)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,007,504,474,000.00	975.780.357.857,00	(31.724.116.143,00)
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	39,703,706,871.00	39.918.618.489,00	214.911.618
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	29,569,177,719.00	37.347.490.408,00	7.778.312.689,00
1	Pendapatan Hibah	4,938,377,719.00	4.938.377.719,00	0
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	24,630,800,000.00	32.409.112.689,00	7.778.312.689,00
JUMLAH PENDAPATAN		1,204,604,425,314.00	1.186.545.478.840,00	(18.058.946.474,00)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021

Memperhatikan perkembangan pendapatan sampai saat ini baik berupa adanya potensi penerimaan pajak dan adanya perubahan target penerimaan pada pendapatan asli daerah, maka pada perubahan APBD Tahun 2021 di targetkan sebesar Pendapatan Asli Daerah Rp. 133,499,021,086.00, Pendapatan Transfer Rp. 1,015,698,976,346.00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 37,347,490,408.00. Dengan demikian pendapatan berkurang sebanyak Rp. 18,058,946,474.00 menjadi sebesar Rp. 1,186,545,478,840.00 perubahan pendapatan daerah terdiri atas :

1. Perubahan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2021 sebesar Rp. 127,827,066,724.00. Bersumber dari Pajak daerah sebesar Rp. 19,740,000,000.00, Retribusi Daerah Rp. 5,726,236,410.00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 18,396,001,683.00 dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 83,964,828,631.00. Setelah Perubahan, Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 5,671,945,362.00 sehingga menjadi Rp. 133,499,021,086.00. Kenaikan pendapatan ini disebabkan adanya penambahan pada Pajak Daerah sebesar Rp. 280,300,000.00 menjadi Rp. 20,020,300,000.00, Retribusi Daerah juga mengalami penambahan sebesar Rp. 4,197,443,650.00 sehingga menjadi Rp. 9,923,680,060.00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 767,343,000.00 menjadi Rp. 19,163,344,683.00 dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah bertambah sebesar Rp. 426,858,712.00 sehingga menjadi Rp. 84,391,687,343.00.

2. Perubahan Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada APBD 2021 sebelum perubahan sebesar Rp. 1,047,208,180,871.00 namun setelah perubahan mengalami penurunan sebesar Rp. 31,509,204,525.00 sehingga menjadi Rp. 1,015,698,976,346.00. Penurunan ini disebabkan karena Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Pusat berkurang sebesar Rp. 31,724,116,143.00 menjadi Rp. 975,780,357,857.00.

3. Perubahan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Sebelum Perubahan, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dialokasikan sebesar Rp. 29,569,177,719.00 dan setelah perubahan mengalami penambahan sebesar Rp. 7,778,312,689.00. Kenaikan ini disebabkan adanya penambahan pada Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 7,778,312,689 menjadi Rp. 32,409,112,689.00.

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih daerah yang dapat dibagi menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Sebagai pengemban amanat rakyat, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk mengelola belanja daerah sedemikian rupa sehingga mampu mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam batas otonomi daerah yang dimiliki serta berdampak luas pada berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat baik pada sektor produksi maupun sektor konsumsi sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu, pengelolaan belanja daerah harus berpedoman kepada kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah

yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya.

1. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Alokasi belanja daerah meliputi alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Alokasi belanja langsung menggambarkan alokasi belanja daerah yang ditujukan untuk pelayanan publik atau penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang secara langsung manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Sedangkan alokasi belanja tidak langsung, nilai manfaatnya tidak secara langsung diterima oleh masyarakat, tetapi dapat diterima bisa saja dalam jangka menengah atau jangka panjang.

Pada APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021, alokasi belanja daerah telah ditetapkan sebesar Rp. 1,202,604,425,314.00 setelah perubahan menjadi Rp. 1,307,375,584,577.00. Perubahan kebijakan belanja daerah terjadi untuk menyikapi beberapa kebijakan pemerintah untuk percepatan penanggulangan COVID-19 dengan adanya refocusing anggaran sehingga menyebabkan perubahan pada beberapa komponen belanja.

Fakta ini mengindikasikan perhatian dan keberpihakan pemerintah daerah terhadap kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat terus menunjukkan peningkatan. Peningkatan secara tajam pada proporsi alokasi belanja langsung, menunjukkan besarnya perhatian pemerintah daerah terhadap pemenuhan pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan pembangunan daerah untuk menjamin terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Alokasi belanja langsung menjadi fokus pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat memperoleh manfaat secara langsung dari setiap keuangan daerah yang dibelanjakan pemerintah daerah.

Hal ini semakin dipertegas dengan proporsi alokasi belanja langsung tersebut yang lebih dominan ditujukan untuk alokasi belanja barang dan belanja modal. Bukan hanya meningkat tajam, tetapi juga menunjukkan proporsi yang semakin dominan dibandingkan alokasi belanja pegawai. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalam kebijakan alokasi belanja perubahan APBD Tahun 2021 direncanakan tertuang pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Kebijakan Alokasi Belanja Perubahan APBD Tahun 2021

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN 2021	SETELAH PERUBAHAN 2021	SELISIH
1	2	3	4	5
I	BELANJA DAERAH	1,202,604,425,314.00	1.307.375.584.577,00	(104.771.159.263,00)
1.	BELANJA OPERASI	867,045,286,817.00	892.903.337.683,00	25.858.050.866,00
1.1	Belanja Pegawai	589,877,029,747.00	586.950.942.832,00	(2.926.086.915,00)
1.2	Belanja Barang dan Jasa	269,452,037,518.00	296.132.577.122,00	26.680.539.604,00
1.3	Belanja Hibah	6,016,000,612.00	6.121.500.612,00	105.500.000,00
1.4	Belanja Bantuan Sosial	1,700,218,940.00	1.765.229.340,00	65.010.400,00
2.	BELANJA MODAL	216,437,043,588.00	296.886.314.251,00	80.449.270.663,00
2.1	Belanja Modal Tanah	300,000,000.00	170.000.000,00	(130,000,000.00
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55,625,332,619.00	69.466.279.992,00	13.840.947.373,00
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	111,339,378,355.00	126.153.868.033,00	14.814.489.678,00
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	49,092,932,614.00	100.295.059.826,00	51.202.127.212,00
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	79,400,000.00	801.106.400,00	721.706.400,00
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	2,113,580,939.00	2.113.580.939,00	0
3.1	Belanja Tidak Terduga	2,113,580,939.00	2.113.580.939,00	0
4.	BELANJA TRANSFER	117,008,513,970.00	115.472.351.704,00	(1.536.162.266)
4.1	Belanja Bagi Hasil	2,582,540,470.00	2.574.554.592,00	(7.985.878,00)
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	114,425,973,500.00	112.897.797.112,00	(1.528.176.388,00)
JUMLAH BELANJA		1,202,604,425,314.00	1.307.375.584.577,00	104.771.159.263,00

Dengan demikian terdapat selisih defisit antara anggaran pendapatan dan belanja sebesar Rp.122.830.105.737,00.

Pada komponen penerimaan pembiayaan dalam anggaran pokok tahun 2021 SiLPA Tahun anggaran sebelumnya Rp. 0 namun setelah perubahan dilakukan penambahan sebesar Rp. 63,500,406,587.00. Penerimaan Pembiayaan dari pokok Rp. 0 mengalami penambahan pada perubahan sebesar Rp. 122,830,105,737.00, sementara komponen Pengeluaran Pembiayaan pada anggaran pokok tahun 2021 yang dialokasikan untuk Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 tidak mengalami perubahan sehingga pada APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021, pembiayaan Netto sebesar Rp. 2,000,000,000.00 setelah perubahan menjadi Rp. 120,830,105,737.00

1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses tahapan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Visi Misi Kepala Daerah. Dalam melaksanakan pemerintahan daerah, Bupati dan Wakil Bupati sebagai unsur eksekutif yang dibantu dengan satuan perangkat daerah menyusun rencana pembangunan daerah dengan mengusun isu-isu permasalahan strategis pemerintah daerah yang mencuat di masyarakat dan dibahas bersama dengan DPRD sebagai unsur legislatif. Hasil pembahasan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) selama 5 tahun dan dapat direvisi dalam jangka waktu 4 tahun.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dalam menyusun rencana pembangunan daerah diuraikan sebagai berikut :

1.1.2.1 Permasalahan dan Starategis Pemerintahan Daerah

Pada pembahasan isu strategis daerah ini merupakan analisa dari permasalahan pembangunan yang telah diuraikan pada sub bahasan permasalahan pembangunan. Secara umum permasalahan pembangunan di kabupaten soppeng dapat dilihat sebagai berikut:

1. **Kualitas hidup manusia relatif tertinggal.**

Kualitas hidup manusia merupakan muara dari semua upaya pembangunan. Ini diindikasikan oleh indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Soppeng yang relatif tertinggal jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Pada tahun 2020 IPM sebesar 68,67 dan masih pada kategori sedang, sementara nilai IPM Sulawesi Selatan sudah mencapai 71,93 dan nasional sebesar 71,94 atau kategori tinggi.

Ini disebabkan oleh beberapa masalah. Pertama, masalah tertinggalnya penguasaan pengetahuan masyarakat yang ditandai dengan angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2020 sebesar 7,81 tahun, tertinggal dari rata-rata provinsi yang sebesar 8,38 tahun dan rata-rata nasional yang sebesar 8,48 tahun. Masalah lainnya adalah angka harapan lama sekolah yang pada tahun 2020 sebesar 12,90 tahun, tertinggal jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 13,45 tahun dan rata-rata nasional yang sebesar 12,98 tahun. Akar masalahnya adalah angka partisipasi sekolah yang rendah dimana pada tahun 2020 angka partisipasi sekolah tingkat SD/MI sebesar 96,63% dan angka

partisipasi sekolah untuk tingkat SMP/MTs sebesar 79,02%, belum terpenuhinya wajib belajar 12 tahun, serta rendahnya minat baca dalam menunjang literasi.

Pada aspek lama hidup, angka harapan lama hidup pada tahun 2020 sebesar 69,65 tahun, lebih rendah dibanding Sulawesi Selatan yang sebesar 70,57 tahun. Akar masalahnya adalah masih adanya kematian ibu melahirkan yang pada tahun 2020 sebesar 3 kematian, kekurangan gizi dimana pada tahun 2020 penduduk yang tingkat konsumsinya lebih rendah dari 2.100 Kkal/perkapita/hari sebesar 325 jiwa., *Universal Child Immunization* (UCI) yang pada tahun 2020 hanya mencapai 82,86%, penerapan pola hidup bersih dan sehat yang belum optimal, serta penanganan bayi pada seribu hari pertama kehidupan yang belum tertata dengan baik dimana pada tahun 2020 angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup sebanyak 7,48.

Masalah daya beli masyarakat. Dari indikator pengeluaran *perkapita*/tahun, capaian Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 sebesar Rp. 9.444.000, lebih rendah dari rata-rata Provinsi yang sebesar Rp.11.079.000. Ini menunjukkan pengeluaran rumah tangga yang tidak memungkinkan terwujudnya kualitas hidup yang baik, misalnya keterpenuhan nutrisi standar, terutama pada masyarakat lapisan bawah. Akar masalahnya adalah sumber pendapatan masyarakat yang tidak memberi pendapatan yang cukup seperti pertanian dengan lahan yang sempit, usaha mikro dan kecil dengan pendapatan harian yang rendah, serta upah buruh yang rendah. Akar masalah lainnya adalah kenaikan harga barang (inflasi) pada waktu tertentu, terutama bahan pangan, yang merupakan kebutuhan pokok.

2. Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) secara menyeluruh.

Masalah untuk SPM pendidikan adalah angka partisipasi pendidikan dasar yang baru mencapai 90,67%, partisipasi pendidikan kesetaraan yang baru sebesar 66,66%, dan SPM pendidikan anak usia dini (PAUD) yang baru mencapai 59,91%. Akar masalah belum tercapainya target SPM pendidikan dasar adalah masih adanya anak usia SD yang tidak bersekolah karena faktor ekonomi dan perhatian orang tua atas pendidikan yang rendah, adanya yang tidak melanjutkan dari SD ke SMP dan adanya yang putus sekolah pada level SD ataupun SMP, sebagian besar hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi. Akar masalah belum tercapainya SPM pendidikan kesetaraan, dalam arti masih banyaknya warga negara usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan, adalah rendahnya minat masyarakat yang belum tammat SD/SMP/SMA untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan, jumlah pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dengan mutu yang baik masih terbatas, dan dari segi pendataan terdapat sebagian sasaran yang

terdata sebagai penduduk Kabupaten Soppeng namun bertempal tinggal di luar Kabupaten Soppeng. Akar masalah belum tercapainya target SPM PAUD adalah keberadaan sebagian PAUD swasta dipelosok-pelosok yang kurang menarik minat masyarakat untuk memasukkan anaknya pada lembaga tersebut, hal ini antara lain disebabkan Lembaga PAUD swasta pada umumnya memiliki sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sementara itu PAUD yang berstatus negeri baru sebesar 15 unit sekolah. Data yang ada menunjukkan jumlah TK di Kabupaten Soppeng sebanyak 79 unit dan RA sebanyak 53 unit. Jika jumlah TK dan RA dibandingkan dengan Jumlah penduduk usia 5-6 tahun maka rasio ketersediaan sekolah TK dan RA sebesar 0,041 atau 1 : 24. Jika dilihat dari rasio ketersediaan sekolah TK dan RA, maka jumlah lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Soppeng sudah sangat berlebih untuk menampung keseluruhan pendudukan usia 5-6 tahun. Namun kenyataannya belum semua penduduk usia 5-6 tahun sudah terlayani oleh lembaga PAUD.

Masalah untuk SPM kesehatan adalah belum terpenuhinya target pelayanan kesehatan untuk warga usia produktif (20,11%). Untuk Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pelayanan Kesehatan Balita, Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, Pelayanan Kesehatan dengan Gangguan Jiwa Berat, Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV, telah terpenuhi 100%. Tidak terpenuhinya target 100% untuk pelayanan warga usia produktif diakibatkan karena belum maksimalnya pelaksanaan skrining kesehatan pada warga usia tersebut. Akar masalah yang menjadi tantangan lima tahun kedepan adalah soal akurasi data calon penerima layanan agar kalkulasi penyiapan unsur pendukung layanan bisa diupayakan dengan optimal.

Masalah untuk SPM pekerjaan umum adalah belum terpenuhinya target 100% untuk penyediaan air minum sehari-hari (96,16%) dan pelayanan pengelolaan limbah domestik 58,78%. Akar masalah belum terpenuhinya SPM air minum sehari-hari adalah menurunnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas air baku air minum, terbatasnya penyediaan air minum oleh PDAM dan Non PDAM yang sehat, dan belum optimalnya sistem perencanaan penyediaan air minum. Akar masalah belum terpenuhinya SPM penyediaan layanan pengolahan air limbah domestik adalah rendahnya kesadaran dan kemampuan masyarakat atas penyediaan sarana penanganan limbah domestik yang memenuhi kriteria layak dan belum tercukupinya fasilitasi pemerintah atas layanan yang memenuhi standar

kelayakan dimaksud yakni penggunaan kloset leher angsa yang dilengkapi dengan tangki septik baik di pedesaan maupun di perkotaan serta adanya layanan penyedotan lumpur tinja secara terjadwal terutama di perkotaan.

Meskipun SPM untuk perumahan rakyat, telah tercapai 100%, dimana jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni 100% dan jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni 100%. Ini disebabkan karena tidak adanya program pemerintah yang mengakibatkan relokasi untuk perumahan rakyat dan belum tersedianya data yang lengkap dan akurat mengenai jumlah warga negara yang berhak menerima layanan tersebut, belum adanya penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar perumahan rakyat.

Masalah terkait SPM untuk urusan sosial adalah belum terpenuhinya target 100% untuk layanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas di luar panti 5,53%, layanan layanan untuk rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti 0,43%, serta layanan rehabilitasi sosial dasar untuk tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti belum ada terealisasi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta kelengkapan data terkait warga yang berhak menerima layanan tersebut. Layanan sosial yang telah mencapai target 100% adalah rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana.

3. Struktur dan produktivitas perekonomian daerah belum menjamin kesejahteraan yang tinggi dan merata.

Ini ditandai dengan PDRB/kapita (Rp. 50.100 juta) yang masih dibawah rata-rata provinsi (Rp. 57.03 juta). Sementara itu rasio-gini cenderung naik dari 0,392 (2019) menjadi 0,403 (2020), sehingga ketimpangan antar lapisan masyarakat juga bertambah. Struktur perekonomian masih didominasi oleh sektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura) dengan kontribusi sekitar 30%. Masalah terkait hal ini adalah rendahnya pendapatan petani disebabkan oleh sempitnya lahan yang dikelola sehingga kurang memenuhi skala ekonomi sehingga sebagian rentan miskin atau miskin. Akar masalah lainnya adalah sektor industri dan perdagangan yang didominasi usaha mikro dan kecil dengan serapan tenaga kerja terbatas dan tingkat upah yang juga rendah. Ini diwarnai oleh persentase penduduk miskin yang mencapai 7,59%, meskipun angka ini lebih rendah dari rata-rata provinsi (8,72%). Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Soppeng pada tahun

2020 adalah 4,42%, masih lebih rendah dari rata-rata Sulawesi Selatan, tetapi lebih tinggi dari dua daerah tetangga yakni Kabupaten Wajo dan Bone

4. Daya saing daerah yang masih tertinggal

Infrastruktur transportasi dan perhubungan telah mengalami perkembangan pesat dalam membuka interkoneksi antar pusat pertumbuhan dalam daerah serta memperlancar mobilitas pelayanan umum. Namun demikian, daya saing daerah untuk mendorong berlangsungnya kunjungan wisata dan menarik investasi belum sepenuhnya berkembang. Akar masalahnya adalah daya tarik destinasi wisata alam maupun situs budaya belum maksimal tertata dan terpromosikan (misalnya wisata alam Lejja, Danau Tempe, Citta, Lereng Hijau, kawasan persuteraan alam; kawasan wisata buatan Ompo dan wisata agro Marioriwawo; kawasan wisata Villa Yuliana dan Taman Kalong di ibu kota). Selain itu, fasilitas ekonomi wilayah perkotaan dalam mendukung urbanisasi seperti jasa perhotelan dan rumah makan/restoran belum berkembang lama. Di Kabupaten Soppeng juga belum berdiri perguruan tinggi yang bisa mendorong berkembangnya sektor jasa di sekitar kampus selain membangkitkan literasi masyarakat, menaikkan indeks pendidikan, serta menarik mahasiswa dari daerah lain. Selain itu meskipun secara umum, nilai realisasi PMDN di Kabupaten Soppeng kurun waktu 2016-2020 mengalami kenaikan yang sangat signifikan tetapi realisasi PMDN belum mencapai target yang ditetapkan.

Meskipun infrastruktur transportasi sudah cukup berkembang tetapi tentunya hal ini memerlukan pemeliharaan sehingga tetap layak fungsi. Selain itu untuk meningkatkan daya saing daerah tentunya juga dibutuhkan kondisi daerah yang aman dan tentram sehingga dapat memacu perkembangan fasilitas ekonomi wilayah dan meningkatkan investasi di daerah.

5. Tatakelola pemerintahan yang baik belum terwujud sepenuhnya.

Reformasi birokrasi telah dijalankan pada delapan area, namun demikian perwujudan good governance dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta partisipasi belum optimal. Ditandai dengan skor reformasi birokrasi yang masih rendah (C), nilai sistem akuntabilitas kinerja (SAKIP) masih CC, indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik yang belum tinggi, meskipun pengelolaan keuangan sudah berlangsung dengan wajar (WTP). Akar masalahnya adalah perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah yang belum sepenuhnya mencerminkan akuntabilitas kinerja, pembinaan administrasi dan keuangan beserta pengawasannya yang belum didukung oleh tenaga APIP berkompetensi dalam jumlah cukup, terbatasnya pendidikan dan pelatihan SDM aparatur untuk mengoptimalkan kinerja tertentu, belum optimalnya

penerapan egovernment dalam mendukung integrasi perencanaan dan penganggaran yang transparan sehingga dapat lebih diakses publik.

6. Terjadinya degradasi lingkungan dan sumberdaya alam yang mengancam keberlanjutan pembangunan

Perekonomian masyarakat Kabupaten Soppeng dominan berbasis pada sumberdaya alam. Kegiatan pertanian yang dilakukan dengan intensif dan monokultur telah menyebabkan degradasi sumberdaya lahan dalam bentuk menurunnya kemampuan tanah menghasilkan unsur hara sehingga kebutuhan pupuk meningkat dari waktu ke waktu. Akar masalahnya adalah teknik pertanian yang diterapkan berbasis penggunaan pupuk sintetis sehingga kesuburan tanah tidak bisa dipulihkan dengan mekanisme alamiah. Degradasi lingkungan lainnya ditandai oleh terjadinya kondisi rawan longsor pada beberapa lokasi, misalnya di Desa Gattareng (Marioriwawo), Desa Mattabulu (Lalabata) dan Desa Citta (Citta). Indikasi lain dari degradasi lingkungan adalah bertambahnya lokasi rawan banjir, terutama sekitar daerah aliran sungai Walanae meliputi Lilirilau, Liliriaja, Donri-Donri, Marioriawa, Citta dan Ganra.

Dari permasalahan pembangunan tersebut disebabkan karena permasalahan pada setiap urusan wajib dasar, urusan wajib bukan dasar dan fungsi penunjang urusan pemerintahan, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Urusan Wajib Dasar

1) Bidang Pendidikan

Pada tahun 2020, Pendidikan Anak Usia Dini yang masih rendah belum mencapai 100%. Jika dilihat dari rasio ketersediaan sekolah TK dan RA, maka jumlah Lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Soppeng sudah sangat berlebihan untuk menampung keseluruhan penduduk usia 4-6 tahun. Namun kenyataannya belum semua penduduk usia 4-6 tahun sudah terlayani oleh Lembaga PAUD. Keberadaan sebahagian PAUD swasta dipelosok-pelosok kurang menarik minat masyarakat untuk memasukkan anaknya pada Lembaga tersebut, hal ini antara lain disebabkan Lembaga PAUD Swasta pada umumnya memiliki sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Di jenjang pendidikan SD/MI/Paket A maupun pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B, belum tercapainya target APM 100 persen, disebabkan oleh masih adanya peserta didik yang putus sekolah dan anak tidak sekolah (ATS), masih adanya penduduk usia 7-12 tahun yang tinggal di daerah perbatasan kabupaten terdata sebagai penduduk Kabupaten Soppeng namun bersekolah di luar Kabupaten Soppeng dan masih terdapat angka putus sekolah yang disebabkan karena Faktor ekonomi keluarga, Faktor jarak tempuh ke sekolah,

masih adanya orang tua/wali yang belum mendukung program wajib belajar 9 tahun.

Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik (Kelas) sebesar 85,73%, Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan Kondisi Bangunan Baik (Kelas) sebesar 81,86%. Hal ini disebabkan karena masih ada bangunan sekolah yang sudah tua dan belum dilakukan rehabilitasi.

Kwalitas Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2020 belum mencapai 100%, hal ini berdampak pada kemampuan memberikan materi, dimana Kemampuan materi seorang guru akan bertambah seiring dengan latar belakang pendidikan yang diterima, dengan pendidikan yang lebih tinggi maka pemahaman akan materi pendidikan akan menjadi lebih baik.

2) Bidang Kesehatan

Masih adanya angka kematian bayi di Soppeng. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan ibu bersalin belum optimal. Ditambah dengan adanya balita dengan gizi buruk di Kabupaten Soppeng. Pada tahun 2020 mencapai 0,015% yaitu termasuk kategori rendah menurut WHO (di bawah 10%) tetapi meningkat dibanding tahun 2019 yang sebesar 0,008.

Prevalensi balita gizi kurang pada tahun 2020 tercatat sebesar 3,28%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar 3,31%. Pada tahun 2016 dan tahun 2017 untuk menentukan status gizi secara manual dengan menggunakan buku standar antropometri. Pada tahun 2018 hingga tahun 2020 menggunakan aplikasi e-PPGBM dengan standar Kemenkes, sehingga jumlah balita gizi kurang mengalami peningkatan. Prevalensi balita gizi kurang perlu terus ditekan melalui upaya peningkatan kualitas balita secara lebih baik yang disertai dengan kualitas lingkungan keluarga secara lebih baik pula 2019 yang sebesar 0,008. Namun Selama 3 tahun terakhir imunisasi dan penanganan pneumonia yang menurundisebabkan tidak adanya kasus pneumonia dimasyarakat.

3) Bidang Pekerjaan Umum

Masih perlunya peningkatan Infrastruktur jalan Kondisi Baik. Dimana pada tahun 2020 proporsi Panjang jalan dalam kondisi baik masih sebesar 0,58 dan Jalan yang memiliki trotoar dan drainase atau saluran pembuangan air masih sebesar 47,12%.

Rumah tinggal yang berakses sanitasi layak masih sebesar 67,83%. Masih rendahnya drainase dalam kondisi baik yang baru sebesar 54,27%. Pada Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan masih rendah yaitu sebesar 28,08%.Persentase

penduduk berakses air minum pada tahun 2020 sebesar 94,55% sehingga masih ada penduduk yang tidak terakses air minum.

Perlunya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Soppeng perlu ditinjau kembali karena RTRW yang ada tidak memuat program yang lebih detail dan tidak ada spesifikasi program dan lokasi yang direncanakan selain itu substansi RTRW telah mengalami perubahan sehingga perda RTRW yang sekarang tidak dapat mengakomodir pertumbuhan yang ada di Soppeng. Sehingga pembangunan yang dilaksanakan tidak bisa dikaji atau diperhitungkan kesesuaiannya dengan Perda RTRW.

Belum optimalnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten Soppeng yang diakibatkan karena kapasitas TPA yang terbatas dan teknologi pengolahan sampah sangat terbatas.

Belum optimalnya Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten Soppeng dimana jalan yang memiliki drainase pada tahun 2020 masih sebesar 47% dan % Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat masih sebesar 54,27% dan Irigasi dalam kondisi baik masih rendah yaitu sebesar 62,06.

4) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Pada tahun 2020 Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Belum optimal mendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah di Kabupaten Soppeng, dan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, juga belum optimal

Masih kurangnya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dan Belum optimalnya peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum

5) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Serta Ketertiban Masyarakat

Belum optimalnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah juga belum optimal serta belum optimalnya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Masih perlunya peningkatan cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana. Belum optimalnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yang diakibatkan diantaranya masih terbatasnya Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana. Belum optimanya

pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran. Dimana Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran masih sebesar 94,20%. Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 90,70%.

6) Bidang Sosial

Pada tahun 2020 Bidang Sosial, belum optimalnya pemberdayaan sosial yang diakibatkan karena Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial belum maksimal. Di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial juga belum optimalnya

Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar masih sebesar 19,18%. Masih rendahnya panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi jenis lainnya yang sebesar 40%.

2. Urusan Wajib Bukan Dasar

1) Bidang Ketenaga Kerjaan

Belum optimalnya kesempatan kerja untuk menyerap angkatan kerja yang ada di Kabupaten Soppeng. Dimana Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 baru mencapai 57,05% dan jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan masih rendah, dimana pada tahun 2020 sebesar 4,41%.

Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 sehingga keselamatan dan perlindungan yang masih rendah sebesar 7,24%.

2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Belum optimalnya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dimana rasio KDRT di Soppeng pada tahun 2020 sebesar 0,0035. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran juga belum menyeluruh pada OPD.

Masih rendahnya cakupan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang sebesar 16,67%.

3) Bidang Pertanian

Belum tercapainya angka ideal untuk skor pola pangan harapan dimana angka idelanya sebesar 100%, sementara itu Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Soppeng Tahun 2020 baru mencapai 93,3%.

4) Bidang Pangan

Belum optimalnya penatagunaan tanah dimana yang diakibatkan oleh belum adanya Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota

5) Bidang Lingkungan Hidup

Belum maksimalnya perencanaan lingkungan hidup di Soppeng yang diakibatkan karena belum adanya Perda RPPLH dan Perbub RPPLH, Belum optimalnya pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan karena Belum terakreditasinya Laboratorium lingkungan serta masih kurang lengkapnya peralatan laboratorium lingkungan, Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Belum maksimalnya timbulan sampah yang tertangani dimana timbulan sampah yang ditangani pada tahun 2020 sebesar 65,85%, Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R sebesar 35,01%, dan Cakupan area pelayanan persampahan di Kabupaten Soppeng sebesar 26%.

6) Bidang Administrasi Kependudukan

Belum optimalnya pendaftaran penduduk dimana Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk masih sebesar 0,99 , Belum optimalnya pencatatan sipil dimana Rasio Bayi Berakta Kelahiran sebesar 0,99% , Rasio bayi berakta kelahiran masih sebesar 0,98, yang berarti bahwa masih ada bayi yang belum memiliki akta kelahiran, dan Masih rendahnya pasangan berakte nikah dimana rasio pasangan yang berakte nikah pada tahun 2020 sebesar 0,061.

7) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Masih rendahnya desa berstatus swsembada dimana pada tahun 2020 Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa sebesar 6,12%. Berdasarkan perhitungan Indeks Desa Membangun Kementerian Desa dan PDT, pada tahun 2020 belum ada Desa Mandiri di Kabupaten Soppeng.

8) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Belum efektifnya keterlibatan perangkat daerah dalam pengembangan kampung KB. Ini terkait dengan belum adanya regulasi daerah yang mengatur tentang pengendalian dan kuantitas dan kualitas penduduk. Selain itu Masih rendahnya perangkat daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk dimana pada tahun 2020 masih sebesar 70,79%.

9) Bidang Perhubungan

Belum optimalnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dimana Persentase kepemilikan KIR angkutan umum di Kabupaten Soppeng di tahun 2020

masih sebesar 65,72%, selain itu pemasangan rambu-rambu masih rendah dimana tahun 2020 masih sebesar 34,72%.

10) Bidang Komunikasi dan Informasi

Belum optimalnya cakupan teknologi, informasi, dan komunikasi dimana Cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Soppeng masih sebesar 65,88%, Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, dan Belum optimalnya integrasi sistem informasi pemerintah daerah.

11) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Belum optimalnya pengawasan dan pemeriksaan koperasi dimana pada tahun 2020 persentase koperasi aktif di Kabupaten Soppeng sebesar 80,58%, dan Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan UMKM dimana pada tahun 2020 Persentase Usaha Mikro dan Kecil masih sebesar 99,06%. Hal ini diakibatkan karena Minimnya akses pasar dan ruang usaha yang layak dan sesuai standar bagi produk Koperasi dan UMKM, dan Keterbatasan akses permodalan yang dimiliki karena terbentur jenis usaha, skala usaha, persyaratan permodalan dan kepemilikan asset.

12) Bidang Penanaman Modal

Laju Investasi di Kabupaten masih fluktuatif, Laju Investasi tahun 2017 sebesar 39,92%, Belum banyak investasi yang masuk ke komoditas unggulan daerah dan Persebaran investasi yang belum merata.

13) Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Cakupan pembinaan olahraga yang masih rendah, dimana padatahun 2020 sebesar 25%, yang menurun dibanding tahun 2019 yangsebesar 46%, Cakupan pembinaan atlet yang terus menurun selama 5 Tahun terakhir, dan Perlunya peningkatan prestasi olah raga.

14) Ururan Statistik

Belum maksimalnya penyelenggaraan statistic sectoral dimana belum tersedianya data statistik dasar pada tahun berjalan karena baru tersedia pada awal semester II tahun berikutnya sehingga terjadi keteringgalan 2 tahun dengan tahun perencanaan, belum adanya sumber daya manusia yang berbasis statistik, masih ada beberapa data yang berbeda dihasilkan dari sumber data yang sama.

15) Bidang Kebudayaan

Belum optimalnya pelestarian cagar budaya dan sejarah. Capaian pelestarian cagar budaya dan sejarah di Kabupaten Soppeng tahun 2020 masih rendah yang

sebesar 24,13%, Karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi belum ada, Belum optimalnya pengembangan kesenian tradisional, dan Belum optimalnya pengelolaan permuseuman.

16) Bidang Perpustakaan

Masih rendahnya pengunjung perpustakaan daerah dimana jumlah pengunjung perpustakaan sebesar 0,013, Belum optimalnya kesadaran dan budaya minat baca (literasi), dan Koleksi buku di perpustakaan juga masih rendah dimana Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah pada tahun 2020 sebesar 27,26%.

17) Bidang kearsipan

Perlunya peningkatan kualitas cakupan penerapan arsip di setiap perangkat daerah secara baku.

3. Urusan Pilihan

1) Bidang Perikanan dan Kelautan

Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budaya, dimana jumlah produksi ikan pada tahun 2020 sebesar 3.383,72 ton lebih rendah dibanding target daerah, Cakupan bina kelompok nelayan yang masih rendah yang sebesar 87,42% dan Masih rendahnya jumlah produksi perikanan kelompok nelayan.

2) Bidang Pariwisata

Belum optimalnya pengembangan terutama dalam hal destinasi wisata, pengembangan sarana prasarana kepariwisataan, ini terlihat pada capaian kinerja jumlah kunjungan yang terus menurun dari tahun ke tahun, Masih rendahnya rata-rata waktu kunjungan wisatawan, sehingga berdampak pada stagnannya penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor kepariwisataan, dan Penurunan fungsi objek wisata, khususnya objek wisata alam, terkadang berbagi fungsi dengan kepentingan lainnya, dan juga berdampak pada pendeknya waktu kunjungan wisatawan rata-rata hanya dua malam.

3) Bidang Pertanian

Perlunya peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan, Belum optimalnya pemasaran produk pertanian, Belum efektif dan efisiennya sarana dan prasarana pertanian khususnya infrastruktur irigasi tersier, dan Belum optimalnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.

4) Bidang Perdagangan

Perlunya peningkatan sarana prasarana perdagangan dimana masih ada srarana dan prasarana perdagangan yang harus direvitalisasi, Perlunya peningkatan

kemitraan antara pelaku usaha dengan swalayan/ toko modern, dan Perlunya peningkatan manajemen pengelolaan pasar, serta Belum optimalnya informasi harga pasar.

5) Bidang Perindustrian

Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia, tingkat pendidikan, keterampilan, dan produktivitas tenaga kerja. Terbatasnya kemampuan pelaku IKM dalam Inovasi dan update, Belum adanya keserasian dan sinergitas program antar perangkat daerah yang terfokus pada komoditas unggulan yang disepakati untuk dibina teknologi industri, Rendahnya daya saing dan kualitas industri lokal, Belum optimalnya regulasi pemerintah dalam mendukung kemajuan, Belum adanya ikon produk industri yang identik dan menjadi ciri khas Kabupaten Soppeng sektor industri, Terbatasnya akses permodalan bagi IKM, dan Belum maksimalnya penataan sentra industri, serta Kurangnya tenaga penyuluh industri.

4. Fungsi Penunjang Pemerintahan

1) Bidang Perencanaan

Perlunya mengoptimalkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah, dan Perlunya peningkatan kualitas pengendalian evaluasi pelaksanaan program pembangunan

2) Bidang Penelitian dan Pengembangan

Belum optimalnya hasil-hasil penelitian dan pengkajian yang belum ditindaklanjuti dengan kebijakan, dan Belum adanya sumber daya manusia khususnya fungsional peneliti bidang penelitian dan pengembangan.

3) Bidang kepegawaian

Rasio ASN di Kabupaten Soppeng yang mengikuti diklat masih rendah

4) Bidang Keuangan

Tingkat kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan masih rendah, dan Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dibidang pendapatan yang belum memadai.

5) Bidang Pengawasan

Belum optimalnya penyelenggaraan pengawasan dimana persentase tindak lanjut temuan pada tahun 2020 sebesar 57,02% menurun dibanding tahun 2019 yang sebesar 67,12% dan temuan BPK yang ditindaklanjuti mengalami fluktuatif tiap tahun dimana pada tahun 2020 sebesar 14 temuan.

Dari permasalahan yang telah diuraikan beberapa isu strategis secara keseluruhan disajikan dengan pendekatan urusan pemerintahan menurut UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026. Pendekatan urusan akan lebih mempermudah

didalam menentukan stakeholder terkait dalam menentukan kebijakan yang akan dilakukan menghadapi isu strategis tersebut.

Isu Strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Isu Internasional

1) Pemulihan kondisi dari dampak pandemik Covid-19

Pandemik Covid-19 merupakan masalah global, nasional hingga daerah yang mempengaruhi perekonomian global, pergerakan manusia dan barang antar negara, selain masalah kesehatan itu sendiri. Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang terpapar, telah berupaya optimal dalam penanganan pandemic Covid-19 dari sisi pelayanan kesehatan, khususnya dalam bentuk berfungsinya laboratorium uji swab sehingga menjadi rujukan bagi daerah lain. Selain itu, dengan fasilitas uji swab tersebut pemerintah daerah lebih mudah melakukan identifikasi dan tracing bila ada warga terpapar, selain terus menegakkan protokol kesehatan untuk memutus rantai penularan.

Dalam pembangunan Kabupaten Soppeng lima tahun kedepan, dampak Covid-19 merupakan faktor yang penting diperhatikan pengaruhnya. Selain terhadap kesehatan masyarakat melalui upaya penegakan protokol kesehatan dan vaksinasi bila vaksin telah ditemukan, upaya strategis juga diperlukan untuk pemenuhan berbagai aspek kehidupan seperti stagnasi pertumbuhan UMKM, kemunduran pariwisata, stagnasi bisnis transportasi dan penginapan/perhotelan, dan sebagainya. Isu strategis terkait Covid19 lebih kepada upaya pemulihan pada berbagai aspek kehidupan yang terdampak negative oleh pandemic Covid-19.

2) Perubahan Iklim

Dampak perubahan iklim kemungkinan akan semakin signifikan dalam lima tahun ke depan. Lembaga internasional seperti FAO, lembaga nasional dalam bidang klimatologi, serta beberapa ahli, memprediksi akan terjadinya fenomena kekeringan yang ekstrim secara bergantian dengan fenomena hujan lebat. Kabupaten Soppeng yang mengandalkan perekonomian dan sumber nafkah masyarakatnya dari pertanian akan terdampak dengan perubahan iklim tersebut tidak hanya terhadap produksi pertanian tetapi juga dengan dampak bencana yang menyertainya. Tantangan bukan hanya pada diperlukannya tindakan pengurangan efek rumah kaca pada berbagai sektor pembangunan, tetapi terutama pada tindakan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim pada pertanian, peternakan, dan perikanan.

Secara keseluruhan, dari data Indeks Kapasitas Adaptif (IKA) beserta Indeks Keterpaparan dan Sensitif (IKS) (yang termuat dalam Laporan KLHS RPJMD),

beberapa daerah di Kab. Soppeng memiliki kerentanan terhadap perubahan iklim. Tingginya tingkat kerentanan di beberapa daerah tersebut disebabkan oleh tingkat keterpaparan dan sensitivitas wilayah tersebut yang tinggi, sementara di sisi lain kapasitas untuk beradaptasi sangat rendah. Kapasitas adaptasi yang rendah mengindikasikan rendahnya ketersediaan infrastruktur di wilayah tersebut. Selain itu, pendidikan dan sumber mata pencaharian masyarakatnya terbatas. Terganggu dan berubahnya kondisi lingkungan akibat perubahan iklim menjadikan masyarakat di wilayah tersebut sangat rentan. Untuk itu, pembangunan infrastruktur wilayah dan diversifikasi penghasilan masyarakat perlu diprioritaskan pada wilayah yang tingkat kerentanannya sedang hingga sangat tinggi.

3) Revolusi Industri 4.0

Dalam lima tahun kedepan, bila pandemic Covid-19 telah berakhir, kemungkinan pengaruh revolusi industri 4.0 kembali signifikan terhadap perekonomian dan aspek kehidupan lainnya. Pada dunia bisnis, perkembangan bisnis berbasis aplikasi internet akan mendorong lahirnya start-up UMKM, industri kreatif, serta terdusurnya sejumlah model bisnis dan digantikan oleh model bisnis baru berbasis elektornik tersebut. Dunia birokrasi akan terpengaruh dengan semakin diterapkan sejumlah aplikasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan berbasis elsktornik sehingga transparansi akan semakin terbuka dan dengan itu kontrol masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintahan semakin terfasilitasi. Isu strategis lain terkait revolusi industri 4.0 adalah semakin dituntutnya inovasi dalam pelayanan public, penyelenggaraan pemerintahan, ataupun pengembangan ekonomi masyarakat.

Untuk tangka Kab. Soppeng dengan jumlah UMKM yang sebanyak 7.464 serta sektor pertanian yang cukup besar, sehingga kedua sktor ini harus diarahkan agar dapat mengadopsi teknologi terkini dan mengembangkan jejaring pelaku utama dan pelaku usaha dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri, UMKM, dan ekonomi kreatif Soppeng.

4) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda global yang dipatuhi oleh semua negara di bawah arahan PBB. Di dalamnya termuat 17 tujuan dan 169 target/indikator. TPB tersebut mencakup: 1. Menghapus segala bentuk kemiskinan; 2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan; 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia; 4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta

meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua; 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan; 6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari air dan sanitasi untuk semua; 7. Memastikan seluruh penduduk mendapat akses untuk energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan; 8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua secara berkelanjutan; 9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif berkelanjutan, dan inovasi; 10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara; 11. Membuat pemukiman kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan; 12. Memastikan penerapan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan; 13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya; 14. Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut dan sumber daya kelautan berkelanjutan dalam rangka pembangunan berkelanjutan; 15. Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, lestari mengelola hutan, memerangi penggurunan, dan menghentikan serta membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati; 16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam pembangunan daerah lima tahun kedepan di Kabupaten

Soppeng, indikator dan target dari TPB akan diintegrasikan dengan indikator dan target lainnya melalui penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026. Sesuai dengan pembagian wewenang

yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten memiliki wewenang sebanyak 220 indikator capaian. Namun, berdasarkan hasil identifikasi yang mempertimbangkan karakteristik wilayah maka Kabupaten Soppeng hanya memiliki 196 indikator. Salah satunya dikarenakan TPB (14) yaitu Melestarikan dan Memanfaatkan secara berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng mengingat Soppeng tidak memiliki laut.

Dari hasil evaluasi, Indikator TPB yang telah dilaksanakan dan mencapai target adalah 41 % atau sebanyak 80 indikator. Sementara itu sebanyak 31 % atau 60 indikator belum mencapai target dan 20 indikator atau 10 % dari total indikator TPB masih belum terlaksana serta 18 % atau 36 indikator belum/tidak memiliki data.

2. Isu Strategis Nasional

1) Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Pelayanan Dasar

Peraturan Pemerintah No.2/2018 dan Permendagri 100/2019 mengamanahkan seluruh daerah untuk menyelenggarakan SPM pada sejumlah urusan yakni urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat serta sosial. Sejumlah indikator untuk masing-masing SPM telah ditetapkan dan targetnya adalah 100%. Kabupaten Soppeng konsisten akan memenuhi target SPM tersebut. Kondisi terakhir di Kab. Soppeng rata-rata capaian SPM dari 6 bidang SPM baru mencapai 79,72%. Hal ini mengindikasikan bahwa beberapa layanan SPM di Kab. Soppeng belum mencapai target yang ditetapkan yang sebesar 100%, diantaranya yaitu SPM PAUD, SPM Kesetaraan, SPM Pendidikan dasar, SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif, Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari, Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik, Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti dan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota.

2) Bonus Demografi

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2020, tercatat bahwa 68,72% dari total penduduk Kab. Soppeng berada pada usia 15 hingga 64 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Kab. Soppeng mengalami bonus demografi, yaitu bonus yang dinikmati suatu daerah akibat dari besarnya proporsi penduduk usia produktif, atau bisa dikatakan penduduk usia 15 sampai dengan 64 tahun, dalam evolusi kependudukan yang dialaminya (BKKBN). Kondisi ini akan terus berlanjut hingga tahun 2035 berdasarkan angka proyeksi penduduk Indonesia.

Kondisi bonus demografi ini memberikan suatu keuntungan bagi perekonomian. Banyaknya tenaga kerja usia produktif dinilai mempunyai produktifitas yang tinggi. Sehingga, output yang dihasilkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan The Conference Board Productivity Brief 2015, yang menyatakan bahwa produktivitas adalah hal yang sederhana akan tetapi menjadi indikator yang paling kuat untuk melihat kemampuan suatu negara dalam mengoptimalkan perekonomian. Selain itu, meningkatnya output juga akan meningkatkan pendapatan tenaga kerjanya. Sehingga kesejahteraan tenaga kerja

pun juga ikut meningkat. Akan tetapi, adanya bonus demografi ini tidak serta merta mampu menunjang perekonomian. Seberapa besar pendapatan yang akan mereka terima tergantung dari kualifikasi yang dibutuhkan. Kualifikasi ini merupakan input dari tenaga kerja,

atau yang disebut sebagai modal manusia. Menurut Todaro (2009), modal manusia merupakan investasi produktif terhadap orang-orang yang mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, gagasan, dan kesehatan. Semakin tinggi modal manusia yang dimiliki seseorang menyebabkan kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa juga meningkat. Sejalan yang dilansir oleh Human Development Report (1990), "Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Berdasarkan hal tersebut tentunya pemerintah daerah Kab. Soppeng harus memanfaatkan hal ini dengan menggenjot pembangunan sumber daya manusia sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi di Kab. Soppeng yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Isu Strategis Regional

Pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan memuat beberapa isu strategis adalah sebagai berikut:

1) Mendekatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat

Syarat pokok pelayanan kesehatan yang baik berkualitas adalah pelayanan kesehatan tersebut harus tersedia di masyarakat (available) serta bersifat berkesinambungan (continously). Artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit ditemukan, serta keberadaannya di masyarakat senantiasa tersedia setiap saat bila dibutuhkan. Syarat pelayanan kesehatan yang baik lainnya adalah yang mudah dicapai (accessible) oleh masyarakat. Pengertian ketercapaian yang dimaksud disini terutama dari sudut lokasi. Dengan demikian untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, maka kehadiran dan pengaturan distribusi sarana kesehatan yang berkualitas menjadi sangat penting. Meskipun pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin telah tersedia, belum semua penduduk miskin memanfaatkan pelayanan ini karena mereka tidak mampu menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan akibat kendala biaya, faktor jarak dan transportasi. Untuk itu dibutuhkan rumah sakit regional yang secara jarak dapat dijangkau oleh masyarakat dan memberi pelayanan kesehatan antar wilayah kabupaten/kota sehingga Kota Makassar tidak lagi selalu dijadikan rujukan dalam pelayanan kesehatan. Rumah sakit regional tersebut harus didukung SDM yang memadai, dan layanan yang ramah anak dan disabilitas.

2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus memastikan perekonomian dapat terus bertumbuh positif. Posisi Sulawesi Selatan yang secara historis menjadi penghubung Kawasan Timur Indonesia menjadi kekuatan yang tidak dimiliki daerah lain. Namun hal tersebut tidaklah cukup, kemudahan dalam berinvestasi, pengurusan perijinan, dan kondisi yang stabil serta kondusif menjadi prasyarat utama sebuah perekonomian yang dinamis dan mendatangkan kesejahteraan bagi warganya. Kondisi Pemerintahan yang cenderung birokratis, tidak melayani, dan kaku membuat Sulawesi Selatan tidak menjadi pilihan utama untuk membuka usaha. Dalam survey tahun 2017 yang dibuat oleh lembaga penelitian Asia Competitiveness Institute, Sulawesi Selatan berada di Posisi ke-9 terkait kemudahan berbisnis, tertinggal dari provinsi lain seperti Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta. Selain kondisi ekonomi, hal lain yang juga mempengaruhi adalah faktor pendidikan dan kesehatan. Demikian juga hak atas rasa aman (perlindungan) bagi seluruh

lapisan masyarakat, termasuk perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya, sesuai posisi geografis Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat menjadi rujukan wilayah lainnya di Indonesia khususnya Kawasan Timur Indonesia. Jika faktor-faktor tersebut dapat diciptakan, akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai pusat pertumbuhan untuk wilayah Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia.

3) Kualitas infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian.

Sulawesi Selatan memiliki luas kurang lebih 45.500 km persegi, dengan daratan yang luas dan gugusan pulau-pulau. Untuk menunjang perekonomian, dibutuhkan interkoneksi antar daerah yang ditunjang oleh Infrastruktur yang mumpuni. Saat ini di Sulawesi Selatan terdapat 109 Pelabuhan Laut dan 11 Pelabuhan Udara. Namun karena kualitas yang kurang baik di kabupaten/kota lain, satu-satunya yang menjadi tumpuan untuk pertumbuhan ekonomi adalah Kota Makassar. Selain itu, keberadaan infrastruktur berkualitas di bidang sumber daya air juga masih sangat dibutuhkan, mengingat Sulawesi Selatan sampai saat ini masih menjadi provinsi yang rawan terdampak bencana banjir. Di samping itu kondisi infrastruktur jalan yang belum optimal, dimana jaringan jalan dalam kondisi baik pada tahun 2017 baru mencapai 37,07% dari panjang jalan 2.009,35 km. Sedangkan pada kondisi jalan rusak cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2016 yakni 25,58 dan meningkat tahun 27,86 persen. kondisi jalan rusak berat pada tahun 2013 adalah 7,35 persen turun pada tahun 2014 yakni 7,15 persen hingga tahun 2015 sebesar 4,85. Hal ini disebabkan karena ada peralihan

kewenangan beberapa ruas jalan kabupaten menjadi ruas jalan provinsi dengan kondisi rusak parah yang berakibat menurunnya capaian kinerja ruas jalan provinsi secara akumulasi. Masih rendahnya persentase jalan provinsi dalam kondisi baik antara lain dikarenakan masih terdapat jalan provinsi dengan perkerasan berupa kerikil sepanjang 152,6 Km (7,59%) dan perkerasan berupa tanah sepanjang 211,52 Km (10,53%). Kondisi jalan ini terdapat di Kabupaten Pinrang, Luwu Utara, Luwu Timur, Luwu, Toraja Utara, Tana Toraja, Enrekang, Barru, Soppeng, Bone, Sinjai, dan Bulukumba. Tentunya dengan hal ini perlunya adanya penanganan terhadap jalan yang rusak ini dapat segera diperbaiki agar tidak membahayakan para pengguna jalan dan menunjang arus perekonomian antar daerah/wilayah.

4) Pemerataan Pendapatan bagi warga Sulawesi Selatan.

Selain fokus terhadap pertumbuhan ekonomi, sebuah pemerintahan tidak bisa melupakan pemerataan pendapatan warganya. Pemerataan dilakukan terhadap pendapatan perkapita maupun pemerataan terhadap pembangunan wilayah. Pendapatan per kapita masyarakat Sulawesi Selatan saat ini telah meningkat mencapai 44 juta per tahunnya, tetapi jika dianalisa lebih mendalam, pendapatan ini belum dirasa oleh semua warga Sulawesi Selatan. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, pada tahun 2017 Sulawesi Selatan menjadi Provinsi yang memiliki ketimpangan pendapatan warga tertinggi kedua di Indonesia (0,429). Selain itu, jumlah orang miskin di Sulawesi Selatan masih cukup tinggi sebesar 9,48 % pada tahun 2016, diatas target yang ingin dicapai oleh Pemprov Sulawesi Selatan pada akhir masa periode tiga RPJPD, yaitu 6%.

5) Keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas

Untuk mengakselerasi pembangunan, kunci utama yang harus dimiliki adalah keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas. Sulawesi Selatan seperti Indonesia pada umumnya, memiliki potensi pertumbuhan yang sering dinamakan oleh bonus demografi, di mana mayoritas warga berada pada usia produktif. Di Sulawesi Selatan pada tahun 2016, jumlah penduduk yang berada pada usia produktif (15-64 Tahun) berada di angka 5,6 Juta, atau 65% dari total warga Sulawesi Selatan. Data tersebut menunjukkan sebuah potensi besar dari sisi kuantitas sumber daya manusia, jika dibarengi oleh kualitas SDM tersebut. Namun IPM Sulawesi Selatan tahun 2019 berada di angka 71,66 yang artinya Sulawesi Selatan berada peringkat 14 dibandingkan Provinsi lain di Indonesia. Lebih dalam lagi, angka rata-rata lama sekolah di Sulawesi Selatan tahun 2019 adalah 8,26 tahun, yang artinya rata-rata anak sekolah di Sulawesi Selatan hanya bersekolah sampai sekolah menengah pertama dan menemui hambatan mengenyam sekolah

menengah atas. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, laki-laki hanya sampai kelas 3 SMP sedangkan perempuan kelas 2 SMP.

6) Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam.

Letak geografis yang strategis dan kondisi biofisik wilayah yang mendukung menyebabkan Sulawesi Selatan memiliki sumberdaya alam yang berlimpah. Potensi sumberdaya alam yang menjadi unggulan di Sulawesi Selatan antara lain; di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan/perikanan, pariwisata, energi dan pertambangan. Untuk sektor pangan, surplus hasil pertanian (padi/beras) selama 2 dekade terakhir memantapkan status Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional dan penghasil tanaman pangan terbesar di wilayah Indonesia Timur. Potensi sumberdaya alam sektor perikanan/kelautan juga menjadi sektor unggulan Sulawesi Selatan. Komoditi unggulan untuk sektor perikanan/kelautan antara lain; ikan laut, udang tambak dan rumput laut. Produksi rumput laut Sulawesi Selatan mampu memenuhi 30% dari kebutuhan nasional. Sektor pariwisata juga menjadi sektor yang perlu dioptimalkan pengelolaannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun demikian, sumberdaya alam yang dimiliki belum dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Hasil produksi sumberdaya alam sebagian besar dikirim/ekspor dalam kondisi bahan mentah/bahan baku (belum diolah), padahal ada potensi pengolahan yang dapat memberikan nilai tambah (added value) dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Sulawesi Selatan. Tantangan lain terkait sumber daya alam adalah bagaimana menjaga agar pemanfaatan sumberdaya alam memberikan manfaat secara ekonomi namun tetap memperhatikan kemampuan daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga. Kebijakan pembangunan ekonomi harus berjalan bersama dengan upaya menjaga kelestarian sumberdaya alam sehingga pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan dengan menjamin akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat sumberdaya alam bagi semua lapisan masyarakat, baik berdasarkan jenis kelamin, usia, status sosial, wilayah, dan kebutuhan yang berbeda.

7) Revitalisasi Paradigma pengelolaan Komoditi (Petik, Olah, Jual)

Industri merupakan salah satu komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan daya saing industri nasional, sebagai katalis utama dalam pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Dengan demikian peningkatan nilai tambah industri lokal untuk mendorong daya saing ekonomi seharusnya menjadi salah satu fokus untuk lebih ditingkatkan. Akselerasi industrialisasi dilaksanakan

melalui lima strategi utama, yaitu: 1) hilirisasi komoditi pertanian sebagai bahan mentah menjadi produk yang bernilai tambah di dalam negeri. 2) mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri. 3) mendorong partisipasi dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur. 4) percepatan proses pengambilan keputusan untuk menyelesaikan hambatan birokrasi (Debottlenecking). 5) meningkatkan integrasi pasar domestik. Hilirisasi komoditi bertujuan untuk meningkatkan produksi, meningkatkan kapasitas pengolahan, dan meningkatkan kapasitas pasar. Dengan demikian akan menghasilkan nilai tambah, memperkuat struktur industri, serta menyediakan lapangan kerja dan peluang usaha. Hilirisasi komoditas yang akan dikembangkan adalah program hilirisasi berbasis sektor pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Dengan program hilirisasi ini diharapkan dapat mengembalikan kejayaan Sulawesi Selatan pada sektor produksi, industri pengolahan berbasis pertanian dan keunggulan pemasaran hasil, baik untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

8) Sulawesi Selatan sebagai poros maritim

Sulawesi Selatan sebagai provinsi yang wilayahnya berbatasan dengan laut memiliki garis pantai sepanjang 1.973,7 km serta luas wilayah laut dan pesisir kurang lebih 60.000 km² diyakini memiliki kekayaan maritim yang besar. Potensi ekonomi yang terkandung di dalam laut dan sepanjang pesisir Sulawesi Selatan bila dikelola secara bijak akan mendatangkan devisa daerah. Sulawesi Selatan memiliki pulau-pulau kecil yang tersebar dari Pangkep hingga Selayar dan sepanjang Teluk Bone yang merupakan destinasi wisata bahari yang tak kalah dengan destinasi pulau yang lain. Pembangunan infrastruktur konektivitas pendukung seperti shortsea shipping untuk mempercepat konektivitas antar pulau di Sulawesi Selatan. Untuk dapat menjadi poros utama pertumbuhan maritim di nusantara, Sulawesi Selatan harus membangun dan meningkatkan daya dukung sistem pelayaran, menghidupkan pelabuhan-pelabuhan perikanan yang terbengkalai di Selayar hingga Palopo, perbaikan tata kelola kepelabuhanan dan memodernisasinya sesuai standar internasional, perbaikan pelayanan dan akses di seluruh pelabuhan yang ada. Dengan memaksimalkan hal tersebut, akan menguatkan posisi Sulawesi Selatan sebagai poros maritim dan pusat konektivitas kawasan timur Indonesia. Aspek sosial dan budaya bagi masyarakat maritim sangat diperlukan dalam mempercepat pembangunan kemaritiman secara komprehensif dan terpadu. Tantangannya adalah mengubah kebiasaan masyarakat maritim yang tertutup, berpikir sempit dan tidak berkembang menjadi

masyarakat maritim yang dinamis, kreatif dan produktif sehingga taraf hidup masyarakat lebih baik tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai masyarakat maritim dan nilai – nilai positif yang selama ini telah ada. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Sulawesi Selatan memprioritaskan proses pada sektor sosial dan budaya dalam membangun kemaritiman. Disamping itu jasa kelautan merupakan salah satu sektor yang berpotensi menjadi sumber penerimaan devisa negara melalui beberapa kegiatan yang menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan sebagai upaya membangun jasa kelautan yang efektif dan efisien di Sulawesi Selatan.

Dari permasalahan pembangunan yang telah ada yang dianggap penting dalam mempengaruhi pembangunan Lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas hidup manusia;
2. Pemenuhan SPM pelayanan dasar dan pelayan public lainnya;
3. Pertumbuhan ekonomi inklusif;
4. Pembangunan infrastruktur;
5. Pengembangan fasilitas ekonomi wilayah;
6. Reformasi birokrasi untuk tata kelola yang baik; dan
7. Pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam.

Dari faktor tersebut hasil identifikasi isu-isu strategis dari level global, nasional, provinsi dan masalah pembangunan daerah, maka isu strategis yang dianggap relevan untuk pembangunan Kabupaten Soppeng Lima tahun kedepan adalah:

1. Pemulihan kondisi dari dampak Covid-19;
2. Pengembangan inovasi dalam merespons revolusi industri 4.0;
3. Pengurangan kesenjangan dan pemerataan pembangunan;
4. Revolusi mental;
5. Pembangunan kebudayaan;
6. Pembangunan infrastruktur;
7. Hilirisasi pengelolaan produksi sumberdaya alam;
8. Peningkatan kualitas hidup manusia;
9. Pemenuhan SPM pelayanan dasar dan pelayan public lainnya;
10. Pertumbuhan ekonomi inklusif;
11. Pengembangan fasilitas ekonomi wilayah untuk daya saing daerah;
12. Reformasi birokrasi untuk tata kelola yang baik;
13. Pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam;
14. Pembangunan pertanian;
15. Pengembangan UMKM;
16. Penguatan kapasitas desa; dan

17. Pengembangan pariwisata.

Berdasarkan penilaian terhadap setiap isu strategis berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, maka prioritas isu strategis Kabupaten Soppeng secara teknokratis adalah seperti berikut:

1. Pemulihan kondisi dari dampak Covid-19;
2. Pemenuhan SPM pelayanan dasar dan pelayan public lainnya;
3. Peningkatan kualitas hidup manusia;
4. Pertumbuhan ekonomi inklusif;
5. Pengurangan kesenjangan dan pemerataan pembangunan;
6. Pembangunan infrastruktur;
7. Pengembangan fasilitas ekonomi wilayah untuk daya saing daerah;
8. Reformasi birokrasi untuk tata kelola yang baik;
9. Pengembangan inovasi dalam merespons revolusi industri 4.0; dan
10. Pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam.

1.1.2.2 Visi Misi Kepala Daerah

Visi dan Misi Kabupaten Soppeng merupakan dasar tujuan pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun Visi dan Misi Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :

1. Visi Kabupaten Soppeng

Visi Kabupaten Soppeng sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2021 – 2026 adalah **“Soppeng yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera”**.

Pada rumusan visi ini terkandung substansi “perwujudan visi” bahwa Kabupaten Soppeng **“Lebih Melayani”** yang mempunyai makna bahawa pemerintah daerah akan semakin memantapkan pelayanan publik yang selama ini telah mencapai peningkatan akses dan kualitas. Kondisi yang hendak diwujudkan adalah terpenuhinya semua standar pelayanan minimal untuk Bidang wajib pelayanan dasar maupun Bidang pemerintahan lainnya. Diekspektasi bahwa Kabupaten Soppeng akan termasuk lima besar Kabupaten terbaik di Sulawesi Selatan dalam hal pemenuhan SPM.

“Lebih Maju” yang mempunyai makna daerah Soppeng akan semakin berdaya saing dalam hal kualitas manusia. Dalam empat tahun terakhir ranking IPM Kabupaten Soppeng telah terakselerasi dari peringkat 20 menjadi peringkat 18 di Sulawesi Selatan. Dalam lima tahun kedepan diekspektasi bahwa capaian IPM Kabupaten Soppeng makin terakselerasi dan dapat masuk kategori tinggi diantara daerah Kabupaten di Sulawesi Selatan. Kemajuan dalam hal kualitas manusia akan didukung oleh infrastruktur daerah dan kondisi keamanan dan ketentraman

daerah yang semakin kindusif serta fasilitas ekonomi wilayah yang semakin terpenuhi dan berkualitas. Selama ini pembangunan infrastruktur daerah dan fasilitas ekonomi wilayah telah terakselerasi sehingga dalam lima tahun kedepan capaian tersebut akan semakin dimantapkan. Kondisi yang hendak diwujudkan adalah semakin tingginya daya tarik Soppeng sebagai daerah perlintasan maupun daerah tujuan baik dari aspek sumberdaya alam maupun dari aspek sosial-budaya. **“Lebih Sejahtera”** yang mempunyai makna masyarakat Soppeng akan semakin meningkat kesejahteraan sosial-ekonominya. Dalam lima tahun terakhir angka kemiskinan telah menurun, PDRB/kapita telah meningkat, dan pertumbuhan ekonomi cukup stabil, meskipun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi menurun karena dampak pandemic Covid-19. Dalam lima tahun kedepan, capaian dalam berbagai indikator perekonomian tersebut akan semakin dimantapkan melalui peningkatan produktivitas pertanian dalam arti umum, UMKM, industri kecil, perdagangan, dan pariwisata dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

2. Misi Kabupaten Soppeng

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

Sembilan Misi, Pemerintahan yang Melayani:

a. Memantapkan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar

Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan Bidang wajib terkait pelayanan dasar berbasis standar pelayanan minimal (SPM) untuk mendukung kualitas manusia yang semakin unggul dan maju baik untuk jangka menengah maupun untuk jangka panjang. Pemenuhan SPM mencakup Bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat serta sosial.

b. Memantapkan Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat

Misi ini mencakup upaya umum untuk memantapkan kesejahteraan masyarakat dalam arti meningkatkan kualitas hidup manusia. Kualitas hidup manusia dalam konteks ini ditandai oleh penguasaan pengetahuan, harapan hidup, dan daya beli sehingga pilihan-pilihan dalam kehidupan selalu terbuka. Ini adalah hakikat dari pembangunan manusia. Misi ini juga mencakup upaya umum dalam perbaikan perekonomian rakyat berupa peningkatan produktivitas dan penyerapan tenaga kerja sektor-sektor perekonomian utama yakni pertanian dalam arti umum, usaha mikro dan kecil, industri kecil, dan perdagangan. Selain itu, tercakup upaya untuk penanggulangan kemiskinan.

c. Memantapkan Pencapaian Daya Saing Daerah

Misi ini secara garis besar mencakup upaya umum dalam meningkatkan kapasitas infrastruktur daerah terutama infrastruktur transportasi, perhubungan, perumahan dan pemukiman, serta komunikasi dan informatika. Misi ini juga terkait dengan upaya pengembangan sarana/prasarana dan fasilitas ekonomi wilayah terutama dalam mendorong daya tarik pariwisata pada berbagai titik destinasi wisata. selain itu salah satu kewajiban kepala daerah adalah menjaga keamanan dan ketentraman wilayah yang pada akhirnya akan menarik investasi dan meningkatkan daya saing daerah

d. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik

Misi ini mencakup upaya umum dalam memantapkan reformasi birokrasi pada level OPD Kabupaten hingga Kecamatan dan melanjutkannya dengan perwujudan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif. Tata kelola pemerintahan yang kolaboratif diupayakan melalui penerapan akuntabilitas dan transparansi yang membuka ruang bagi kontribusi masyarakat sipil dan dunia usaha dalam pencapaian visi bersama Kabupaten Soppeng.

e. Memantapkan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Misi ini mencakup upaya umum dalam menjaga, memelihara dan memperbaiki daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup agar manfaatnya bisa berkelanjutan antar generasi. Misi ini juga mencakup upaya umum untuk pencapaian berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis Kabupaten Soppeng.

1.1.2.3 Sasaran Pembangunan Daerah

Sesuai dengan Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Tahun 2021 yang tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Tahun 2021-2026 arah pembangunan yang di laksanakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
SOPPENG YANG LEBIH MELAYANI MAJU DAN SEJAHTERA			
Misi-1 Memantapkan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar			
Tujuan1.1: Memenuhi Hak warga negara dalam memperoleh layanan minimal untuk hidup secara layak	Sasaran1.1.1: Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar	Mengembangkan sinergi Pemerintah dengan masyarakat dalam memenuhi akurasi data, kecukupan sarana dan prasarana, dan cakupan penerima	Perbaikan akurasi data untuk pemenuhan jenis dan kualitas pelayanan dasar berbasis SPM

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		layanan untuk penerapan SPM pelayanan dasar	
	Sasaran1.1.2: Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar	Mendorong inovasi pelayanan publik berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan SDM berkompetensi relevan diringi dengan dukungan regulasi	Penguatan regulasi, kelembagaan dan sistem pelayanan terpadu satu pintu dan pelayanan publik lainnya
Misi-2 Memantapkan Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat			
Tujuan- 2.1: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Sasaran2.1.1: Meningkatnya derajat pendidikan, literasi dan kualitas fisik masyarakat	Memenuhi kebutuhan tenaga pendidik secara merata disertai dengan pengembangan kurikulum muatan lokal secara bersinergi dengan Penguatan literasi masyarakat dan pengembangan prestasi olah raga serta kepemudaan	Penguatan manajemen berbasis sekolah
	Sasaran2.1.2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Mendorong kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam akselerasi upaya reventif, promotif, maupun kuratif diiringi dengan penyediaan sarana, prasarana dan tenaga medis berkualitas dan perbaikan pelayanan rumah sakit	Optimalisasi penanganan pandemik Covid-19
Tujuan2.2: Meningkatkan produktivitas perekonomian dan pendapatan masyarakat secara merata	Sasaran2.2.1: Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	Mengadopsi teknologi terkini dan mengembangkan jejaring pelaku utama dan pelaku usaha dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian, peternakan,	Penguatan ketahanan KUMKM dan sektor pertanian agar tetap terakselerasi dalam menghadapi dampak pandemik Covid-19

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		perkebunan, perikanan, industri, UMKM, dan ekonomi kreatif.	
	Sasaran-2.2.2: Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah	Mendorong kolaborasi multipihak dalam Penanggulangan kemiskinan serta perluasan cakupan layanan bagi PMKS diiringi dengan pencapaian SDGs Desa	Penanganan penyandang masalah Kesejahteraan sosial (PMKS)
Misi-3 Memantapkan pencapaian daya saing daerah			
Tujuan-3.1: Memperkuat kapasitas infrastruktur serta keamanan dan ketertiban daerah dalam mendukung fasilitas ekonomi wilayah	Sasaran3.1.1: Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Mengefektifkan fungsi Infrastruktur transportasi dan perhubungan, perumahan dan pemukiman, irigasi, serta sumberdaya air sesuai karakteristik wilayah berbasis rencana tata ruang daerah dan partisipasi masyarakat	Menjaga kemantapan jalan yang telah dicapai melalui: Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Berkala Jalan, Pemeliharaan Rutin Jalan
	Sasaran3.1.2: Meningkatnya fasilitas ekonomi wilayah	Menciptakan situasi kondusif bagi dunia usaha untuk berkembangnya fasilitas ekonomi wilayah dalam mendukung daya tarik investasi dan perkembangan pariwisata.	Penguatan kelembagaan dan pengembangan akses untuk pembiayaan pelaku usaha
	Sasaran3.1.3: Terpeliharanya situasi amandan damai dalam masyarakat	Memberdayakan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban, ketenteraman, kesatuan bangsa dan kepatuhan terhadap norma sosial secara	Penegakan kepatuhan masyarakat atas hukum dan norma-norma sosial

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		bersinergi dengan teladan dari aparat	
Misi-4 Memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik			
Tujuan- 4.1: Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi secara inovatif	Sasaran4.1.1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah	Mengakselerasi implementasi road-map reformasi birokrasi berbasis sistem elektronik yang mengintegrasikan data sektoral dan keuangan serta didukung dengan inovasi secara kontinyu	Penyelarasan organisasi birokrasi dan jabatan fungsional pegawai
Misi-5 Memantapkan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup			
Tujuan-5.1: Memelihara daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup	Sasaran5.1.1: Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana	Menyadarkan dan mengkoordinasikan pemangku kepentingan untuk pengendalian pencemaran, pencegahan degradasi lahan, pemeliharaan keanekaragaman hayati, mitigasi perubahan iklim, dan perwujudan masyarakat tangguh bencana	Penguatan sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Sumber Data Dokumen RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun2021-2026			

1.1.2.4 Program Pembangunan Daerah

Tabel 1.13
Sasaran Pembangunan Daerah dan Target Tahun 2021

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Capaian Tahun 2021	Perangkat Darah Penanggung Jawab
Misi-1 Memantapkan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar				
Tujuan-1.1: Memenuhi hak warga negara dalam	KM atas SPM pelayanan dasar dan non pelayanan	84,34	85,87	

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Capaian Tahun 2021	Perangkat Darah Penanggung Jawab
memperoleh layanan minimal untuk hidup secara layak	dasar			
Sasaran-1.1.1: Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar	Nilai rata-rata tingkat capaian penerapan SPM	79,72	100	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	59,91	100	Dinas KESEHATAN
	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	66,66	100	Dinas KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah ibu hamil mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100	110	Dinas KESEHATAN
	Jumlah ibu bersalin mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100	100	Dinas KESEHATAN
	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100	100	Dinas KESEHATAN
	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100	100	Dinas KESEHATAN
	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	Dinas KESEHATAN

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Capaian Tahun 2021	Perangkat Darah Penanggung Jawab
	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	20,11	100	Dinas KESEHATAN
	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100	100	Dinas KESEHATAN
	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	Dinas KESEHATAN
	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	Dinas KESEHATAN
	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	Dinas KESEHATAN
	Jumlah warga negara terduga Tuberculosis Yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	Dinas KESEHATAN
	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100	100	Dinas KESEHATAN
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	96,16	100	Dinas PUPR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah	98,24	100	Dinas PUPR

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Capaian Tahun 2021	Perangkat Darah Penanggung Jawab
AIR LIMBAH	domestik			
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	Dinas PERKIM
	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat rogram Pemda yang Memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100	100	Dinas PERKIM
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan erkada	100	100	SATPOL.PP dan DAMKAR
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	100	100	BPBD
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	100	100	BPBD
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	100	100	BPBD
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	90,70	100	SATPOL.PP dan DAMKAR
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah warga negara Penyandang Disabilitas Terlantar yang memperoleh rehabiitasi sosial di luar panti	5,53	100	DINAS SOSIAL

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Capaian Tahun 2021	Perangkat Darah Penanggung Jawab
	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti	100	100	DINAS SOSIAL
	Jumlah warga negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti	0,44	100	DINAS SOSIAL
	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di Luar Panti	0,00	100	DINAS SOSIAL
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh Perlindungan dan jaminan sosial	13,48	100	DINAS SOSIAL
Sasaran-1.1.2: Meningkatnya mutu pelayanan publik Non Pelayanan Dasar	IKM pelayanan publik non pelayanan dasar	83,84	84	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	99	99	Dinas DUKCAPIL
	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	40	43	Dinas DUKCAPIL
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	95,00	95,50	Dinas DUKCAPIL
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Izin yang diterbitkan Sesuai SOP	100	100	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan	100	100	KEC. LALABATA

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Capaian Tahun 2021	Perangkat Darah Penanggung Jawab
	Lalabata(%)			
	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Donri-Donri(%)	100	100	KEC. DONRI- DONRI
	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Liliriaja(%)	100	100	KEC. LILIRIAJA
	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriwawo(%)	100	100	KEC. MARIORI WAWO
	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Lilirilau(%)	100	100	KEC. LILIRILAU
	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriawa(%)	100	100	KEC. MARIO RIAWA
	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Ganra(%)	100	100	KEC. GANRA
	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan	100	100	KEC. CITTA

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Capaian Tahun 2021	Perangkat Darah Penanggung Jawab
	Citta(%)			
Misi-2 Memantapkan Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat				
Tujuan-2.1: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	IPM	68,67	69,13	
Sasaran-2.1.1: Meningkatnya derajat pendidikan, literasi dan kualitas fisik masyarakat	Indeks Pendidikan	61,87	62,34	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase PTK Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D- IV	94,52	95,50	Dinas DIKBUD
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	100	100	Dinas PERPUSTAKAN Dan KEARSIPAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	0,95	0,99	Dinas PERIWISATA Dan PEMUDA OLAHRAGA
	Persentase Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	25,96	27,25	Dinas PERIWISATA Dan PEMUDA OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Peningkatan Prestasi Olahraga	0	1	Dinas PERIWISATA Dan PEMUDA OLAHRAGA
Sasaran-2.1.2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	76,38	76,8	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Persentase Sarana dan Prasarana	68	70	Dinas KESEHATAN

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Capaian Tahun 2021	Perangkat Darah Penanggung Jawab
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan yang Sesuai Standar			
	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Sesuai Standar	67	70	Dinas KESEHATAN
	Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan	94	95	Dinas KESEHATAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Keterpenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	87	90	Dinas KESEHATAN
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang sesuai standar	100	100	Dinas KESEHATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa/Kelurahan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	30	40	Dinas KESEHATAN
Tujuan-2.2:Meningkatkan produktivitas perekonomian dan pendapatan masyarakat secara merata	Indeks Gin	0,403	0,395	
	PDRB/kapita (Rp)	50.100.000	55.119.000	
Sasaran-2.2.1: Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi (%)	2,19	5,80	
	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,42	4,40	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi	0,90	1,70	Dinas PERDAGANGAN , INDUSTRI, KOPERASI dan UKM
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru yang	19,64	39,21	Dinas PERDAGANGAN , INDUSTRI, KOPERASI dan

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Capaian Tahun 2021	Perangkat Darah Penanggung Jawab
	Berskala Mikro			UKM
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	425,82	430,08	Dinas PETERNAKAN dan PERIKANAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	13,65	-26,22	Dinas TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, PERKEBUNAN dan KETAHANAN PANGAN
	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	5,16	-5,58	Dinas TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, PERKEBUNAN dan KETAHANAN PANGAN
	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	-10	1,98	Dinas TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, PERKEBUNAN dan KETAHANAN PANGAN
	Produksi daging (Kg)	430.466	451.982	Dinas TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, PERKEBUNAN dan KETAHANAN PANGAN
	Produksi Telur (Kg)	9.707.820	9.785.483	Dinas TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, PERKEBUNAN dan KETAHANAN PANGAN
	Produksi Hasil Ikutan Lainnya (Kg)	88.470	92.009	Dinas TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, PERKEBUNAN dan KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase Prasarana	90	95	Dinas TANAMAN

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Capaian Tahun 2021	Perangkat Darah Penanggung Jawab
PRASARANA PERTANIAN	Pertanian yang Digunakan			PANGAN, HOLTIKULTURA, PERKEBUNAN dan KETAHANAN PANGAN
	Persentase Prasarana (Pternakan) yang Digunakan	90	95,00	Dinas PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN dan PERIKANAN
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kelas kelompok tani pemula kelanjut	42	8	Dinas TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, PERKEBUNAN dan KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	50	50	Dinas PERDAGANGAN , INDUSTRI, KOPERASI dan UKM
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pangan	22,86	24,29	Dinas TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, PERKEBUNAN dan KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	23,69	23,80	Dinas PMPTSP- NAKERTRANS
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota	4,41	0,00	Dinas PMPTSP- NAKERTRANS
Sasaran-2.2.2: Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah	Angka kemiskinan (%)	7,59	7,15	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase masyarakat miskin yang memiliki Jaminan kesehatan	96	100	Dinas KESEHATAN

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Capaian Tahun 2021	Perangkat Darah Penanggung Jawab
MASYARAKAT	talangan pemda			
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase RTLH RT Miskin yang ditingkatkan	N.A	0,00	Dinas PERKIM
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pekerja Sosial yang Mendapatkan Layanan Pemberdayaan Sosial	100	100	Dinas SOSIAL
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang Mendapatkan Bantuan Sosial	100	100	Dinas SOSIAL
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Daerah Rawan Pangan (Poin)	10	10	Dinas TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, PERKEBUNAN dan KETAHANAN PANGAN
Misi-3 Memantapkan pencapaian daya saing daerah				
Tujuan-3.1: Memperkuat kapasitas infrastruktur serta keamanan dan ketertiban daerah dalam mendukung fasilitas ekonomi wilayah	Indeks daya saing infrastruktur daerah	68,07	69,45	
Sasaran-3.1.1: Meningkatny kualitas infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	60,03	61,63	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	0,10	0,14	Dinas PUPR
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan	0,62	0,65	Dinas PUPR

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Capaian Tahun 2021	Perangkat Darah Penanggung Jawab
	irigasi			
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	58,00	58,50	Dinas PUPR
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	N.A	0,00	Dinas PERKIM
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	80,00	81,00	Dinas PERHUBUNGAN
	V/C Ratio	0,06	0,06	Dinas PERHUBUNGAN
Sasaran-3.1.2: Meningkatnya fasilitas ekonomi wilayah	Nilai PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Lainnya (milyar)	246,24	280,2	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pembinaan/Pengawasan Investasi Bagi Investor dalam Rangka Meningkatkan Iklim nvestasi yang Kondusif	1,22	0,00	Dinas PMPTSP- NAKERTRANS
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah nvestor Kabupaten/Kota	40,00	0,00	Dinas PMPTSP- NAKERTRANS
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara	-61,27	44,11	Dinas PERIWISATA Dan PEMUDA OLAHRAGA
Sasaran-3.1.3: Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat	Angka Kriminalitas (kasus)	86	86	SATPOL.PP dan DAMKAR
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat terselesaikan	100	100	SATPOL.PP dan DAMKAR

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Capaian Tahun 2021	Perangkat Darah Penanggung Jawab
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Keikutsertaan Masyarakat dan Remaja pada Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	<i>N.A</i>	<i>100</i>	<i>KESBANGPOL</i>
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Terkait Konflik Sosial	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>KESBANGPOL</i>
Misi-4 Memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik				
Tujuan-4.1: Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi secara inovatif	Indeks reformasi birokrasi (Nilai/kategori)	<i>49,78/C</i>	<i>50,53/CC</i>	
Sasaran-4.1.1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah	Nilai LPPD (Skor/status kinerja)	<i>3,7/Tinggi</i>	<i>3,9/Tinggi</i>	
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	<i>C</i>	<i>B</i>	
	Opini laporan keuangan	<i>WTP</i>	<i>WTP</i>	
	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	<i>59,18 (CC)</i>	<i>60 (B)</i>	
	Indeks Inovasi Daerah	<i>461 (kurang inovatif)</i>	<i>30,00 - 35,00 (inovatif)</i>	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang Dirumuskan	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>SEKRETARIAT DAERAH</i>
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD (%)	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>BAPPELIT BANGDA</i>
	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>BAPPELIT BANGDA</i>

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Capaian Tahun 2021	Perangkat Darah Penanggung Jawab
	APBD (%)			
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Keterpenuhan Dokumen Penganggaran Daerah Tepat Waktu	100	100	BPKPD
	Persentase Keterpenuhan Penyampaian SPJ Keuangan Tepat Waktu	100	100	BPKPD
	Persentase Keterpenuhan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tepat Waktu	100	100	BPKPD
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Tertib Asset Manajemen	100	100	BPKPD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio Efektivitas PAD	100	100	BPKPD
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi Temuan yang Selesai Ditindak Lanjuti	70	75	INSPEKTO RAT
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Penurunan Temuan Keuangan	0	75,00	BPKPD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan SKPD	0	0	-
Misi-5 Memantapkan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan				
Tujuan-5.1: Memelihara daya dukung sumberdaya alam dan	Nilai daya dukung dan daya tampung lingkungan	Belum terlampau	Belum terlampau	

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Capaian Tahun 2021	Perangkat Darah Penanggung Jawab
daya tampung lingkungan hidup				
Sasaran-5.1.1: Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana	Indeks Risiko Bencana	131,20 (Sedang)	131,20 (Sedang)	
	Potensi Penurunan EmisGRK (Ton Co2)	36238	36238	
	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLH)	N.A	65,83	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Keterpenuhan Regulasi, Kelembagaan dan Kerjasama dalam Penanggulangan Bencana	N.A	6	BPBD
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100	100	Dinas LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luasan Kawasan yang terkelola sesuai standar	9351 m ²	9351 m ²	Dinas LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Jumlah Pengaduan/Perkara LH yang Ditindak Lanjuti	100	100	Dinas LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	65,85	67,00	Dinas LINGKUNGAN HIDUP
Sumber Data Dokumen RPJMD 2021-2026				

Dari uraian tabel diatas pelaksanaan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan visi misi Bupati Soppeng dan Wakil Bupati Soppeng dalam menentukan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.15
Indikator Kinerja Kunci Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah

Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Rencana Target Tahun 2021	Penanggung Jawab	Keterangan
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
URUSAN PENDIDIKAN					
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	59,92	61,54	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Pelayanan Dasar
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	88,88	88,94	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Pelayanan Dasar
Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	69,86	74,04	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Pelayanan Dasar
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	66,67	50	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Pelayanan Dasar
URUSAN KESEHATAN					
Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	poin	0,13	0,13	Dinas Kesehatan	Pelayanan Dasar
Persentase RS Rujukan tingkat kabupaten atau kota yang terakreditasi	%	100	100	Dinas Kesehatan	Pelayanan Dasar
Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	Dinas Kesehatan	Pelayanan Dasar
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	Dinas Kesehatan	Pelayanan Dasar
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	Dinas Kesehatan	Pelayanan Dasar
Cakupan pelayanan	%	100	100	Dinas Kesehatan	Pelayanan

Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Rencana Target Tahun 2021	Penanggung Jawab	Keterangan
kesehatan balita sesuai standar					Dasar
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	Dinas Kesehatan	Pelayanan Dasar
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	20,12	100	Dinas Kesehatan	Pelayanan Dasar
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	Dinas Kesehatan	Pelayanan Dasar
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	Dinas Kesehatan	Pelayanan Dasar
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	Dinas Kesehatan	Pelayanan Dasar
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	Dinas Kesehatan	Pelayanan Dasar
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	Dinas Kesehatan	Pelayanan Dasar
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	Dinas Kesehatan	Pelayanan Dasar
URUSAN PEKERJAAN UMUM					
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian	%	0,95	0,14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pelayanan Dasar

Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Rencana Target Tahun 2021	Penanggung Jawab	Keterangan
banjir di WS Kewenangan Kab/Kota					
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	<i>Tidak ada garis pantai</i>	<i>Tidak ada garis pantai</i>	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pelayanan Dasar
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	0,62	0,65	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pelayanan Dasar
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	28	30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pelayanan Dasar
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	67,83	70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pelayanan Dasar
Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	<i>n.a</i>	0,3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pelayanan Dasar
Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/kota	%	58,4	59,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pelayanan Dasar
Rasio tenaga perator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pelayanan Dasar
Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pelayanan Dasar
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT					
Penyediaan dan rehabilitasi	unit	26	32	Dinas Perumahan	Pelayanan

Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Rencana Target Tahun 2021	Penanggung Jawab	Keterangan
rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten /kota				& Kawasan Pemukiman	Dasar
Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah kabupaten/kota	unit	1	1	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	Pelayanan Dasar
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	%	n.a	0	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	Pelayanan Dasar
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	10,19	100	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	Pelayanan Dasar
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	n.a	100	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	Pelayanan Dasar
URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM dan PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	Sat.Pol.PP & Damkar	Pelayanan Dasar
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	50	50	Sat.Pol.PP & Damkar	Pelayanan Dasar
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	jiwa	101735	101735	BPBD	Pelayanan Dasar
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan encegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	jiwa	101735	101735	BPBD	Pelayanan Dasar
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	jiwa	715	1000	BPBD	Pelayanan Dasar

Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Rencana Target Tahun 2021	Penanggung Jawab	Keterangan
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	90	90	Sat.Pol.PP & Damkar	Pelayanan Dasar
Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	7,75	7,75	Sat.Pol.PP & Damkar	Pelayanan Dasar
URUSAN SOSIAL					
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	%	12,25	100	Dinas Sosial	Pelayanan Dasar
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	<i>n.a</i>	100	Dinas Sosial	Pelayanan Dasar
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN TENAGA KERJA					
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	4,41	15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pelayanan Bukan Dasar
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	23,69	23,8	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pelayanan Bukan Dasar
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	<i>n.a</i>		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pelayanan Bukan Dasar

Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Rencana Target Tahun 2021	Penanggung Jawab	Keterangan
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	3,76	3,8	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pelayanan Bukan Dasar
Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	%	4,41	4,75	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pelayanan Bukan Dasar
URUSAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	2,01	2,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Pelayanan Bukan Dasar
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	0,04	0,04	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Pelayanan Bukan Dasar
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100,000 penduduk perempuan)	%	0,002	0,001	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Pelayanan Bukan Dasar
URUSAN PANGAN					
Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	29,11	30	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Pelayanan Bukan Dasar
URUSAN PERTANAHAN					
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas	%	29,11	30	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pelayanan Bukan Dasar

Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Rencana Target Tahun 2021	Penanggung Jawab	Keterangan
izin lokasi yang diterbitkan					
Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	65,85	67,5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pelayanan Bukan Dasar
Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal		<i>n.a</i>	<i>n.a</i>	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pelayanan Bukan Dasar
Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		<i>n.a</i>	<i>n.a</i>	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pelayanan Bukan Dasar
Tersedianya tanah untuk masyarakat		<i>n.a</i>	<i>n.a</i>	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pelayanan Bukan Dasar
Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pelayanan Bukan Dasar
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP					
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	IKLH	81,13	82,16	Dinas Lingkungan Hidup	Pelayanan Bukan Dasar
Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	%	65,85	67	Dinas Lingkungan Hidup	Pelayanan Bukan Dasar
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	61	63	Dinas Lingkungan Hidup	Pelayanan Bukan Dasar
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
Perekaman KTP Elektronik	%	99,33	99,33	Dinas Kependudukan dan	Pelayanan

Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Rencana Target Tahun 2021	Penanggung Jawab	Keterangan
				Catatan Sipil	Bukan Dasar
Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	60,04	60,1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Pelayanan Bukan Dasar
Kepemilikan akta kelahiran	%	99,12	99,12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Pelayanan Bukan Dasar
Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	58,82	76,47	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Pelayanan Bukan Dasar
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
Persentase pengentasan desa tertinggal	%	20	20	Dinas Pemeberdayaan Masyarakat Dan Desa	Pelayanan Bukan Dasar
Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	<i>n.a</i>	<i>n.a</i>	Dinas Pemeberdayaan Masyarakat Dan Desa	Pelayanan Bukan Dasar
URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2,16	2,16	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Pelayanan Bukan Dasar
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	78,23	78,24	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Pelayanan Bukan Dasar
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	12,78	12,78	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Pelayanan Bukan Dasar
URUSAN PERHUBUNGAN					

Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Rencana Target Tahun 2021	Penanggung Jawab	Keterangan
Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	poin	30,03	81	Dinas Perhubungan	Pelayanan Bukan Dasar
V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C	0,0022	0,063	Dinas Perhubungan	Pelayanan Bukan Dasar
URUSAN KOMUNIKASI DAN ONFORMATIKA					
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	97,06	100	Dinas Kominfo	Pelayanan Bukan Dasar
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	0,08	0,5	Dinas Kominfo	Pelayanan Bukan Dasar
Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	64,86	65	Dinas Kominfo	Pelayanan Bukan Dasar
URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH					
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	38,17	38,17	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	Pelayanan Bukan Dasar
Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	0,87	2,09	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	Pelayanan Bukan Dasar
URUSAN PENANAMAN MODAL					
Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	%	57,65	61,1	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pelayanan Bukan Dasar
URUSAN KEPEMUDAAN					

Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Rencana Target Tahun 2021	Penanggung Jawab	Keterangan
DAN OLAHRAGA					
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,95	0,99	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Pelayanan Bukan Dasar
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	25,96	27,25	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Pelayanan Bukan Dasar
Peningkatan Prestasi Olahraga	Prestasi	0	0	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Pelayanan Bukan Dasar
URUSAN STATISTIK					
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pelayanan Bukan Dasar
Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pelayanan Bukan Dasar
URUSAN PERSANDIAN					
Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	249	255	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pelayanan Bukan Dasar
URUSAN KEBUDAYAAN					
Terlestarikannya Cagar Budaya	%	25	21,88	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pelayanan Bukan Dasar
URUSAN PERPUSTAKAAN					
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	nilai	n.a	n.a	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pelayanan Bukan Dasar
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pelayanan Bukan Dasar
URUSAN KEARSIPAN					
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah	%	75	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pelayanan Bukan Dasar

Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Rencana Target Tahun 2021	Penanggung Jawab	Keterangan
dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan					
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	<i>n.a</i>	<i>n.a</i>	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pelayanan Bukan Dasar
URUSAN PILIHAN					
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah provins	Ton	3383,72	3417,56	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	Pelayanan Bukan Dasar
Produksi Perikanan Tangkap	Ton	2957,9	2987,48	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	Pelayanan Bukan Dasar
Produksi Perikanan Budidaya	Ton	425,82	430,08	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	Pelayanan Bukan Dasar
URUSAN PARIWISATA					
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	<i>n.a</i>	0	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Pelayanan Bukan Dasar
Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten /Kota	%	-61,27	44,11	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Pelayanan Bukan Dasar
Tingkat Hunian Akomodasi	%	<i>n.a</i>	10	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Pelayanan Bukan Dasar
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	1,44	1,46	Dinas Pariwisata, Pemuda dan	Pelayanan

Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Rencana Target Tahun 2021	Penanggung Jawab	Keterangan
				Olahraga	Bukan Dasar
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,28	0,2	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Pelayanan Bukan Dasar
URUSAN PERTANIAN					
Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	5,67	5,36	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Pelayanan Bukan Dasar
Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	31,25	29,5	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Pelayanan Bukan Dasar
URUSAN PERDAGANGAN					
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	0	0	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	Pelayanan Bukan Dasar
Persentase kinerja realisasi pupuk	%	36,06	25,99	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	Pelayanan Bukan Dasar
Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	76,54	77,21	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	Pelayanan Bukan Dasar
URUSAN PERINDUSTRIAN					
Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	%	40	42,86	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	Pelayanan Bukan Dasar
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	100	100	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	Pelayanan Bukan Dasar
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan	%	100	100	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	Pelayanan Bukan Dasar

Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Rencana Target Tahun 2021	Penanggung Jawab	Keterangan
oleh instansi terkait					
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	<i>nihil</i>	0	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	Pelayanan Bukan Dasar
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	%	0	0	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	Pelayanan Bukan Dasar
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini				Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	Pelayanan Bukan Dasar
1. Keterkinian informasi industri:					
- tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%)	%	0	0		
- Tersedianya nformasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (20%)	%	0			
- Tidak menyampaikan informasi industri (0%)	%	0	0		
2. Keterlengkapan informasi industri:					
- Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)	%	0	0		
- Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)	%	0	0		
URUSAN TRANSMIGRASI					

Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Rencana Target Tahun 2021	Penanggung Jawab	Keterangan
URUSAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
PERENCANAAN DAN KEUANGAN					
Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Poin	31,75	31,75	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Fungsi Penunjang
Rasio PAD	Poin	1,33	1,33	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Fungsi Penunjang
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	level	Level 3	Level 3	Inspektorat	Fungsi Penunjang
Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level	Level 2	Level 2	Inspektorat	Fungsi Penunjang
Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Poin	0,66	0,66	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Fungsi Penunjang
Opini Laporan Keuangan	Poin	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Fungsi Penunjang
PENGADAAN					
Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	Sekretariat Daerah Bagian Barang dan Jasa	Fungsi Penunjang
Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	9,82	9,38	Sekretariat Daerah Bagian Barang dan Jasa	Fungsi Penunjang
Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	97,97	97	Sekretariat Daerah Bagian Barang dan Jasa	Fungsi Penunjang

Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Rencana Target Tahun 2021	Penanggung Jawab	Keterangan
KEPEGAWAIAN					
Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	6,43	7,06	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Fungsi Penunjang
Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	0,08	0,25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Fungsi Penunjang
Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	1,00	0,55	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Fungsi Penunjang
MANAJEMEN KEUANGAN					
Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	0,04	0,04	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Fungsi Penunjang
Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	0,2	0,2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Fungsi Penunjang
Assets Management		Ya	Ya	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Fungsi Penunjang
Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	4,99	4,99	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Fungsi Penunjang
TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK					
Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk	%	n.a	100	Dinas Kominfo/ DPMPTSP/ Kecamatan	Fungsi Penunjang

Outcome	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Rencana Target Tahun 2021	Penanggung Jawab	Keterangan
pelayanan					
Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	Fungsi Penunjang

Sumber Data Bapelitbangda dan Bagian Pemerintahan Setda

1.1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Soppeng menyusun penerapan standar pelayanan minimal menetapkan Satuan Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan dasar. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor : 29 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020, maka pelayanan dasar Adapun satuan perangkat daerah yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1.1.3.1 Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan

Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan yang pelaksanaan teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan. Adapun target capaian untuk pelaksanaan pelayanan dasar pada Bidang Pendidikan yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 di jelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1.16
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
Tahun 2020

NO	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET	KETERANGAN
1	Pendidikan Dasar	Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100 %	
2	Pendidikan Kesetaraan	Program Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang belum	100 %	

			menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		
		Program Pendidikan Non Formal	Jumlah yang mengikuti Pendidikan Kesetaraan, (orang)	0 %	
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	

1.1.3.2 Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang pelaksanaan teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Adapan target capaian untuk pelaksanaan pelayanan dasar pada Bidang Kesehatan di jelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1.17
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
Tahun 2020

NO	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET	KETERANGAN
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Melahirkan	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Program Pelayanan Bayi Baru Lahir, Balita dan Anak Usia Pendidikan Dasar serta Pelayanan Kesehatan Usia lanjut	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Program Pelayanan Bayi Baru Lahir, Balita dan Anak Usia Pendidikan Dasar serta Pelayanan Kesehatan Usia lanjut	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	
4.	Pelayanan kesehatan balita	Program Pelayanan Bayi Baru Lahir, Balita dan Anak Usia Pendidikan Dasar serta Pelayanan Kesehatan Usia lanjut	Jumlah Balita yang Mendapatkan layanan kesehatan	100 %	
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Program Pelayanan Bayi Baru Lahir, Balita dan Anak Usia Pendidikan Dasar serta Pelayanan	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang	100 %	

NO	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET	KETERANGAN
		Kesehatan Usia lanjut	mendapatkan layanan kesehatan		
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Program Pelayanan Kesehatan Usia Produktif dan Pencegahan Penyakit	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Program Pelayanan Bayi Baru Lahir, Balita dan Anak Usia Pendidikan Dasar serta Pelayanan Kesehatan Usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Program Pelayanan Bayi Baru Lahir, Balita dan Anak Usia Pendidikan Dasar serta Pelayanan Kesehatan Usia lanjut	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	

1.1.3.3 Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum

Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang pelaksanaan teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.

Adapun target capaian untuk pelaksanaan pelayanan dasar pada Bidang Pekerjaan Umum yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 di jelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1.18
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum
Tahun 2020

NO	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pembangunan sarana dan prasarana air bersih	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan dan Air Limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %

1.1.3.4 Pelayanan Dasar Bidang Perumahan dan Pemukiman

Pelayanan Dasar Bidang Perumahan dan Pemukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman yang pelaksanaan teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun target capaian untuk pelaksanaan pelayanan dasar pada Bidang Perumahan dan Pemukiman yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 di jelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1.19
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan dan Pemukiman
Tahun 2020

NO	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota		Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 %

1.1.3.5 Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan pada 2 satuan perangkat daerah yaitu :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pelaksanaan teknis standar pelayanan minimal berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Bidang Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun target capaian untuk pelaksanaan pelayanan dasar pada Bidang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan RPJMD 2016-2021 di jelaskan pada tabel berikut:

Adapun target capaian untuk pelaksanaan pelayanan dasar pada Bidang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 di jelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1.20
Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Bidang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2020

NO	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Program tanggap darurat dan logistik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %

2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pelaksanaan teknis pada Bidang Pemadam Kebakaran adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal pada Sub Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten/Kota, sedangkan pada pelaksanaan standar pelayanan minimal pada Bidang Polisi Pamong Praja berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Adapun target capaian untuk pelaksanaan pelayanan dasar pada Bidang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan RPJMD 2016-2021 di jelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1.21
Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Bidang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Tahun 2020

NO	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	100%
	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	100%

NO	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET
	korban kebakaran	dan Evakuasi korban kebakaran		

1.1.3.6 Pelayanan Dasar Bidang Sosial

Pelayanan Dasar Bidang Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang pelaksanaan teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Adapun target capaian untuk pelaksanaan pelayanan dasar pada Bidang Perumahan dan Pemukiman yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 di jelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1.22
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan dan Pemukiman
Tahun 2020

NO	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Daerah	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%

Pelaksanaan pelayanan dasar di Pemerintahan Daerah Kabupaten Soppeng telah dilaksanakan dan untuk memperkuat pelaksanaan pelayanan dasar tersebut, sudah ada rancangan Peraturan Bupati Soppeng tentang Penerapan Standar Pelayanan Dasar yang mulai dilaksanakan pada tahun 2021. Untuk sementara ini masih berdasar dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dalam menilai pemenuhan standar pelayanan minimal.

BAB. II
CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan gambaran umum penyelenggaraan pemerintahan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, pendapatan per kapita, menekan angka kemiskinan dan pengangguran, dan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Evaluasi Dan Penyelenggaraan Pemerintahan, capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah diuraikan sebagai berikut :

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dengan pengukuran perbandingan dari IPM, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan ketimpangan pendapatan sebagai perbandingan perkembangan ekonomi nasional. Dengan menggunakan capaian kinerja makro, Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengukur kinerja pembangunan Daerah dibidang pengembangan peningkatan SDM di Kabupaten Soppeng yang menggambarkan capaian capaian kinerja makro Kabupaten Soppeng 2020-2021 pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Capaian Makro Kabupaten Soppeng

NO	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Makro Tahun 2020	Capaian Kinerja Makro Tahun 2021	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	68,67	68,99	0,005
2	Angka Kemiskinan	7,59	7,53	-0,008
3	Angka Pengangguran	4,42	3,92	-0,113
4	Pertumbuhan Ekonomi	2,19	6,15	1,808 **
5	Pendapatan Perkapita	50,10	52,75	0,053 **
6	Ketimpangan Pendapatan (gini Ration)	0,40	-	0,40 -

Keterangan :
** proyeksi sementara
*** proyeksi tidak berubah/ proyeksi masih tahun lalu
- data belum tersedia

Pada tahun 2022 indeks pembangunan manusia (IPM) sebanyak 68,99% atau naik 0,005% dari tahun 2021 yang hanya 68,67%, yang menandakan angka harapan putus sekolah menurun dan angka harapan hidup meningkat, serta dapat menekan angka kemiskinan untuk tidak naik dari 7,59% menjadi 7,58% atau turun 0,008% di tahun 2021. Angka pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2021 angka sementara meningkat 1,808% atau 6,15% dari tahun 2020 yang hanya 2,19% sehingga mempengaruhi pendapatan daerah dan juga mempengaruhi tingkat pendapatan perkapita yang naik 0,053%. Pada ketimpangan pendapatan(gini Ration) tahun 2021 data belum dirilis sampai selesai penyusunan LPPD Tahun 2021 ini dirampungkan sehingga data sementara masih berlaku tahun 2020 yaitu 0,40%.

2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan terbagi atas 2 (dua) urusan yaitu Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Penunjang Pemerintahan

Urusan tersebut yang dilaksanakan oleh organinisasi perangkat daerah diuraikan sebagai berikut :

2.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Dalam pelaksanaannya urusan pemerintahan wajib terbagi atas 2 urusan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng pada Tahun 2022 Urusan Pemerintahan Wajib dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
SKPD Pelaksana Urusan Wajib Dan Urusan Pilihan

NO	NAMA URUSAN	SKPD PELAKSANA
A	URUSAN WAJIB	
1	PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2	KESEHATAN	Dinas Kesehatan
3	PEKERJAAN UMUM	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4	PERUMAHAN RAKYAT	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
5	TRANTIBUN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
6	SOSIAL	Dinas Sosial
7	TENAGA KERJA	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

9	PANGAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
10	PERTANAHAN	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
11	LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
12	ADM. KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
13	PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
15	PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi Dan Informatika
17	KOPERASI DAN UKM	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Ukm
18	PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
20	STATISTIK	Dinas Komunikasi Dan Informatika
21	PERSANDIAN	Dinas Komunikasi Dan Informatika
22	KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
23	PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
24	KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
B	URUSAN PILIHAN	
1	PERIKANAN	Dinas Peternakan , Kesehatan Hewan Dan Perikanan
2	PARIWISATA	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
3	PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan Dinas Peternakan , Kesehatan Hewan Dan Perikanan
4	PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Ukm
5	PERINDUSTRIAN	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Ukm
6	TRANSMIGRASI	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

2.2.2 Urusan Penunjang Pemerintahan

Urusan Penunjang Pemerintahan adalah Urusan Satuan Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan bagi perangkat daerah lainnya dalam melaksanakan fungsi perencanaan, keuangan, penelitian, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan serta pengawasan. Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng pada Tahun 2021 Satuan Kerja Perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Penunjang Pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Inspektorat
7. Kecamatan
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Indikator Kinerja Kunci Keluaran adalah proses kegiatan yang dibebankan pada perangkat daerah dalam memenuhi target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun, adapun uraian hasil yang dicapai oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Soppeng pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

2.2.3.1 Urusan Wajib

Pelaksanaan Urusan Wajib sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan wajib terbagi atas :

- **Urusan Wajib Pelayanan Dasar**, yaitu Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah dalam pemenuhan pelayanan dasar warga negara yang ada di daerah.
- **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar** Yaitu, Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah dalam menunjang pelaksanaan pelayanan urusan wajib pelayanan dasar yang ada di daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 dalam melaksanakan urusan tersebut, diuraikan sebagai berikut:

1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

A. URUSAN PENDIDIKAN

Pada pelaksanaan urusan pelayanan dasar pada Bidang Pendidikan pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan dasar pada Urusan Pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan anggaran Rp 408.604.150.323 dan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan kegiatan terdiri atas:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b) Program Pengelolaan Pendidikan

Pada Program Pengelolaan Pendidikan, pelaksanaan kegiatan terdiri atas:

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

c) Program Pengembangan Kurikulum

Pada Program Pengembangan Kurikulum, pelaksanaan kegiatan terdiri atas:

- Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

d) Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Pada Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, pelaksanaan kegiatan terdiri atas:

- Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Pendidikan yang dilaksnakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
IKK Output dan IKK Outcome
Urusan Pendidikan

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
A.1	Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	112,62%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Data Jumlah Anak Uaia 5-6 Tahun yang susah tamat atau sedang belajar di asatuan PAUD Tahun 2021 sebanyak 3435 jiwa - Data pembagi dari data penduduk usia 5-6 tahun semester 1 tahun 2021 bersumber dari Dinas DUKCAPIL sebanyak 3060 jiwa
	1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi (Negeri dan Swasta)	103 PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang teragreditasi diuraikan sebagai berikut: ✓ Agreditasi A = 8 ✓ Agreditasi B = 64 ✓ Agreditasi C = 31
	2. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari PEMDA	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data tidak ada
	3. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	779 peserta didik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	daftar peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan
	4. Jumlah kebutuhan pendidik PAUD (Negeri	516 Kebutu	Dinas Pendidikan dan	daftar sarana prasarana pendidikan PAUD

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	dan Swasta)	han	Kebudayaan	
	5. Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tidak ada data jumlah pendidik PAUD
	6. Jumlah Pendidik PAUD yang memiliki Ijazah D IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan PAUD	267 Orang Pendidik PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Jumlah Pendidik PAUD yang memiliki Ijazah atau sertifikat pendidik adalah sebagai berikut: ✓ Diploma = ✓ Sarjana = ✓ Sertifikat pendidik =
	7. Jumlah Kepala Sekolah PAUD ijazah D-IV atau S.1 bersertifikat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD nonformal dari lembaga pemerintah	132 Kepala Sekolah PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Jumlah Kepala Sekolah yang memiliki Ijazah atau sertifikat pendidik adalah sebagai berikut: ✓ Diploma = ✓ Sarjana = ✓ Sertifikat pendidik =
A.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	107,48%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Data tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi di tingkat Pendidikan dasar sebanyak 18788 jiwa - Data pembagi dari data penduduk usia 7-12 tahun semester 1 tahun 2021 bersumber dari Dinas DUKCAPIL sebanyak 17480 jiwa
	1. Jumlah Satuan Pendidikan Dasar SD yang terakreditasi (Negeri dan Swasta)	252	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Jumlah Satuan Pendidikan Dasar SD yang terakreditasi diuraikan sebagai berikut: ✓ Agreditasi A = 95 ✓ Agreditasi B = 154 ✓ Agreditasi C = 3
	2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari PEMDA	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari PEMDA
	3. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	17.743	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Semua peserta didik dibebaskan biaya pendidikan
	4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	2.277	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar
	5. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	2.590	Dinas Pendidikan dan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
			Kebudayaan	
	6. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	1.012	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar
	7. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	387	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Jumlah pendidik PAUD di Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut: ✓ Negeri = ✓ Swasta =
	8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2.417	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik
	9. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	225	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah
	10. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	375	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat
A.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama,:	120,62%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Data Jumlah anak usia 13-15 tahun yang tamat dan sedang belajar di sekolah menengah pertama sebanyak 9004 jiwa - Data pembagi dari data penduduk semester 1 tahun 2021 bersumber dari Dinas DUKCAPIL sebanyak 7465 jiwa
	1. Jumlah Satuan Pendidikan Dasar SMP yang terakreditasi (Negeri dan Swasta) adalah sebagai berikut:	38	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Jumlah Satuan Pendidikan Dasar SMP yang terakreditasi diuraikan sebagai berikut: ✓ Agreditasi A = 26 ✓ Agreditasi B = 9 ✓ Agreditasi C = 3
	2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	data tidak ada
	3. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah	5.982	Dinas Pendidikan dan	Daftar peserta didik SMP yang menerima

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Kebudayaan	pembebasan biaya pendidikan
	4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertam	380	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data sarana prasarana Pendidikan SMP
	5. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1221	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data guru SMP
	6. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	152	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data sarana dan prasaran pendukung tenaga pendidikan SMP
	7. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	155	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Guru SMP
	8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.182	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Guru SMP yang berijazah D IV dan S1 dan sertifikat guru SMP
	9. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekola	33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Kepala Sekolah PAUD ijazah D-IV atau S.1 bersertifikat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk SMP formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan SMP nonformal dari lembaga pemerintah
	10. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	136	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Daftar tenaga/staf administrasi perkantoran di sekolah SMP
A.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	8,78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Data warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan pendidikan kesetaraan sebanyak 384 jiwa - Data pembagi dari data penduduk semester 1 tahun 2021 bersumber dari Dinas DUKCAPIL sebanyak 4376 jiwa
	1. Jumlah satuan	5	Dinas Pendidikan dan	Data Jumlah Satuan

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	pendidikan kesetaraan terakreditasi		Kebudayaan	Pendidikan kesetaraan yang terakreditasi diuraikan sebagai berikut: ✓ Agreditasi A = 0 ✓ Agreditasi B = 9 ✓ Agreditasi C = 3
	2. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data tidak ada
	3. Jumlah peserta didik ppendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	935	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	daftar peserta didik kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan
	4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	daftar sarana prasarana pendidikan kesetaraan
	5. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Guru kesetaraan
	6. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	54	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Guru Kesetaraan yang berijazah D IV dan S1
	7. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data tidak perlu di isi
	8. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D- IV atau S1	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data tidak perlu di isi

- 3) Prestasi/penghargaan yang diraih
- Pada Tahun 2021 tidak ada penghargaan yang diraih terkait urusan pendidikan

B. URUSAN KESEHATAN

Pada pelaksanaan urusan pelayanan dasar pada Bidang Kesehatan pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, dapat di lihat sebagai berikut:

1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan dasar pada Urusan Kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Kesehatan dengan anggaran Rp 223.432.369.527 dan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
- Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
- Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

d) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Pada Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - Kegiatan Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
 - Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
 - Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
- e) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:
- Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
IKK Output dan IKK Outcome
Urusan Kesehatan

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
B.1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,13%	RSUD Latemmamala Kab. Soppeng	Daya tampung RSUD Latemmamala sebanyak 300 Jiwa dari Jumlah keseluruhan penduduk semester 2 (dua) tahun 2022 sebanyak 237875 jiwa
	1. Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	1 RS	RSUD Latemmamala Kab. Soppeng	- Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 8/J.09/PTSP/2020 - SK Gubernur Nomor 955/II/TAHUN 2020
B.2	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya.	100%	RSUD Latemmamala Kab. Soppeng	Akreditasi yang didapat Paripurna Bintang 5 (lima)

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	1. Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	1 RS	RSUD Latemmamala Kab. Soppeng	keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 8/J.09/PTSP/2020 tentang Izin Operasional RSUD Latemmamala Soppeng, merupakan dasar Rumah sakit yang dibina dan dipersiapkan akreditasinya
B.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	Dinas Kesehatan	Berdasarkan Perbup No.43 Tahun 2018 tentang Persalinan di Fasilitas Kesehatan sehingga tidak ada Ibu hamil yang tidak terlayani. Jumlah Ibu Hamil yang terdaftar dan terlayani sebanyak 2574.
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	245.353 persediaan	Dinas Kesehatan	Berdasarkan Perbup No.43 Tahun 2018 tentang Persalinan di Fasilitas Kesehatan, sehingga pemenuhan dukungan logistic kesehatan bagi Ibu Hamil terjamin dengan baik.
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	51	Dinas Kesehatan	Berdasarkan Perbup No.43 Tahun 2018 tentang Persalinan di Fasilitas Kesehatan, tingkat pemenuhan pelayanan kesehatan pada
B.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	Dinas Kesehatan	- Data Ibu bersalin di Kabupaten Soppeng Tahun 2021 sebanyak 2811 jiwa Pembagi jumlah Ibu bersalin di Kabupaten Soppeng tahun 2021 sebanyak 2811 jiwa - Capaian persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan di dukung dengan Perbup No.43 Tahun 2018 tentang Persalinan di Fasilitas Kesehatan
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	8196 persediaan	Dinas Kesehatan	Data Logistik (Obat-obatan) untuk ibu bersalin
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	51	Dinas Kesehatan	Data Petugas yang melayani ibu bersalin termasuk di puskesmas, polindes dan pustu adaah sebagai berikut: ✓ Dokter = 17 ✓ Bidan = 17 ✓ Perawat =17

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
B.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	Dinas Kesehatan	- Data bayi baru lahir 0-28 hari di Kabupaten Soppeng Tahun 2021 sebanyak 2790 jiwa, Pembagi jumlah bayi baru lahir 0-28 hari di Kabupaten Soppeng tahun 2021 sebanyak 2790 - Capaian Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di dukung dengan Perbup No.43 Tahun 2018 tentang Persalinan di Fasilitas Kesehatan
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	22104 persediaan	Dinas Kesehatan	Data Logistik (Obat-obatan) untuk bayi baru lahir
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	51 petugas	Dinas Kesehatan	Data Petugas yang melayani bayi baru lahir termasuk di puskesmas, polindes dan pusku adaah sebagai berikut: ✓ Dokter = 17 ✓ Bidan = 17 ✓ Perawat = 17
B.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	- 'Data balita berusia 12-59 bulan tahun 2021 di Kabupaten Soppeng Tahun 2021 sebanyak 9846 jiwa dan Pembagi jumlah balita berusia 12-59 bulan di Kabupaten Soppeng tahun 2021 sebanyak 9846 - Capaian Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar di dukung dengan Perbup No.43 Tahun 2018 tentang Persalinan di Fasilitas Kesehatan
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	81846 persediaan	Dinas Kesehatan	Data Logistik (Obat-obatan) untuk balita
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan balita sesuai standar	51 petugas	Dinas Kesehatan	Data Petugas yang melayani kesehatan balita sesuai standar termasuk di puskesmas, polindes dan pusku adaah sebagai berikut: ✓ Dokter = 17 ✓ Perawat = 17 ✓ Bidan = 17

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
				✓ Gizi = 17
B.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	19,85%	Dinas Kesehatan	Data anak berusia 7-15 tahun 2021 yang mendapatkan pelayanan di Kabupaten Soppeng Tahun 2021 sebanyak 5637 jiwa dan Pembagi jumlah anak berusia 7-15 semester 1 di Kabupaten Soppeng tahun 2021 yang bersumber dari DUKCAPIL sebanyak 28640 jiwa
	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	16911 persediaan	Dinas Kesehatan	Data Logistik (Obat-obatan) untuk anak usia pendidikan dasar untuk anak berusia 7-15
	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	85 petugas	Dinas Kesehatan	Data Petugas yang melayani kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar termasuk di puskesmas, polindes dan pustu adaah sebagai berikut: ✓ Dokter = 17 ✓ Perawat = 17 ✓ Bidan = 17 ✓ Gizi = 17 ✓ Kesmas = 17
B.8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	51,86%	Dinas Kesehatan	Data orang usia 15-59 tahun 2021 yang mendapatkan pelayanan di Kabupaten Soppeng Tahun 2021 sebanyak 76987 jiwa dan Pembagi warga negara usia 15-59 semester 2 di Kabupaten Soppeng tahun 2021 yang bersumber dari DUKCAPIL sebanyak 148451 jiwa
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	167106 persediaan	Dinas Kesehatan	Data Logistik (Obat-obatan) untuk anak usia pendidikan dasar untuk skrening warga negara usia 15-59
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	85 petugas	Dinas Kesehatan	Data Petugas yang melayani skrining kesehatan sesuai standar termasuk di puskesmas, polindes dan pustu adaah sebagai berikut: ✓ Dokter = 17 ✓ Perawat = 17 ✓ Bidan = 17 ✓ Gizi = 17 ✓ Kesmas = 17
B.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas	51,16%	Dinas Kesehatan	Data orang usia 60 tahun keatas tahun 2021 yang

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			mendapatkan pelayanan di Kabupaten Soppeng Tahun 2021 sebanyak 20317 jiwa dan Pembagi warga negara usia 60 tahun keatas di Kabupaten Soppeng tahun 2021 yang bersumber dari DUKCAPIL sebanyak 39710 jiwa
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	60961 persediaan	Dinas Kesehatan	Data Logistik (Obat-obatan) untuk anak usia pendidikan dasar untuk skrening warga negara usia 60 tahun keatas
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	85 petugas	Dinas Kesehatan	Data Petugas yang melayani skrining kesehatan sesuai standar termasuk di puskesmas, polindes dan pustu adaah sebagai berikut: ✓ Dokter = 17 ✓ Perawat = 17 ✓ Bidan = 17 ✓ Gizi = 17 ✓ Kesmas = 17
B.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, dengan rumus sebagai berikut :	100%	Dinas Kesehatan	Data penderita hipertensi di Kabupaten Soppeng tahun 2021 sebanyak 4170 jiwa dan pembangi jumlah pasien hipertensi di Kabupaten Soppeng sebanyak 4170 jiwa
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	68 persediaan	Dinas Kesehatan	Data Logistik (Obat-obatan) untuk anak usia pendidikan dasar untuk penderita hipertensi
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	85 petugas	Dinas Kesehatan	Data Petugas yang melayani skrining kesehatan sesuai standar untuk hipertensi termasuk di puskesmas, polindes dan pustu adaah sebagai berikut: ✓ Dokter = 17 ✓ Perawat = 17 ✓ Bidan = 17 ✓ Gizi = 17 ✓ Kesmas = 17
B.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	Data penderita DM di Kabupaten Soppeng tahun 2021 sebanyak 1234 dan pembanginya data jumlah penderita DM di Kabupaten Soppeng sebnyak 1234 jiwa
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan	2510 logistik	Dinas Kesehatan	Data Logistik (Obat-obatan) untuk anak usia pendidikan

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	yang tersedia			dasar untuk penderita DM
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	85 persediaan	Dinas Kesehatan	Data Petugas yang melayani skrining kesehatan sesuai standar untuk hipertensi termasuk di puskesmas, polindes dan pustu adaah sebagai berikut: ✓ Dokter = 17 ✓ Perawat = 17 ✓ Bidan = 17 ✓ Gizi = 17 Kesmas = 17
B.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar, dengan rumus sebagai berikut :	100%	Dinas Kesehatan	Data penderita ODGJ tahun 2021 yang mendapatkan pelayanan di Kabupaten Soppeng Tahun 2021 sebanyak 424 jiwa dan Pembagi penderita ODGJ di Kabupaten Soppeng tahun 2021 sebanyak 242 jiwa
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	68 persediaan	Dinas Kesehatan	Data Logistik (Obat-obatan) untuk anak usia pendidikan dasar untuk penderita ODGJ
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	34 petugas	Dinas Kesehatan	Data Petugas yang melayani ODGJ termasuk sebagai berikut: ✓ Dokter = 17 ✓ Perawat = 17
B.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	Data penderita TBC tahun 2021 yang mendapatkan pelayanan di Kabupaten Soppeng Tahun 2021 sebanyak 595 jiwa dan Pembagi penderita TBC di Kabupaten Soppeng tahun 2021 sebanyak 595 jiwa
	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	502745 persediaan	Dinas Kesehatan	Data Petugas yang melayani skrining kesehatan sesuai standar termasuk di puskesmas, polindes dan pustu adaah sebagai berikut: ✓ Dokter = 17 ✓ ATLM = 17 ✓ Penata Rontgen = 2 ✓ Perawat = 17 ✓ Kesmas = 17
	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	70 petugas	Dinas Kesehatan	Data Petugas yang melayani skrining kesehatan sesuai standar termasuk di puskesmas, polindes dan pustu adaah

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
				sebagai berikut: ✓ Dokter = 17 ✓ ATLM = 17 ✓ Penata Rontgen = 2 ✓ Perawat = 17 Kesmas = 17
B.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	Data penderita HIV tahun 2021 yang mendapatkan pelayanan di Kabupaten Soppeng Tahun 2021 sebanyak 3103 jiwa Pembagi penderita HIV di Kabupaten Soppeng tahun 2021 sebanyak 3103 jiwa
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	23034 persediaan	Dinas Kesehatan	Data Logistik (Obat-obatan) untuk anak usia pendidikan dasar untuk penderita HIV
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	85 petugas	Dinas Kesehatan	Data Petugas yang melayani skrining kesehatan sesuai standar untuk HIV adalah sebagai berikut: ✓ Dokter = 17 ✓ Perawat = 17 ✓ Bidan = 17 ✓ Gizi = 17 Kesmas = 17

- 3) Prestasi/penghargaan yang diraih
- Tidak ada Penghargaan di Tahun 2021

C. URUSAN PEKERJAAN UNUM DAN PENATAAN RUANG

Pada pelaksanaan urusan pelayanan dasar pada Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dapat di lihat sebagai berikut:

- 1) Program Kegiatan
- Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan dasar pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerrintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan anggaran Rp 129.683.080.391 dan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b) Program Pengelolaan Sumber Daya Air
- Pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:
- Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- c) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- Pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:
- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
- d) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- Pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:
- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/kota
- e) Program Penataan Bangunan Gedung
- Pada Program Penataan Bangunan Gedung, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:
- Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
- f) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- Pada Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:
- Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
- g) Program Penyelenggaraan Jalan
- Pada Program Penyelenggaraan Jalan, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 - h) Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Pada Program Pengembangan Jasa Konstruksi, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 - Penerbitan Izin Usaha Kecil Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
 - i) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Pada Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Indikator Kinerja Kunci
- Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
IKK Output dan IKK Outcome
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
C.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	9,27%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data Kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi dan Data keseluruhan kawasan pemukiman yang rawan banjir
	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	717,54 Ha	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data keseluruhan kawasan pemukiman yang rawan banjir yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
	2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	62388,6 meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data panjang sungai kawasan pemukiman yang rawan banjir yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
	3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak memiliki garis pantai surat keterangan nomor 034/LPPD/PI-PR/II/2022

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	kabupaten/kota (HA)			
	4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak memiliki garis pantai surat keterangan nomor 035/LPPD/PI-PR/II/2022
	5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/loa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	surat keterangan nomor 036/LPPD/PI-PR/II/2022
	6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	surat keterangan nomor 037/LPPD/PI-PR/II/2022
	7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota, sebagai berikut :	8277 meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data Sarana dan Prasarana pengamanan sungai milik PEMDA
	1) Bangunan perkuatan tebing (m)	5150 meter		
	2) Tanggul sungai (m)	3097 meter		
	3) Kanal banjir (m)	0		
	4) Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit)	30 meter		
	5) Pompa banjir (Unit dan Kapasitas)	0		
	6) Polder/Kolam Retensi (Unit)	0		
	7) Breakwater (m)	0		
	8) Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m)	0		

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
C.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	n.a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak memiliki garis pantai surat keterangan nomor 038/LPPD/PI-PR/II/2022
	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	n.a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak memiliki garis pantai surat keterangan nomor 038/LPPD/PI-PR/II/2022
	2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	n.a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak memiliki garis pantai surat keterangan nomor 038/LPPD/PI-PR/II/2022
	3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	n.a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak memiliki garis pantai surat keterangan nomor 038/LPPD/PI-PR/II/2022
	4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	n.a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak memiliki garis pantai surat keterangan nomor 038/LPPD/PI-PR/II/2022
	5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/ tata pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	n.a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak memiliki garis pantai surat keterangan nomor 038/LPPD/PI-PR/II/2022
	6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/ rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	n.a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak memiliki garis pantai surat keterangan nomor 038/LPPD/PI-PR/II/2022
	7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota, sebagai berikut :	n.a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak memiliki garis pantai surat keterangan nomor 038/LPPD/PI-PR/II/2022
	1) Bangunan perkuatan			

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	tebing (m)			
	2) Tanggul sungai (m) 3) Kanal banjir (m) 4) Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit) 5) Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) 6) Polder/Kolam Retensi (Unit) 7) Breakwater (m)			
C.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	6,21 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data jaringan irigasi yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi, dioperasikan dan dipelihara sebanyak 6001,34 Ha dan pembagi Data Luas daerah irigasi kewenagan Kabupaten sebanyak 96666 Ha
	1. Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	65,38%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data jaringan irigasi primer di kabupaten
	2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	59,68%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data jaringan irigasi sekunder di kabupaten
	3. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	64,34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data jaringan irigasi tersier di kabupaten
C.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	98,02%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data rumah tangga yang dapatkan layanan air minum SPAM di Kab. Soppeng diuraikan tiap kecamatan sebanyak 56492 Rumah Tangga Data Jumlah rumah di Kab. Soppeng sebanyak 57632 Rumah Tangga
	1. Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penetapan Dokumen RISPAM Kabupaten/Kota tidak terdapat data karena Perencanaan Penyusunan Dokumen RISPAM sementara diusulkan untuk dianggarkan sesuai dengan Surat Keterangan Dinas PUPR Nomor

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
				030/LPPD/PU-PR/II/2022
	2. Tersusun dan ditetapkan JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penetapan JAKSTRADA Kab/Kota tidak terdapat data karena perencanaan penyusunan JAKSTRADA sementara diusulkan untuk dianggarkan berdasarkan Surat Keterangan Dinas PUPR Nomor 031/LPPD/PU-PR/II/2022
	3. Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM	1 BUMD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data BUMD yang mengelolah SPAM yaitu PDAM Kab.Soppeng
	4. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak ada izin yang dikeluarkan BU untuk SPAM Surat Keterangan Dinas PU-PR Nomor 033/LPPD/PI-PR/II/2022
	5. Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data tidak ada
C.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.	99,95%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data rumah tangga yang memiliki akses pengolahan berupa cupluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah oleh PLT + jumlah rumah memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPAL dan Data Jumlah rumah di Kab. Soppeng
	1. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S	57260 Rumah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data SPALD-S
	2. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD T	345 Rumah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data SPALD-T
	3. Jumlah rumah dengan akses unit	40231 Rumah	Dinas Pekerjaan	Data rumah tangga yang memiliki akses pengolahan

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T		Umum dan Penataan Ruang	berupa cupluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah oleh PLT + jumlah rumah memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPAL dan Data Jumlah rumah di Kab. Soppeng
	4. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	32 rumah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data Jumlah rumah yang menerima layanan jasa penedotan lumpur tinja tahun 2021
	5. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	32 rumah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data Jumlah rumah yang menerima layanan jasa penedotan lumpur tinja tahun 2021
	6. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	32 rumah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data Jumlah rumah yang menerima layanan jasa penedotan lumpur tinja tahun 2021
	7. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tidak terdapat data surat keterangan nomor 026/LPPD/PU-PR/II/2021
	8. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tidak terdapat data surat keterangan nomor 039/LPPD/PU-PR/II/2021
	9. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tidak terdapat data surat keterangan nomor 027/LPPD/PU-PR/II/2021
	10. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tidak terdapat data surat keterangan nomor 040/LPPD/PU-PR/II/2021
	11. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	75%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dokumentasi penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja
	12. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dokumentasi kapasitas pengelolaan lumpur tinja yang tersedia dengan kapasitas 9 m ³ /hari

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	13. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak terdapat data penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPAL-D surat keterangan Dinas PU-PR nomor 028/LPPD/PI-PR/II/2022
	14. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak terdapat data rumah yang tangki septiknya yang sudah disedot surat keterangan Dinas PU-PR nomor 029/LPPD/PI-PR/II/2022
C.6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai dengan peruntukannya sebanyak 392 izin pembagi Data Jumlah IMB yang berlaku seabanyak 392 permohonan
	1. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	11,99%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah IMB yang diberikan PEMD tahun 2021
	2. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	392	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting
	3. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	ADA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perda Kab. Soppeng Nomor 3 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung
	4. Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	TIDAK ADA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak penetapan keputusan Bupati surat keterangan Dinas PU-PR nomor 023/LPPD/PI-PR/II/2022
	5. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak ketetapan bangunan gedung yang ditetapkan surat keterangan Dinas PU-PR nomor 024/LPPD/PI-PR/II/2022
	6. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak ketetapan bangunan gedung yang ditetapkan surat keterangan nomor 025/LPPD/PI-PR/II/2022
	7. Jumlah bangunan gedung negara milik	2952 unit	Dinas Pekerjaan	Data Jumlah bangunan gedung negara milik

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	Pemerintah Kab/Kota		Umum dan Penataan Ruang	Pemerintah Kab/Kota
	8. Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	2952	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat
C.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	57,32%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	- Data jalan kewenangan kabupaten yang mantap sebanuak 516,03 Km - Data Panjang jalan keseluruhan Kabupaten/Kota sebanyak 900,34
	1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	898881 km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SK BUPATI Nomor 882/IX/2017 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten dan Jalan Desa Di Kabupaten Soppeng
	2. Panjang jalan yang dibangun	1,45 km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data Panjang jalan yang dibangun
	3. Panjang jembatan yang dibangun	41 meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data Panjang jembatan yang dibangun
	4. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	4,26 km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)
	5. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak ada jembatang yang diganti/dilebarkan surat keterangan Dinas PU-PR nomor 020/LPPD/PI-PR/II/2022
	6. Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak ada jembatang yang diganti/dilebarkan surat keterangan Dinas PU-PR nomor 021/LPPD/PI-PR/II/2022
	7. Panjang jembatan yang direhabilitasi	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak ada jembatang yang diganti/dilebarkan surat keterangan nomor 022/LPPD/PI-PR/II/2022
	8. Panjang jalan yang dipelihara	11,81 km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data Panjang jalan yang dipelihara

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	9. Panjang jembatan yang dipelihara	58,4 meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data Panjang jembatan yang dipelihara
C.8.1	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi, dengan rumus sebagai berikut :	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak ada data Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi surat keterangan Dinas PU-PR nomor 001/LPPD/PI-PR/II/2022
	1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak ada data jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten surat keterangan Dinas PU-PR nomor 002/LPPD/PI-PR/II/2022
	2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	74 Tenaga kerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah Kab. Soppeng
	3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota (<i>dibuktikan dengan sertifikat</i>)	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak ada data jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten surat keterangan Dinas PU-PR nomor 003/LPPD/PI-PR/II/2022
	4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	2 kegiatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dokumentasi kegiatan pembinaan jasa konstruksi (pelatihan/bintek) yang diselenggarakan oleh pemerintah/lembaga lainnya di Kab. Soppeng Yaitu : ✓ Pembekalan dan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi ✓ Pelatihan Kerja Tukang Batu
	5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab surat keterangan nomor 004/LPPD/PI-PR/II/2022
	6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	Tidak tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN		Ruang	tahun berjalan yang bersumber dari APBN surat keterangan nomor 005/LPPD/PI-PR/II/2022
	7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya surat keterangan nomor 006/LPPD/PI-PR/II/2022
	8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala surat keterangan nomor 007/LPPD/PI-PR/II/2022
	9. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten surat keterangan nomor 008/LPPD/PI-PR/II/2022
	10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya. surat keterangan nomor 009/LPPD/PI-PR/II/2022
	11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis surat

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	operator dan teknisi/analisis			keterangan nomor 010/LPPD/PI-PR/II/2022
	12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab surat keterangan nomor 011/LPPD/PI-PR/II/2022
	13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten surat keterangan nomor 012/LPPD/PI-PR/II/2022
	14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	ADA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data Laporan Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
	15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya surat keterangan nomor 013/LPPD/PI-PR/II/2022
	16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya surat keterangan nomor 014/LPPD/PI-PR/II/2022
	17. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum pernah dilaksanakan pendataan terkait Badan Usaha yang memiliki IUJKN surat keterangan Dinas PU-PR Nomor 015/LPPD/PU-PR/II/2022
	18. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota surat keterangan Dinas PU-PR nomor

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
				016/LPPD/PI-PR/II/2022
	19. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota surat keterangan Dinas PU-PR nomor 017/LPPD/PI-PR/II/2022
	20. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota surat keterangan Dinas PU-PR nomor 018/LPPD/PI-PR/II/2022
	21. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota surat keterangan Dinas PU-PR nomor 019/LPPD/PI-PR/II/2022
	22. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data tidak da
	23. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	35 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya
	24. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan	0 kecelakaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	data kecelakaan konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasan

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	pengawasannya			
C.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi, dengan rumus sebagai berikut :		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak ada data jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten surat keterangan Dinas PU-PR nomor 002/LPPD/PI-PR/II/2022
	2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	74 Tenaga kerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah Kab. Soppeng
	3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak ada data jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten surat keterangan Dinas PU-PR nomor 003/LPPD/PI-PR/II/2022
	4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	2 kegiatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dokumentasi kegiatan pembinaan jasa konstruksi (pelatihan/bintek) yang diselenggarakan oleh pemerintah/lembaga lainnya di Kab. Soppeng Yaitu : ✓ Pembekalan dan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi ✓ Pelatihan Kerja Tukang Batu
	5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab surat keterangan nomor 004/LPPD/PI-PR/II/2022
	6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tidak tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN surat keterangan nomor 005/LPPD/PI-PR/II/2022
	7. Tersedianya data dan informasi potensi	n/a	Dinas Pekerjaan	tidak Tersedianya data dan informasi potensi pasar

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya		Umum dan Penataan Ruang	jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya surat keterangan nomor 006/LPPD/PI-PR/II/2022
	8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala surat keterangan nomor 007/LPPD/PI-PR/II/2022
	9. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten surat keterangan nomor 008/LPPD/PI-PR/II/2022
	10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya. surat keterangan nomor 009/LPPD/PI-PR/II/2022
	11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis surat keterangan nomor 010/LPPD/PI-PR/II/2022
	12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	tidak Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota		Ruang	operator/teknisi/analisis di wilayah kab surat keterangan nomor 011/LPPD/PI-PR/II/2022
	13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten surat keterangan nomor 012/LPPD/PI-PR/II/2022
	14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	ADA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data Laporan Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
	15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya surat keterangan nomor 013/LPPD/PI-PR/II/2022
	16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya surat keterangan nomor 014/LPPD/PI-PR/II/2022
	17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum pernah dilaksanakan pendataan terkait Badan Usaha yang memiliki IUJKN surat keterangan Dinas PU-PR Nomor 015/LPPD/PU-PR/II/2022
	18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota surat keterangan Dinas PU-PR nomor

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
				016/LPPD/PI-PR/II/2022
	19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota surat keterangan Dinas PU-PR nomor 017/LPPD/PI-PR/II/2022
	20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota surat keterangan Dinas PU-PR nomor 018/LPPD/PI-PR/II/2022
	21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tidak Tersedianya data Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota surat keterangan Dinas PU-PR nomor 019/LPPD/PI-PR/II/2022
	22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	35 paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya
	24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0 kecelakaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	data kecelakaan konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasan
	25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi	35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	kewenangan pengawasannya			
C.9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data Jumlah proyek yang menjadi kewenangan tanpa kecelakaan konstruksi sebanyak 0 kecelakaan dan Data jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya banyak 35 paket

- 3) Prestasi/penghargaan yang diraih
- Tidak ada prestasi/penghargaan yang diraih pada tahun 2021

D. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Pada pelaksanaan urusan pelayanan dasar pada Bidang Perumahan Rakyat pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dapat di lihat sebagai berikut:

- 1) Program Kegiatan
- Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan dasar pada Urusan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan anggaran Rp 2.957.969.311 dan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Kabupaten / Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Kabupaten / Kota, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

b) Program Pengembangan Perumahan

Pada Program Pengembangan Perumahan, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi

BAB II-35

- c) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
- Pada Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:
- Penyelesaian sengketa tanah garapan Dalam Kabupaten/Kota

- 2) Indikator Kinerja Kunci
- Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
IKK Output dan IKK Outcome
Urusan Perumahan Rakyat

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
D.1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	106,25%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	- Data Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2021 sebanyak 34 unit - Data Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2021 sebanyak 32 unit
	1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	32 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Data Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya
	2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam	287 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Data Jumlah rumah yang terkena bencana alam
	3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	287 KK	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Data Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam adalah sebagai berikut: Jumlah RT = n/a Jumlah KK = 287 Jumlah Jiwa = n/a
	4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	34 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Data Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi
	5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Tidak ada rumah korban dibangun kembali di kawasan bencana sesuai rencana aksi, surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/54/PKP/II/2022
	6. Jumlah unit rumah	0	Dinas	Tidak ada rumah korban

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi		Perumahan dan Kawasan Pemukiman	dibangun baru/relokasi sesuai rencana aksi, surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/56/PKP/II/2022
D.2	7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Tidak ada Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana, surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/55/PKP/II/2022
	8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	34 kk	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Data Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi adalah sebagai berikut: Jumlah RT = n/a Jumlah KK = 34 Jumlah Jiwa = n/a
	9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Tidak ada lokasi cadangan lahan diperuntukkan bencana alam surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/57/PKP/II/2022
	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota.	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/58/PKP/II/2022 tidak ada RT terkena relokasi program Pemda yang memenuhi kriteria penerima pelayanan surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/59/PKP/II/2022
	1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Tidak ada rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/60/PKP/II/2022
	2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Tidak ada rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM			rencana pemenuhan SPM surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/61/PKP/II/2022
	3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Tidak ada rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/62/PKP/II/2022
	4. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Tidak ada rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/63/PKP/II/2022
	5. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Tidak ada rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/64/PKP/II/2022
	6. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Tidak ada pengadaan tanah untuk relokasi rumah tangga yang terkena bencana alam surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/65/PKP/II/2021
D.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani.	n/a	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Tidak ada kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/66/PKP/II/2022
	1. Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	16,53 ha	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	SK Bupati nomor 664/X/2019
	2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	n/a	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Tidak ada unit peningkatan kualitas RTLH surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/67/PKP/II/2022
	3. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan	n/a	Dinas Perumahan dan Kawasan	Tidak ada luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	kumuh		Pemukiman	surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/68/PKP/II/2022
D.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni).	11,79%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	- Data Jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) sebanyak 6710 unit - Data Jumlah total unit rumah di Kab. Soppeng sebanyak 56899 unit
	1. Jumlah rumah di kab/kota	56899 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Data Jumlah rumah di Kab. Soppeng
	2. Jumlah unit PK RTLH	735 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Data Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH
	3. Jumlah rumah tidak layak huni	6710 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Data Jumlah rumah tidak layak huni
	4. Jumlah rumah yang tidak dihuni	n/a	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Tidak ada data rumah yang tidak dihuni surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/69/PKP/II/2022
	5. Rasio rumah dan KK	1:1,14	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	- Data Jumlah KK di Wilayah Kab. Soppeng bersumber dari DUKCAPIL sebanyak 79714 KK - Data Jumlah total unit rumah di Kab. Soppeng sebanyak 56899 unit
	6. Jumlah rumah pembangunan baru	244 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Data Jumlah rumah pembangunan baru
D.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum).	0,43%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	- Data Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU sebanyak 244 unit - Data Jumlah total unit rumah di Kab. Soppeng sebanyak 56899 unit
	1. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	46 perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Data Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU
	2. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	244 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Data Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum
	3. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan	244 unit	Dinas Perumahan	Data Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	lingkungan		dan Kawasan Pemukiman	lingkungan
	4. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	244 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Data Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)
	5. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	244 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Data Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH
	6. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	244 unit	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Data Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU
	7. Jumlah pengembang yang tersertifikasi	n/a	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Tidak ada data pengembang yang tersertifikasi surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/70/PKP/II/2022
	8. Jumlah pengembang yang terregistrasi	n/a	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Tidak ada data pengembang yang terregistrasi surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/71/PKP/II/2022
	9. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	n/a	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Tidak ada data pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/72/PKP/II/2022

E. URUSAN KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pada pelaksanaan urusan pelayanan dasar pada Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu:

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan dasar pada Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan anggaran Rp 13.714.856.046 dan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Adminsitasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Kegiatan administrasi umum perangkat daerah
 - Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
- b) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Pelaksanaan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan sebagai berikut:
- Kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan keteriban umum dalam [satu] daerah kabupaten/kota
 - Kegiatan Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota
 - Kegiatan Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil [ppns] kabupaten/kota
- c) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- Pelaksanaan Program Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, dengan kegiatan sebagai berikut:
- Kegiatan Pencegahan,Pengendalian,Pemadam,Penyelamatan,dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
IKK Output dan IKK Outcome
Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
E.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan, dengan rumus sebagai berikut :	100%	Sat.Pol.PP & Damkar	Target pada Tahun 2021 pelayanan gangguan Trantibum yang diselesaikan terlaksana sesuai target dari RPJMD. Selama tahun 2021

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
				sebanyak 92 Pengaduan yang dilaporkan dan ditangani oleh petugas Sat.Pol.PP
	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	92 pengaduan	Sat.Pol.PP & Damkar	Pada tahun 2020 tingkat pengaduan dan pelanggaran sebanyak 107 pengaduan, menurun di tahun 2021 sebanyak 92 pengaduan disbanding dengan tahun 2020 turun 16,30%
	2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	1566 orang	Sat.Pol.PP & Damkar	Pembinaan Satlinmas yang dilaksanakan oleh Sat.Pol.PP dan Damkar sebanyak 1566 orang berdasarkan SK Bupati Nomor: 01/II/2019
	3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	5 Perda/Perkada	Sat.Pol.PP & Damkar	Pada tahun 2021 penegakan perda/perkada yang dilaksanakan sebanyak 5 perda/perkada yang ditegakkan, atau naik dari tahun 2020 jumlah penegakan Perda/Perkada sebanyak 4 perda/perkada yang ditegakkan
	4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	2 Petugas	Sat.Pol.PP & Damkar	Jumlah petugas Sat.Pol.PP yang dibina menjadi PPNS sebanyak 2 orang dari jumlah keseluruhan petugas Sat.Pol.PP sebanyak 2 petugas
	5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	8 SOP	Sat.Pol.PP & Damkar	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum berkurang di banding tahun Sebelumnya menjadi 8 SOP
	6. Tersedianya sarana prasarana minimal	10 Unit	Sat.Pol.PP & Damkar	Tersedianya sarana prasarana minimal pada Sat.Pol.PP dalam pelaksanaan pelayanan minimal pada masyarakat, dengan rincin saran prasarana sebagai berikut: ✓ Gedung Kantor ✓ Alat Dalmas ✓ Handy Talky ✓ Senter Kepala ✓ Kamera Digital ✓ Kendaraa operasional roda 2 ✓ Kendaraa operasional roda 4 ✓ Kendaraa operasional roda 6 ✓ PC unit ✓ Printer

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
E.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	55,56%	Sat.Pol.PP & Damkar	Pada tahun 2020 persentase penegakan Peraturan Perundang-Undangan Perda/Perkada adalah 44,44% yaitu 4 Perda yang selalu di langgar oleh masyarakat. Dari 9 Perda/Perkada yang memuat sanksi. Namun pada Tahun 2021 persentase penegakan Perda/Perkada meningkat menjadi 55,56% atau naik 1,12% dalam hal ini 5 Perda yang dilanggar oleh masyarakat dari 9 Perda/Perkada yang memuat sanksi. Untuk itu perlunya peningkatan sosialisasi peraturan Perundang-Undangan Perda/Perkada untuk diketahui oleh masyarakat.
E.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	n.a	Sat.Pol.PP & Damkar	Pada tahun 2021 tidak terjadi bencana kebakaran yang luar biasa, sehingga tidak terdapat data penanggulangan bencana dengan surat pernyataan dari Sat.Pol.PP dan Damkar Nomor 58/POL.PP&PMK/I/2022
	1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB.	n.a	Sat.Pol.PP & Damkar	Pada tahun 2021 tidak terjadi bencana kebakaran yang luar biasa, sehingga tidak terdapat data penanggulangan bencana
	2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana.	n.a	Sat.Pol.PP & Damkar	Pada tahun 2021 tidak terjadi bencana kebakaran yang luar biasa, sehingga tidak terdapat data penanggulangan bencana
	3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana.	n.a	Sat.Pol.PP & Damkar	Pada tahun 2021 tidak terjadi bencana kebakaran yang luar biasa, sehingga tidak terdapat data penanggulangan bencana
	4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana.	n.a	Sat.Pol.PP & Damkar	Pada tahun 2021 tidak terjadi bencana kebakaran yang luar biasa, sehingga tidak terdapat data penanggulangan bencana
E.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	100 %	Sat.Pol.PP & Damkar	Pelaksanaan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran pada tahun 2021 melebihi target sebesar 100% dibandingkan pada target RPJMD yang telah

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
				ditetapkan sebesar 90%. Hal ini perlu dipertahankan dalam pelaksanaan pelayanan minimal di masyarakat.
	1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	2 SOP	Sat.Pol.PP & Damkar	Jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah 2 SOP yaitu - SOP Animal Rescue; dan - SOP Penyusunan Laporan Kejadian Dalam pelaksanaan penyelamatan non kebakaran yang dilaksanakan oleh bidang kebakaran telah melaksanakan pengaduan/laporan dari masyarakat sebanyak 43 kejadian non kebakaran
	2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan.	ADA 8 Posko 82 unit	Sat.Pol.PP & Damkar	dalam pelaksanaan percepatan pelayanan minimal dimasyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng telah membuat 8 Posko/UPTD penaganan kebakaran di Kabupaten Soppeng. Posko/UPTD Pemadam Kebakaran tersebar di 8 Kecamatan yang siap melayani masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran di Wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Soppeng
	3. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan.	ADA	Sat.Pol.PP & Damkar	Untuk mendukung pelayanan pemerintah dalam penanggulangan bencana kebakaran pada masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menempatkan petugas kebakaran di 8 Posko/UPTD Kebakaran dengan susunan petugas yang siap dalam 24 jam yang bergiliran sesuai dengan jadwal tugas yang telah ditetapkan.
	4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana	ADA 10 UNIT	Sat.Pol.PP & Damkar	Dalam mendukung peningkatan pelayanan pemerintah dalam penanggulangan bencana kebakaran, pemerintah

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa.			Desa/Kelurahan menyiapkan sarana/prasarana damkar yang siap membantu petugas kebakaran dari Posko/UPTD Kebakaran dalam mengantisipasi awal penanganan bencana kebakaran yang ada di desa/kelurahan. Sarana prasarana pemadam kebakaran yang siap membantu dalam penanggulangan kebakaran di wilayah desa/kelurahan tersebar di beberapa desa yaitu: 1) Desa Citta. 2) Desa Pesse. 3) Desa Kessing. 4) Desa Sering. 5) Desa Barang. 6) Desa Tellulimpoe. 7) Desa Patampanua. 8) Desa Leworeng. 9) Desa Panincong. 10) Desa Bulue.
	5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi.	5 Jenis	Sat.Pol.PP & Damkar	Dalam mendukung pelayanan masyarakat bidang kebakaran, Pemerintah Daerah menyiapkan sarana prasana pemadam, penyelamatan dan evakuasi pada setiap Posko/UPTD Kebakaran sebanyak 10 Unit. Namun setiap posko tidak merata sarana prasarana yang disiapkan, akibat keterbatasan anggaran
	6. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	1 Orang	Sat.Pol.PP & Damkar	Perlunya peningkatan aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi pemadam yang hanya 1 orang petugas saja. Untuk itu perlunya penambahan anggaran dalam peningkatan kualitas aparatur pemadam kebakaran di wilayah Kabupaten Soppeng.
	7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat	a/n	Sat.Pol.PP & Damkar	Belum adanya relawan yang dibentuk dalam mempermudah pelayanan minimal di masyarakat, sehingga sering tidak tercapaainya response time

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.			penanganan kebakaran di wilayah Kabupaten Soppeng, terutama di wilayah pegunungan, terpencil dan wilayah padat penduduk.
	8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	4 Kali	Sat.Pol.PP & Damkar	Dalam peningkatan kecepatan response time dan kedisiplinan petugas pemadam kebakaran Kabupaten Soppeng, Pemerintah Dearah Kabupaten Soppeng melaksanakan bina kesamaptaan oleh Sat.pol.PP dan Pemadam Kebakaran sebanyak 4 kali dalam satu tahun.
E.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	8,84 menit	Sat.Pol.PP & Damkar	Data Laporan Kejadian Kebakaran per Tahun 2021

- 3) Prestasi/penghargaan yang diraih
- Tidak ada prestasi atau penghargaan yang diraih oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada tahun 2021

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- 1) Program Kegiatan
- Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan dasar pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan anggaran Rp4.554.035.747,- dan program kegiatan sebagai berikut:
- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan kegiatan terdiri dari:
- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b) Program Penanggulangan Bencana
- Pada Program Penanggulangan Bencana, pelaksanaan kegiatan terdiri dari:

- Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
IKK Output dan IKK Outcome
Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
E.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	25667 jiwa	BPBD	data jumlah penduduk di kawasan rawan bencana
	1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal.	1 dokumen	BPBD	Dokumentasi Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sebanyak 1 dokumen yang dilaksanakan
	2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	BPBD	data jumlah penduduk di kawasan rawan bencana sebnyak 25667 jiwa
	3. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal.	n/a	BPBD	Belum menyusun Dokumn Renkon masih bentuk dokumen studi mitigasi bencana alam dan bencana geologi akibat anggaran terbatas surat pernyataan BPBD Nomor 050/20-6/BPBD/II/2022
	4. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan.	n/a	BPBD	Tidak melaksanakan pelatihan akibat keterbatasan anggaran surat pernyataan nomor 050/20.B/BPBD/2022
	5. Persentase warga negara yang ikut pelatihan.	n/a	BPBD	Tidak melaksanakan pelatihan akibat keterbatasan anggaran surat pernyataan nomor 050/20.B/BPBD/2022

	6. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana.	n/a	BPBD	Pusdalops belum dibentuk surat pernyataan nomor 050/20-9/BPBD/2022
	7. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan.	n/a	BPBD	surat pernyataan nomor 050/20-10/BPBD/2022
E.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	n/a	BPBD	Tidak terdapat data
	1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB.	n/a	BPBD	- Surat Pernyataan Sat.Pol.PP & PMK Nomor 57/POL.PP&PMK/II/2022 - surat pernyataan BPBD nomor 050/20.A/BPBD/II/2022
	2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana.	n/a	BPBD	- Surat Pernyataan Sat.Pol.PP & PMK Nomor 57/POL.PP&PMK/II/2022 - surat pernyataan BPBD nomor 050/20.A/BPBD/II/2022
	3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana.	57 orang	BPBD	Surat Keputusan Bupati Soppeng nomor 74/II/2021 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana
	4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana.	n/a	BPBD	surat pernyataan BPBD nomor 050/20.A/BPBD/II/2022

- 3) Prestasi/penghargaan yang diraih
- Tidak ada prestasi atau penghargaan yang diraih oleh Badan Penaggulangan Bencana Daerah pada tahun 2021

F. URUSAN SOSIAL

Pada pelaksanaan Urusan Pelayanan Dasar pada Bidang Sosial pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dapat di lihat sebagai berikut:

1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan dasar pada Urusan Sosial, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Sosial dengan anggaran Rp9.799.410.887 dan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

b) Program Pemberdayaan Sosial

Pada Program Pemberdayaan Sosial, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

c) Program Rehabilitasi Sosial

Pada Program Rehabilitasi Sosial, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, Serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial

d) Program Penanganan Bencana

Pada Program Penanganan Bencana, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

e) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Pada Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

f) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, dapat di lihat pada tabel berikut:pada tabel berikut:

Tabel 2.8
IKK Output dan IKK Outcome
Urusan Sosial

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
F.1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM).	49,70%	Dinas Sosial	- Data Populasi Sosial yang tertangani Kabupaten Soppeng Tahun 2021 sebanyak 250 jiwa - Data Populasi Sosial yang tertangani pada Tabel Tertangani Diluar Panti sebanyak 503 jiwa
	1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	2 layanan	Dinas Sosial	Dalam melaksanakan pelayanan pengaduan bagimasyarakat yang berdampak pada sosial, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyiapkan layanan pengaduan, yaitu: ✓ BPJS ✓ BPNT
	2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM		Dinas Sosial	data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM, sebagai berikut : ✓ Penyandang Disabilitas sebanyak 1 jiwa ✓ Anak Terlantar sebanyak 32 jiwa
	3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	3 TRC	Dinas Sosial	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk dalam penanggulangan sosial, oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng adalah sebgai berikut: ✓ Tagana ✓ TRC ✓ PSC Tim Reasi Cepat ini melaksanakan penaganan saat mitigasi bencana bila diperlukan

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau,	494 jiwa	Dinas Sosial	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau dalam pelayanan adalah sebagai berikut: ✓ Penyandang Disabilitas sebanyak 153 jiwa ✓ Anak Terlantar sebanyak 234 jiwa ✓ Lanjut Usia Terlantar sebanyak 107 jiwa
	5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	4 unit	Dinas Sosial	Dokumentasi Kendaraan Roda 4 yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki Dinas Sosial Kab. Soppeng
	6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi,	285 jiwa	Dinas Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi adalah sebagai berikut: ✓ Penyandang Disabilitas sebanyak 82 jiwa ✓ Anak Terlantar sebanyak 203 jiwa
	7. Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	n/a	Dinas Sosial	Belum ada Rumah singgah Di Kabupaten soppeng untuk PMKS, Surat Pernyataan Dinas Sosial No. 804/96/Dinsos/II/2022
	8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	n/a	Dinas Sosial	Tidak terdapat data
	9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	26 jiwa	Dinas Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu adalah sebagai berikut: ✓ Penyandang Disabilitas sebanyak 26 jiwa
	10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	n/a	Dinas Sosial	Belum ada Rumah singgah Di Kabupaten soppeng untuk PMKS, Surat Pernyataan Dinas Sosial No. 804/96/Dinsos/II/2022

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	11. Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia		Dinas Sosial	
	12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	n/a	Dinas Sosial	
	13. Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	n/a	Dinas Sosial	Belum ada Rumah singgah Di Kabupaten soppeng untuk PMKS, Surat Pernyataan Dinas Sosial No. 804/96/Dinsos/II/2022
	14. Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	46 relawan	Dinas Sosial	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan, terdiri dari: ✓ Pendamping disabilitas = 1 orang ✓ Pendamping Anak = 1 orang ✓ Pendamping Fakir Miskin = 1 orang ✓ Pendamping Keluarga Harapan = 35 orang ✓ TKSK = 8 orang
	15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	153 jiwa	Dinas Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut: ✓ Penyandang Disabilitas sebanyak 26 jiwa ✓ Anak Terlantar sebanyak 20 jiwa ✓ Lanjut Usia Terlantar sebanyak 107 jiwa
	16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	n/a	Dinas Sosial	Tidak terdapat data
	17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan	1 jiwa	Dinas Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan			yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan adalah sebagai berikut: ✓ Lanjut Usia Terlantar sebanyak 1 jiwa an. HIDAYA
	18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	n/a	Dinas Sosial	Tidak terdapat data
	19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	n/a	Dinas Sosial	Tidak terdaat data
	20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	n/a	Dinas Sosial	Tidak terdaat data
	21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	26	Dinas Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk adalah sebagai berikut: ✓ Anak Terlantar sebanyak 22 jiwa ✓ Lanjut Usia Terlantar sebanyak 4 jiwa
F.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota.	100%	Dinas Sosial	Nama Penerima Bantuan Bencana Tahun 2021 sebanyak 192 jiwa
	1. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	192	Dinas Sosial	- Daftar Nama Penerima Bantuan Bencana Alam Tahun 2021 sebanyak 162 jiwa - Daftar Nama Penerima Bantuan Bencana Sosial Tahun 2021 sebanyak 30 jiwa
	2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	n/a	Dinas Sosial	Tidak terdapat data

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	n/a	Dinas Sosial	Surat pernyataan 804/252/Dinsos/II/2022
	4. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	n/a	Dinas Sosial	Surat pernyataan 804/227/Dinsos/II/2022
	5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	n/a	Dinas Sosial	Tidak terdapat data
	6. Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	63 relawan	Dinas Sosial	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial Dan/Atau Relawan Sosial Yang Tersedia, Adalah Sebagai Berikut: ✓ TKSK = 8 relawan ✓ PKH = 35 relawan ✓ Pendamping Anak = 1 relawan ✓ Pendamping Disabilitas = 1 relawan ✓ Pendamping Bpnt = 1 relawan ✓ TAGANA = 17 relawan

- 3) Prestasi/penghargaan yang diraih
- Tidak ada prestasi atau penghargaan yang diraih oleh Dinas Sosial pada tahun 2021

2. URUSAN WAJIB TIDAK TERKAIT DENGAN PELAYANAN DASAR

A. URUSAN TENAGA KERJA

Pada pelaksanaan urusan pelayanan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar Pada Bidang Ketenaga Kerjaan pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasil dapat di lihat sebagai berikut:

- 1) Program Kegiatan
- Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan bukan dasar pada Urusan Tenaga Kerja, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, jumlah anggaran Rp 266,719,850 dengan program kegiatan uraian sebagai berikut:

a) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Kerja

Pada Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Kerja menghasilkan

- Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi

b) Program perencanaan tenaga kerja

Pada Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Kerja menghasilkan

- Penyusunan rencana tenaga kerja (RTK)
- BAB II-54

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Tenaga Kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Opelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9
IKK Output dan IKK Outcome
Urusan Tenaga Kerja

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
A.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja.	61,32%	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Data penempatan pencari kerja tahun 2021 sebanyak 447 pencaker Data pencaker yang terdaftar sebanyak 729 pencaker
	1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Nomor 50/MPTSP-NAKERTRANS/II/2022
	2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Nomor 51/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2022
	3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Nomor 74/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2022
A.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi.	0,47	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Sertifikat "on The Job Training Competency of Barista" sebanyak 5 orang Data tenaga kerja di kabupaten sebanyak 1069
	1. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster.	100%	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Dokumentasi Pelatihan Barista Tahun 2021
	2. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi.	50%	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	- Sertifikat Kompetensi No 56303512300004082017 - Surat Keputusan Bupati Nomor : 565/XII/2021 tentang pemberhentian pejabat administrasi dan pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui penyetaraan jabatan lingkup pemerintah kabupaten soppeng - Surat Keputusan Bupati Nomor : 565/XII/2021 tentang pemberhentian pejabat administrasi dan pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui penyetaraan jabatan lingkup

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
				pemerintah kabupaten soppeng
	3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan.	40%	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	- Sertifikat Kompetensi No 56303512300004082017 - Daftar Pelatihan dan Magang Kompetensi Barista
	4. Persentase LPK yang terakreditasi.	28,57%	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Yang mempunyai sertifikat hanya 2 LPK dari 7 LPK yang terdaftar yaitu: - Sertifikat Akreditasi LPK no 79/L.A-LPK/XII/2020 - Sertifikat Akreditasi no 110/L.A-LPK/XII/2020
	5. Persentase LPK yang memiliki perizinan.	100%	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Ada 7 LPK yang terdaftar yaitu: 1. LPK Aqilah Tekno Edukasi Nomor 12/DPMTSP_NAKERTRANS/II/2020 2. LPK Lembaga Pelatihan Kerja STEKOM Nomor 28/NAKERTRANS/IX/2017 3. LPK BLK Komunitas Pondok Pesantren Perguruan Ganra Nomor 14/PTSP-NAKERTRANS/II/2020 4. LPK Wiliana, Calio Kel.Ujung Kec.Lilirilau Kab. Soppeng Nomor 2/LPK/PMPTSP-NAKERTRANS/V/2021 5. LPK Workshop Las BLK Komunitas Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Sering Kab. Soppeng Nomor 13/DPMTSP-NAKERTRANS/II/2020 6. LPK Komunitas Pondok Pesantren Darussalam Berru Kab. Soppeng Nomor 1/LPK/DPMTSP-NAKERTRANS/V/2021 7. LPK YP.AN-NAILAH Nomor 27/NAKERTRANS/IX/2017
	6. Jumlah penganggur yang dilatih	5 orang	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Daftar Pelatihan dan Magang Kompetensi Barista
	7. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100%	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Pelatihan dan Magang Kompetensi Barista

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
				sebanyak 5 orang
	8. Persentase penyerapan lulusan	100%	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Pelatihan dan Magang Kompetensi Barista sebanyak 5 orang
	9. Lulusan bersertifikat kompetensi	0	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Nomor 52/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
	10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan.	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Nomor 53/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
	11. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI).	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Nomor 54/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
A.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	579642	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Tingkat Produktivitas tenaga kerja pendapatan per tenaga kerja yaitu PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)
	1. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas.	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Nomor 55/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
	2. Data tingkat produktivitas total.	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Nomor 66/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
A.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	3,98%	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Data jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak sebanyak 20 perusahaan Dari jumlah perusahaan yang terdata sebanyak 502 perusahaan
	1. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Nomor 56/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
	2. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	100%	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Data jumlah perusahaan yang memiliki perjanjian kerja bersama (PKB) sebanyak 8 perusahaan dari jumlah perusahaan memiliki SP/SB sebanyak 8 perusahaan
	3. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Nomor 57/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan			
	4. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	100%	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Data jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah sebanyak 7 perusahaan dari jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB) sebanyak 7 perusahaan
	5. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	23,90%	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	data jumlah perusahaan yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 120 perusahaan dari Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor sebanyak 502 perusahaan
	6. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih.	0,20%	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Terbitnya 1 buah Surat Perjanjian Bersama
	7. Jumlah mogok kerja	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Nomor 58/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
	8. Jumlah penutupan perusahaan	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Nomor 59/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
	9. Jumlah perselisihan kepentingan	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Nomor 60/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
	10. Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Nomor 61/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
	11. Jumlah perselisihan PHK	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Nomor 62/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
	12. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	33 pekerja	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Data jumlah pekerja ter-PHK melalui aplikasi SISNAKER tahun 2021
	13. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	1	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Terbitnya 1 buah Surat Perjanjian Bersama
	14. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Nomor 63/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
	15. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui	100%	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Data Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perjanjian Bersama sebanyak 1 perjanjian

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial			
A.5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota.	61,32%	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Data jumlah pencari kerja yang ditempatkan tahun 2021 sebanyak 447 pencaker dari Jumlah pencaker yang terdaftar sebanyak 729 pencaker
	1. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Nomor 64/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
	2. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	729 pencaker	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Data pencari kerja tahun 2021
	3. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	1 BKK	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Data jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK)
	4. Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Nomor 65/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
	5. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	1 asn	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Keputusan Bupati Nomor : 565/XII/2021 tentang pemberhentian pejabat administrasi dan pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui penyetaraan jabatan lingkup pemerintah kabupaten soppeng
	6. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Nomor 67/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
	7. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Nomor 68/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
	8. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Nomor 69/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
	9. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Nomor 70/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
	10. Jumlah Calon Pekerja	9	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	data Jumlah CPMI tahun

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	CPMI		2021
	11. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	100%	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Data jumlah Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan fasilitas kepulangan sebanyak 4 PMI
	12. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja.	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Nomor 71/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
	13. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Nomor 72/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
	14. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk.	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Nomor 73/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002

3) Prestasi/penghargaan yang diraih

Tidak ada prestasi atau penghargaan yang diraih oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada urusan ketenagakerjaan pada tahun 2021

B. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pada pelaksanaan urusan pelayanan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar pada Bidang Pemberdayaa Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat di lihat sebagai berikut:

1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan bukan dasar pada Urusan Pemberdayaa Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan anggaran Rp 5.889.661.637 dan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Pada Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dengan kegiatan sebagai berikut:

- Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
- Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

c) Program Perlindungan Perempuan

Pada Program Perlindungan Perempuan, dengan kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

d) Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Pada Program Peningkatan Kualitas Keluarga, dengan kegiatan sebagai berikut:

- Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

e) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Pada Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, dengan kegiatan sebagai berikut:

- Pengumpulan Pengolahan Analisis dan penyajian Data Gender dan Anak dalam kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

f) Program Perlindungan Khusus Anak

Pada Program Perlindungan Khusus Anak, dengan kegiatan sebagai berikut:

- Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10
IKK Output dan IKK Outcome
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
G.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	1,5%	Dinas P3APPKB	Tingkat dukungan penganggaran ARG oleh pemerintah daerah hanya mencapai 1,5% dibandingkan dari rencana target RPJMD awal sebanyak 2,5%. Begitupun pula perbandingan penganggaran 2020 mengalami penurunan pada tahun 2021
	1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	34 SKPD	Dinas P3APPKB	Data Jumlah Lembaga tingkat daerah kabupaten yang terlatih PUG
	2. Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	57 kegiatan	Dinas P3APPKB	Data Jumlah kegiatan PUG pada perangkat daerah
G.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten.	0,03%	Dinas P3APPKB	Tingkat kekerasan terhadap anak kurang dari usia 18 tahun di Kabupaten Soppeng menurun 0,01%, akibat peran serta masyarakat, media massa yang bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menaggulangi kekerasan anak di masyarakat.
	1. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap	5 Media Massa	Dinas P3APPKB	media massa yang mengadakan kerjasama dengan PEMDA Tahun 2021

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	anak			
	2. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	45 lembaga	Dinas P3APPKB	pada tahun 2021 jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki SPM sebanyak 45 lembaga, meningkat dari tahun 2020 hanya 8 lembaga
	3. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	Dinas P3APPKB	Data Jumlah Korban Kekerasan anak Tahun 2021 sebanyak 15 orang dan tertangani dengan baik
	4. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	3 lembaga	Dinas P3APPKB	Data Jumlah Lembaga Layanan Anak yang mendapatkan pelatihan
	5. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	n.a	Dinas P3APPKB	Surat Pernyataan Dinas P3APPKB
G.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	8,12%	Dinas P3APPKB	0,0002% tahun 2020
	1. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	18 ormas	Dinas P3APPKB	Data Ormas perempuan yang sudah mendapatkan pelatihan
	2. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	n.a	Dinas P3APPKB	Surat Pernyataan Dinas P3APPKB
	3. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	n.a	Dinas P3APPKB	Surat Pernyataan Dinas P3APPKB
	4. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	n.a	Dinas P3APPKB	Surat Pernyataan Dinas P3APPKB
	5. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1 program	Dinas P3APPKB	Kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan tahun 2021
	6. Jumlah lembaga penyediaan layanan	7 lembaga	Dinas P3APPKB	Data Jumlah Lembaga penyedia layanan

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi			perlindungan perempuan tahun 2021
	7. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	Dinas P3APPKB	Data Jumlah Korban kekerasan perempuan yang terlayani tahun 2021 sebanyak 10 orang

3) Prestasi/penghargaan yang diraih

Adapun penghargaan yang dapat diperoleh oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2021 yaitu :

- a) Penghargaan Pemerintah Pusat.
Tahun 2021 Penghargaan tingkat nasional tidak ada.
- b) Penghargaan Pemerintah Provinsi.
Penghargaan yang diperoleh pada tahun 2021 yaitu
 - Penghargaan Pendataan Keluarga 2021 (PK21) dari Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan
- c) Penghargaan Lembaga Internasional.
Penghargaan yang didapat dari lembaga internasional tidak ada
- d) Penghargaan Lembaga Nasional.
Penghargaan yang diperoleh pada tahun 2021 yaitu;
 - Penhargaan Kabupaten/Kota Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak republic Indonesia
 - Penghargaan Penerima anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2021 Kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak republic Indonesia
 - Partisipasi Dalam Penanggulangan Pekerja Anak di Indonesia Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak republic Indonesia.

C. URUSAN PANGAN

Pada pelaksanaan urusan pelayanan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar pada Bidang Pangan pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan dapat di lihat sebagai berikut:

- 1) Program Kegiatan
Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan bukan dasar pada Urusan Pangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Tanaman Pangan,

Holtikultura, Perkebunan dan Ketahan Pangan dengan anggaran Rp 1.325.237.000 dan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Pada Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan terdiri dari:

- Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

b) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Pada Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, terdiri dari:

- Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan
- Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
- Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

c) Program Penanganan Kerawanan Pangan

Pada Program Penanganan Kerawanan Pangan, terdiri dari:

- Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

d) Program Pengawasan Keamanan Pangan

Pada Program Pengawasan Keamanan Pangan, terdiri dari:

- Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahan Pangan, dapat di lihat pada tabel berikut::

Tabel 2.11
IKK Output dan IKK Outcome
Pelaksanaan Urusan Pangan

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
H.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	25,82%	Dinas TPHPKP	Data Jumlah cadangan pangan sebanyak 25340 ton dan data Jumlah kebutuhan pangan sebanyak 98150 ton
	1. Tersedianya	ADA	Dinas	Tersedianya infarstruktur

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan		TPHPKP	gudang cadangan pangan
	2. Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	ADA	Dinas TPHPKP	Data penyaluran Bahan Pangan (Beras dan Telur) Ke TTIC/TTI Tahun 2021
	3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	n/a	Dinas TPHPKP	Belum tersedianyan regulasi untuk penentuan harga minimum pangan okal di kabupaten Soppeng Surat Pernyataan Dinas TPHPKP
	4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	ADA	Dinas TPHPKP	Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Perkebunan dan Ketahanan Kabupaten Soppeng Nomor 800/2505/DTPHPKP/XI/2021
	5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	ADA	Dinas TPHPKP	Tersedianya peta kerawanan bencana pangan sehingga mempermudah pendektisian dini bencana yang terjadi di Wilayah Kabupaten Soppeng
	6. Tertanganinya kerawanan pangan	Tertangan	Dinas TPHPKP	Data Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Soppeng Tahun 2021
	7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan		Dinas TPHPKP	Dokumentasi Penyaluran Cadangan Pangan pada daerah rentang rawan pangan yaitu : 1. Penyerahan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Korban Kebakaran Di Kel.Lemba Kec. Lalabata 2. Penyerahan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Korban Kebakaran Di Desa Kampiri Kec. Citta 3. Penyerahan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
				kepada Korban Banjir Di Kel.Limpomajang Kec. Mariotiawa 4. Penyerahan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Korban Kebakaran Di Desa Bulue Kec. Marioriawa 5. Penyerahan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Korban Kebakaran Di Desa Bulue Kec. Marioriawa
	8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	TERLAKSANA	Dinas TPHPKP	Data hasil pengawasan keamanan pangan segar terbit surat pengawasan sebagai berikut: ✓ Nomor: 5633/FOOD/X/21 ✓ Nomor: 5634/FOOD/X/21 ✓ Nomor: 5635/FOOD/X/21 ✓ Nomor: 5635/FOOD/X/21 ✓ Nomor: 5636/FOOD/X/21 ✓ Nomor: 5637/FOOD/X/21 ✓ Nomor: 5855/FOOD/X/21 ✓ Nomor: 5855/FOOD/X/21 ✓ Nomor: 5857/FOOD/X/21

- 3) Prestasi/penghargaan yang diraih
- Tidak ada prestasi atau penghargaan yang diraih oleh Dinas Tanaman Panga, Holtikultura, Perkebunan dan Katahanan Pangan urusan pangan pada tahun 2021

D. URUSAN PERTANAHAN

Pada pelaksanaan urusan pelayanan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar pada Bidang Pertanahan pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dapat di lihat sebagai berikut:

- 1) Program Kegiatan
- Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan bukan dasar pada Urusan Pertanahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan anggaran Rp 56.400.00. dan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Pada Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

 - Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam kabupaten/kota

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Pertanahan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dapat di lihat pada tabel berikut:dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12
IKK Output dan IKK Outcome
Pelaksanaan Urusan Pertanahan

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
I.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	- Data LuasTanah Izin Lokasi Tahun 2021 sebanyak 120699 ha - Data Laporan Penerbitan Izin Lokasi sebanyak 120699 ha
	1. SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	- Data Jumlah Izin Lokasi yang diterbitkan tahun 2021 sebanyak 4 izin - Data Laporan Penerbitan Izin Lokasi sebanyak 4 izin
	2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek.	100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Data Pemohon yang diusulkan panitai pertimbangan landreform tahun 2021 sebanyak 8 obyek tanah sesuai dengan Surat BPN Kabupaten Soppeng No. HP.02.01/252-73.12/II/2022 Perihal Permintaan Data
	3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee		Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Data penetapan besarnya ganti rugi tanah kelebihan maksimum/absentee tahun 2021 781,38 ha sesuai Surat BPN Kabupaten Soppeng No. HP.02.01/252-73.12/II/2022 Perihal Permintaan Data
	4. Dokumen Izin membuka tanah	100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Data Jumlah Izin Lokasi yang diterbitkan tahun 2021 sebanyak 4 izin dari Data Laporan Penerbitan Izin Lokasi sebanyak 4 permohonan yang masuk
	5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota.	35 dokumen	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Data penetapan site lokasi pembangunan fisik sebanyak 35 dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik
I.2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum.	100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	- 67471 m di konversi menjadi Ha menjadi 6.75 ha - Data daftar prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
				permukiman
I.3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	120699 m ²	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Data Luas Tanah Izin Lokasi Tahun 2021 dan Data Laporan Penerbitan Izin Lokasi
I.4	Mengukur persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	1367 m ²	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Data Tersedianya Tanah Objek Landreform (TOL) Tahun sesuai dengan Surat BPN Kabupaten Soppeng No. HP.02.01/252-73.12/II/2022 Perihal Permintaan Data
I.5	Mengukur persentase tersedianya tanah untuk masyarakat	9,01 ha	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Data tersedianya tanah ntuk masyarakat tahun 2021
I.6	Mengukur persentase Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi.	50%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Surat Pernyataan Dinas PERKIM Nomor 045.2/73/PKP/II/2022 Junlah Sengketa Tanah yang ditangani pada tahun 2021 sebanyak 3 Kasus dan Data Hasil Identifikasi Aset Bermasalah Pemerintah Kabupaten Soppeng sebnayak 6 kasus

- 3) Prestasi/penghargaan yang diraih
- Tidak ada prestasi atau penghargaan yang diraih oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman urusan pertanahan pada tahun 2021

E. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Pada pelaksanaan urusan pelayanan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar pada Bidang Lingkungan Hidup pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dapat di lihat sebagai berikut:

- 1) Program Kegiatan
- Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan bukan dasar pada Urusan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp 9.943.800.207 dan program kegiatan sebagai berikut:
- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
- Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, pelaksanaan kegiatan adalah:
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b) Program Pengendalian Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- Pada Program Pengendalian Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, pelaksanaan kegiatan adalah:
- Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota
 - Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota
- c) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
- Pada Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), pelaksanaan kegiatan adalah:
- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota
- d) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- Pada Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, pelaksanaan kegiatan adalah:
- Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
- e) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- Pada Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, pelaksanaan kegiatan adalah:
- Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
- f) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- Pada Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, pelaksanaan kegiatan adalah:
- Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / Kota
- g) Program Pengelolaan Persampahan
- Pada Program Pengelolaan Persampahan, pelaksanaan kegiatan adalah:
- Pengelolaan Sampah

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13
IKK Output dan IKK Outcome
Pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
2.J.1	Mengukur Indeks Kualitas	69.52	Dinas	Berdasarkan Peraturan

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	IKLH	Lingkungan Hidup	Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup hasil pengukuran IKLH Kab. Soppeng didapat skor 69.520 telah memenuhi kriteria sedang , dari perbandingan target RPJMD tingkat IKHL kabupaten Soppeng semakin membaik dari tingkat target yang di tergetkan
2.J.2	Mengukur capaian Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	74,06 %	Dinas Lingkungan Hidup	Cakupan pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Soppeng belum optimal dikarenakan perbandingan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang ada belum sebanding dengan luas cakupan pelayanan, Tempat Pemrosesan Sampah (TPA) masih Control Landfill belum Sanitary Landfill dan sudah overcapacity serta masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri
	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbunan sampah	0.64	Dinas Lingkungan Hidup	Untuk kegiatan pengurangan sampah yang dilakukan oleh pemerintah Kab. Soppeng meliputi Bank Sampah Induk, TPS3R Pasar Setral, dan Pengomposan TPA
	2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbunan sampah	22,364.64	Dinas Lingkungan Hidup	
	3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing-masing lingkungan	Belum Ada	Dinas Lingkungan Hidup	
2.J.3	Mengukur tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	11.43 %	Dinas Lingkungan Hidup	Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan atau Usaha yang melanggar termasuk kategori Pelanggaran Izin Lingkungan
	1. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan hitungan rumus sebagai berikut:	100%	Dinas Lingkungan Hidup	Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah melalui DPMTSP sebanyak 9 Izin Lingkungan berdasarkan rekomendasi persetujuan UKL-UPL / DPLH dari Dinas Lingkungan Hidup. Setelah terbitnya UU Cipta Kerja, Izin Lingkungan dihapus dan persetujuan lingkungan berupa SKKLH untuk dokumen Andal & PKPLH untuk Dokumen UKL- UPL yang diterbitkan sebanyak 5 PKPLH oleh DLH. Dan semua usulan

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
				permohonan telah terintegrasi kedalamnya
	2. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	14.28%	Dinas Lingkungan Hidup	Belum sebandingnya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) di Kabupaten Soppeng terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah Kab. Soppeng
	3. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten/Kota	n/a	Dinas Lingkungan Hidup	Belum ada kelembagaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kab. Soppeng
	4. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	n/a	Dinas Lingkungan Hidup	
	5. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	n/a	Dinas Lingkungan Hidup	
	6. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	0	Dinas Lingkungan Hidup	Tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya, sehingga Tidak adanya pengaduan dari masyarakat

- 3) Prestasi/penghargaan yang diraih
- Tidak ada prestasi atau penghargaan yang diraih oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2021

F. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pada pelaksanaan urusan pelayanan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar pada Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat di lihat sebagai berikut:

- 1) Program Kegiatan
- Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan bukan dasar pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan anggaran Rp5.442.103.574 dan program kegiatan sebagai berikut:
- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program Pendaftaran Penduduk
- Kegiatan Pelayanan pendaftaran penduduk terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

b) Program Pencatatan Sipil

Pada Program Pencatatan Sipil, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Pelayanan pencatatan sipil

c) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pada Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dapat di lihat pada tabel berikut:dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14
IKK Output dan IKK Outcome
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
2.K.1.1	Mengukur tingkat perekaman KTP Elektronik	99,59%	Dinas Dukcapil	Data penduduk yang berumur 17 tahun ke atas yang memiliki E-KTP sebanyak 182.524 orang, degan uraian sebagai berikut: ✓ LK = 86.028 orang ✓ PR = 96.496 orang
	1. Menghitung Persentase Penerbitan akta perkawinan	65,87%	Dinas Dukcapil	Data penduduk yang mempunyai akta perkawinan sebanyak 73.580 orang dengan uraian sebagai berikut: ✓ LK = 36.228 orang ✓ PR = 37.352 orang
	2. Menghitung Persentase Penerbitan akta perceraian	2,33%	Dinas Dukcapil	Data penduduk yang mempunyai akta perceraian sebanyak 2.600 orang dengan uraian

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
				sebagai berikut: ✓ LK = 1.076 orang ✓ PR = 1.524 orang
	3. Menghitung Persentase Penerbitan akta kematian	46,68%	Dinas Dukcapil	Data kepemilikan akta kematian sebanyak 10.862 orang dengan uraian sebagai berikut: ✓ LK = 5.854 orang ✓ PR = 5.008 orang
	4. Menghitung Persentase Penyajian data kependudukan	2 kali penyajian data penduduk	Dinas Dukcapil	dokumentasi Buku Penyajian data Kabupaten Soppeng DKB.Idan DKB.II
2.K.1.2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA		Dinas Dukcapil	Data kepemilikan KIA anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) tahun sebanyak 35.076 orang dengan uraian sebagai berikut: ✓ LK = 35.076 orang ✓ PR = 54.593 orang
2.K.1.3	Persentase Kepemilikan akta kelahiran		Dinas Dukcapil	Data kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun sebanyak 62.219 orang dengan uraian sebagai berikut: ✓ LK = 32.097 orang ✓ PR = 30.122 orang
2.K.1.4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	17,65%	Dinas Dukcapil	Data jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kinerja sebanyak 6 OPD, yaitu 1. DP3APPKB, 2. DIKBUD, 5)BPKPD, 3. DISKOMINFO, 4. DINSOS, 8)DPMD Perlunya OPD melakukan kerjasama dengan Dinas Kependudukan untuk memanfaatkan data penduduk yang akurat kedepannya.

- 3) Prestasi/penghargaan yang diraih
- Tidak ada prestasi atau penghargaan yang diraih oleh Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2021

G. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pada pelaksanaan urusan pelayanan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dapat di lihat sebagai berikut:

1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan bukan dasar pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan anggaran Rp.4.284.116.864 dan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan

Pada pelaksanaan Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan, mempunyai kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- Penyediaan Bahan / Material.
- Fasilitas Kunjungan Tamu.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- Penyediaan jasa Komunikasi umbar Daya Air dan Listrik.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

b) Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Pada pelaksanaan Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, mempunyai kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

c) Program Administrasi Pemerintahan Desa

Pada pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa, mempunyai kegiatan sebagai berikut:

- Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

- Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa
- Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
- Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa
- Fasilitas Penyusunan Profil Desa
- Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan

d) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Pada pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, mempunyai kegiatan sebagai berikut:

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.
- Fasilitas Pemerintahan Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
- Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dapat di lihat pada tabel berikut:dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15
IKK Output dan IKK Outcome
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
2.L.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	20 %	DPMD	Data jumlah peningkatan desa tertinggal menjadi desa berkembang sebanyak 1 desa yang meningkat dari jumlah desa tertinggal per awal tahun sebanyak 5 desa
	1. Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	22 desa	DPMD	Data jumlah desa melaksanakan kerjasama
	2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan	n/a	DPMD	Tidak ada desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun berjalan diakibatkan dalam proses pembentukan kegiatan dan kegiatan dikurangi karena refocusing anggaran untuk

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
				menanganan Covid 19, surat pernyataan Dinas PMD Nomor 87/DPMD/II/2022
	3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	47 LKD/LAD	DPMD	Data Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan dilengkapi dengan data dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas LKD/LAD di desa
	4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	3 LKD/LAD	DPMD	Data Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan dilengkapi dengan data dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas LKD/LAD di desa
2.L.2	Menghitung Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	8%	DPMD	Data Jumlah peningkatan desa berkembang menjadi desa mandiri sebanyak 2 desa dari Jumlah desa berkembang (per awal tahun-n) sebanyak 26 desa
	1. Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	22 desa	DPMD	Data jumlah desa melaksanakan kerjasama
	2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	n/a	DPMD	Tidak ada desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun berjalan diakibatkan dalam proses pembentukan kegiatan dan kegiatan dikurangi karena refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19, surat pernyataan Dinas PMD Nomor 87/DPMD/II/2022
	3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	47 LKD/LAD	DPMD	Data Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan dilengkapi dengan data dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas LKD/LAD di desa
	4. Jumlah peningkatan	3	DPMD	Data Jumlah peningkatan

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	LKD/LAD		desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan dilengkapi dengan data dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas LKD/LAD di desa

- 3) Prestasi/penghargaan yang diraih
- Tidak ada prestasi atau penghargaan yang diraih oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2021

H. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pada pelaksanaan urusan pelayanan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat di lihat sebagai berikut:

1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan bukan dasar pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan anggaran Rp 3.410.510.850 dan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Kegiatan Pengendalian Penduduk

Pada Program Kegiatan Pengendalian Penduduk, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kualitas Penduduk
- Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

b) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Pada Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
- Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

- Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat daerah Kabupaten/Kotadalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Keseftaan Ber•KB

c) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Pada rogram Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dapat di lihat pada tabel berikut:dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16
IKK Output dan IKK Outcome
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
2.M.1	Mengukur TFR (Angka Kelahiran Total)	2,16	Dinas P3APPKB	data masih SUSENAS 2019
	1. Tersedianya dokumen Grand DesignPembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	n/a	Dinas P3APPKB	surat pernyataan Dinas P3APPKB nomor 212/DP3APPKB/I/2022
	2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	1026 jiwa	Dinas P3APPKB	Daftar laporan perincian usia NTCR tahun 2021
	3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	16,1 %	Dinas P3APPKB	data masih SUSENAS 2019
	4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	100%	Dinas P3APPKB	Data Jumlah Masyarakat terpapar program KKBK sebanyak 36408 jiwa
	5. Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi	15 OPD dan Ormas	Dinas P3APPKB	data stakeholders dan mitra kerja dalam pengelolaan KKBPK

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK			
2.M.2	Menghitung Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	75,42%	Dinas P3APPKB	Data pencapaian jumlah peserta KB Aktif Modern Tahun 2021 sebanyak 27458 Peserta KB Modern dari jumlah wajib PUS sebanyak 36408 PUS
	1. Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100%	Dinas P3APPKB	- Data Faskes yang siap melayani KB MKJP sebanyak 8 Faskes - Kesepahaman Bersama antara Dinas P3APPKB dengan Faskes di Kab.Soppeng
	2. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	75,39%	Dinas P3APPKB	Data Persentase Peserta KB Aktif Kontraepsi Jangka Panjang (MJKPJ) Tahun 2021 Tingkat Kecamatan Se Kabupaten Soppeng sebanyak 27463 peserta KB aktif dari jumlah wajib PUS sebanyak 36429 PUS
	3. Jumlah Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	13 kelompok	Dinas P3APPKB	Daftar kelompok kerja yang aktif
	4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan		Dinas P3APPKB	Data peserta KB pasca bersalin tingkat Kabupaten Soppeng Tahun 2021 sebanyak 2861 peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern dari Jumlah sasaran peserta Kab pasca persalinan sebanyak 14909 sasaran
2.M.3	Menghitung Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	14,24%	Dinas P3APPKB	Data Jumlah penduduk dan pasangan usia subur (PUS) tingkat kecamatan se Kabupaten Soppeng tahun 2021 sebanyak 5188 PUS yang ingin ber KB tetapi tidak terlayani dibandingkan jumlah pasangan PUS sebanyak 36429 PUS
	1. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	45,17%	Dinas P3APPKB	Data Persentase Kepesertaan KB di Desa/Kelurahan yang terendah adalah Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau
	2. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	18163	Dinas P3APPKB	Data peserta KB yang menerima PBI

3) Prestasi/penghargaan yang diraih

Penghargaan yang diterima Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng untuk urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2021 meliputi:

a) Penghargaan Pemerintah Pusat.

Penghargaan dari pemerintah pusat tidak ada

b) Penghargaan Pemerintah Provinsi.

Penghargaan perovinsi adalah:

- Penghargaan dari Perwakilan BKKBN propinsi Sulawesi selatan kepada Bupati Soppeng atas Penghargaan Pendataan Keluarga 2021 (PK21)

c) Penghargaan Lembaga Internasional.

Penghargaan yang didapat dari lembaga internasional tidak ada.

d) Penghargaan Lembaga Nasional.

Penghargaan yang didapat dari lembaga Nasional tidak ada

I. URUSAN PERHUBUNGAN

Pada pelaksanaan urusan pelayanan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar pada Bidang Pehubungan pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dapat dilihat sebagai beriku:

1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan bukan dasar pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Perhubungan dengan anggaran Rp 9.300.707.388 dan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, pelaksanaan kegiatan terdiri dari:

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pelaksanaan kegiatan terdiri dari:

- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten
- Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
- Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
- Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
- Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
- Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penertiban Izin Penyelenggraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
-

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, dapat di lihat pada tabel berikut:dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17
IKK Output dan IKK Outcome
Urusan Perhubungan

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
2.N.1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	62 RTK	Dinas Perhubungan	Data angkutan jalan tahun 2021
	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	n/a	Dinas Perhubungan	Surat pernyataan nomor 23.98/DISHUB/II/2022
	2. Terlaksananya pelayanan uji berkala	n/a	Dinas Perhubungan	Surat pernyataan nomor 23.98/DISHUB/II/2022
	3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	18,49%	Dinas Perhubungan	Data penetapan tarif angkutan umum dalam bentuk SK Bupati Nomor 583/X/2005 dan surat edaran Dinas Perhubungan Nomor 248.06/Dishub/VII/2021
	4. Persentase pelaksanaan	91,63%	Dinas Perhubungan	Data jumlah Pemasangan Perlengkapan Jalan Tahun

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota			2021 sebanyak 186 titik dari target yang akan dipasangi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota sebanyak 203 titik
2.N.2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,009	Dinas Perhubungan	Data proyeksi pembebanan jaringan jalan
	1. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	91,63%	Dinas Perhubungan	Data jumlah Pemasangan Perlengkapan Jalan Tahun 2021 sebanyak 186 titik dari target yang akan dipasangi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota sebanyak 203 titik

- 3) Prestasi/penghargaan yang diraih
- Tidak ada prestasi atau penghargaan yang diraih oleh Dinas Perhubungan pada tahun 2021

J. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pada pelaksanaan urusan pelayanan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar pada Bidang Komunikasi dan Informatika pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

- 1) Program Kegiatan
- Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan bukan dasar pada Urusan Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan anggaran Rp. 7.301.640.265 dan program kegiatan sebagai berikut:
- a) Program Kegiatan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota
- Pada Program Kegiatan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, uraian kegiatan sebagai berikut:
- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b) Program Kegiatan Sub Kegiatan Informasi dan Komunikasi Publik
- Pada Program Kegiatan Sub Kegiatan Informasi dan Komunikasi Publik, uraian kegiatan sebagai berikut:
- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- c) Program Kegiatan Sub Kegiatan Aplikasi Informatika
- Pada Program Kegiatan Sub Kegiatan Aplikasi Informatika, uraian kegiatan sebagai berikut:
- Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.18
IKK Output dan IKK Outcome
Urusan Komunikai dan Informatika

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
2.O.1	Mengukur Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	97,06%	Diskominfo	Masih adanya OPD yang belum terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo sebanyak 1 OPD yaitu Kecamatan Liliraja
	1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	97,06%	Diskominfo	Masih adanya perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo sebanyak 1 Perangkat Daerah yaitu Kecamatan Liliraja
	2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	97,06	Diskominfo	Masih adanya perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo sebanyak 1 Perangkat Daerah yaitu Kecamatan Liliraja
	3. Tersedianya 84sytem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis	Tersedia	Diskominfo	Peraturan Bupati Soppeng Nomor 87 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Website dan Media Sosial Pemerintah Daerah

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah, dengan data kelengkapan sebagai berikut :			
2.O.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	Diskominfo	Data Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online yaitu 36 layanan SKPD yaitu: ✓ SIPD = 34 ✓ SIMPEG = 1 ✓ LAPOR = 1
	1. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan 85system pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	97 event	Diskominfo	Data Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan layanan publik pada pemerintahan daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015
	2. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	82,35%	Diskominfo	Data Jumlah perangkat daerah yang mempunyai portal dan sistus web yang sesuai dengan standar sebanyak 28 perangkat daerah dari jumlah perangkat daerah sebanyak 34 perangkat daerah
	3. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100%	Diskominfo	Data Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebanyak 34 perangkat daerah dari jumlah sebanyak 34 perangkat daerah
	4. Persentase layanan SPBE (layanan 85system dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis	82,35%	Diskominfo	Data Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	yang telah diimplementasikan secara elektronik			elektronik sebanyak 28 layanan dari jumlah keseluruhan sebanyak 34 layanan
	5. Persentase layanan SPBE (layanan 86system dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	5,88%	Diskominfo	Data Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik sebanyak 1 SKPD yaitu: 1. DUKCAPIL
	6. Persentase system elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	Diskominfo	Data Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 34 perangkat daerah
	7. Persentase layanan 86system dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan 86system penghubung layanan pemerintah	100%	Diskominfo	Data Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan sebanyak 3 layanan yaitu: ✓ SIAK ✓ OSS ✓ SP4N LAPOR
	8. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	8,82%	Diskominfo	Data Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah sebanyak 3 perangkat daerah yaitu: ✓ BAPPELITBANGDA ✓ BKPSDM ✓ DINAS DUKCAPIL
	9. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100%	Diskominfo	Data Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah sebanyak 34 perangkat daerah
	10. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100%	Diskominfo	Data Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data sebanyak 34 perangkat daerah
	11. Persentase data yang dapat berbagi pakai	8,82%	Diskominfo	Data Jumlah data yang dapat berbagi pakai sebanyak 3 data yaitu: ✓ SIPD ✓ SIAK ✓ SIMPEG
	12. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang	14,71%	Diskominfo	Data Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	mendukung smart city			city sebanyak 5 perangkat daerah YAITU: ✓ DISKOMINFO ✓ BKPSDM ✓ DPMPSTP-NAKERTRANS ✓ DPPK&UKM ✓ RSUD LATEMMAMALA ✓ BPKPD
	13. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	13,33%	Diskominfo	Data Jumlah ASN pengelola TIK dan piagam pegelora TIK sebanyak 3 ASN dari jumlah keseluruhan ASN Kominfo sebanyak 15 ASN
	14. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi egovernment, dengan dokumen master plan	ada	Diskominfo	Peraturan Bupati Soppeng Nomor 61/IX/2020 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Soppeng
2.O.3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	42,25%	Diskominfo	Data Jumlah Pengunjung Webside sebanyak 100495 kunjungan dari total jumlah penduduk 237875
	1. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	100%	Diskominfo	Data Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi dengan uraian Kelompok Informasi Masyarakat sebanyak 54 KIM, Media Cetak sebanyak 47 MC dan Media Online sebanyak 55 MO
	2. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100%	Diskominfo	Data Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi dengan uraian FB PEMKAB sebanyak 388 postingan, Youtube sebanyak 38 postingan, dan Instagram sebanyak 388 postingan
	3. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100%	Diskominfo	Data Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi dengan uraian PPID dan LAPOR, melampirkan ✓ SK Bupati Soppeng Nomor 126/I/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Soppeng ✓ SK Bupati Soppeng

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
				Nomor 152/II/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Soppeng ✓ SK Bupati Soppeng Nomor 319/VI/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrastrator Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021

- 3) Prestasi/penghargaan yang diraih
- Tidak ada prestasi atau penghargaan yang diraih oleh Dinas Komunikasi dan Informatika urusan komunikasi dan informasi pada tahun 2021

K. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Pada pelaksanaan urusan pelayanan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar pada Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Program Kegiatan
- Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan bukan dasar pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah dengan anggaran Rp 465.166.313 dan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi.

Pada Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

b) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Pada Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- BAB II-88

- c) Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Pada Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota
- d) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

Pada Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM), kegiatan yang dilaksanakan adalah :

 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.
- e) Program Pengembangan UMKM

Pada Program Pengembangan UMKM, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah, dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.19
IKK Output dan IKK Outcome
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
2.P.1	Menghitung Persentase Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	45,18%	Dinas PPK&UKM	Data Koperasi yang meningkat kualitas berdasarkan RAT, Volume usaha dan asset sebanyak 75 koperasi dari jumlah keseluruhan koperasi sebanyak 166 koperasi
	1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	17,69%	Dinas PPK&UKM	Data penerbitan ijin usaha simpan pinjam koperasi sebanyak 23 koperasi dari jumlah koperasi simpan pinjam sebanyak 166 koperasi
	2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi	n/a	Dinas PPK&UKM	jumlah penerbitan izin membuka kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam tidak ada yang dikeluarkan kerana tidak ada yang mengajukan

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			permohonan izin Surat Pernyataan Dinas P2K-UKM nomor 01/KUM-1-PPK&UKM/II/2022
	3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	25,90%	Dinas PPK&UKM	Data Koperasi yang diperiksa dan diawasi sebanyak 43 koperasi dari jumlah koperasi sebanyak 166 koperasi
	4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	42,48%	Dinas PPK&UKM	Data rekapitulasi penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam di Kabupaten Soppeng sebanyak 65 koperasi dari jumlah keseluruhan koperasi simpan pinjam sebanyak 153 koperasi
	5. Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	36,14%	Dinas PPK&UKM	Daftar nama koperasi yang mengikuti pelatihan dan pendidikan koperasi tahun 2021 sebanyak 60 koperasi dari jumlah koperasi 166 koperasi
	6. Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	18,15%	Dinas PPK&UKM	- Daftar nama anggota koperasi yang mengikuti pelatihan dan pendidikan koperasi tahun 2021 sebanyak 120 anggota - Daftar nama anggota koperasi sebanyak 661 anggota
	7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		Dinas PPK&UKM	- Koperasi yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian tahun 2021 sebanyak 5 koperasi - Data Jumlah Koperasi Kabupaten Soppeng sebanyak 166 koperasi
	8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	tidak perlu di isi	Dinas PPK&UKM	data tidak perlu di isi
	9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam	45,18%	Dinas PPK&UKM	Daftar koperasi telah menerima Sertifikat NIK sebanyak 75 koperasi dari Data Jumlah Koperasi Kabupaten Soppeng sebanyak 166 koperasi

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	daerah kabupaten/kota			
	10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota, dengan rumus sebagai berikut :	37,35%	Dinas PPK&UKM	Jumlah Koperasi yang diberi dukungan fasilitas pembiayaan sebanyak 62 koperasi dari Jumlah Koperasi di Kabupaten Soppeng sebanyak 166 koperasi
	11. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	n/a	Dinas PPK&UKM	Data koperasi yang diberi dukungan fasilitas pemasaran belum ada karena usaha koperasi hanya simpan pinjam dan pertokoan serta tidak adanya koperasi produksi Surat Keterangan Dinas P2K-UKM Nomor 02/KUM-2-PPK&UKM/ II/2022
	12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100%	Dinas PPK&UKM	Jumlah Koperasi Tahun 2021 di Kabupaten Soppeng sebanyak 166
	13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	n/a	Dinas PPK&UKM	Data Jumlah Koperasi yang diberikan fasilitas kemitraan UKM pada tahun 2021 tidak ada karena koperasi hanya simpan pinjam dan pertokoan Surat Pernyataan Dinas P2K-UKM nomor 03/KUM-1-PPK&UKM/II/2022
2.P.2	Menghitung persentase Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha, dengan rumus sebagai berikut :	7,50%	Dinas PPK&UKM	Data Usaha Mikro dan Wirausaha Tahun 2016-2021 di Kabupaten Soppeng sebanyak 535 dari jumlah usaha mikro dan wirausaha sebanyak 7129
	1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	28,04%	Dinas PPK&UKM	- Jumlah usaha mikro tahun 2020 sebanyak 430 - Jumlah usaha mikro tahun 2021 sebanyak 535
	2. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	n/a	Dinas PPK&UKM	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS) belum ada, karena belum ada aplikasi online data

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
				system (ODS) pada SKPD bersangkutan, Surat Keterangan Dinas P2K-UKM nomor 01/KUM.3/PPK&UKM/II/2021
	3. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	15,14%	Dinas PPK&UKM	Data Usaha Mikro yang bermitra dengan perbankan sebanyak 1079 dari jumlah Data Usaha Mikro di Kabupaten Soppeng sebanyak 7129
	4. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	15,40%	Dinas PPK&UKM	Usaha Mikro yang terfasilitasi standarisasi sebanyak 124 dan belum difasilitasi standarisasi Tahun 2021 sebanyak 756
	5. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	20,50%	Dinas PPK&UKM	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha sebanyak 115 dari jumlah usaha mikro di Kabupaten Soppeng sebanyak 756
	6. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	7,50%	Dinas PPK&UKM	Data Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitas sebanyak 535 dari Data Usaha Mikro Tahun 2016-2021 sebanyak 7129
	7. Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	n/a	Dinas PPK&UKM	Jumlah Usaha Mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha tidak terdapat data karena kegiatan pendampingan melalui lembaga pendampingan belum pernah dilakukan dan belum adanya usulan dari Desa/Kelurahan dan para pelaku usaha untuk difasilitasi pendampingan usaha, Surat Pernyataan Dinas P2K-UKM Nomor 02/Kum.3/PPK&UKM/II/2022

3) Prestasi/penghargaan yang diraih

Tidak ada prestasi atau penghargaan yang diraih oleh Dinas Perdagangan, Perindustria, Koperasi dan UKM urusan koperasi, usaha kecil dan menengah pada tahun 2021

L. URUSAN PENANAMAN MODAL

Pada pelaksanaan urusan pelayanan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar pada Bidang Penanaman Modal pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:

1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan bukan dasar pada Urusan Penanaman Modal, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, jumlah anggaran yang ditetapkan Rp.5.098.091.873 dan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program pelayanan penanaman modal

Pada Program pelayanan penanaman modal, kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota

b) Program Peendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pada Program Peendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota

c) Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota, kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
- Administrasi keuangan perangkat daerah
- Administrasi umum perangkat daerah
- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
- Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20
IKK Output dan IKK Outcome
Urusan Penanaman Modal

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
2.Q.2	Menghitung Persentase peningkatan investasi di	114,52%	Dinas PMPTSP-	- Data Jumlah Investasi tahun 2021

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	Kabupaten /Kota		NAKERTRANS	Rp57.658.667.253,- - Data Jumlah Investasi tahun 2020 di Kabupaten Soppeng Rp123.688.144.297,-
	1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Dinas PMPTSP-NAKERTRANS Nomor : 40/DPMTSP-NAKERTRANS/II/2022
	2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	31 SOP	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Data SOP Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif penanaman modal
	3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	70 LKPM	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal sebanyak 70 LKPM
	4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Dinas PMPTSP-NAKERTRANS Nomor : 42/DPMTSP-NAKERTRANS/II/2022
	5. Kegiatan pameran penanaman modal	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Dinas PMPTSP-NAKERTRANS Nomor : 43/DPMTSP-NAKERTRANS/II/2022
	6. Kegiatan penerimaan misipenanaman modal	n/a	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Surat Pernyataan Dinas PMPTSP-NAKERTRANS Nomor : 44/DPMTSP-NAKERTRANS/II/2022
	7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	19 kali	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Data Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan
	8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	1672 Perizinan dan non perizinan	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	- Jumlah penerbitan perizinan sebanyak 1648 - Jumlah penerbitan non perizinan sebanyak 24
	9. Laporan realisasi penanaman modal (Rp)	57.658.667.253,-	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Data Jumlah Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Terpantau di Kabupaten Soppeng Tahun 2021
	10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	7 orang	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Sertifikat ASN penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal
	11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	199 perusahaan	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	Data Jumlah Perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Soppeng

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	92,97%	Dinas PMPTSP-NAKERTRANS	- Data Laporan Penerbitan Surat Izin yang telah diserahkan Tahun 2021 sebanyak 1672 - Data Jumlah Pendaftaran Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2021 sebanyak 1812

- 3) Prestasi/penghargaan yang diraih
- Tidak ada prestasi atau penghargaan yang diraih oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi urusan penanaman modal pada tahun 2021

M. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

Pada pelaksanaan urusan pelayanan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar pada Bidang Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut:

- 1) Program Kegiatan
- Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan bukan dasar pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan anggaran Rp 5.031.513.141 dan program kegiatan sebagai berikut:
- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
- Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
- Perencanaan, Penganggaran, dan Eavaluasi Kinerja Perangkat daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat daerah
 - Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- Pada Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- Penyadara,Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
- Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

c) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Pada Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, pelaksanaan kegiatan seabgai berikut:

- Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

d) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Pada Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21
IKK Output dan IKK Outcome
Urusan Kepemudaan dan Olahraga

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
2.R.1	Menghitung persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, dengan rumus sebagai berikut :	1,03%	DINAS PARPORA	Faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan ini adalah belum terprogramnya pelatihan kewirausahaan dalam bidang kepemudaan, sehingga kegiatan tersebut akan dilaksanakan di tahun selanjutnya.
	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	n/a	DINAS PARPORA	tidak terdapat data akibat pembatasan kegiatan masyarakat dan refocusing anggaran dengan Surat Pernyataan DISPARPORA nomor:556/61.d/DISPARPORA/II/2022
	2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	n/a	DINAS PARPORA	tidak terdapat data akibat pembatasan kegiatan masyarakat dan refocusing anggaran dengan Surat Pernyataan DISPARPORA nomor:556/61.d/DISPARPORA/II/2022

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
2.R.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	5,49%	DINAS PARPORA	Data pemuda usia 16-30 tahun yang aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan sebanyak 2925 orang dari jumlah pemuda usia 16-30 tahun di kabupaten sppeng sebanyak 53278 orang
	1. Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawana n dan kepeloporan pemuda	n/a	DINAS PARPORA	tidak terdapat data akibat pembatasan kegiatan masyarakat dan refocusing anggaran dengan Surat Pernyataan DISPARPORA nomor:556/61.c/DISPARPORA/II/2022
	2. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	n/a	DINAS PARPORA	tidak terdapat data akibat pembatasan kegiatan masyarakat dan refocusing anggaran dengan Surat Pernyataan DISPARPORA nomor:556/61.c/DISPARPORA/II/2022
2.R.3	Peningkatan Prestasi Olahraga		DINAS PARPORA	Daftar atlit berprestasi peraih medali tahun 2021
	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	2 medali	DINAS PARPORA	
	1. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	46 pelatih	DINAS PARPORA	Daftar pelatih olahraga tahun 2021
	2. Jumlah penyelenggaraa n event OR prestasi tingkat daerah	n/a	DINAS PARPORA	tidak terdapat data akibat pembatasan kegiatan masyarakat dan refocusing anggaran dengan Surat Pernyataan DISPARPORA nomor:556/61.b/DISPARPORA/II/2022

- 3) Prestasi/penghargaan yang diraih
- Penghargaan yang dicapai oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga selama satu tahun Khususnya Bidang Keolahraagaan meliputi:

a) Penghargaan Tingkat Provinsi

Penghargaan perseorangan yang diraih dalam kejuaraan tenis Meja kelompok Umur Se-Sulawesi Selatan tahun 2021 sebanyak 4 Orang, penghargaan perseorangan dalam Kejuaraan tenis meja kelompok umur Se Sul-SelBar tahun

2021 sebanyak 2 Orang dan penghargaan perseorangan dalam kejuaraan menembak Kapolda Sul-Sel Cup IX 2021 adalah 1 orang.

b) Penghargaan Tingkat Nasional.

Penghargaan perseorangan dalam kejuaraan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) sebanyak 2 orang yang terdiri dari 1 orang pada cabang olahraga Tenis Meja dan 1 orang dari cabang olahraga Lempar Lembing.

N. URUSAN STATISTIK

Pada pelaksanaan urusan pelayanan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar pada Bidang Statistik pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan bukan dasar pada Urusan Statistik, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan anggaran Rp. 143,950,000 dan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Kegiatan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Pada Program Kegiatan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral, uraian kegiatan sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut:

1) Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Statistik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.22
IKK Output dan IKK Outcome
Urusan Statistik

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
2.S.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan	100%	DIKOMINFO	Data Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah sebanyak 34 OPD

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	daerah			
	1. Tersedianya buku profil daerah	ada	DIKOMINFO	SOPPENG DALAM ANGKA 2021
	2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	8 sektoral	DIKOMINFO	Screenshoot Web Kabupaten Soppeng (soppeng.kab.go.id pada laman satatistik yaitu: 1. Ekonomi 2. Geografis 3. Pemerintahan 4. Kependudukan 5. Sosial 6. Industri 7. Pariwisata 8. Perdagangan
	3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	2 sektoral	DIKOMINFO	Data Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan oleh Kominfo, yaitu: 1. Jumlah TV Kabel 2. Jumlah Media
	4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	n/a	DIKOMINFO	Surat Pernyataan Dinas KOMINFO
	5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	n/a	DIKOMINFO	Surat Pernyataan Dinas KOMINFO
	6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	2 sektoral	DIKOMINFO	Surat BPS Kab. Soppeng Nomor: B-081/BPS/7312/06/12/2021
	7. Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	n/a	DIKOMINFO	Surat Pernyataan Dinas KOMINFO
2.S.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	34 OPD	DIKOMINFO	Data Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah sebanyak 34 OPD

3) Prestasi/penghargaan yang diraih

Tidak ada prestasi atau penghargaan yang diraih oleh Dinas Komunikasi dan Informatikan urusan statistik pada tahun 2021

O. URUSAN PERSANDIAN

Pada pelaksanaan urusan pelayanan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar pada Bidang Persandian pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan bukan dasar pada Urusan Persandian, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan anggaran Rp. 48,350,000 dan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Kegiatan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengamanan Informasi

Kegiatan Program Kegiatan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengamanan Informasi, adalah sebagai berikut:

1) Pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik

Kegiatan Pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik, adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik

2) Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut:

- Operasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.23
IKK Output dan IKK Outcome
Urusan Persandian

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
2.T.1	Mengukur tingkat keamanan informasi pemerintah	49,40%	DIKOMINFO	Indeks KAMI
	1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya	n/a	DIKOMINFO	Data tdak ada

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan			
	2. Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	100%	DIKOMINFO	Data Surat Sandi Tahun 2021 sebanyak 539
	3. Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	n/a	DIKOMINFO	Surat Keterangan Dis KOMINFO
	4. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	100%	DIKOMINFO	Penerapan mail sanpati (JKS) "Sanapati.net" sebanyak 1 titik

- 3) Prestasi/penghargaan yang diraih
- Tidak ada prestasi atau penghargaan yang diraih oleh Dinas Komunikasi dan Informatika urusan persandian pada tahun 2021

P. URUSAN KEBUDAYAAN

Pada pelaksanaan urusan pelayanan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar pada Bidang Kebudayaan pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Program Kegiatan
- Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan bukan dasar pada Urusan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan anggaran Rp 506.620.000 dan program kegiatan sebagai berikut:
- a) Program Pengembangan Kesenian Tradisional
- Pada Program Pengembangan Kesenian Tradisional, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan kegiatan pada Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut:
 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
- b) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Pada Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:
 - 1) Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
Pelaksanaan kegiatan pada Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut:
 - Pengembangan Cagar Budaya
- 2) Indikator Kinerja Kunci
Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24
IKK Output dan IKK Outcome
Urusan Pendidkan dan Kebudayaan

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
2.U.1	Mengukur persentase Terlestarikannya Cagar Budaya	25%	Dinas Dikbud	Cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 8 CB dari jumlah keseluruhan cagar budaya sebanyak 32 CB
	1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi	52 OK	Dinas Dikbud	Data jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi
	2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	49 PK	Dinas Dikbud	Data Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)
	3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	n/a	Dinas Dikbud	Tidak terdapat data
	4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata	15 lembaga	Dinas Dikbud	Data SDM Lembaga dan pranata yang dibina

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)			(peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)
	5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	n/a	Dinas Dikbud	Tidak terdapat data
	6. Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	n/a	Dinas Dikbud	Surat Pernyataan nomor 432.1/849/DIKBUD/III/2022 Surat Pernyataan nomor 432.1/850/DIKBUD/III/2022
	7. Layanan perijizinan membawa cagar budaya kabupaten ke luar kabupaten dengan dukungan data	n/a	Dinas Dikbud	Data tidak ada
	8. Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi) Jumlah pengembangan cagar budaya di kabupaten	28 cb	Dinas Dikbud	Data Jumlah Cagar Budaya di teliti
	9. Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata) Jumlah CB dimanfaatkan	32 cb	Dinas Dikbud	data cagar budaya yang dimanfaatkan tahun 2021
	10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	348 koleksi	Dinas Dikbud	Data Koleksi museum latemmamala kabupaten soppeng
	11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana	3524 pengunjung	Dinas Dikbud	Data pengunjung museum tahun 2021

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	dan prasarana museum.			
	12. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	tidak perlu di isi	Dinas Dikbud	tidak perlu di isi
	13. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	n/a	Dinas Dikbud	Data tidak ada
	14. Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	n/a	Dinas Dikbud	Data tidak ada
	15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	n/a	Dinas Dikbud	Data tidak ada
	16. Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	26 orang	Dinas Dikbud	SK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng Nomor 047/SK/DIKBUD/IV/2021
	17. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	n/a	Dinas Dikbud	Data tidak ada
	18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	n/a	Dinas Dikbud	Data tidak ada
	19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	7 kegiatan	Dinas Dikbud	Data kegiatan ddi museum

- 3) Prestasi/penghargaan yang diraih
- Tidak ada prestasi atau penghargaan yang diraih oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan urusan kebudayaan pada tahun 2021

Q. URUSAN PERPUSTAKAAN

Pada pelaksanaan urusan pelayanan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar pada Bidang Perpustakaan pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut:

- 1) Program Kegiatan
- Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan bukan dasar pada Urusan Perpustakaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan anggaran Rp 7.286.743.182 dan program kegiatan sebagai berikut:

- a) Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan
- Pada pelaksanaan Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan, dengan kegiatan sebagai berikut:
- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
- b) Program Pembinaan Perpustakaan
- Pada pelaksanaan Program Pembinaan Perpustakaan, dengan kegiatan sebagai berikut:
- Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
 -

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25
IKK Output dan IKK Outcome
Pelaksanaan Urusan Perpustakaan

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
2.V.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat ✓ Indikator Frekuensi Membaca ✓ Indikator Durasi Membaca ✓ Indikator Jumlah Bahan Bacaan	150 kali 120 menit 4:1 orang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat, dengan Menghitung tingkat kegemaran membaca masyarakat melalui pengukuran indikator ✓ Indikator Frekuensi Membaca = 180 kali ✓ Indikator Durasi Membaca = 225 menit ✓ Indikator Jumlah Bahan Bacaan = 101112 judul buku Dengan mengambil sampel jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah sebanyak 27077 kunjungan
	1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	1:1,46	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	data koleksi buku dipergustakaan sebanyak 298149 excamplar dibagi Data Jumlah Penduduk usia 6-70

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
				tahun 2021 di Kabupaten Soppeng sebanyak 203957 orang
	2. Pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	13,32%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	data kunjungan masyarakat diperpustakaan sebanyak 27165 eksamplar dibagi Data Jumlah Penduduk usia 6-70 tahun 2021 di Kabupaten Soppeng sebanyak 203957 orang
	3. Ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,12%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	data jumlah pemustakaan di kabupaten soppeng sebanyak 252 petugas dibagi Data Jumlah Penduduk usia 6-70 tahun 2021 di Kabupaten Soppeng sebanyak 203957 orang
	4. Perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	42,22%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data perpustakaan yang ber SNP di Kabupaten Soppeng sebanyak 19 perpustakaan dari jumlah seluruh perpustakaan di kabupaten soppeng sebanyak 54 perpustakaan
	5. Pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	7 kelompok	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat sebanyak 7 kelompok sebagai berikut: Kelompok Baca Polres Kelompok Baca Citta Kelompok Baca Taman Kalong Kelompok Baca Ganra Kelompok Baca Ganra Kelompok Baca Rumah Sakit Latemmmala
2.P.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	28,74%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Indek pembangunan literasi masyarakat diambil dari ✓ Data jumlah layanan perpustakaan sebanyak 52 layanan ✓ Data jumlah judul buku duiperpustakaan sebanyak 101112 judul ✓ Data Julah pemustakaan ✓ Data Jumlah kunjungan diperpustakaan sebanyak 27077 kunjungan ✓ Jumlah anggota perpustakaan sebanyak 123 anggota Yang dibagi jumlah warga negara usia 6-70 di Kabupaten sebanyak 222358 orang ✓ Data jumlah Perpustakaan Ber SNP sebanyak 19

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
				perpustakaan dibagi jumlah keseluruhan perpustakaan di Kabupaten Soppeng sebanyak 45 perpustakaan
	1. Naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	n/a	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	jumlah naska kuno yang dialih bahasakan tidak ada Surat Pernyataan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nomor 34.a/DPK/II/2022
	2. Naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	n/a	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	jumlah naska kuno yang dialih bahasakan tidak ada Surat Pernyataan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nomor 34.a/DPK/II/2022
	3. Koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada diwilayahnya (item)	n/a	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	jumlah naska kuno yang dialih bahasakan tidak ada Surat Pernyataan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nomor 34.a/DPK/II/2022

- 3) Prestasi/penghargaan yang diraih
- Tidak ada prestasi atau penghargaan yang diraih oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan urusan perpustakaan pada tahun 2021

R. URUSAN KEARSIPAN

Pada pelaksanaan urusan pelayanan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar pada Bidang Kearsipan pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut:

- 1) Program Kegiatan
- Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan bukan dasar pada Urusan Kearsipan, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan anggaran Rp 56.326.500 dan program kegiatan sebagai berikut:

a) Progam Pengelolaan Arsip

Pada pelaksanaan Progam Pengelolaan Arsip, dengan kegiatan sebagai berikut:

- Pengelolaan Arsip Dinamis Kabupaten/Kota

- Pengelolaan Arsip Dinamis Kabupaten / Kota

- Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota
- 2) Indikator Kinerja Kunci
- Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.26
IKK Output dan IKK Outcome
Pelaksanaan Urusan Kearsipan

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
2.W.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	25%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Arsip Aktif yang telah dibuatkan daftar arsip
	1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Arsip Aktif yang telah dibuatkan daftar arsip sebanyak 544 arsip
	2. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	n/a	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data tidak ada
	3. Arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	n/a	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data tidak ada
	4. Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	n/a	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data tidak ada
2.W.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	n/a	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data tidak ada
	1. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	n/a	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Surat PernyataanDinas Perpustakaan dan Kearsipan Nomor 34b/DPK/II/2022
	2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	n/a	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Surat PernyataanDinas Perpustakaan dan Kearsipan Nomor 34b/DPK/II/2022
	3. Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	n/a	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Surat PernyataanDinas Perpustakaan dan Kearsipan Nomor 34b/DPK/II/2022

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	4. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	n/a	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Surat Pernyataan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nomor 34b/DPK/II/2022
	5. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	n/a	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Surat Pernyataan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nomor 34b/DPK/II/2022

3) Prestasi/penghargaan yang diraih

Tidak ada prestasi atau penghargaan yang diraih oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan urusan kearsipan pada tahun 2021

2.2.3.2 Urusan Pilihan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Urusan Pilihan merupakan Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah, oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

A. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pada pelaksanaan urusan pilihan pada Bidang Kelautan dan Perikanan pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pilihan pada Urusan Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan sebanyak 5 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 15 kegiatan dengan anggaran Rp. 8.196.909.898 dengan realisasi anggaran Rp.7.883.815.909 dan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- Kegiatan pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap adalah sebagai berikut:
- 1) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabuapten/ Kota
 - 2) Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota
- c) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- Kegiatan pada Program Pengelolaan Perikanan Budidaya adalah sebagai berikut:
- 1) Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
 - 2) Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
- d) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- Kegiatan pada Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:
- 1) Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota
- e) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- Kegiatan pada Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan adalah sebagai berikut:
- 1) Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
 - 2) Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.27
IKK Output dan IKK Outcome
Urusan Kelautan dan Perikanan

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
3.A.1	Jumlah Total Produksi	3425,7	Dinas	Data Produksi Perikanan

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota	ton	Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	Tangkap dan Perikanan Budidaya Tahun 2021
	1. Rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	120 KK	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	RTP Nelayan yang melakukan diversifikasi usaha tahun 2021
	2. Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	2 beroperasi	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	Daftar Nama Pendaratan Ikan Tahun 2021
	3. Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota yang diterbitkan	a/n	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	data tidak ada disebabkan karena tidak ada pembudidaya ikan yang mengajukan permohonan izin, Surat Pernyataan Dinas PKHP Nomor 804/66.1/DPKHP/II/2022
	4. Pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan	15 kelompok	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	Data Daftar Nama Kelompok Pembudidaya lakan yang Dibina Tahun 2021
	5. Benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	8,7 ton	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	Data Pembenihan Budidaya Tahun 2021

3) Prestasi/penghargaan yang diraih

Tidak ada prestasi atau penghargaan yang diraih oleh Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan pada tahun 2021

B. URUSAN PARIWISATA

Pada pelaksanaan urusan pilihan pada Bidang Pariwisata pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pilihan pada Urusan Pariwisata, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Pariwisata,

Kepemudaan dan Olahraga dengan anggaran Rp 575.155.599 dan program kegiatan sebagai berikut:

- a) Program Peningkatan daya Tarik Destinasi Pariwisata

Pada Program Peningkatan daya Tarik Destinasi Pariwisata, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

 - Pengelolaan Destinasi Pariwsata Kabupaten/Kota
- b) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Pada Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.28
IKK Output dan IKK Outcome
Urusan Pariwisata

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
3.B.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	n/a	DINAS DISPARPORA	data wisatawan mancanegara tidak terdapat data surat pernyataan DISPARPORA nomor 556/61.b/DISPARPORA/II/2022
	1. Entitas pengelolaan destinasi	52 pengelola	DINAS DISPARPORA	SK Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Nomor 88/DISPARPORA/XII/2021
	2. Kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	120 unit	DINAS DISPARPORA	Data Jumlah kengkapan infarastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di Kabupaten Soppeng yang terdiri dari: ✓ Jumlah Infrastruktur dasar = 12 ✓ Jumlah Fasilitas Umum = 42 ✓ Jumlah Fasilitas pariwisata = 66
	3. Tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	565 buah	DINAS DISPARPORA	Data Usaha Pariwisata Tahun 2021 terdiri dari: ✓ Jumlah Daya Tarik usaha Wisata = 60 ✓ Jumlah Kawasan pariwisata = 2 ✓ Jumlah Jasa makanan dan minuman = 230

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
				✓ Jumlah Penyediaan akomodasi = 271 ✓ Jumlah Spa = 2
	4. Wisatawan mancanegara	n/a	DINAS DISPARPORA	data wisatawan mancanegara yang berkunjung di Kabupaten soppeng tidak terdapat data diakibatkan pembatasan kunjungan wisatawan luar negeri ke Kabupaten Soppeng sesuai dengan Surat Pernyataan DISPARPORA nomor 556/61.f/DISPARPORA/II/2012
	5. Promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	n/a	DINAS DISPARPORA	data wisatawan mancanegara yang berkunjung di Kabupaten soppeng tidak terdapat data diakibatkan pembatasan kunjungan wisatawan luar negeri ke Kabupaten Soppeng sesuai dengan Surat Pernyataan DISPARPORA nomor 556/61.f/DISPARPORA/II/2012
	6. Event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	n/a	DINAS DISPARPORA	data wisatawan mancanegara yang berkunjung di Kabupaten soppeng tidak terdapat data diakibatkan pembatasan kunjungan wisatawan luar negeri ke Kabupaten Soppeng sesuai dengan Surat Pernyataan DISPARPORA nomor 556/61.f/DISPARPORA/II/2012
	7. Industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	n/a	DINAS DISPARPORA	data wisatawan mancanegara yang berkunjung di Kabupaten soppeng tidak terdapat data diakibatkan pembatasan kunjungan wisatawan luar negeri ke Kabupaten Soppeng sesuai dengan Surat Pernyataan DISPARPORA nomor 556/61.g/DISPARPORA/II/2012
	8. Tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	n/a	DINAS DISPARPORA	data tidak tenaga kerja pariwisata bersertifikat Surat Pernyataan DISPARPORA nomor 556/61.g/DISPARPORA/II/2012
	9. SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan, dengan rumus sebagai berikut:	100%	DINAS DISPARPORA	Data peserta pembekalan pariwisata pada duta wisata Kabupaten Soppeng dan duta pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan dibuktikan dengan sertifikat sebanyak 24 orang
	10. Lokasi yang memperoleh	n/a	DINAS DISPARPORA	data wisatawan mancanegara yang berkunjung di Kabupaten

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat			soppeng tidak terdapat data diakibatkan pembatasan kegiatan masyarakat di Kabupaten Soppeng sesuai dengan Surat Pernyataan DISPARPORA nomor 556/61.e/DISPARPORA/II/2012
3.B.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	3,66%	DINAS DISPARPORA	data jumlah kunjungan wisatawan nusantara pada tahun 2021 di Kab. Soppeng naik 3,66% dari tahun 2020
3.B3	Tingkat Hunian Akomodasi	21,84%	DINAS DISPARPORA	Data jumlah kamar yang terjual sebanyak 5919 dari jumlah kamar terediah sebanyak 271, yang menandakan kunjungan wisatawan lokal masih mendominasi kunjungan pariwisata
3.B.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	4,97%	DINAS DISPARPORA	Data Bersumber Dari BPS Soppeng Dalam Angka 2021 dengan kontribusi sektok pariwisata sebanyak Rp617.440.000 dari jumlah total PDRB Kabupaten Soppeng sebanyak Rp 12.426.780.000
3.B.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	0,81%	DINAS DISPARPORA	Data PAD Pariwisata Tahun 2021 sebanyak Rp27.697.000 dari Total PAD Rp155.453.702.843,9

3) Prestasi/penghargaan yang diraih

Penghargaan perseorangan pada tingkat Provinsi yang diraih oleh 4 orang delegasi Kabupaten Soppeng dalam pemilihan Duta Wisata Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021. Penghargaan yang dicapai yakni Duta Wisata Kategori Best Talent diraih 1 orang dan Duta Wisata Kategori Favorit diraih 1 orang.

C. URUSAN PERTANIAN

Pada pelaksanaan urusan pilihan pada Bidang Pertanian pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan dan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1) Program Kegiatan

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan

Untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pilihan pada Urusan Pertanian, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Tanaman Pangan,

Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan dengan anggaran Rp 27.659.204.073 dan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan, yaitu:

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pada pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sub kegiatan terdiri dari :

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pada pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sub kegiatan terdiri dari :

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pada pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatan terdiri dari :

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
- Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pada pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, sub kegiatan terdiri dari :

- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pada pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan terdiri dari :
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pada pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan terdiri dari :
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besarxc
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- b) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- Pada Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
- 1) Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
- Pada pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, sub kegiatan terdiri dari :
- Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi
 - Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
- 2) Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
- Pada pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, sub kegiatan terdiri dari :
- Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman
 - Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
- c) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- Pada Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian
Pada pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian, sub kegiatan terdiri dari :
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan / KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LCP2B
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
- 2) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian
Pada pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian, sub kegiatan terdiri dari :
 - Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
 - Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
 - Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
 - Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
- d) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Pada Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
Pada pelaksanaan Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, sub kegiatan terdiri dari :
 - Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- e) Program Penyuluhan Pertanian
Pada Program Penyuluhan Pertanian, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
Pada pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, sub kegiatan terdiri dari :
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
 - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

- Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
- Sub Kegiatan Pembentukan Badan Usaha Milik Petani
- Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan

Untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pilihan pada Urusan Pertanian, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan dengan anggaran Rp 8.196.909.898 dan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sub kegiatan terdiri dari :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sub kegiatan terdiri dari :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

3) Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sub kegiatan terdiri dari :

- Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah.

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatan terdiri dari :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan/ Material
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, sub kegiatan terdiri dari :

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan terdiri dari :
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan terdiri dari :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- b) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- Pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
- 1) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya
- Pada Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya, sub kegiatan terdiri dari :
- Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
- 2) Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota
- Pada Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota, sub kegiatan terdiri dari :
- Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
- c) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- Pada Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
- 1) Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
- Pada Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil, sub kegiatan terdiri dari :
- Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
- Pada Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, sub kegiatan terdiri dari :

- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
- d) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- Pada Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
- 1) Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota
- Pada Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota, sub kegiatan terdiri dari :
- Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota
- e) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- Pada Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
- 1) Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
- Pada Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil, sub kegiatan terdiri dari :
- Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
- 2) Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
- Pada Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, sub kegiatan terdiri dari :
- Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
- 3) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
- Pada Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, sub kegiatan terdiri dari :
- Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.29
IKK Output dan IKK Outcome
Urusan Pertanian

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
3.C.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	547,45%	DINAS TPHPKP	Data Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi dan Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Di Kabupaten Soppeng Tahun 2021
	1. Sarana dan prasana pertanian yang diberikan, dengan rumus sebagai berikut:	287 paket	DINAS TPHPKP	Data Jumlah Sarana Prasarana yang diberikan tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut: ✓ Sarana = 213 paket ✓ Prasarana = 74 paket
	2. Prasarana pertanian yang digunakan	213 paket	DINAS TPHPKP	Data Jumlah Sarana Prasarana yang diberikan tahun 2021
	3. Penerbitan izin usaha pertanian	25 izin	DINAS TPHPKP	Data Daftar Fasilitas Penerbitan Izin Usaha Pertanian (IUP) Tahun 2021
	4. Prasarana yang digunakan	100%	DINAS TPHPKP	Data Jumlah Sarana Prasarana yang diberikan tahun 2021 sebanyak 74 paket
	5. Jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	100%	DINAS TPHPKP	Data Daftar Fasilitas Penerbitan Izin Usaha Pertanian (IUP) Tahun 2021 sebanyak 25 izin dan permohonan
3.C.2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	-42,86%	DINAS TPHPKP	Data kasus kejadian/kasus hewan menular tahun 2021 dan tahun 2020 data kasus menurun dari tahun sebelumnya dari 21 kasus tahun 2020 menjadi 13 kasus di tahun 2021
	1. Fasilitas penanggulangan bencana	100%	DINAS TPHPKP	Daftar Lokasi Penanggulangan Bencana Padi Puso Akibat Banjir Di Kabupaten Soppeng sebanyak 1524 Ha

3) Prestasi/penghargaan yang diraih

Penghargaan yang dicapai pada Tahun 2021 adalah Penghargaan Abdi Bakti Tani dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan pada tahun 2021

D. URUSAN PERDAGANGAN

Pada pelaksanaan urusan pilihan pada Bidang Perdagangan pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi., Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pilihan pada Urusan Perdagangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan anggaran Rp 16.503.713.377 dan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan

Pada Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan, dengan kegiatan yaitu :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Pada Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan kegiatan yaitu :

- Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
- Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

c) Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Pada Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, dengan kegiatan yaitu :

- Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

d) Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Pada Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, dengan kegiatan yaitu :

- Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Usaha Kecil dan Menengah dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30
IKK Output dan IKK Outcome
Urusan Perdagangan

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
3.F.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	3,77%	DINAS PPK&UKM	Data rekapan penerbitan surat izin usaha (SIUP) perdagangan tahun 2021 sebanyak 177 pelaku usaha dengan dari Data pelaku Usaha wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2021sebanyak 4691pelaku usaha
	1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :		DINAS PPK&UKM	
	✓ izin pusat belanja	n/a	DINAS PPK&UKM	tidak ada data jumlah izin belanja yang diterbitkan Surat Pernyataan Dinas P2K-UKM Nomor 14/PERDAG PPKMUKM/II/2022 - tidak ada data pemohon izin pusat belanja yang mengajukan Surat Pernyataan Dinas P2K-UKM Nomor 18/PERDAG PPKUKM/II/2022
	✓ izin 123ook swalayan	100%	DINAS PPK&UKM	Data Toko Modern Swalayan Dalam Wilayah Kabupaten Soppeng yang diteritkan pada Tahun 2021 sebanyak 10 izin dari jumlah permohonan sebanyak 10 pemohon 2021
	2. Penerbitan TDG	100%	DINAS PPK&UKM	Data Gudang yang terbit pada tahun 2021 sebanyak 7 gudang dari jumlah pemohon penerbitan izin gudang sebanyak 7 permohoan
	3. Gudang yang tidak mempunyai TDG	17,95%	DINAS PPK&UKM	Data Gudang yang terbit pada tahun 2021 sebanyak 7 gudang dari data Laporan Penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG) Tahun 2021 sebanyak 39 gudang
	4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu ✓ Penerima waralaba	n/a	DINAS PPK&UKM	'tidak ada data penerima waralaba dari waralaba yang bermohon

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	lanjutan dari waralaba dalam negeri			untuk STPW Waralaba Surat Pernyataan Dinas P2K-UKM Nomor 13/Perdag PPK-UKM/II/2022
	✓ Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	n/a		'tidak ada data penerima waralaba dari waralaba yang bermohon untuk STPW Waralaba Surat Pernyataan Dinas P2K-UKM Nomor 13/Perdag PPK-UKM/II/2022
	5. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	n/a	DINAS PPK&UKM	- Tidak ada data jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten, karena tidak ada pengusaha yang mengajukan izin bahan berbahaya, Surat Pernyataan Dinas P2K-UKM Nomor 17/PERDAG PPKUKM/II/2022 - Tidak ada penerbitan surat SIUP bahan berbahaya karena tidak ada pemohon untuk penerbitan SIUP bagi pengecer Surat Pernyataan Dinas P2K-UKM Nomor 11/PERDAG ppkukm/ii/2021
	6. Penerbitan SKA yang tepat waktu	n/a	DINAS PPK&UKM	Tidak terlaksana karena belum terdaftar sebagai instansi penerbit surat keterangan asal (IPSKA) sebagai mana tercantum dalam KEPMENDAG-RI Nomor 896 Tahun 2019, Surat Pernyataan Dinas P2K-UKM Nomor 15/PERDAG PPKUKM/II/2022
	7. Pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	20%	DINAS PPK&UKM	- Data Pasar yang telah direvitalisasi tahun 2021 sebanyak 2 - Data Pasar Rakyat Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 sebanyak 18
	8. Koefisien variasi harga antar waktu	3,36%	DINAS PPK&UKM	Data Perkembangan Harga Rata-Rata Kebutuhan Pokok Masyarakat Di Tingkat Perdagangan Bulan Januari-Desember 2021
3.F.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	26,81%	DINAS PPK&UKM	- Data Realisasi Pupuk yang tersalurkan tahun 2021 sebanyak 30,827 ton - Data Targer Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) (RDKK) Tahun 2022 sebanyak 115,001 ton

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	1. Pupuk dan pestisida yang tersalurkan - Jumlah pupuk yang disalurkan - Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK - RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)	30,827 ton 103,501 ton 115,001 ton	DINAS PPK&UKM	Data Realisasi Pupuk yang tersalurkan Data Targer Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) (RDKK) Tahun 2022 Data E-RDKK (Ton)
3.F.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	70,55%	DINAS PPK&UKM	- Data Hasil Pelayanan Sidang Tera fan Tera Ulang Kabupaten Soppeng Tahun 2021 sebanyak 1919 unit - Data Potensi Alat-Alat UTTP Wilayah Kerja Kabupaten Soppeng sebanyak 2720
	1. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	70,55%	DINAS PPK&UKM	- Data Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan sebanyak 1919 unit - Data Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di Kabupaten/Kota sebanyak 2720 unit
	2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	100%	DINAS PPK&UKM	Dat Jumlah Sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku tahun 2021 sebanyak 6559

3) Prestasi/penghargaan yang diraih

Tidak ada prestasi atau penghargaan yang diraih oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah urusan perindustrian pada tahun 2021

E. URUSAN PERINDUSTRIAN

Pada pelaksanaan urusan pilihan pada Bidang Perindustrian pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah adalah sebagai berikut:

1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pilihan pada Urusan Perindustrian, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan anggaran Rp 1.611.409.000 dan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Kegiatan Urusan Perindustrian

Pada Program Kegiatan Urusan Perindustrian, dengan kegiatan yaitu :

- Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

b) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Pada Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, dengan kegiatan yaitu :

- Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.31
IKK Output dan IKK Outcome
Urusan Perindustrian

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
3.G.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	47,62%	DINAS PPK&UKM	- Data industri tahun 2021 sebanyak 31 industri - Data industri tahun 2020 sebanyak 21 industri
	1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	100%	DINAS PPK&UKM	Data Jumlah Izin yang diterbitkan tahun 2021 sebanyak 31 isin usaha
3.G.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan	20%	DINAS PPK&UKM	- Lampiran Data RIPIN yang diterapkan di Kabupaten sebanyak 2 kegiatan - Lampiran Data RIPIN menurut PP Nomor 14 Tahun 2015 sebanyak 10 kegiatan

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	dalam RPIK			
	1. Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA, dengan Capaian target tahapan penyelesaian RPIK yaitu :	100%	DINAS PPK&UKM	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK yaitu: Tersusunnya naskah akademik - Tersusunnya Draft Raperda RPIK = 30% - Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provins= 20% - Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi = 15% - Penetapan Perda RPIK = 10%
3.G.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	DINAS PPK&UKM	Data Jumlah Izin yang dipatau dan dikeluarkan tahun 2021 sebanyak 31 dari jumlah perohonan sebanyak 31 permohonan
	1. Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha 127ndustry (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	100%	DINAS PPK&UKM	Data Jumlah Izin yang dipatau dan dikeluarkan tahun 2021 sebanyak 31 dari jumlah perohonan sebanyak 31 permohonan
3.G.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	n/a	DINAS PPK&UKM	Data tidak ada data di sebabkan tidak adanya pemohon/pengajuan izin yang masuk Surat Pernyataan Dinas P2K-UKM Nomor 87.a/IND/PPKUKM/II/2022
	1. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPIU) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	n/a	DINAS PPK&UKM	Data tidak ada
3.G.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya	n/a	DINAS PPK&UKM	Data tidak ada

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	di Daerah Kabupaten/Kota			
3.G.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini, dengan rumus sebagai berikut: 1. Keterkinian informasi industri : ➤ Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) ➤ Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) ➤ Tidak menyampaikan informasi industri (0%)	Tidak ada ada	DINAS PPK&UKM DINAS PPK&UKM DINAS PPK&UKM	Data kemajuan industri
	2. Kelengkapan informasi industri meliputi : ➤ Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)	n/a	DINAS PPK&UKM	
	➤ Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)	n/a		
	1. Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	n/a	DINAS PPK&UKM	Penerapan SIINas belum dilaksanakn pada tahun 2021, Surat Pernyataan DP2K-UKM nomor 86.a/IND/PPKUKM/ I/2021

- 3) Prestasi/penghargaan yang diraih
- Tidak ada prestasi atau penghargaan yang diraih oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah urusan perindustrian pada tahun 2021

F. URUSAN TRANSMIGRASI

Pada pelaksanaan urusan pilihan pada Bidang Transmigrasi pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:

1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pilihan pada Urusan Transmigrasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan anggaran yang ditetapkan Rp.152.399.500 dan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Pada Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi, kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Sat Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.32
IKK Output dan IKK Outcome
Urusan Transmigrasi

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
3.H	1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	1 uptd	DINAS PMPTSP-NAKERTRANS	KEPMENDES-PDT-TRANS Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021
	2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	88 KK		Data Kepala Keluarga di daerah transmigrasi
	3. Jumlah satuan pemukiman yang dibina	1 pemukiman		KEPMENDES-PDT-TRANS Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi Oleh Pemerintah

				Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021

- 3) Prestasi/penghargaan yang diraih
- Tidak ada prestasi atau penghargaan yang diraih oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi urusan transmigrasi pada tahun 2021

2.2.3.3 Urusan Penunjang Pemerintahan

Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 dapat diuraikan pda tabel sebagai berikut :

A. PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Pada pelaksanaan urusan pilihan pada Bidang Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu:

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

- 1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan pada Perencanaan dan Keuangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapat Daerah anggaran yang ditetapkan sebanyak Rp.145.519.073.481 dengan program kegiatan sebagai berikut:

 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut :

 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari:

 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari:

 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 3) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, terdiri dari:

 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
 - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari:

- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari:
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari:
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari:
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- b) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- Pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :
- 1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
- Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, terdiri dari:
- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

- Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
- 2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, terdiri dari:
- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri dari:
- Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
- 4) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari:
- Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
 - Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
- c) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari:
- Penyusunan Standar Harga
 - Pengamanan Barang Milik Daerah

- Penilaian Barang Milik Daerah
- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

d) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari:

- Perencanaan pengelolaan pajak daerah
- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- Penagihan Pajak Daerah
- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Penunjang Pemerintahan pada Perencanaan dan Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.33
IKK Output dan IKK Outcome
Urusan Penunjang Pemerintahan Perencanaan dan Keuangan
Yang Dilaksanakan Oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
4.A.1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	13,78	BPKPD	Data Jumlah belanja pegawai tahun 2021
4.A.2	Rasio PAD		BPKPD	Data Rasio PAD Tahun 2021 bersumber dari BPS (Soppeng Dalam Angka 2022) PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Soppeng (miliar rupiah) 2017-2021
4.A.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)		BPKPD	transfer expenditures adalah hibah, bantuan sosial, subsidi, pembayaran bunga, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga dan data belanja urusan pemerintahan adalah

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
				seluruh belanja daerah di luar belanja modal
4.A.6	Opini Laporan Keuangan	WTP	BPKPD	Data penghargaan opini laporan keuangan 10 tahun
	✓ Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2021	WTP	BPKPD	
	✓ Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2020	WTP	BPKPD	
	✓ Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2019	WTP	BPKPD	
	✓ Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2018	WTP	BPKPD	
	✓ Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2017	WTP	BPKPD	
	✓ Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2016	WTP	BPKPD	
	✓ Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2015	WTP	BPKPD	
	✓ Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2014	WTP	BPKPD	
	✓ Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2013	WTP	BPKPD	
	✓ Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2012	WTP	BPKPD	
	✓ Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2011	WTP	BPKPD	
	✓ Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2010	WTP	BPKPD	
	✓ Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2009	WTP	BPKPD	

3) Prestasi/penghargaan yang diraih

Penghargaan yang diperoleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kabupaten Soppeng pada tahun 2021, antara lain :

- **Penghargaan Pemerintah Pusat**

Penghargaan dari Bank Indonesia sebagai Pemerintah Daerah Terbaik 2 dengan Porsi Nominal Transaksi Pendapatan melalui Qris Terbanyak pada tahun 2021

Inspektorat Daerah

1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan pada Perencanaan dan Keuangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Inspektorat Daerah dengan anggaran Rp Rp 10.397.524.026 dan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan terdiri dari :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b) Program Penyelenggaraan Pengawasan

Pada Program Penyelenggaraan Pengawasan, kegiatan terdiri dari :

- Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

c) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Pada Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, kegiatan terdiri dari:

- Pendampingan dan Asistensi

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Penunjang Pemerintahan pada Perencanaan dan Keuangan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34
IKK Output dan IKK Outcome
Urusan Penunjang Pemerintahan Perencanaan dan Keuangan
Yang Dilaksanakan Oleh Inspektorat Daerah

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	TARGET CAPAIAN (RPJMD) 2021/ CAPAIAN LPPD TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
4.A.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 2	Level 2	Inspektorat	Pada peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan tingkat Kualitas APIP pada level 2 disebabkan tingkat tindak lanjut temuan pada tahun 2021 sebanyak 262 temuan dan yang diselesaikan sebanyak 156 temuan atau persentase penyelesaian temuan 59,54% dan temuan BPK pada tahun 2021 sebanyak 741 temuan dan ditindak lanjuti dari temuan BPK sebanyak 530 temuan atau 71,52%
4.A.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 2	Level 2	inspektorat	

- 3) Prestasi/penghargaan yang diraih
- Tidak ada penghargaan pada tahun 2021

B. PENGADAAN

Pada pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan pada Bidang Pengadaan pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Sekeretariat Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Program Kegiatan
- Untuk mendukung pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan pada Pengadaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Sekretariat Daerah dengan anggaran Rp. 511.954.600,- dan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

b) Program Perekonomian dan Pembangunan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
- Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
- Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35
IKK Output dan IKK Outcome
Urusan Penunjang Pemerintahan Pengadaan
Yang Dilaksanakan Oleh Sekretariat Daerah

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
4.B.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	n/a	Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Berdasarkan data kontrak pengadaan barang jasa konstruksi tahun 2021, tidak ada kontrak jasa konstruksi yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal, surat pernyataan Nomor 80/B.BPJ/II/2022
4.B.2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	84%	Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Data kontrak paket pekerjaan pengadaan jasa konstruksi kabupaten soppeng tahun 2021 sebanyak 84 paket Data pengadaan barang/jasa melalui metode penunjukan langsung Pemerintah Kabupaten Soppeng tahun 2021 sebanyak 1 paket
4.B.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	49,77%	Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan realisasi dan kativasi pengadaan Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021 per bulan Desember 2021 pada belanja langsung sebanyak Rp.583.431.549.766 dan belanja modal Rp.290.348.896.182

C. KEPEGAWAIAN

Pada pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan di Bidang Kepegawaian pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan pada Kepegawaian, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, jumlah anggaran yang ditetapkan Rp9.412.785.948,- dengan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b) Program Kepegawaian Daerah

- Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
- Mutasi dan Promosi ASN
- Pengembangan Kompetensi ASN
- Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

c) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

- Pengembangan Kompetensi Teknis
- Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.36
IKK Output dan IKK Outcome
Urusan Penunjang Pemerintahan Kepegawaian
Yang Dilaksanakan Oleh
Badan Kepegawaian, Pengembang Sumber Daya Manusia

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
4.C.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BKPSDM	Realisasi 6,76% dari target 7,06 terlihat masih tingginya ASN yang berpendidikan SMA kebawah, ini diakibatkan ASN yang berpendidikan SMA kebawah adalah Cleaning Service dan umur mereka rata-rata hampir pensiun
4.C.2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BKPSDM	Realisasi 0,24% dari Target 0,25% hampir mencapai target ini akibat dilaksanakannya penyetaraan Jabatan Struktural ke dalam Jabatan Fungsional sebanyak 224 ASN
4.C.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		Bidang Pengembangan SDM, Bidang Mutasi, Promosi dan Penilaian	Realisasi 74,49% dari target 85,91% belum mencapai target akibat bertambahnya pejabat fungsional yang disetarakan dari jabatan fungsional pada akhir desember serta banyak pejabat structural yang belum mengikuti diklat kepemimpinan karena keterbatasan anggaran

- 3) Prestasi/penghargaan yang diraih
- Tidak ada prestasi/penghargaan yang diraih tahun 2021

D. MANAJEMEN KEUANGAN

Pada pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan di Bidang Manajemen Keuangan pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

- Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan pada Perencanaan dan Keuangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapat Daerah, jumlah anggaran Rp.145.519.073.481 dengan program kegiatan sebagai berikut:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - 2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- c) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengelolaan Barang Milik Daerah
- d) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37
IKK Output dan IKK Outcome
Urusan Penunjang Pemerintahan Manajemen Keuangan
Yang Dilaksanakan Oleh
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
4.D.1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam	7,28%	BPKPD	Kurang dari 7,28% anggaran yang tidak terialisasi atau 92,72% anggaran sudah

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	APBD			teralisasi dari target yang telah ditetapkan sebelum perubahan, perlunya pada tahun kedepannya agar ditingkatkan realisasi penggunaan anggaran pada tingkat SKPD
4.D.2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD,	21,61%	BPKPD	Capaian pada tahun 2021 melebihi dari target RPJMD tahun 2021 yaitu 21,41% dari target yang telah ditetapkan
4.D.3	Assets Management 1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	Ya Ya Ya Ya	BPKPD BPKPD BPKPD BPKPD	Data Assets Management yang telah didata dan dicatat pada data assets secara manual dan secara digital oleh SKPD, dengan adanya berita acara rekon Assets yang telah ditandatangani oleh pejabat pengelola, dan pejabat pemeriksa asset
4.D.4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	9,23%	BPKPD	Data Silpa tahun 2020 dan total belanja sebalum

- Prestasi/penghargaan yang diraih
Penghargaan yang diperoleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng pada tahun 2021, antara lain :
- **Penghargaan Pemerintah Pusat**
Penghargaan dari Bank Indonesia sebagai Pemerintah Daerah Terbaik 2 dengan Porsi Nominal Transaksi Pendapatan melalui Qris Terbanyak pada tahun 2021

E. TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK

Pada pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan di Bidang Transparansi dan Partisipasi Publik pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh 10 (sepuluh) Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu:

Dinas Komunikasi dan Informatika

- 1) Program Kegiatan
Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan bukan dasar pada Urusan Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan anggaran Rp. 7.301.640.265 dan program kegiatan sebagai berikut:

- a) Program Kegiatan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota
- Pada Program Kegiatan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, uraian kegiatan sebagai berikut:
- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Pelaksanaan kegiatan pada Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Pelaksanaan kegiatan pada Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
 - Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Pelaksanaan kegiatan pada Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:
 - Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
 - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pelaksanaan kegiatan pada Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:
 - Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
 - Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian
 - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pelaksanaan kegiatan pada Administrasi Umum Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan rumah tangga
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan/material
 - Fasilitasi kunjungan tamu
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 -

- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pelaksanaan kegiatan pada Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut:
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pelaksanaan kegiatan pada Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut:
 - Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pelaksanaan kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut:
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- b) Program Kegiatan Sub Kegiatan Informasi dan Komunikasi Publik
- Pada Program Kegiatan Sub Kegiatan Informasi dan Komunikasi Publik, uraian kegiatan sebagai berikut:
- 1) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan kegiatan pada Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut:
 - Monitoring opini dan aspirasi publik
 - Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi public
 - Pelayanan Informasi Publik
 - Kemitraan dengan pemangku kepentingan
 - Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik
 - Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas
- c) Program Kegiatan Sub Kegiatan Aplikasi Informatika
- Pada Program Kegiatan Sub Kegiatan Aplikasi Informatika, uraian kegiatan sebagai berikut:
- 1) Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan kegiatan pada Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut:

- Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota
 - Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah
- 2) Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan kegiatan pada Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut:
- Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah
 - Pengelolaan government chief information officer (GCIO)
- 2) Indikator Kinerja Kunci
- Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.38
IKK Output dan IKK Outcome
Urusan Penunjang Pemerintahan Transparasi dan Partisipasi Publik
Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
4.E.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100%	DINAS KOMINFO	Pelaksanaan Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan pada DINAS KOMINFO
4.E.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah:	100%	DINAS KOMINFO	Pelaksanaan Akses publik terhadap informasi keuangan daerah pada DINAS KOMINFO dengan adanya Webside Pemda yang memuat tentang transparasi anggaran daerah

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- 1) Program Kegiatan
- Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan bukan dasar pada Urusan Penanaman Modal, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, jumlah anggaran yang ditetapkan Rp.5.098.091.873 dan program kegiatan sebagai berikut:
- a) Program pelayanan penanaman modal
- Pada Program pelayanan penanaman modal, kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
- b) Program Peendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- Pada Program Peendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
- c) Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota
- Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota, kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - Administrasi keuangan perangkat daerah
 - Administrasi umum perangkat daerah
 - Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
- 2) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- Indikator Kinerja Kunci**
- Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39
IKK Output dan IKK Outcome
Urusan Penunjang Pemerintahan Transparasi dan Partisipasi Publik
Yang Dilaksanakan Oleh
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
4.E.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100%	DINAS PMPTSP-NAKERTRAN	Pelaksanaan Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan pada DPMPTSP-NAKERTRAN terdapat pada kegiatan Administrasi umum perangkat daerah dengan Pagu Anggaran Rp.255.531.682 danrealisasi Anggaran Rp.251.563.082 atau 98,45%

- 3) Prestasi/penghargaan yang diraih
- Tidak ada prestasi/ penghargaan yang diraih tahun 2021

Kecamatan Lalabata

1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan pada Transparansi dan Partisipasi Publik, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Kecamatan Lalabata, jumlah anggaran Rp 14.955.662.232 dengan program kegiatan sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program kegiatan tersebut terdiri dari :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

Program kegiatan tersebut terdiri dari :

- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program kegiatan tersebut terdiri dari :

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Pemberdayaan Kelurahan.

d) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program kegiatan tersebut terdiri dari :

- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

e) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program kegiatan tersebut terdiri dari :

- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Lalabata dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.40
IKK Output dan IKK Outcome
Urusan Penunjang Pemerintahan Transparasi dan Partisipasi Publik
Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Lalabata

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
4.E.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100%	Kecamatan Lalabata	Pelaksanaan Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan pada Kecamatan Liliriaja terdapat pada Program Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan Pagu Anggaran Rp 21.600.000 danrealisasi Anggaran Rp 21.600.000 atau 100 %

- 3) Prestasi/penghargaan yang diraih
- Tidak ada prestasi/penghargaan yang diraih pada tahun 2021

Kecamatan Liliriaja

- 1) Program Kegiatan
- Untuk mendukung pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan pada Transparasi dan Partisipasi Publik, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Kecamatan Liliriaja, jumlah anggaran Rp 5.748.184.992,- dengan program kegiatan sebagai berikut:
- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program kegiatan tersebut terdiri dari :
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.
- Program kegiatan tersebut terdiri dari :
- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- Program kegiatan tersebut terdiri dari :
- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- d) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program kegiatan tersebut terdiri dari :

 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program kegiatan tersebut terdiri dari :

 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- 2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Liliraja dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.41
IKK Output dan IKK Outcome
Urusan Penunjang Pemerintahan Transparasi dan Partisipasi Publik
Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Liliraja

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
4.E.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100%	Kecamatan Liliraja	Pelaksanaan Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan pada Kecamatan Liliraja terdapat pada Program Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan 150 perizinan non usaha dan 451 non perizinan yang dikeluarkan. Pagu Anggaran Rp Rp33.250.000danrealisasi Anggaran Rp3.250.000atau 100%

- 3) Prestasi/penghargaan yang diraih

Tidak ada penghargaan pada tahun 2021

Kecamatan Lilirilau

- 1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan pada Transparasi dan Partisipasi Publik, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Kecamatan Lilirilau dengan anggaran Rp 8.786.138.985 dan program kegiatan diuraikan sebagai berikut:

 - a) Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota

Pada Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota,terdiri dari :

 - 1) Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - 2) Administrasi keuangan perangkat daerah

Pelaksanaan Administrasi keuangan perangkat daerah, menghasilkan kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan penatausahaan atau pengujian/verifikasi keuangan skpd
- Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi skpd

3) Administrasi umum perangkat daerah

Pelaksanaan Administrasi umum perangkat daerah, menghasilkan kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan bahan logistik kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan bahan / material
- Fasilitas kunjungan tamu
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd

4) Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Pelaksanaan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah menghasilkan kegiatan sebagai berikut:

- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

5) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Pelaksanaan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, menghasilkan kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

6) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Pelaksanaan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, menghasilkan kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

b) Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Pada Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, terdiri dari :

- 1) Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
Pelaksanaan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, menghasilkan kegiatan sebagai berikut:
 - Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait
 - 2) Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
Pelaksanaan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, menghasilkan kegiatan sebagai berikut:
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 - Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non perizinan
- c) Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
Pada Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, terdiri dari :
- 1) Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
Pelaksanaan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, menghasilkan kegiatan sebagai berikut:
 - Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
 - 2) Kegiatan pemberdayaan kelurahan
Pelaksanaan Kegiatan pemberdayaan kelurahan, menghasilkan kegiatan sebagai berikut:
 - Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
 - Pemberdayaan masyarakat kelurahan
- d) Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
Pada Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, terdiri dari :
- 1) Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
Pelaksanaan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menghasilkan kegiatan sebagai berikut:
 - Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
- e) Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
Pada Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, terdiri dari :
- 1) Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa
 - Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
- 2) Indikator Kinerja Kunci
Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Lilirilau dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.42
IKK Output dan IKK Outcome
Urusan Penunjang Pemerintahan Transparasi dan Partisipasi Publik
Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Lilirilau

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
4.E.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100%	Kecamatan Lilirilau	Pelaksanaan Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan pada Kecamatan Lilirilau terdapat pada Program Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan Pagu Anggaran Rp 31.200.000 dan realisasi Anggaran Rp 28.750.000 atau 92,15%

- 3) Prestasi/penghargaan yang diraih
- Tidak ada prestasi yang dirai tahun 2021

Kecamatan Marioriwawo

- 1) Program Kegiatan
- Untuk mendukung pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan pada Transparasi dan Partisipasi Publik, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Kecamatan Marioriwawo, jumlah anggaran Rp. 6.265.738.617 dengan program kegiatan diuraikan sebagai berikut:
- a) Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
- Pada Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota,terdiri dari :
- Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - Administrasi keuangan perangkat daerah
 - Administrasi kepegawaian perangkat daerah
 - Administrasi umum perangkat daerah
 - Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
 - Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- b) Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
- Pada Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,terdiri dari :
- Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
 - Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
- c) Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
- Pada Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan,terdiri dari :

- Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
 - Kegiatan pemberdayaan kelurahan
- d) Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
- Pada Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum,terdiri dari :
- Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- e) Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
- Pada Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa,terdiri dari :
- Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Marioriwawo dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.43
IKK Output dan IKK Outcome
Urusan Penunjang Pemerintahan Transparasi dan Partisipasi Publik
Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Maririwawo

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
4.E.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100%	Kecamatan Marioriwawo	Pelaksanaan Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan pada Kecamatan Marioriwawo terdapat pada Program Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)

- 3) Prestasi/penghargaan yang diraih
- Tidak ada prestasi yang dirai tahun 2021

Kecamatan Marioriawa

1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan pada Transparasi dan Partisipasi Publik, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Kecamatan Marioriawa, jumlah anggaran Rp 2.639.191.234 dengan program kegiatan diuraikan sebagai berikut:

- a) Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
- Pada Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota,terdiri dari :
- Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - Administrasi keuangan perangkat daerah
 - Administrasi kepegawaian perangkat daerah
 - Administrasi umum perangkat daerah

- Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
 - Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- b) Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
- Pada Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,terdiri dari :
- Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
 - Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
- c) Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
- Pada Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan,terdiri dari :
- Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
 - Kegiatan pemberdayaan kelurahan
- d) Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
- Pada Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum,terdiri dari :
- Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- e) Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
- Pada Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa,terdiri dari :
- Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa
- 2) Indikator Kinerja Kunci
- Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
- Indikator Kinerja Kunci
- Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Marioriawa dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.44 IKK Output dan IKK Outcome Urusan Penunjang Pemerintahan Transparasi dan Partisipasi Publik Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Marioriawa				
NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
4.E.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100%	Kecamatan Marioriawa	Pelaksanaan Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan pada Kecamatan Marrioriawa terdapat pada Program Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan 50 perizinan non usaha dan 150 non perizinan yang diterbitkan. Pagu Anggaran Rp 7.200.000 dan realisasi Anggaran Rp 7.200.000 atau 100%

- 3) Prestasi/penghargaan yang diraih
Tidak ada prestasi yang diraih tahun 2021

Kecamatan Ganra

1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan pada Transparansi dan Partisipasi Publik, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Kecamatan Ganra jumlah anggaran Rp 2.447.164.301 dengan program kegiatan diuraikan sebagai berikut:

a) Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota

Pada Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota, terdiri dari :

- Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
- Administrasi keuangan perangkat daerah
- Administrasi kepegawaian perangkat daerah
- Administrasi umum perangkat daerah
- Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
- Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

b) Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Pada Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, terdiri dari :

- Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat

c) Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Pada Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, terdiri dari :

- Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa

d) Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

Pada Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, terdiri dari :

- Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

e) Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Pada Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, terdiri dari :

- Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ganra dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.45
IKK Output dan IKK Outcome
Urusan Penunjang Pemerintahan Transparasi dan Partisipasi Publik
Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Ganra

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
4.E.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100%	Kecamatan Ganra	Pelaksanaan Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan pada Kecamatan Ganra terdapat pada Program Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan 150 surat keterangan non izin dan perizinan yang diterbitkan. Pagu Anggaran Rp 21.600.000 danrealisasi Anggaran Rp21.600.000 atau 100%

- 3) Prestasi/penghargaan yang diraih
- Tidak ada prestasi yang dirai tahun 2021

Kecamatan Donri-Donri

- 1) Program Kegiatan
- Untuk mendukung pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan pada Transparasi dan Partisipasi Publik, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Kecamatan Donri-Donri dengan anggaran Rp 2.660.242.234 dan program kegiatan sebagai berikut:
- a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan terdiri dari :
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, kegiatan terdiri dari :
- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
- c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, kegiatan terdiri dari :
- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- d) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, kegiatan terdiri dari :
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, kegiatan terdiri dari :
- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Donri-Donri dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.45
IKK Output dan IKK Outcome
Urusan Penunjang Pemerintahan Transparasi dan Partisipasi Publik
Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Donri-Donri

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
4.E.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100%	Kecamatan Donri-Donri	Pelaksanaan Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan pada Kecamatan Donri-Donri terdapat pada Program Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan 100 perizinzn dan non perisinin yang diterbitkan. Pagu Anggaran Rp 16.800.000 danrealisasi Anggaran Rp16.800.000 atau 100%

3) Prestasi/penghargaan yang diraih

Tidak ada penghargaan pada tahun 2021

Kecamatan Citta

1) Program Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan pada Transparasi dan Partisipasi Publik, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Kecamatan Citta dengan anggaran Rp 2.133.682.921dan program kegiatan sebagai berikut:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan terdiri dari :
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Negara Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Negara Daerah Penunjang Urusan pemerintahan daerah
- b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, kegiatan terdiri dari :
- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
- c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, kegiatan terdiri dari :
- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- d) Program Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Pada Program Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, kegiatan terdiri dari :
- Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum
- e) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, kegiatan terdiri dari :
- Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

2) Indikator Kinerja Kunci

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Citta dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.47
IKK Output dan IKK Outcome
Urusan Penunjang Pemerintahan Transparasi dan Partisipasi Publik
Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Citta

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
4.E.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk	100%	Kecamatan Citta	Pelaksanaan Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan pada

	pelayanan			Kecamatan Citta terdapat pada Program Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan Pagu Anggaran Rp 21.600.000 danrealisasi Anggaran Rp21.600.000 atau 100%

- 3) Prestasi/penghargaan yang diraih
Tidak ada penghargaan pada tahun 2021

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng yang merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak terdapat Indikator Kinerja Kunci OutCome dan Indikator Kinerja Kunci Outcome, namun sangat mendukung pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan yaitu :

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut mempunyai anggaran, program dan kegiatan sebagai berikut :

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dalam mendukung pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Sekretariat DPRD dengan anggaran Rp 28.269.760.127 dan program kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdapat kegiatan sebagai berikut :
 - a) Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat daerah
 - c) Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah
 - d) Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah
 - e) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
 - g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - i) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - j) Layanan Administrasi DPRD

2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, terdapat kegiatan sebagai berikut :

- a) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
- b) Pembahasan Kebijakan Anggaran
- c) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
- d) Peningkatan Kapasitas DPRD
- e) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- f) Fasilitasi Tugas DPRD

Dari program kegiatan tersebut pada Sekretariat DPRD menghasilkan penetapan Peraturan Daerah sebanyak 10 Perda terdiri dari :

- Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
- Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021–2026
- Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kepemudaan
- Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penertiban Ternak Dan Hewan Lair
- Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
- Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Tingkat II Soppeng Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum
- Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembangunan Infrastruktur Daerah Sumber Dana Pinjaman Pemerintah Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional Dengan Kontrak Tahun Jamak
- Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
- Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Dalam mendukung pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan anggaran Rp 5.068.770.514 dan program kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Pada Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, pelaksanaan kegiatan terdiri dari:
 - a) Kegiatan Penyusunan perencanaan dan pendanaan
 - b) Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - c) Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah
- 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Daerah
Pada Program Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Daerah, pelaksanaan kegiatan terdiri dari:
 - a) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
 - b) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
 - c) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- 3) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Pada Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, pelaksanaan kegiatan terdiri dari:
 - a) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 - b) Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi
- 4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan kegiatan terdiri dari:
 - a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dari program kegiatan tersebut pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menghasilkan dokumen :

- Dokumen perencanaan berupa penyusunan RPJMD tahun 2021-2026 dan RKPD tahun 2022
- Dokumen Renstra tahun 2021
- Dokumen Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Soppeng 2021-2026

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam mendukung pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun Program Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan anggaran Rp 5.906.547.054 dan program kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, kegiatan terdiri dari:
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Pada Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, kegiatan terdiri dari:
 - a) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- 3) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
Pada Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, kegiatan terdiri dari:
 - a) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi , Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik
- 4) Program Pemberdayaan dan Pengawas Organisasi Kemasyarakatan
Pada Program Pemberdayaan dan Pengawas Organisasi Kemasyarakatan, kegiatan terdiri dari:
 - a) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- 5) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Pada Program Pemberdayaan dan Pengawas Organisasi Kemasyarakatan, kegiatan terdiri dari:
 - a) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- 6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, kegiatan terdiri dari:

- a) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Dari program kegiatan tersebut pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menghasilkan :

- Tingkat Kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Kewaspadaan Dini dan dalam Penanganan Konflik mencapai 95,57%

2.2.4 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

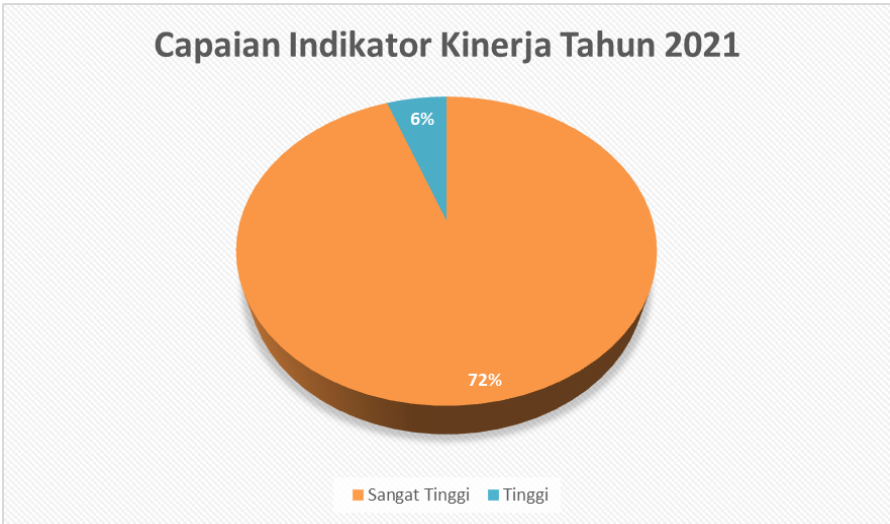
Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah merupakan pengukuran kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan visi misi kepala daerah yang dituangkan pada RPJMD yang dijabarkan tiap tahun pada rencana kerja pemerintahan daerah (RKPD). Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun rencana strategis pada perangkat daerah sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Soppeng ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 yang dijabarkan pada pada Peraturan Bupati Soppeng Nomor 34 Tahun 2021 Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.48

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017.



Secara umum Pemerintah Kabupaten Soppeng telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026. Untuk tahun 2021 telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 mencakup 11 (sebelas) sasaran dengan 18 (delapan belas) indikator kinerja.

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Soppeng mendapatkan berbagai penghargaan dari berbagai kementerian/instansi/lembaga atas pencapaian kinerja yang diterima pada tahun 2021 sampai dengan tanggal pelaporan kinerja diantaranya :

1. Penghargaan opini WTP dari BPK RI Perwakilan Makassar Tahun 2021 atas LKPD Tahun 2020
2. Penghargaan Swasti Saba Wistara untuk Kabupaten Soppeng dari Menteri Kesehatan atas keberhasilan dalam menyelenggarakan Kabupaten /Kota Sehat Tahun 2021 untuk Klasifikasi Taraf Pengembangan berdasarkan Kep.Menkes RI Nomor : HK.01.07/Menkes/6562/2021 tanggal 3 November 2021.



3. Piagam penghargaan Terbaik 2 sebagai Pemerintah Daerah dengan porsi nominal transaksi pendapatan melalui QRIS terbanyak dari Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.



4. Penghargaan kepada Bupati Soppeng Kategori Kepala Daerah Peduli Media dan Pers dari Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Makassar, tanggal 25 Maret 2021.



5. Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tingkat KLA Pratama Tahun 2021 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI pada tanggal 29 Juli 2021 (virtual zoom).



6. Piagam Penghargaan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk Kategori Pendataan Keluarga Dengan Pencapaian 100% Target KK Terdata Tepat Waktu 1 April -31 Mei 2021, tertanggal 2 Juni 2021.



7. Piagam Penghargaan Top 30 Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan untuk Inovasi “PANDU ALAN” dari Dinas TPHTP dan Inovasi “HORE ENKANI KTPku” dari Dinas Dukcapil di Makassar pada tanggal 6 September 2021.



8. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng, di Jakarta pada tanggal 23 September 2021.



9. Plakat dan Piagam Penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng atas keberhasilan dalam menyusun Laporan Keuangan Tahun 2020 dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Watampone, pada tanggal 15 Oktober 2021 di Lounge Kantor Bupati Soppeng.



10. Penghargaan Program Kampung Iklim (Proklam) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada tanggal 19 Oktober 2021 (virtual zoom) kepada :
 - Desa Ganra, Kecamatan Ganra sebagai Penerima Trofi Proklam Utama;
 - Desa Mattabulu, Kecamatan Lalabata sebagai Penerima Sertifikat Proklam Utama.



11. Piagam Penghargaan sebagai peserta Desa Binaan Kemenparekraf RI dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 pada tanggal 13 Desember 2021.



12. Juara 1 Lomba One Page Summary (OPS) pada acara South Sulawesi Digital Festival 2022 yang digelar oleh Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Selatan melalui Inovasi “One Man One Tax One QRIS” yang digagas oleh BPKPD Kab. Soppeng, diterima pada tanggal 24 Maret 2022.



Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam matriks sebagai berikut :

Tabel 2.49
Capaian Kinerja dan Predikat Kinerja Sasaran Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	
1	Meningkatnya mutu penerapan standar	1	Nilai rata-rata tingkat	100%	89,28%	89,28	Tinggi

	elayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar (S1)		capaian penerapan SPM				
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 1					89,28	Tinggi
2	Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar (S2)	2	IKM pelayanan publik non pelayanan dasar	84%	83,83%	99,80	Sangat Tinggi
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 2					99,80	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya derajat pendidikan, literasi dan kualitas fisik masyarakat (S3)	3	Indeks Pendidikan	62,34	62,32	99,96	Sangat Tinggi
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 3					99,96	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S4)	4	Indeks Kesehatan	76,8	76,63	99,78	Sangat Tinggi
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 4					99,78	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah (S5)	5	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,80	6,15	106	Sangat Tinggi
		6	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,4	3,92	112,24	Sangat Tinggi
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 5					109,12	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah (S6)	7	Angka Kemiskinan (%)	7,15%	7,53%	94,95	Sangat Tinggi
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 6					94,95	Sangat Tinggi
7	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah (S7)	8	Indeks Infrastruktur Daerah	61,63	69,45	112,68	Sangat Tinggi
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 7					112,68	Sangat Tinggi
8	Meningkatnya fasilitas ekonomi wilayah (S8)	9	Nilai PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Lainnya (milyar)	280,213	275,5	98,32	Sangat Tinggi
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 8					98,32	Sangat Tinggi
9	Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat (S9)	10	Angka Kriminalitas (Kasus)	86	92	93,94	Sangat Tinggi
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 9					93,94	Sangat Tinggi
10	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah (S10)	11	Nilai LPPD (Skor/Status Kinerja)	3,9/Tinggi	3,7/Tinggi	94,87	Sangat Tinggi
		12	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B	A	100	Sangat Tinggi
		13	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100	Sangat Tinggi
		14	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	60 (B)	59,18	98,63	Sangat Tinggi

		15	Indek Inovasi Daerah	30.00-35.00 (inovatif)	35,48 (inovatif)	100	Sangat Tinggi
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 10					98,70	Sangat Tinggi
11	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana (S11)	16	Indeks Risiko Bencana	131,20 (sedang)	131,20 (sedang)	100	Sangat Tinggi
		17	Potensi Penurunan Emisi GRK (Ton Co2)	36238 Ton Co2	36.240,33	99,99	Sangat Tinggi
		18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH)	65,83 poin	69,52	105,6	Sangat Tinggi
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 11					101,86	Sangat Tinggi

Analisis terhadap capaian kinerja masing-masing sasaran yang diukur dari tingkat capaian indikator kinerja sasaran sebagai berikut :



Berikut Hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran pada tabel berikut :

Tabel 2.50

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2021			Target Akhir Kinerja RPJMD 2026
				Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
Nilai rata-rata tingkat capaian penerapan SPM	79,72	-	-	100	89,28	89,28	100
Rata-Rata Capaian Sasaran 1						89,28	

❖ **Nilai rata-rata tingkat capaian penerapan SPM**

Pada tahun 2021 nilai rata-rata tingkat capaian penerapan SPM adalah sebesar 89,28%, masih dibawah target yang ditetapkan tahun 2021 dan akhir tahun RPJMD yaitu 100% atau capaian 89,28%, namun lebih tinggi dari kondisi awal pada tahun 2020 yaitu 79,72%.

Indikator ini dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Capaian SPM 6 Bidang SPM}}{6} \times 100\%$$

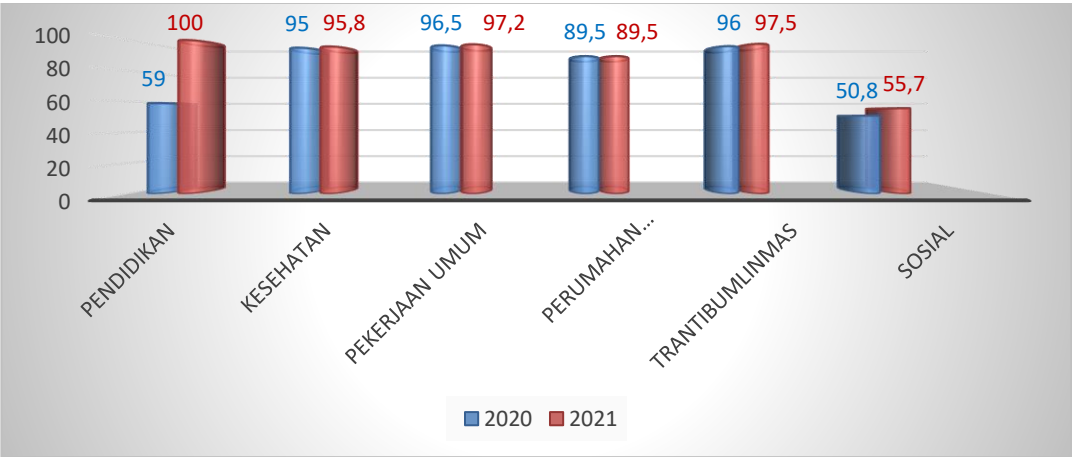
6

Adapun SPM 6 bidang urusan yaitu : Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman serta Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Walaupun belum mencapai target pada tahun 2021 namun nilai rata-rata tingkat capaian penerapan SPM tetap patut disyukuri.

Grafik 2.1

Trend tingkat capaian penerapan SPM per urusan kurun waktu 2020-2021



Faktor keberhasilan/kegagalan yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja adalah:

- ❖ Masyarakat saat ini bukan hanya mempersoalkan terpenuhi atau tidaknya kebutuhan akan pelayanan publik, akan tetapi sudah mempertanyakan mutu atau kualitas layanan publik yang mereka terima dari pemerintah.

Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah :

- ❖ Salah satu upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut adalah dengan melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai kinerja pelayanan yang disediakan oleh berbagai Unit Organisasi/Perangkat Daerah.

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.51
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Rata-rata capaian kinerja sasaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar (S1)	270.434.279.666	226.402.408.240,37	83,72	89,28	5,56

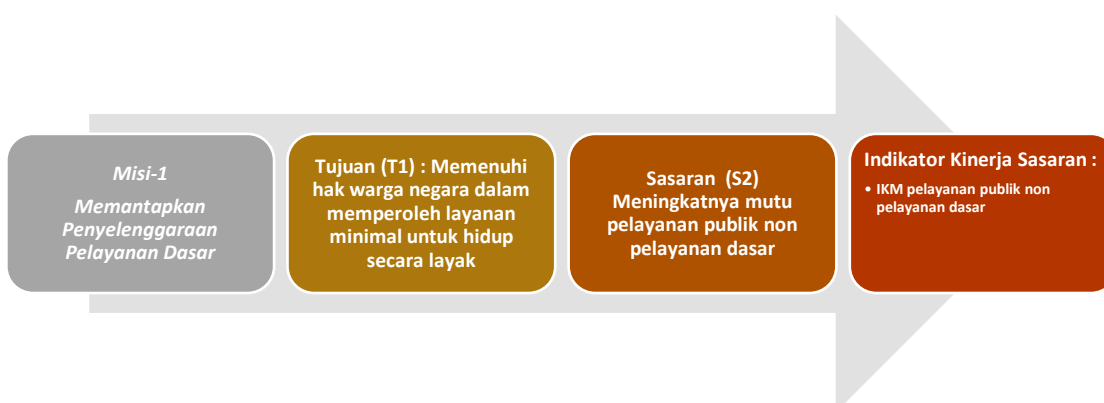
Untuk mendukung pencapaian sasaran dilaksanakan melalui :

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan
- 2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- 5) Program Pengembangan Perumahan
- 6) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 7) Program Penanggulangan Bencana
- 8) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- 9) Program Rehabilitasi Sosial
- 10) Program Penanganan Bencana

Total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 270.434.279.666 ,- terealisasi sebesar Rp.226.402.408.240,37,- atau 83,72%, Apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 84,65% maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) adalah 5,56%.

Sasaran 2

- **Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar (S2)**



Tabel 2.52 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2021			Target Akhir Kinerja RPJMD 2026
				Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
IKM pelayanan publik non pelayanan dasar	83,84	-	-	84	83,83	99,80	88
Rata-Rata Capaian Sasaran 2						99,80	

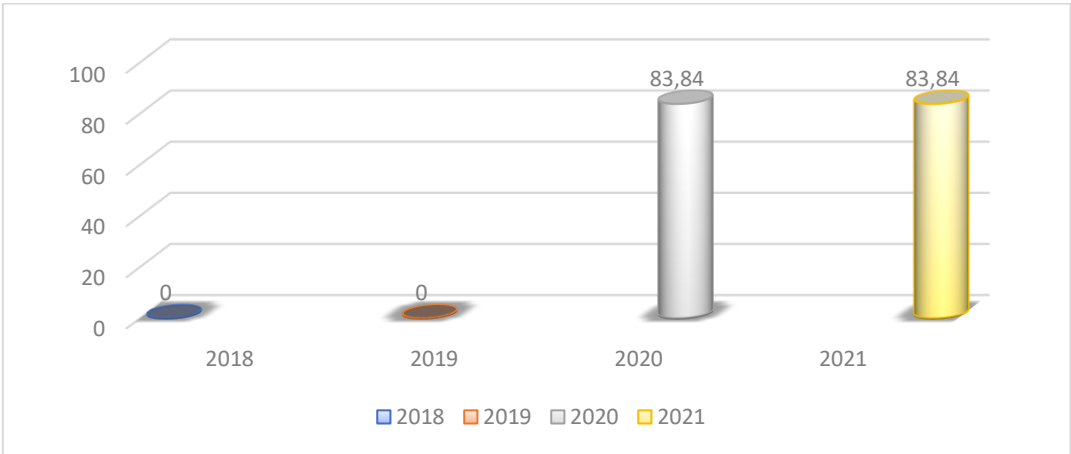
❖ IKM pelayanan publik non pelayanan dasar

IKM pelayanan publik non pelayanan dasar adalah sebesar 83,83%, masih dibawah target yang ditetapkan yaitu 84% atau capaian 99,80%, realisasi tersebut sedikit lebih rendah dari kondisi awal pada tahun 2020 yaitu 83,84%.



No.	UNSUR PELAYANAN			
U1	Persyaratan		3,330	B
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur		3,314	B
U3	Waktu Penyelesaian		3,115	B
U4	Biaya/Tarif		3,912	A
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan		3,307	B
U6	Kompetensi Pelaksana		3,317	B
U7	Perilaku Pelaksana		3,358	B
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan		3,306	B
U9	Sarana dan prasarana		3,222	B
83,83				
A (Sangat Baik) : 88,31- 100,00 88,31 100				
B (Baik) : 76,61-88,30 76,61 88,3				
C (Kurang/Baik) : 65,00-76,60 65 76,6				
D (Tidak Baik) : 25,00- 64,99 25 64,99				

Grafik 3.1 IKM pelayanan publik non pelayanan dasar tahun 2018-2021



Faktor keberhasilan/kegagalan yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja adalah:

- ❖ Masyarakat saat ini bukan hanya mempersoalkan terpenuhi atau tidaknya kebutuhan akan pelayanan publik, akan tetapi sudah mempertanyakan mutu atau kualitas layanan publik yang mereka terima dari pemerintah.

Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah :

- ❖ Melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai kinerja pelayanan yang disediakan oleh berbagai Unit Organisasi/Perangkat Daerah.

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.53 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Rata-rata capaian kinerja sasaran (%)	Tingkat efesiensi (%)
Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar (S2)	630.649.800	582.944.800	92,43	99,80	7,37

Untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar dilaksanakan melalui :

- 1) Program Pendaftaran Penduduk
- 2) Program Pencatatan Sipil
- 3) Program Pelayanan Penanaman Modal
- 4) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp.630.649.800,- terealisasi sebesar Rp.582.944.800,- atau 92,43%, dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya 7,37%.

Sasaran 3

• Meningkatkan derajat pendidikan, literasi dan kualitas fisik masyarakat (S3)



Berikut Hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran pada tabel berikut :

Tabel 2.54 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3

Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2021			Target Akhir Kinerja RPJMD 2026
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Pendidikan	61,87	60,35	61,16	62,34	62,32	99,96	68,6
Rata-Rata Capaian Sasaran 3						99,96	

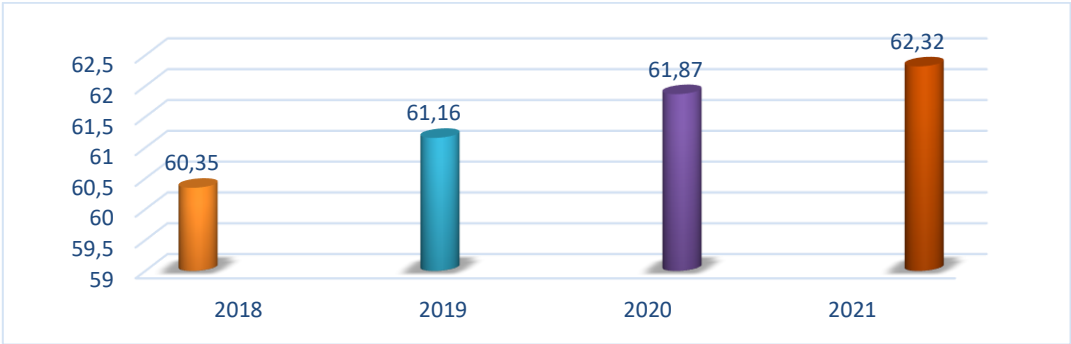
❖ **Indeks Pendidikan**

Indeks Pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator pembentuk yang diukur dalam Indeks Pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).

Pada tahun 2021 realisasi indikator kinerja Indeks Pendidikan sebesar 62,32 dari target 62,34 atau rata-rata capaian sasaran sebesar 99,96%. Rata-rata lama sekolah (RLS) yaitu 7,82 dan Harapan Lama Sekolah (HLS) yaitu 13,05. Realisasi kinerja indikator ini menunjukkan trend yang selalu meningkat dilihat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

Sementara itu bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2021 sebesar 68,6, hal ini berarti upaya yang dilakukan sudah berada pada jalur yang tepat.

Grafik 3.2 Indeks Pendidikan Tahun 2018 - 2021



Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan yang berpengaruh terdapat pencapaian kinerja sasaran adalah :

- ❖ Peningkatan kualitas guru dengan kualifikasi minimal S1
- ❖ Masih terdapat beberapa sekolah dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang tidak layak/tidak ada.

Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah :

- ❖ Pemenuhan Kualifikasi Minimal Guru S.1 dan Memperoleh Sertifikat
- ❖ Peningkatan Sumber Daya Kepala Sekolah dan Para Sekolah Penggerak
- ❖ Pemenuhan Pembiayaan Pendidikan Dasar

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :

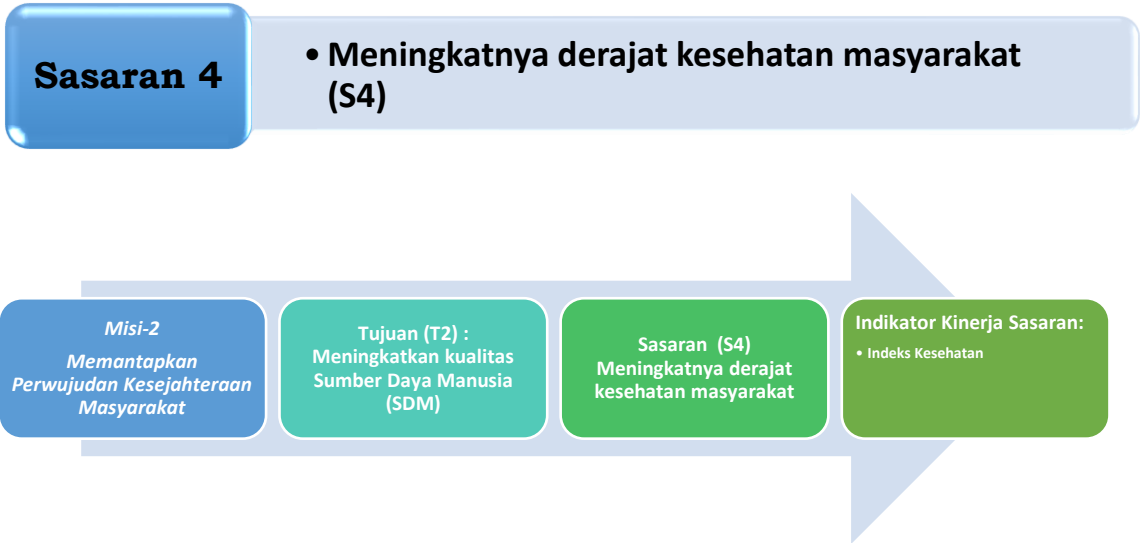
Tabel 2.55 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Sasaran	Anggaran	Realisasi	Serapan Anggaran (%)	Rata-rata capaian kinerja sasaran (%)	Tingkat efisiensi (%)
Meningkatnya derajat pendidikan, literasi dan kualitas fisik masyarakat	1.073.826.950	936.114.050	87,17	99,96	12,79

Adapun Program yang mendukung pencapaian sasaran adalah :

- 1) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- 3) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 1.073.826.950,- terelisasi sebesar Rp. 936.114.050,- atau 87,17%, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 99,96%, hal ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) sebesar 12,79%.



Berikut Hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran pada tabel berikut :

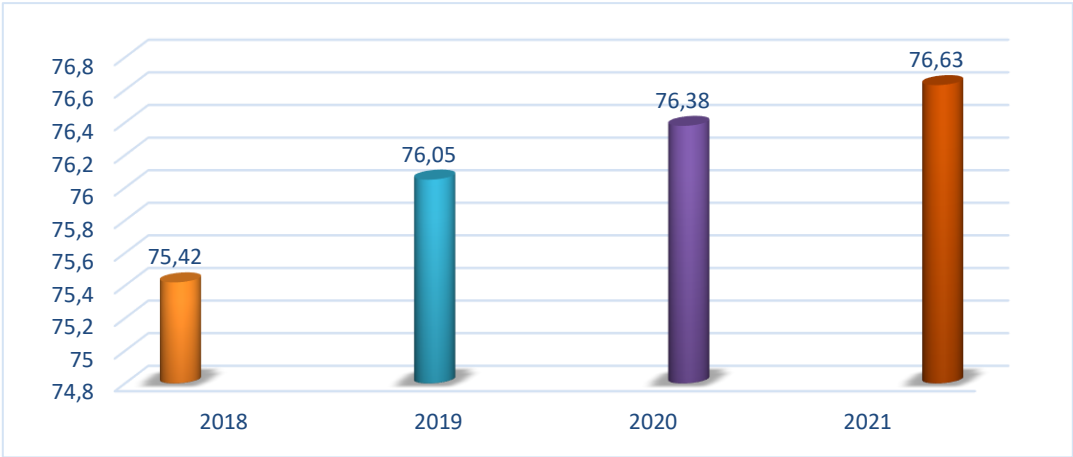
Tabel 2.56 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4

Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2021			Target Akhir Kinerja RPJMD 2026
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Kesehatan	76,38	75,42	76,05	76,8	76,63	99,78	79
Rata-Rata Capaian Sasaran 4						99,78	

❖ Indeks Kesehatan

Pada tahun 2021 Indeks Kesehatan sebesar 76,63 poin atau sedikit lebih rendah dibandingkan target yaitu 76,8 poin sehingga capaiannya sebesar 99,78%. Bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2021 sebesar 79% maka Indeks Kesehatan masih perlu upaya keras untuk mencapai target tersebut.

Grafik 3.3. Indeks Kesehatan Tahun 2018 - 2021



Faktor keberhasilan/kegagalan yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja sasaran adalah :

- ❖ Indeks kesehatan ditentukan secara langsung oleh angka harapan hidup. Indeks kesehatan kabupaten soppeng pada tahun 2021 meningkat dari tahun 2020, namun masih belum memenuhi target RPJMD yaitu sebesar 76,8 poin. Faktor yang mempengaruhi antara lain adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020 dan 2021 yang secara langsung memengaruhi angka kesakitan masyarakat maupun faktor-faktor lain yang mengakibatkan laju peningkatan angka harapan hidup belum maksimal sesuai target.

Solusi/ Alternatif penyelesaian masalah :

- ❖ Meningkatkan kerja sama lintas sektor antara pemangku kepentingan yang mendukung peningkatan angka harapan hidup sehingga indeks kesehatan dapat mencapai target di tahun berikutnya.

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :

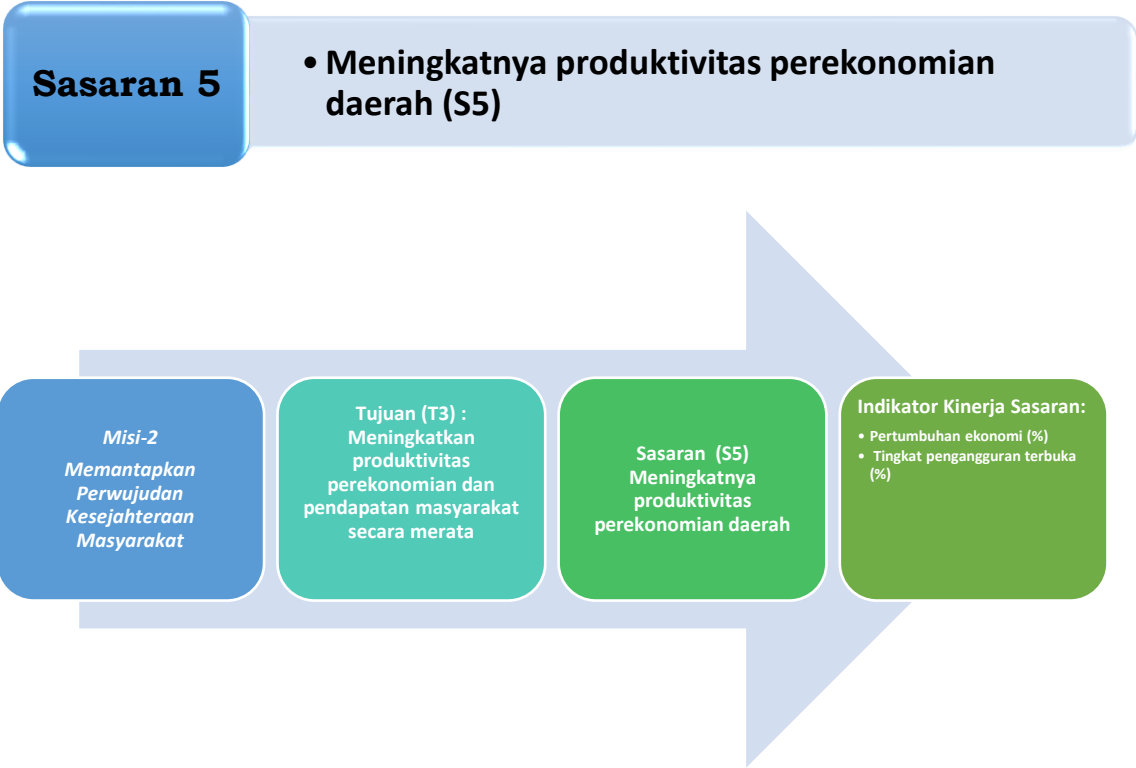
Tabel 2.57
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Sasaran	Anggaran	Realisasi	Serapan Anggaran (%)	Rata-rata capaian kinerja sasaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S4)	152.245.965.812	118.902.591.021,37	78,10	99,78	21,68

Adapun Program yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat adalah :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp152.245.965.812,- dan terealisasi sebesar Rp118.902.591.021,37,- atau 78,10%, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 99,78% maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) sebesar 21,68%.



Berikut Hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran pada tabel berikut :

Tabel 2.58. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 5

Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2021			Target Akhir Kinerja RPJMD 2026
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
Pertumbuhan ekonomi (%)	2,19	8,11	7,16	5,80	6,15	106	6,82
Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,42	2,36	3,24	4,40	3,92	112,24	3,70
Rata-Rata Capaian Sasaran 5						109,12	

❖ **Pertumbuhan ekonomi**

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Soppeng. PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Soppeng tahun 2021

sebesar 12.426,78 milyar rupiah. PDRB atas dasar harga konstan tahun dasar 2010 Kabupaten Soppeng tahun 2021 sebesar 7.585,98 milyar rupiah.

Untuk pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2021 Kabupaten Soppeng mencapai 6,15 persen atau termasuk 5 besar kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi tercepat pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan target indikator pertumbuhan ekonomi 5,80% maka capaian indikator ini sebesar 106%. Indikator ini menunjukkan capaian yang cukup memuaskan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang hanya sebesar 2,19% serta bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD yaitu 6,82%. Indikator tersebut sudah tergolong dalam kondisi yang baik karena sudah mengalami peningkatan signifikan.

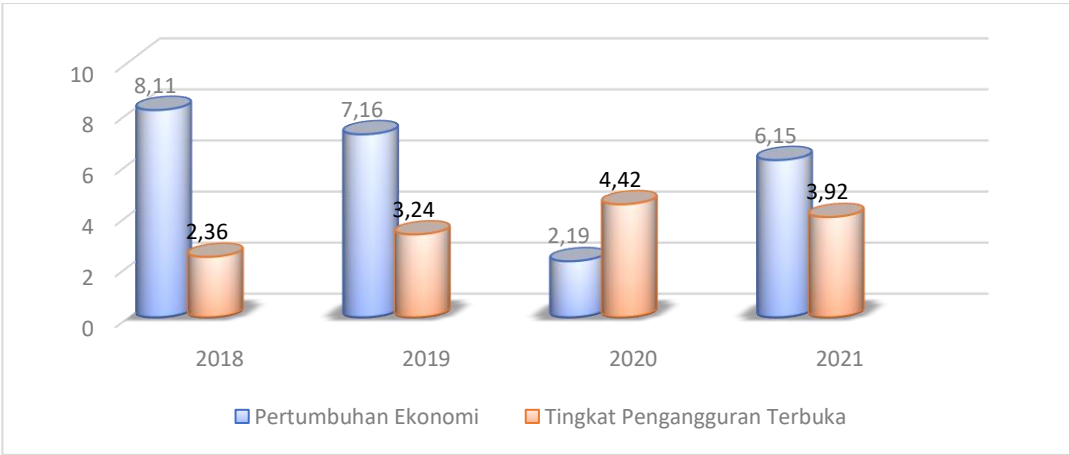
❖ **Tingkat pengangguran terbuka**

Jumlah populasi Kab. Soppeng pada tahun 2021 sebanyak 235.574 jiwa, ada sebanyak 108.914 angkatan kerja usia 15 tahun ke atas dan 4.269 penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan pengangguran terbuka.

Pada tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka yaitu 3,92 yang menunjukkan perkembangan yang cukup baik bila dibandingkan dengan target tahun 2021 yaitu 4,40% atau capaian 112,24%. Sementara bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD, pencapaian pada tahun 2021 sudah tergolong baik karena sudah mendekati persentase target akhir 3,70%.

Grafik 3.4

Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018-2021



Faktor keberhasilan/kegagalan yang berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja sasaran adalah :

- ❖ Adanya kelompok penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, kelompok penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja, juga terdapat penduduk yang mendapatkan Kartu Pencari Kerja namun setelah mulai bekerja tidak melaporkan ke Dinas DPMPSTSP-Nakertrans bahwa sudah mulai bekerja sehingga semua kelompok tersebut masih dihitung sebagai pengangguran terbuka.
- ❖ Laju pertumbuhan PDRB pada tahun 2021 sebesar 6,15 persen dimana kategori yang memiliki laju pertumbuhan paling tinggi yaitu kategori lapangan usaha penyedia akomodasi dan makan minum tumbuh sebesar 12,72 persen diikuti lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 12,06 persen.

Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah :

- ❖ Memperbaiki sistem pencatatan pencari kerja berbasis elektronik yang mudah, murah dan cepat;
- ❖ Mendorong pelaksanaan event-event olahraga, seni, pariwisata dan berbagai sektor lainnya dengan tujuan meningkatkan perputaran ekonomi yang memiliki multiplier effect terhadap perekonomian.

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.59
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

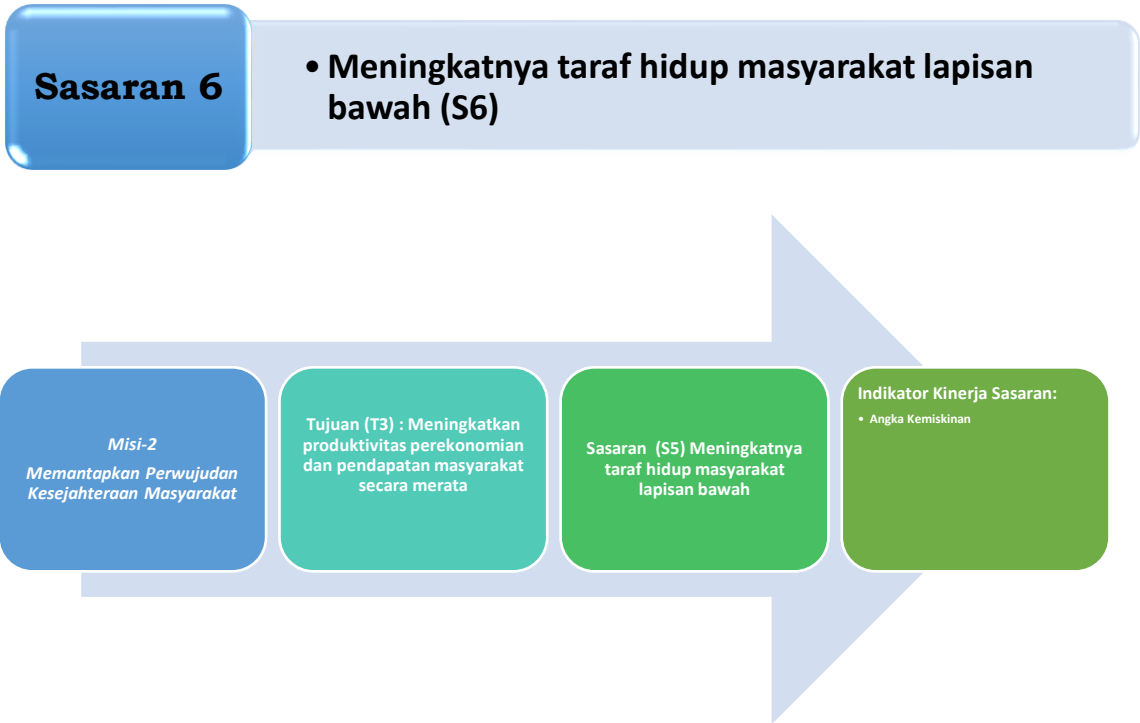
Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Rata-rata capaian kinerja sasaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	22.366.767.984	11.792.053.064	52,72	109,12	56,4

Adapun Program yang mendukung pencapaian sasaran adalah :

1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
2. Program Pengembangan UMKM

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
4. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
5. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
6. Program Penyuluhan Pertanian
7. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
8. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
9. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp22.366.767.984,- terealisasi sebesar Rp11.792.053.064,- atau 52,72%, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 109,12% maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) sebesar 56,4%.



Berikut Hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran pada tabel berikut :

Tabel 2.60 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 6

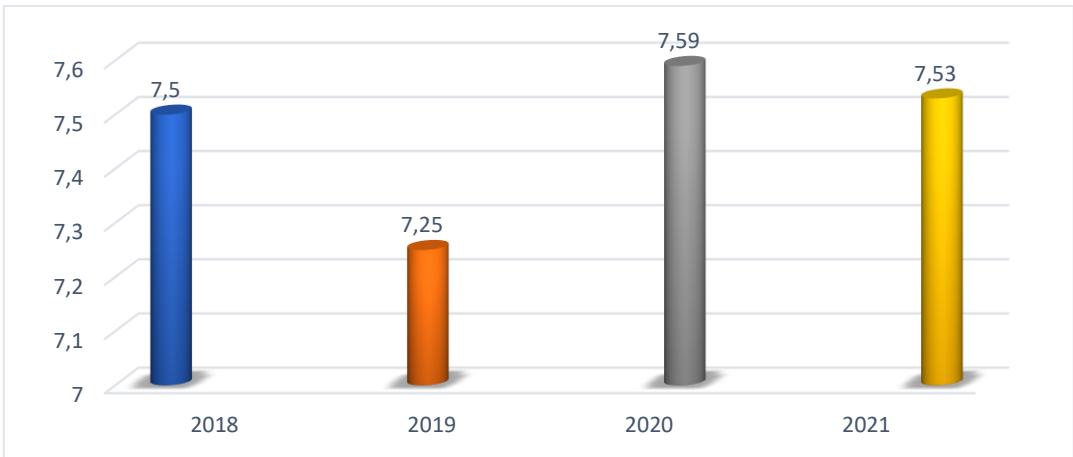
Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2021			Target Akhir Kinerja RPJMD 2026
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
Angka Kemiskinan (%)	7,59	7.5	7.25	7,15	7,53	94,95	6,13
Rata-Rata Capaian Sasaran 6						94.95	

➤ **Angka Kemiskinan**

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 sebanyak 17,27 (ribu) dari jumlah penduduk/populasi Kab. Soppeng sebanyak 235,574 (ribu).

Persentase angka kemiskinan di Kabupaten Soppeng pada tahun 2021 mencapai 7,53% atau tidak mencapai target sebesar 7,15%. Angka kemiskinan tahun 2021 lebih tinggi dibanding tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 7,25% dan 7,5%. Sementara bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2021 sebesar 6,13%, maka diperlukan kerja keras dan upaya bersama untuk mencapai target akhir RPJMD.

Grafik 2.5 Angka Kemiskinan Tahun 2018-2021



Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan yang berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja sasaran adalah :

- ❖ Meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang belum tertangani dan meningkatnya data fakir miskin serta terbatasnya anggaran bantuan sosial APBN dan APBD atau sumber lainnya.

Solusi/alternatif Pemecahan Masalah

- ❖ Perlunya pemutakhiran data penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, maka perlu adanya peningkatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial dan anggaran untuk kegiatan masyarakat.

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :

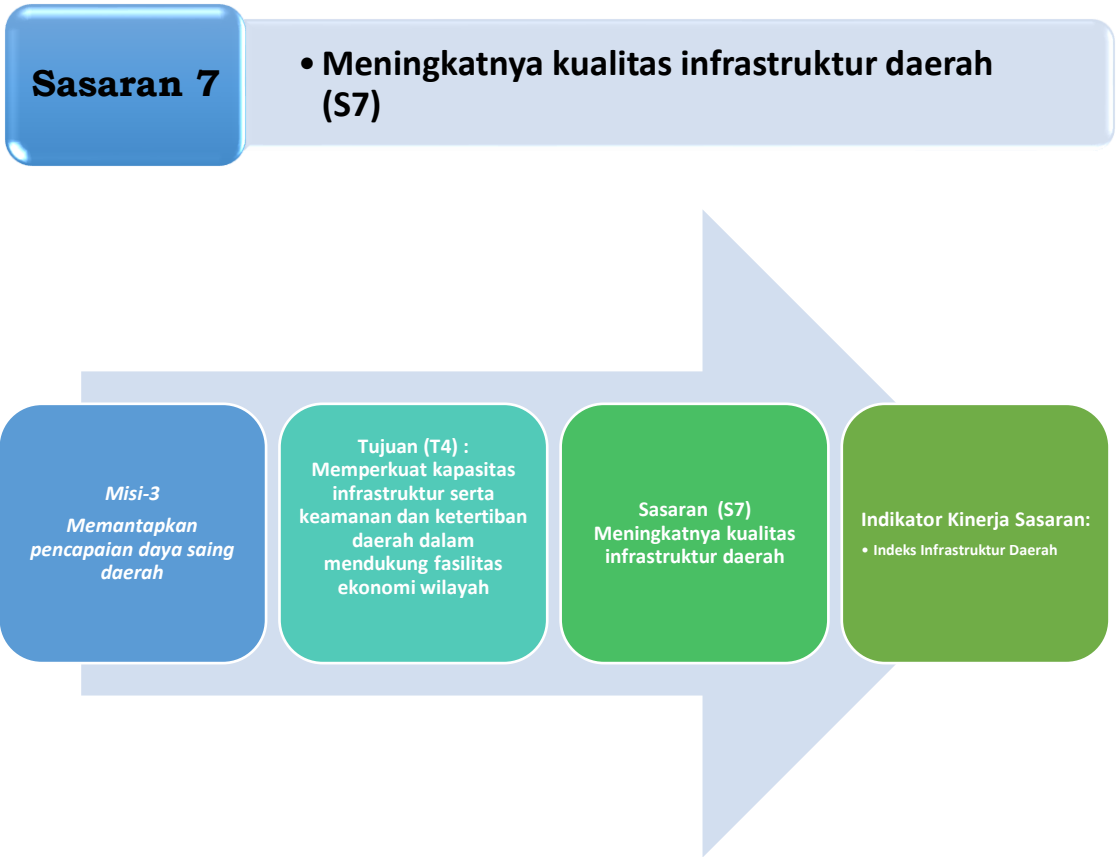
Tabel 2.61 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

No.	Sasaran	Anggaran	Realisasi	Serapan Anggaran (%)	Rata-rata capaian kinerja sasaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah	144.954.600.597	113.744.438.343,37	78,47	94,95	16.48

Program yang mendukung pencapaian sasaran yaitu :

- 1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- 2. Program Pemberdayaan Sosial
- 3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 4. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 144.954.600.597,- terealisasi sebesar Rp113.744.438.343,37,- atau 78,47%, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 94,95% maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) sebesar 16.48%.



Hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.62

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 7

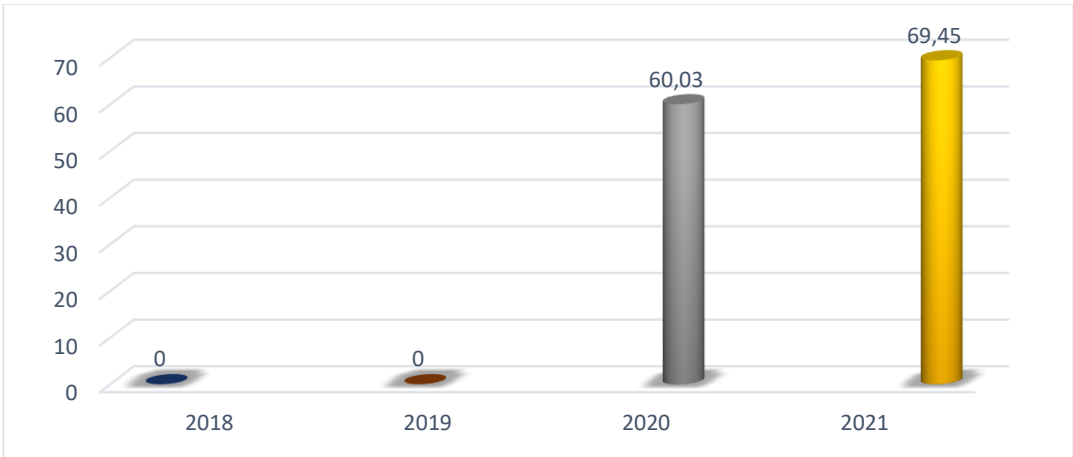
Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2021			Target Akhir Kinerja RPJMD 2026
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Infrastruktur Daerah	60,03	-	-	61,63	69,45	112,68	71,35
Rata-Rata Capaian Sasaran 7						112,68	

➤ **Indeks Infrastruktur Daerah**

Indeks infrastruktur daerah tahun 2021 ditargetkan 61,63, namun dapat terealisasi sebesar 69,45 atau capaian kinerja sasaran sebesar 112,68. Sementara bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2026 yang ditargetkan sebesar 71,35, maka capaian kinerja pada tahun 2021 menunjukkan kinerja yang sangat baik.

Grafik 2.6

Indeks Infrastruktur Daerah Tahun 2018-2021



Faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja sasaran adalah :

- ❖ Beberapa sektor pembangunan yang menunjang pencapaian target infrastruktur daerah terlaksana dengan baik

Solusi/alternatif pemecahan masalah :

- ❖ Semua sektor pembangunan perlu selalu menjadi perhatian.

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.63

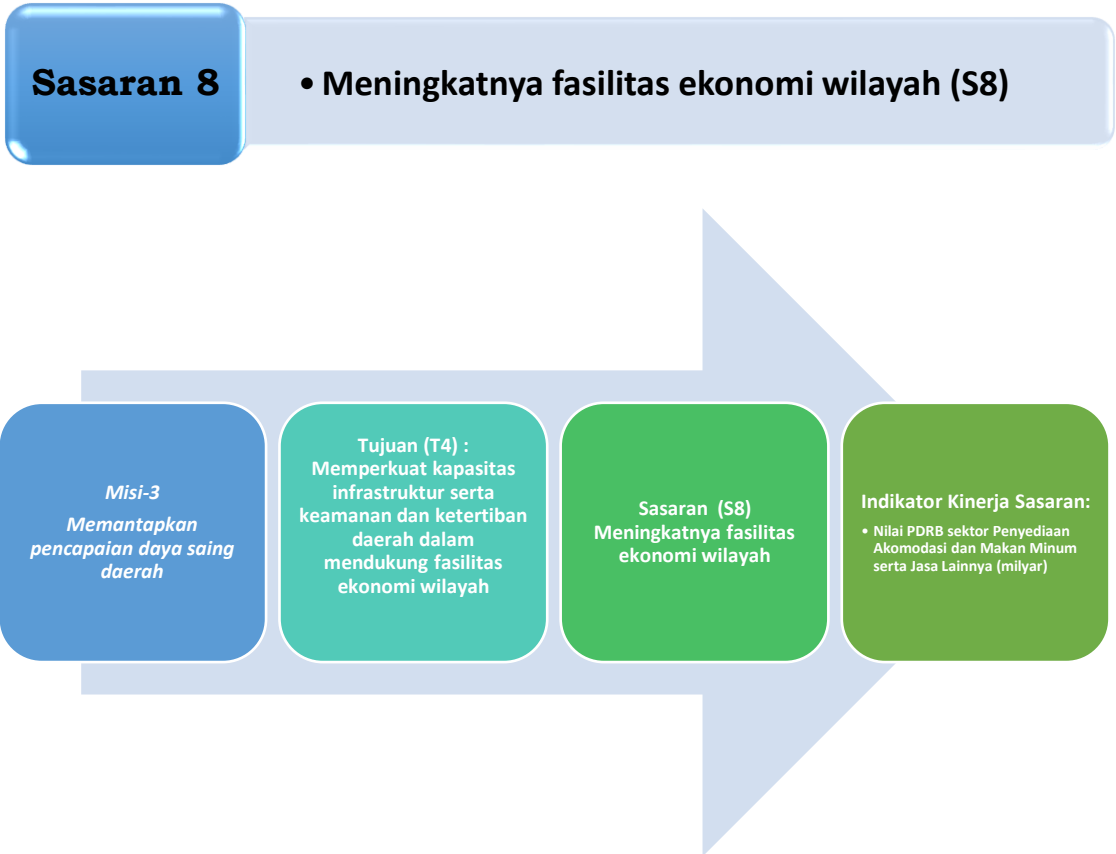
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Sasaran	Anggaran	Realisasi	Serapan Anggaran (%)	Rata-rata capaian kinerja sasaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
meningkatnya kualitas infrastruktur daerah (S7)	101.700.027.429	48.658.708.362	47,85	112,68	64.83

Adapun Program yang mendukung pencapaian sasaran 7 yaitu :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2. Program Penyelenggaraan Jalan
3. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp.101.700.027.429,- terealisasi sebesar Rp48.658.708.362,- atau 47,85%, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yaitu 112,68% maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) sebesar 2,35.



Tabel 2.64 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 8

Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2021			Target Akhir Kinerja RPJMD 2026
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
Nilai PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Lainnya (milyar)	246,24	-	-	280,2	275,5	98,32	385,5
Rata-Rata Capaian Sasaran 8						98,32	

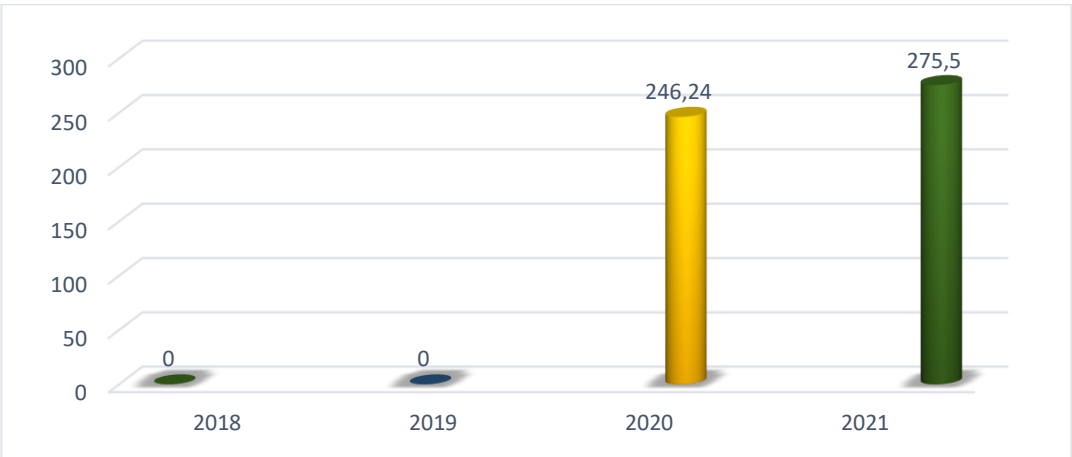
➤ **Nilai PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Lainnya (milyar)**

Laju pertumbuhan PDRB pada tahun 2021 sebesar 6,15% dimana kategori yang memiliki laju pertumbuhan paling tinggi yaitu kategori lapangan usaha penyedia akomodasi dan makan minum tumbuh sebesar 12,72% diikuti lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 12,06%.

Nilai PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tahun 2021 sebesar Rp.186,67 (milyar) sedangkan Jasa Lainnya sebesar Rp.88,83 (milyar) atau jumlah sebesar Rp.275,5 (milyar), realisasi tersebut mendekati target yang ditetapkan tahun 2021 yaitu sebesar Rp.280,2 (milyar) atau capaian sebesar 98,32%.

Sementara itu bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2026 sebesar Rp.385,5 (milyar) hal ini berarti pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2021 masih berjalan sesuai perencanaan.

Grafik 3.7 Nilai PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Lainnya (milyar) 2018-2021



Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan terhadap pencapaian target kinerja sasaran adalah :

- ❖ Adanya pusat kuliner UMKM baru di lokasi strategis yang terintegrasi dengan obyek hiburan/pariwisata
- ❖ Revitalisasi/rehabilitasi sarana dan prasarana perdagangan tidak seluruhnya dapat terealisasi.

Saran/alternatif pemecahan masalah :

- ❖ Optimalisasi revitalisasi/rehabilitasi sarana dan prasarana perdagangan melalui skema APBN dan APBD.
- ❖ Menciptakan kegiatan/event pariwisata, olahraga, seni dan budaya yang menarik banyak orang.

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.65
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Rata-rata capaian kinerja sasaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Meningkatnya fasilitas ekonomi wilayah	451.617.299	443.982.392	98,31	98,32	0,1

Adapun Program yang mendukung pencapaian sasaran adalah Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.

Total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp451.617.299,- terealisasi sebesar Rp443.982.392,- atau 98,31%, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 98,32% maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) adalah 0,1%.

Sasaran 9

• Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat (S9)



Berikut hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.66 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 9

Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2021			Target Akhir Kinerja RPJMD 2026
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
Angka Kriminalitas (kasus)	86	-	-	86	92	93,47	60
Rata-Rata Capaian Sasaran 9						93,47	

➤ **Angka kriminalitas**

Angka kriminalitas adalah jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi selama 1 (satu) tahun. Angka kriminalitas ini merupakan gabungan dari laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dari 8 (delapan) kecamatan dan laporan yang diterima di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Jenis gangguan yang terjadi selama tahun 2021 dapat dirinci sebagai berikut :

NO	JENIS KEJADIAN	JUMLAH KASUS
1	PENCURIAN	10
2	PERAMPOKAN	-
3	PEMERKOSAAN	-
4	PENGAMANAN	28
5	PENERTIBAN	3
6	PATROLI WILAYAH	18
7	OPERASI PROTOKOL KESEHATAN	15
8	BONGKAR ATM	-
9	PEMBUNUHAN	-
10	PERJUDIAN	1
11	PERSELINGKUHAN	-
12	PENGHELAPAN	-
13	PENEMUAN MAYAT	1
14	PELANGGARAN IZIN BANGUNAN	-
15	PERSELISIHAN	-
16	KEBAKARAN	4
17	SENGKETA TANAH	5
18	ANGING PUTING BELIUNG	3
19	BANJIR	4
JUMLAH TOTAL KASUS		92

Faktor keberhasilan/kegagalan yang berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja sasaran adalah :

- ❖ Gencarnya dilaksanakan Operasi Penegakan Protokol Kesehatan bekerjasama dengan TNI/Polri, Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan

Solusi/Alternatif pemecahan Masalah :

- ❖ Meningkatkan koordinasi dengan pihak Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa untuk mencegah gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.67 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Rata-rata capaian kinerja sasaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat	1.416.392.000	1.401.911.570	98,98	93,47	-5,51

Adapun Program yang mendukung pencapaian sasaran adalah :

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp1.416.392.000,- terealisasi sebesar Rp1.401.911.570,- atau 98,98%, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 93,47% maka terjadi inefisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) sebesar -5,51%.



Hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.68

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 10

Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2021			Target Akhir Kinerja RPJMD 2026
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
Nilai LPPD (Skor/Status Kinerja)	3,7/Tinggi	-	-	3,9/Tinggi	3,7/Tinggi	94,87	4,4/ Sangat tinggi
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	C	-	-	B	A	100	A
Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	59,18 (CC)	58,23 (CC)	58,97 (CC)	60 (B)	59,18 (CC)	98,63	65 (B)
Indeks Inovasi Daerah	461 (kurang inovatif)	-	-	30,00-35,00 (inovatif)	35,48 (inovatif)	100	60,00 – 65,00 (sangat inovatif)
Rata-Rata Capaian Sasaran 10						98,70	

➤ **Nilai LPPD**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, laporan ini menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah yaitu Indikator Kinerja Kunci (IKK). Pengukuran yang dilakukan untuk nilai LPPD menggunakan tahun n-1, hal ini disebabkan Tahun 2021 nilai LPPD masih menunggu publikasi hasil penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dari Tim EPPD Provinsi Sulawesi Selatan dan Tim Nasional EPPD Kemendagri. Sedangkan untuk tahun 2020 nilai LPPD yaitu 3,7 degnan status kinerja “TINGGI”.

➤ **Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah**

Terdapat setidaknya 6 (enam) dimensi dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah diantaranya kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah serta opini BPK atas LKPD.

Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Kabupaten Soppeng yang berada pada Kemampuan Keuangan Klaster Rendah pada tahun 2021 memperoleh skor 80,74 kategori “**baik**” atau **nilai A**, untuk hasil pengukuran tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2806/XII/TAHUN 2021 tentang Penetapan Hasil Uji Coba Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2020 tanggal 24 Desember 2021. Skor ini merupakan yang tertinggi di Sulawesi Selatan di semua kategori klaster.

➤ **Opini Laporan Keuangan**

Pengukuran yang dilakukan untuk opini laporan keuangan menggunakan tahun n-1, hal ini disebabkan Tahun 2021 masih menunggu publikasi opini laporan keuangan dari BPK RI Perwakilan Makassar. Opini Laporan Keuangan Tahun 2020 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang artinya laporan keuangan (LK) telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau laporan realisasi anggaran (LRA), laporan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penjelasan laporan keuangan juga telah disajikan secara memadai, informatif dan tidak menimbulkan penafsiran yang menyesatkan. Wajar karena laporan keuangan bebas dari keraguan dan ketidakjujuran serta lengkap informasinya, wajar tidak hanya terbatas pada jumlah-jumlah dan ketetapan pengklasifikasian aktiva dan kewajiban, namun yang terpenting meliputi pengungkapan yang tercantum dalam laporan keuangan.

➤ **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Pengukuran yang dilakukan untuk nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menggunakan tahun n-1, hal ini disebabkan Tahun 2021 masih menunggu publikasi nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dari Kementerian PAN dan RB. Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja berdasarkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah tahun 2021 terhadap implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah Kab.Soppeng tahun 2020 mendapatkan nilai 59,18 atau dengan predikat penilaian “CC”, sedangkan untuk implementasi SAKIP tahun 2021 penilaiannya belum dipublikasikan oleh Kementerian PAN dan RB. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efesiensi penggunaan anggaran masih perlu ditingkatkan jika dihubungkan dengan capaian kinerja.

➤ **Indeks Inovasi Daerah**

Indikator Indeks Inovasi Daerah adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Indeks Hasil Pengukuran Mandiri sebesar 35,48 (inovatif) dengan jumlah inovasi tahun 2019 dan tahun 2020 sebanyak 16 inovasi dan berada pada ranking 312 secara nasional.

Berikut grafik Nilai Akuntabilitas Daerah di Kab. Soppeng kurun waktu 2017-2019 :

Faktor keberhasilan/kegagalan terhadap pencapaian target kinerja sasaran adalah :

- ❖ Adanya Kebijakan Pemerintah terkait One Agency One innovation sehingga SKPD diharuskan membuat Inovasi sesuai tupoksinya masing-masing
- ❖ Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dibarengi dengan penerapan SIPD yang terintegrasi;
- ❖ Tingginya komitmen pimpinan daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel;
- ❖ Kualitas pembangunan budaya kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil belum berjalan dengan baik.

Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah :

- ❖ Menyusun target kinerja secara cermat dan realistis dengan memperhitungkan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi di tahun yang akan datang.
- ❖ Mengintensifkan koordinasi seluruh stakeholders perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, aset serta pengawasan (audit).
- ❖ Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP dan meningkatkan kualitas SDM penyelenggaraan pemerintahan melalui Coaching Clinic dan Pendampingan penerapan SAKIP.

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.69
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Sasaran	Anggaran	Realisasi	Serapan Anggaran (%)	Rata-rata capaian kinerja sasaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah	843.935.542.848	772.081.753.236	91,48	98,70	7,22

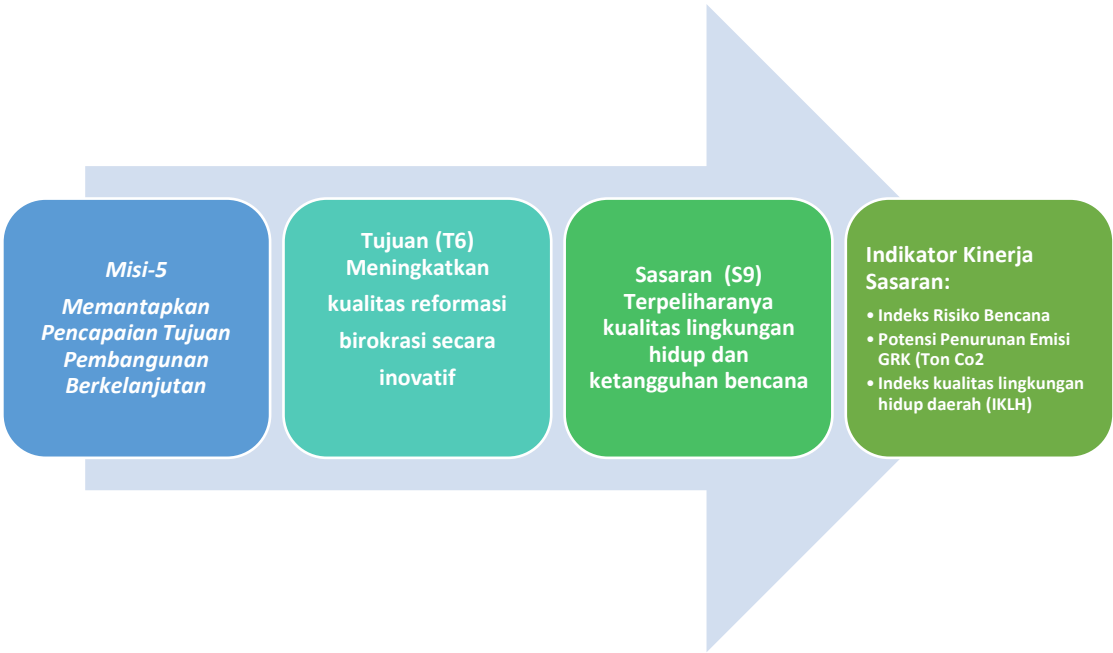
Adapun Program yang mendukung pencapaian sasaran adalah :

- 1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- 2) Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 3) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 4) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 5) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 6) Program Penyelenggaraan Pengawasan
- 7) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- 8) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 843.935.542.848,- terealisasi sebesar Rp. 772.081.753.236,- atau 91,48%, dengan tingkat efisiensi sebesar 7,22%.

Sasaran 11

• Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana (S10)



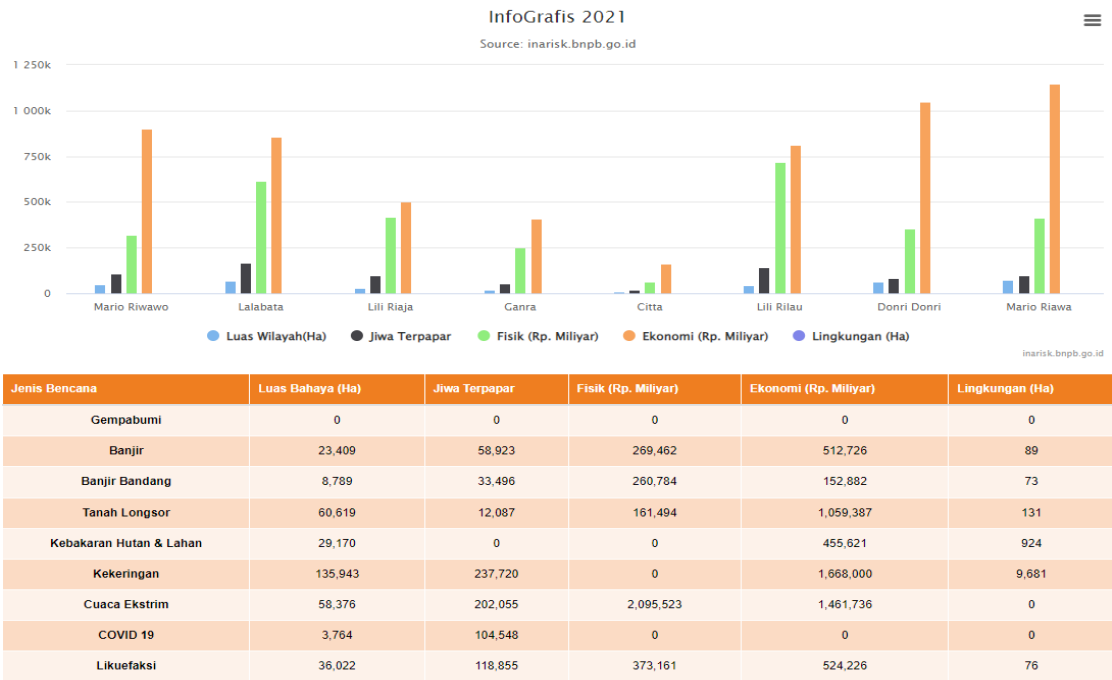
Berikut hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.70
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 11

Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2021			Target Akhir Kinerja RPJMD 2026
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Risiko Bencana	131,20 (sedang)	-	-	131,20 (sedang)	131,20 (sedang)	100	131,20 (sedang)
Potensi Penurunan Emisi GRK (Ton Co2)	36.238	-	-	36.238	36.240,33	99,99	36.238
Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLH)	N.A.	-	-	65,83	69,52	105,6	67,68
Rata-Rata Capaian Sasaran 11						101,86	

➤ **Indeks Risiko Bencana**

Indeks Risiko Bencana daerah dihitung secara berkala sebagai wujud pengamatan dan pemantauan di daerah oleh BNPB melalui Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana (PERB). Indeks ini terbagi tiga ukuran yaitu mulai tingkatan rendah, sedang dan tinggi. Indeks ini dihitung salah satunya berdasarkan Indeks Kapasitas Daerah (IKD) yang dilaporkan oleh Pemerintah Daerah. Pada tahun 2021, Indeks Risiko Bencana Kabupaten Soppeng adalah 131,20 atau berada pada tingkatan “**sedang**”.



➤ **Potensi Penurunan Emisi GRK (Ton Co2)**

Perubahan iklim mengakibatkan terjadinya cuaca ekstrem yang dapat berakibat bencana dan atau gagal panen. Gas rumah kaca dikatakan menjadi penyebab dari perubahan iklim ini. Hasil pengukuran indikator Penurunan Emisi GRK (Ton Co2) pada tahun 2021 yaitu 36,240,33 Ton Co2, sedikit lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 36.238 Ton Co2 atau capaian sebesar 99,99%.

➤ **Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLH)**

Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan yang berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja sasaran adalah :

- ❖ Penguatan struktur dan mekanisme informasi kebencanaan daerah
- ❖ Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Tutupan Lahan telah memenuhi target yang ditetapkan baik oleh kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun target yang ditetapkan dalam IKK Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng
- ❖ Adanya kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan seperti program pengurangan sampah dengan pengomposan, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, pemasangan lampu LED, pengembangan pertanian organik, pengembangan pertanian pada lahan kering, peningkatan produktivitas tanaman aneka kacang dan umbi, penggunaan pupuk dan pestisida yang tidak berlebihan

Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah :

- ❖ Penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir melalui perencanaan kontijensi.
- ❖ Mengedukasi masyarakat tentang aktivitas sehari-hari yang meninggalkan jejak karbon.

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.71 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Rata-rata capaian kinerja sasaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana	3.801.551.893	3.559.271.770	93,63	101,86	8,23

Adapun Program yang mendukung pencapaian sasaran yaitu :

- 1) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- 2) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
- 3) Program Pengelolaan Persampahan

Total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp3.801.551.893,- terealisasi sebesar Rp3.559.271.770,- atau 93,63% dengan tingkat efisiensi sebesar 8,23%.

A. 3.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka pencapaian target kinerja sebanyak 21 sasaran strategis, sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel-2.72 Alokasi dan Realisasi Belanja untuk Pencapaian Sasaran

SASARAN STARTEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN		PERSENT ASE (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
					TARGET (RP)	REALISASI (RP)		
Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar (S1)	1 Nilai rata-rata tingkat capaian penerapan SPM	100%	84,65%	89,28	270.434.279.666	226.402.408.240,37	83,72	5,56
Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar (S2)	2 IKM pelayanan publik non pelayanan dasar	84%	83,83%	99,80	630.649.800	582.944.800	92,43	7,37
Meningkatnya derajat pendidikan, literasi dan kualitas fisik masyarakat (S3)	3 Indeks Pendidikan	62,34	62,32	99,96	1.073.826.950	936.114.050	87,17	12,79

SASARAN STARTEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN		PERSENT ASE (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
						TARGET (RP)	REALISASI (RP)		
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S4)	4	Indeks Kesehatan	76,8	76,63	99,78	152.245.965.812	118.902.591.021,37	78,10	21,68
Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah (S5)	5	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,80	6,15	109,12	22.366.767.984	11.792.053.064	52,72	56,4
	6	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,4	3,92					
Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah (S6)	7	Angka Kemiskinan (%)	7,15%	7,53%	94,95	144.954.600.597	113.744.438.343,37	78,47	16,48
Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah (S7)	8	Indeks Infrastruktur Daerah	61,63	69,45	112,68	101.700.027.429	48.658.708.362	47,85	64,83
Meningkatnya fasilitas ekonomi wilayah (S8)	9	Nilai PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Lainnya (milyar)	280,213	275,5	98,32	451.617.299	443.982.392	98,31	0,1
Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat (S9)	10	Angka Kriminalitas (Kasus)	86	92	93,94	1.416.392.000	1.401.911.570	98,98	-5,51
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan	11	Nilai LPPD (Skor/Status Kinerja)	3,9/Tinggi	3,7/Tinggi	98,70	3.801.551.893	3.559.271.770	93,63	7,22

SASARAN STARTEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN		PERSENT ASE (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
					TARGET (RP)	REALISASI (RP)		
keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah (S10)	12 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B	A					
	13 Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP					
	14 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	60 (B)	59,18 (CC)					
	15 Indek Inovasi Daerah	30.00- 35.00 (inovatif)	35,48 (inovatif)					
Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana (S11)	16 Indeks Risiko Bencana	131,20 (sedang)	131,20 (sedang)	101,86	3.801.551.893	3.559.271.770	93,63	8,23
	17 Potensi Penurunan Emisi GRK (Ton Co2)	36238 Ton Co2	36.240,33					
	18 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH)	65,83 poin	69,52					

Dalam penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat yang dikeluarkan Lembaga Pemerintah Penilai Pelayanan Ombudsman-RI pada Unit Layanan Dinas Kepandudukan dan Pencatatan Sipil, Unit Layanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigras, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan dari 67 produk layanan administrasi sesuai surat Ombudsman-RI Nomor: B/406/PC.02/II/2022 masih dalam kategori pelayanan “*SEDANG*” dengan nilai rata-rata 74,18, dibandingkan dengan Unit Layanan Kesehatan pada UPTD Puskesmas dengan kategori “*TINGGI*” dengan nilai rata-rata 81,12.

Untuk mendapatkan peningkatan nilai rata-rata tinggi pada tahun berikutnya, perlu peningkatan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan terhadap pimpinan unit pelayanan publik yang memperoleh Predikat Kepatuhan Sedang sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap upaya pemenuhan komponen standar pelayanan.
2. Perbaiki produk hukum unit pelayanan, mulai dari tingkat pelayanan dasar, pelayanan perizinan yang masih perlu ditingkatkan percepatan penerbitan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pemenuhan sarana prasarana unit layanan, mulai peningkatan informasi ketepatan waktu pelayanan sampai penyelesaian pelayanan.

BAB III

CAPAIAN KINERJA

PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN



ugas pembantuan, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonomi untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, selanjutnya dalam Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan daerah Pasal 94 Ayat (7) disebutkan bahwa pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik. Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Daerah mendapatkan tugas pembantuan dari APBN yang direalisasikan pada 2 (dua) Dinas yaitu :

- A. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
- B. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

3.1 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

3.1.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Dasar Hukum pelaksanaan Tugas Pembantuan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng yaitu sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- j. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah;

- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- l. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/10/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- m. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

3.1.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pelaksanaan tugas pembantuan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng berasal dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini 1 (satu) Kementerian yaitu Kementerian Pertanian. Adapun Tugas Pembantuan yang diberikan meliputi bidang urusan Pertanian dan urusan Pangan yang sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng. Yang terdiri dari beberapa Direktorat Jenderal .

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan RI yang memeberikan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan Prasarana dan sarana pertanian yang berjumlah Rp. 5.017.545.000.-, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan RI 3 (tiga) program yaitu Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Tanaman Pangan, Program Nilai Tambah,Daya Saing Industri Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran hasil Tanaman dan Program Dukungan Manajemen yang berjumlah Rp. 7.747.436.000.-. Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan RII dengan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan jumlah Rp. 615.000.000.- ,dan Badan Ketahanan Pangan Kementan RI dengan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan senilai Rp. 189.920.000. Adapun Rincian Tugas Pembantuan yang dilaksanakan pada tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tugas Pembantuan
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Kab. Soppeng Tahun 2020

No	Pemberi Tugas Pembantuan	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan RI	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	5.017.545.000	Dilaksanakan Bidang Tanaman Pangan
		Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	1.275.000.000	
		Kegiatan Pembangunan Embung Pertanian	360.000.000	

No	Pemberi Tugas Pembantuan	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Keterangan
		Kegiatan Optimasi Lahan Kering	2.842.500.000	Dilaksanakan Bidang Hortikultura & Perkebunan
		Kegiatan Pembangunan Irigasi Perpompaan	238.000.000	
		Kegiatan Fasilitas Pupuk dan Pestisida	182.345.000	
		Kegiatan Fasilitas Pembiayaan Pertanian	19.700.000	
		Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen PSP (I)	100.000.000	
2	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan RI	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Tanaman Pangan	7.115.136.000	Dilaksanakan Bidang Tanaman Pangan
		Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	397.213.000	
		Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal	2.168.083.000	
		Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	3.917.540.000	
		Program Nilai Tambah, Daya Saing Industri Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman	605.300.000	
		Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	605.300.000	
		Program Dukungan Manajemen	27.000.000	
		Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	27.000.000	
3	Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan RI	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	615.000.000	Dilaksanakan Bidang Hortikultura & Perkebunan
		Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	310.000.000	
		Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	105.000.000	
4	Badan Ketahanan Pangan Kementan RI	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	170.100.000	Dilaksanakan Bidang Ketahanan Pangan
		Kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	28.460.000	
		Kegiatan Pemantapan Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	141.640.000	
		Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan	20.520.000	
		Program Dukungan Manajemen	19.820.000	
		Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan	19.820.000	
	JUMLAH		13.569.901.00	

3.1.3 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

a. Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat yang Dilaksanakan

Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng berasal dari Kementerian Pertanian, dengan uraian sebagai berikut :

1) Target Kinerja

Target kinerja dari masing-masing program/kegiatan dari Tugas Pembantuan yang dilaksanakan lebih detailnya bisa dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2
Target Kinerja Tugas Pembantuan
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Kab. Soppeng Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Target Kinerja
I.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan SaranaPertanian	
1	Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	17 Unit
2	Kegiatan Pembangunan Embung Pertanian	3 Unit
3	Kegiatan Optimasi Lahan Kering	500 Hektar
4	Kegiatan Pembangunan Irigasi Perpompaaan	2 Unit
5	Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	1 Paket
6	Kegiatan Fasilitas Pembiayaan Pertanian	1 Paket
7	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen PSP (I)	1 Unit
II.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Tanaman Pangan	
1	Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi - Kawasan Kedelai	50 Hektar
	-Kawasan Kedelai (ABT PEN)	122 Hektar
2	Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealisa	165 ktar
	-Budaya Padi rawa	1284 Hektar
3	Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	100 Hektar
	-Bantuan Benih pada padi Inbrida Sawah	4000 Hektar
	-Bantuan Benih padi Inbrida sawah (ABT PEN)	5524 Hektar
	-Bantuan Benih jagung Hibrida	1800 Hektar
	-Bantuan Benih Jagung Hibrida (ABT PEN)	423 Hektar
III	Program Nilai Tambah,Daya Saing Industri Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman	
	Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	
	- Corn Sheller Mobile	2 Unit
	- Corn Sheller	3 Unit
	- Power Thereser Mobile	6 Unit
IV	Program Dukungan Manajemen	

	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	12 OB
V	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	
1	Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	
	- Kawasan Bawang Merah	30 Hektar
	- Kawasan Aneka Cabai	25 Hektar
2	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	1 Paket
VI	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	
1	Kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	
	-Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1 Dokumen
2	Kegiatan Pemantapan Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	
	-Pekarangan Pangan Lestari	2 Kelompok
VII	Program Dukungan Manajemen	1 Tahun
	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	1 Tahun

2) Realisasi

Realisasi kinerja dari masing-masing program/kegiatan dari Tugas Pembantuan yang dilaksanakan lebih detailnya bisa dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3
Realisasi Kinerja Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian yang Dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Soppeng Tahun 2020

No	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program/ Kegiatan/ Rincian Kegiatan	Keluaran	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%
1	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian			5.017.545.000	4.988.256.500	99,42%		98,49%
		Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	17 Unit	Kab. Soppeng	1.275.000.000	1.275.000.000	100%	17 Unit	100%
		Kegiatan Pembangunan Embung Pertanian	3 Unit	Kab. Soppeng	360.000.000	360.000.000	100%	3 Unit	100%
		Kegiatan Optimasi Lahan Kering	500 Hektar	Kab. Soppeng	2.842.500.000	2.842.500.000	100%	500 Hektar	100%
		Kegiatan Pembangunan Irigasi Perpompaan	2 Unit	Kab. Soppeng	238.000.000	238.000.000	100%	2 Unit	92,45%
		Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	1 Paket	Kab. Soppeng	182.345.000	176.939.500	97,04%	1 Paket	97,04%
		Kegiatan Fasilitas Pembiayaan Pertanian	1 Paket	Kab. Soppeng	19.700.00	-	0%	-	0%
		Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen PSP (I)	1 Paket	Kab. Soppeng	100.000.000	95.817.000	95,82%	1 Paket	100%

No	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program/ Kegiatan/ Rincian Kegiatan	Keluaran	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%
		Konsumsi Pangan Berkualitas Tanaman Pangan			7.115.136.000	6.838.985.469	96,12%		100%
		Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi							
		- Kawasan Kedelai	50 Hektar	Kab. Soppeng	133.290.000	73.910.812	55,45%	50 Hektar	100%
		-Kawasan Kedelai (ABT PEN)	122 Hektar	Kab. Soppeng	203.923.000	180.080.207	88,31%	122 Hektar	100%
		-Bimbingan Teknis dan Monev	1 Paket	Kab. Soppeng	60.000.000	60.000.000	100%	1 Paket	100%
	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal							
		-Budaya Padi rawa	1284 Hektar	Kab. Soppeng	2.114.583.000	2.114.433.200	99,99%	1284 Hektar	100%
		-Koordinasi, Bimbingan Yeknis dan Monev	1 Paket	Kab. Soppeng	53.500.000	50.200.000	93,83%	1 Paket	100%
		Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan							
		-Bantuan Benih pada padi Inbrida Sawah	4000 Hektar	Kab. Soppeng	1.050.000.000	969.000.000	92,29%	4000 Hektar	100%
		-Bantuan Benih padi Inbrida sawah (ABT PEN)	5524 Hektar	Kab. Soppeng	1.450.050.000	1.341.646.250	92,52%	5524 Paket	100%
		-Koordinasi, Bimbingan Teknis dan Monev	1 Paket	Kab. Soppeng	17.000.000	17.000.000	100%	1 Paket	100%
		-Bantuan Benih jagung Hibrida	1800 Hektar	Kab. Soppeng	1.134.000.000	1.134.000.000	100%	1800 Hektar	100%
		-Bantuan Benih Jagung Hibrida (ABT PEN)	423 Hektar	Kab. Soppeng	266.490.000	266.490.000	100%	423 Hektar	100%
		Program Nilai Tambah, Daya Saing Industri Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman							
		Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan							
		- Corn Sheller Mobile	2 Unit	Kab. Soppeng	113.900.000	113.900.000	100%	2 Unit	100%
	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	- Corn Sheller	3 Unit	Kab. Soppeng	84.600.000	84.525.000	100%	3 Unit	100%
		- Power Thresher Mobile	6 Unit	Kab. Soppeng	406.800.000	406.800.000	100%	3 Unit	100%
		Program Dukungan Manajemen							
		Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	12 OB	Kab. Soppeng	27.000.000	27.000.000	100%	12 OB	100%

No	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program/ Kegiatan/ Rincian Kegiatan	Keluaran	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%
3		Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas			615.000.000	614.000.000	99,84%		100%
		Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat							
		- Kawasan Bawang Merah	30 Hektar	Kab. Soppeng	210.000.000	209.625.000	99,82%	30 Hektar	100%
		- Kawasan Aneka Cabai	25 Hektar	Kab. Soppeng	300.000.000	299.375.000	99,79%	25 Hektar	100%
	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	1 Paket	Kab. Soppeng	105.000.000	96.850.000	92,24%	1 Paket	100%
		Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas			170.100.00	170.100.000	100%		100%
		Kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan							
		-Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1 Dokumen	Kab. Soppeng	28.460.000	28.460.000	100%	1 Dokumen	100%
		Kegiatan Pemantapan Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan							
		-Pekarangan Pangan Lestari	2 Kelompok	Kab. Soppeng	141.640.000	141.640.000	100%	2 Kelompok	100%
		Program Dukungan Manajemen			19.820.000	19.820.000	100%		
		Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	1 Tahun	Kab. Soppeng	19.820.000	19.820.000	100%	1 Tahun	100%
	JUMLAH				14.218.726.000	13.992.646.270	98,41%		99,57%

b. Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi yang Dilaksanakan

Tidak ada Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2020.

3.1.4 Permasalahan Dan Kendala

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng dalam melaksanakan Tugas Pembantuan pada Tahun 2020 antara lain :

- a. Kurangnya jumlah Aparatur dan keterbatasan kualitas SDM dalam melaksanakan Tugas Pembantuan, sementara beban kerja dan target cukup tinggi.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas kedinasan, terutama aset bergerak berupa peralatan pendukung kinerja, baik karena adanya kerusakan yang tidak dilaporkan untuk perbaikan, maupun karena kebijakan penyimpanan peralatan sehingga tidak digunakan.
- c. Terkait teknis, anomali iklim yang menyebabkan terjadinya musim kemarau dan musim hujan tidak lagi mengikuti siklus seperti biasanya (tidak menentu) sehingga berdampak terhadap kondisi pertanaman yang akan dilakukan melalui Tugas Pembantuan serta pembangunan Infrastruktur Pertanian.

Adapun solusi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng dalam melaksanakan Tugas Pembantuan sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan potensi SDM yang tersedia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, termasuk pegawai tidak tetap dalam membantu pelaksanaan program/kegiatan Tugas Pembantuan, meskipun secara struktur tidak bisa mengisi posisi-posisi yang harus diisi oleh ASN.
- b. Aktif menyampaikan kepada para penanggungjawab barang agar melaporkan apabila ada kerusakan untuk diupayakan perbaikan, termasuk peralatan yang tersimpan agar dioptimalkan pemanfaatannya.
- c. Pengembangan sumber-sumber air tanah melalui pembuatan sumur air tanah dangkal, irigasi air permukaan dan dam parit serta embung. Disamping itu dilakukan percepatan pertanaman khusus kegiatan yang melalui Tugas Pembantuan. Sedangkan Pembangunan Infrastruktur disesuaikan kesiapan kelompok dan mengambil waktu jeda pertanaman.

3.1.5 Saran Dan Tindak Lanjut

Sebaiknya dilakukan penambahan personil ASN pada Bidang-Bidang yang menangani Tugas Pembantuan setiap tahunnya, untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan.

3.2 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENEGAH

Tugas Pembantuan yang diterima Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng yaitu Pembangunan Pasar Rakyat Tanalle di Desa Watu Kecamatan Marioriwawo dan Pembangunan Pasar Rakyat Batu-Batu Kel. Manorang Salo Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng.

3.2.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

- 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
- 4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 6) DIPA nomor : SP DIPA-090.02.4.199554/2021 tanggal 27 April 2021 dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan Kode Satker 199554 : *Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng*.

3.2.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pelaksanaan Tugas pembantuan yang diterima Dinas Perdagangan perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Soppeng dari Pemerintah Pusat yaitu Tugas pembantuan dari Kementerian Perdagangan RI Urusan Perdagangan dengan **Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri**, **Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan**. Jumlah anggaran Tugas Pembantuan sebesar Rp. 12.000.000.000,- (*Dua Belas Milyar Rupiah*) yang diperuntukkan untuk Pembangunan Pasar Rakyat 2 unit yaitu Pasar Tanalle di Kecamatan Marioriwawo dan Pasar Batu-Batu di Kecamatan Marioriwawo.

a. Target Kinerja

Target kinerja Tugas Pembantuan Tahun 2021 adalah Pembangunan Pasar Rakyat 2 unit yang yaitu Pasar Rakyat Tanalle berlokasi di Desa Watu Kec. Marioriwawo dan Pasar Rakyat Batu-Batu Kel. Manorang Salo Kec. Marioriwawo.

b. Realisasi

Realisasi program kegiatan Tugas Pembantuan Tahun 2021 tercapai 100% dengan terbangunnya 2 unit Pasar Rakyat yaitu Pasar Tanalle dan Pasar Batu Batu.

Tabel 4.4
Realisasi Kinerja Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan yang Dilaksanakan
Dinas Perdagangan Perindustrian Kopersai dan UKM
Kab. Soppeng Tahun 2020

NO .	K/LPN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROG RAM, KEGIA TAN, OUTPU, DANA RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA	ALOKA SI ANGGARAN	REALISA SI ANGGARAN	%	REA LISASI CA PAI AN KEGIA TAN	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Kemen terian Perda gangan RI	Peraturan Menteri Perdagang an No. 788 Tahun 2021 Tgl. 19 April 2021	Program Perdagangan Dalam Negeri	Kec. Marioriw awo dan Kec. Mario riawa	Dinas Perda gangan Perin dus trian Koperas i dan Usaha Kecil Mene ngah Kabupat en Sop peng	12.000.000.000	11.770.948.951	98,09124	2 unit	100	

3.2.3 Permasalahan dan Kendala

Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat Tanalle dan Pasar Batu-Batu dengan menggunakan dana TP APBN dengan penyelesaian fisik 100% dan tetap waktu dengan realisasi anggaran 98,09% dari total anggaran 12M (Dua Belas Milyar) Rupiah.

3.2.4 Saran dan Tindak lanjut

Saran dan tindak lanjut dalam perencanaan tugas pembantuan kedepan agar pembangunan pasar/revitalisasi dilakukan secara kontinyu dalam upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Soppeng menyusun penerapan standar pelayanan minimal menetapkan Satuan Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan dasar. Pada penerapan Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Pasal 3 ayat (2) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 dalam 5 (lima) bidang urusan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah dengan uraian sebagai berikut:

4.1 URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Nomor 32 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara maksimal. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran.

Yang dimaksud dengan “**prinsip kesesuaian kewenangan**” adalah SPM diterapkan sesuai dengan kewenangan Kabupaten menurut pembagian urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Adapun kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan. Untuk “**prinsip ketersediaan**” adalah SPM diterapkan dalam rangka menjamin tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Adapun yang dimaksud dengan “**prinsip keterjangkauan**” adalah SPM ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang mudah diperoleh setiap warga negara. “**Prinsip kesinambungan**” adalah SPM ditetapkan dan diterapkan untuk memberikan jaminan tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara terus menerus. Adapun “**prinsip keterukuran**” adalah SPM ditetapkan dan diterapkan dengan barang dan/atau jasa yang terukur untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Dan yang dimaksud “**ketepatan sasaran**” adalah SPM ditetapkan dan diterapkan untuk pemenuhan barang/jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dan pemenuhan oleh Pemerintah Daerah ditujukan kepada warga negara dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu.

Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng tahun 2021 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa.

Untuk standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa meliputi standar satuan pendidikan dan standar biaya pribadi peserta didik. Standar satuan pendidikan terdiri dari:

- a. Standar kompetensi lulusan;
- b. Standar isi;
- c. Standar proses;
- d. Standar sarana dan prasarana;
- e. Standar pengelolaan;
- f. Standar pembiayaan; dan
- g. Standar penilaian.

Sedangkan untuk standar biaya pribadi peserta didik meliputi:

- a. Perlengkapan dasar peserta didik; dan
- b. Pembiayaan pendidikan.

Untuk standar perlengkapan dasar peserta didik diatur sebagai berikut:

a. Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu:

- 1) Pemberian 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per peserta didik per semester; dan
- 2) Pemberian 1 (satu) set alat mewarnai dalam kondisi baru per peserta didik per semester

b. Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, yaitu:

- 1) Pemberian 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per peserta didik per tahun.
- 2) Pemberian 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per peserta didik per semester.

c. Pendidikan Kesetaraan, yaitu:

- 1) Pemberian 1 (satu) paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per peserta didik per tahun.
- 2) Pemberian 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per peserta didik per semester.

2. Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Untuk standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan terdiri dari: a) jenis pendidik dan tenaga kependidikan; b) kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.

a. Pendidikan Anak Usia Dini, terdiri dari:

- 1) Jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
Untuk jenis pendidik yaitu guru pendidikan anak usia dini, sedangkan untuk tenaga kependidikan yaitu kepala satuan pendidikan anak usia dini.
- 2) Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; terdiri dari

Kualitas pendidik paling rendah memiliki ijazah Diploma Empat atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan, atau psikologi dan memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini. Sedangkan kualitas kepala satuan pendidikan anak usia dini paling rendah memiliki ijazah Diploma Empat atau Sarjana (S1), memiliki sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD Formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang.

- 3) Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
Untuk jumlah pendidik dan tenaga kependidikan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pendidikan Sekolah Dasar

- 1) Jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
Untuk jenis pendidik terdiri dari guru kelas dan guru mata pelajaran, sedangkan untuk tenaga kependidikan yaitu kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya.
- 2) Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; terdiri dari
Kualitas pendidik paling rendah memiliki ijazah Diploma Empat atau Sarjana (S1) dan memiliki sertifikat pendidik. Sedangkan kualitas kepala sekolah paling rendah memiliki ijazah Diploma Empat atau Sarjana (S1), memiliki sertifikat pendidik dan memiliki surat tanda tamat pendidikan pelatihan calon kepala sekolah. Untuk tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.
- 3) Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
Untuk jumlah pendidik dan tenaga kependidikan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

- 1) Jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
Untuk jenis pendidik yaitu guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum, sedangkan untuk tenaga kependidikan terdiri atas kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya.
- 2) Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; terdiri dari
Kualitas pendidik paling rendah memiliki ijazah Diploma Empat atau Sarjana (S1) dan memiliki sertifikat pendidik. Sedangkan kualitas kepala sekolah paling rendah memiliki ijazah Diploma Empat atau Sarjana (S1), memiliki sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan pelatihan calon kepala sekolah. Sedangkan untuk penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.
- 3) Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
Untuk jumlah pendidik dan tenaga kependidikan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pendidikan Kesetaraan

- 1) Jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
Untuk jenis pendidik yaitu tutor pendidikan kesetaraan, sedangkan untuk tenaga kependidikan yaitu kepala satuan pendidikan kesetaraan dan tenaga penunjang lainnya.
- 2) Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
Kualitas pendidik paling rendah memiliki ijazah Diploma Empat atau Sarjana (S1). Sedangkan kualitas kepala sekolah paling rendah memiliki ijazah Diploma Empat atau Sarjana (S1). Untuk tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.
- 3) Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
Untuk jumlah pendidik dan tenaga kependidikan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Tatacara Pemenuhan Standar.

Untuk pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan, Pemerintah Daerah wajib memasukkan belanja pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target kinerja SPM Pendidikan terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu: 1) yang diatur secara umum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; dan 2) yang diatur secara teknis di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Target kinerja SPM Pendidikan diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1

Target SPM Pendidikan Berdasarkan Permendagri No. 100 Tahun 2018

No	Uraian	Indikator	Target Tahun2021 (%)	Keterangan
1	SPM PAUD	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	100%	
2	SPM Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam PendidikanDasar	100%	
3	SPM Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	100%	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

1. Target SPM berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Target kinerja SPM Pendidikan diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2

Target SPM Pendidikan Berdasarkan Permendikbud No. 32 Tahun 2018

No	Uraian	Indikator		Target Tahun 2021 (%)	Keterangan
1	SPM PAUD	1	Standar Jumlah dan Kualitas Barang/Jasa		
		a.	Pemberian 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per semester (khusus siswa miskin)	100%	
		b.	Pemberian 1 Set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru (khusus siswa miskin)	100%	
		2	Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
		a.	Kualitas Pendidikan PAUD		
		1)	Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D-IV bidang PAUD, kependidikan lain atau psikologi.	78,95%	
		2)	Memiliki sertifikat profesi guru PAUD	48,03%	
		b.	Kualitas Kepala Sekolah		
		1)	Memiliki Ijazah S1/D-IV	93,18%	
		2)	Memiliki sertifikat pendidik.	95,45%	
		3)	Memiliki STTPP Calon Kepala Sekolah untuk PAUD Formal dan/atau Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepala Satuan PAUD dari lembaga yang berwenang untuk PAUD Nonformal.	100%	
2	SPM Pendidikan Dasar	1	Standar Jumlah dan Kualitas Barang/Jasa		
		a.	Pemberian 1 Set paket buku teks pelajaran sesuai Kurikulum Per Peserta Didik Per Tahun (khusus siswa miskin)	100%	
		b.	Pemberian 1 Set Perlengkapan Belajar Berupa Buku Tulis dan Alat Tulis Dalam Kondisi Baru Per Peserta Didik Per Semester (khusus siswa miskin)	100%	
		2	Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
		a.	Kualitas Pendidik		
		1)	Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D-IV	95,21	
		2)	Memiliki sertifikat pendidik	46,25	
		b.	Kualitas Kepala Sekolah		
		1)	Memiliki Ijazah S1/D-IV	100%	
		2)	Memiliki sertifikat pendidik.	100%	
		3)	Memiliki STTPP Calon Kepala Sekolah	100%	
		c.	Tenaga Penunjang		
		1)	Tenaga Penujang Lainnya Minimal Pendidikan Ijazah SMA/Sederajat	94,66	
3	SPM Pendidikan Kesetaraan	1	Standar Jumlah dan Kualitas Barang/Jasa		
		a.	Pemberian 1 Paket Modul Belajar Sesuai Kurikulum Per Peserta Didik Per Tahun	100%	
		b.	Pemberian 1 Set Perlengkapan Belajar Berupa Buku Tulis dan Alat Tulis Dalam Kondisi Baru Per Peserta Didik Per Semester	100%	
		2	Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan:		
		a.	Tutor Pendidikan Kesetaraan, Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D-IV	100%	

No	Uraian	Indikator		Target Tahun 2021 (%)	Keterangan
		b.	Kepala Sekolah Paling Rendah Memiliki Ijazah S1/D-IV	100%	
		c.	Tenaga Penujang Lainnya Minimal Pendidikan SMA/Sederajat	100%	

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

4.1.3 Realisasi Standar Pelayanan Minimal

Adapun realisasi SPM Pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi SPM berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Stdandar Pelayanan Minimal.

a. Realisasi SPM PAUD

Realisasi SPM PAUD dihitung sebagai berikut:

Tabel 2.3
Peserta Didik PAUD Usia 5-6 Tahun

No	Uraian	Peserta Didik PAUD		
		L	P	Jumlah
1	Kec. Citta	85	63	148
2	Kec. Donridonri	196	183	379
3	Kec. Ganra	40	55	95
4	Kec. Lalabata	425	377	802
5	Kec. Liliraja	225	189	414
6	Kec. Lilirilau	295	308	603
7	Kec. Marioriawa	115	92	207
8	Kec. Maroriwawo	395	392	787
	JUMLAH	1.776	1.659	3.435

Sumber : Bidang Pembinaan PAUD dan PNF , Tahun 2021

Sedangkan jumlah warga negara usia 5-6 tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Jumlah Warga Negara Usia 5-6

No	Uraian	Usia Penduduk		
		L	P	Jumlah
1	Kec. Citta	103	86	189
2	Kec. Donridonri	422	307	643
3	Kec. Ganra	146	136	282
4	Kec. Lalabata	704	662	1.366
5	Kec. Liliraja	361	351	712
6	Kec. Lilirilau	453	465	918
7	Kec. Marioriawa	386	375	761
8	Kec. Maroriwawo	662	591	1.253
	JUMLAH	3.151	2.973	6.124

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Sedangkan untuk menghitung capaian digunakan rumus sebagai berikut:

Rumus:

Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun
Yang Berpartisipasi Dalam PAUD

SPM PAUD

=

x 100%

Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun
3.435

=

x 100%

6.124

=

56,10%

Berdasarkan capaian tersebut, hal ini menunjukkan bahwa baru 59,91% warga negara usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini.

b. Realisasi SPM Pendidikan Dasar

Untuk menghitung SPM Pendidikan Dasar digunakan data sebagai berikut:

Tabel 2.5
Warga Negara Usia 7-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar

No	Uraian	Peserta Didik SD/MI/SMP/MTs Usia 7-15Tahun		
		L	P	Jumlah
1	Kec Citta	430	387	606
2	Kec Donridonri	1.303	1.272	2.924
3	Kec Ganra	772	680	1.610
4	Kec Lalabata	3.520	3.271	7.079
5	Kec Liliraja	1.711	1.644	3.437
6	Kec Lilirilau	1.932	1.851	4.202
7	Kec Marioriawa	1.849	1.752	3.880
8	Kec Marioriwawo	2.760	2.658	6.083
	JUMLAH	14.277	13.515	27.792

Sumber : Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Tahun 2021

Tabel 2.6

Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun

No	Uraian	Jumlah Penduduk Usia 7-15 Tahun		
		L	P	Jumlah
1	Kec. Citta	543	481	1024
2	Kec. Donridonri	1.692	1.636	3.328
3	Kec. Ganra	826	696	1.522
4	Kec. Lalabata	3.635	3.412	7.047
5	Kec. Liliraja	1.887	1.818	3.705
6	Kec. Lilirilau	2.378	2.321	4.699
7	Kec. Marioriawa	2.107	1.977	4.084
8	Kec. Marioriwawo	3.484	3.221	6.705
	JUMLAH	16.552	15.562	32.114

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Sedangkan untuk menghitung capaian digunakan rumus sebagai berikut:

Rumus:

Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun
Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar

SPM DIKDAS = ----- x 100%

Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun
30.172
= ----- x 100%
33.276

= 90,67%

Berdasarkan capaian tersebut, hal ini menunjukkan bahwa sudah 90,67% warga negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar

c. Realisasi SPM Pendidikan Kesetaraan

Untuk menghitung SPM Pendidikan Kesetaraan digunakan data sebagai berikut:

Tabel 2.7
Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan
Realisasi SPM Pendidikan Kesetaraan

No	Nama Lembaga	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Kec. Citta	0	0	0
2	Kec. Donridonri	36	22	58
3	Kec. Ganra	0	0	0
4	Kec. Lalabata	29	22	51
5	Kec. Liliriaja	72	47	119
6	Kec. Lilirilau	40	17	57
7	Kec. Marioriawa	28	15	43
8	Kec. Marioriwawo	40	16	56
	JUMLAH	245	139	384

Sumber: Bidang Pembinaan Paud dan PNF, 2021

Tabel 2.8
Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan
Dasar dan/atau Menengah Diluar Pendidikan Formal

No	Uraian	Jumlah Penduduk Usia 7-18 Tahun		
		L	P	Jumlah
1	Kec. Citta	0	0	0
2	Kec. Donridonri	36	22	58
3	Kec. Ganra	0	0	0
4	Kec. Lalabata	29	22	51
5	Kec. Liliriaja	72	47	119
6	Kec. Lilirilau	40	17	57
7	Kec. Marioriawa	28	15	43
8	Kec. Marioriwawo	40	16	56
	JUMLAH	245	139	384

Sumber: Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, 2021

Sedangkan untuk menghitung capaian digunakan rumus sebagai berikut:

Rumus:

$$\text{SPM Kesetaraan} = \frac{\text{Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan}}{\text{Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan/atau Menengah}} \times 100\%$$
$$= \frac{384}{384} \times 100\%$$
$$= 100\%$$

Berdasarkan capaian tersebut, hal ini menunjukkan bahwa sudah 100% warga negara usia 7 - 18 tahun belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

Berdasarkan data-data tersebut di atas, maka realisasi SPM Pendidikan pada Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Realisasi SPM Pendidikan Berdasarkan Permendagri No. 100 Tahun 2018

No	Uraian	Indikator	TargetTahun 2021(%)	Realisasi Tahun 2021 (%)	Capaian (%)	Ket
1	SPM PAUD	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	100%	56,10%	56,10%	
2	SPM PendidikanDasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar	100%	86,54%	86,54%	
3	SPM Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	100%	100%	100%	

Sumber: Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, 2021

2. Realisasi SPM berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan

Untuk realisasi SPM Pendidikan berdasarkan Permendikbud No. 32 Tahun 2018, diuraikan sebagai berikut:

a) Realisasi SPM PAUD

Adapun pencapaian SPM PAUD berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Penerima Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan Jasa

Tabel 2.10
Standar Jumlah dan Kualitas Barang/Jasa (Biaya Personil Siswa PAUD)

No	Uraian	Jumlah Siswa Miskin	Jumlah Penerima	%
1	Pemberian 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisibaru per semester (khusus siswa miskin)	123	0	0%
2	Pemberian 1 Set alat mewarnai paling sedikit 12(dua belas) warna dalam kondisi baru per semester(khusus siswa miskin)	123	0	0%

Untuk menghitung pemberian biaya personil siswa atau standar jumlah dan kualitas barang/jasa digunakan rumus berikut:

Rumus 1 :

Jumlah Siswa Misikin PAUD Penerima 6
Buah buku gambar dalam kondisi baru Per semester

Buku Gambar

=

Jumlah Siswa Miskin

x 100%

0

=

123

x 100%

=

0 %

Rumus 2 :

Jumlah Siswa Miskin PAUD Penerima 1 Set
Alat mewarnai paling sedikit 12 warna dalam kondisi
Baru Per Semester

Buku Gambar

=

Jumlah Siswa Miskin

x 100%

0

=

123

x 100%

=

0 %

2) Standar Jumlah dan Kualitas PTK

Untuk standar jumlah dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD
Tahun 2021

No	Uraian	L	P	Jumlah
1	Kualitas Pendidik PNS		102	102
	a. Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D-IV bidang PAUD, kependidikan lain atau psikologi.	-	99	99
	b. Belum Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D-IV bidang PAUD, kependidikan lain atau psikologi.	-	3	3
	c. Memiliki Sertifikat Profesi Guru PAUD.	-	89	89
	d. Belum Memiliki Sertifikat Profesi Guru PAUD	-	13	13
2	Kualitas Pendidik Non PNS		202	202
	a. Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D-IV bidang PAUD, kependidikan lain atau psikologi.	-	141	141
	b. Belum Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D-IV bidang PAUD, kependidikan lain atau psikologi.	-	61	61
	c. Memiliki Sertifikat Profesi Guru PAUD.	-	57	57
	d. Belum Memiliki Sertifikat Profesi Guru PAUD	-	145	145
3	Kepala Sekolah	-	44	44
	a. Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D-IV	-	41	41
	b. Belum Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D-IV	-	3	3
	c. Memiliki Sertifikat Pendidik.	-	42	42
	d. Belum Memiliki Sertifikat Pendidik	-	2	2
	e. Memiliki STTPP Calon Kepala Sekolah untuk PAUD Formal dan/atau Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepala Satuan PAUD dari lembaga yang berwenang untuk PAUD Nonformal.	-	44	44
	f. Belum Memiliki STTPP Calon Kepala Sekolah untuk PAUD Formal dan/atau Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepala Satuan PAUD dari lembaga yang berwenang untuk PAUD Nonformal.	-	-	-

Untuk menghitung standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan digunakan rumus berikut :

Rumus 1:

Pendidik Kualifikasi Minimal S1/D-IV

=

Jumlah Pendidik PAUD Yang Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D-IV

Jumlah Siswa Paud

x 100 %

$$\begin{aligned}
 &= \frac{240}{304} \times 100 \% \\
 &= 78,95 \%
 \end{aligned}$$

Rumus 2:

Pendidik Memiliki Sertifikat	Jumlah Pendidik PAUD Yang Memiliki Sertifikat Pendidik = $\frac{\text{Jumlah Pendidik PAUD Yang Memiliki Sertifikat Pendidik}}{\text{Jumlah Pendidik Paud}} \times 100 \%$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{146}{304} \times 100 \% \\
 &= 48,03 \%
 \end{aligned}$$

Rumus 3:

Kepala Sekolah Kualifikasi Minimal S1/D-IV	Jumlah Pendidik PAUD Yang Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D-IV = $\frac{\text{Jumlah Pendidik PAUD Yang Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D-IV}}{\text{Jumlah Kepala Sekolah}} \times 100\%$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{41}{44} \times 100\% \\
 &= 93,18 \%
 \end{aligned}$$

Rumus 4:

Kepala Sekolah Memiliki NUKS	Jumlah Pendidik PAUD Yang Memiliki Sertifikat Pendidik = $\frac{\text{Jumlah Pendidik PAUD Yang Memiliki Sertifikat Pendidik}}{\text{Jumlah Kepala Sekolah PAUD}} \times 100\%$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{42}{44} \times 100\% \\
 &= 95,45 \%
 \end{aligned}$$

Rumus 5:

Kepala Sekolah Memiliki STTP Cakep	Jumlah Pendidik PAUD Yang Kualifikasi STTP Calon Kepala Sekolah/Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan = $\frac{\text{Jumlah Pendidik PAUD Yang Kualifikasi STTP Calon Kepala Sekolah/Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan}}{\text{Jumlah Kepala Sekolah PAUD}} \times 100\%$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{44}{44} \times 100\% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

b) Realisasi SPM Pendidikan Dasar

Adapun pencapaian SPM Pendidikan Dasar berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Penerima Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan Jasa

Tabel 2.12
Standar Jumlah dan Kualitas Barang/Jasa (Biaya Personil Siswa Dikdas)

No	Uraian	Jumlah Siswa Miskin	Jumlah Penerima	Realisasi (%)
1	Pemberian 1 Set paket buku teks pelajaran sesuai Kurikulum Per Peserta Didik Per Tahun (khusus siswa miskin)	5.992	0	0%
2	Pemberian 1 Set Perlengkapan Belajar Berupa Buku Tulis dan Alat Tulis Dalam Kondisi Baru Per Peserta Didik Per Semester (khusus siswa miskin)	5.992	0	0%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Untuk menghitung pemberian biaya personil siswa atau standar jumlah dan kualitas barang/jasa digunakan rumus berikut:

Rumus 1:

Kepala Sekolah
Paket Buku Teks
Cakep

=

Jumlah Siswa Miskin Penerima 1 Set
Buku Teks Pelajaran Sesuai Kurikulum

Jumlah Siswa Miskin

x 100%

0

=

x 100%

5.992

= 0 %

Rumus 2:

Perlengkapan
Belajar

=

Jumlah Pendidik PAUD Yang Kualifikasi
STTPP Calon Kepala Sekolah/Sertifikat
Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Siswa Miskin

x 100%

0

BAB. IV-13

$$= \frac{\text{-----}}{5.992} \times 100\% = 0\%$$

2) Standar Jumlah dan Kualitas PTK

Tabel 2.13
Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Dasar (SD dan SMP) Tahun 2020

NO	URAIAN	L	P	JML
A	SEKOLAH DASAR (SD)			
1	Kualitas Pendidik PNS			
	a. Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D-IV	456	1146	1602
	b. Belum Kualifikasi Pendidikan MinimalS1/D-IV	38	59	97
	c. Memiliki Sertifikat Pendidik.	289	749	1038
	d. Belum Memiliki Sertifikat Pendidik	205	456	661
2	Kualitas Pendidik Non PNS			
	a. Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D-IV	153	695	848
	b. Belum Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D-IV	9	41	50
	c. Memiliki Sertifikat Pendidik.	2	9	11
	d. Belum Memiliki Sertifikat Pendidik	160	727	887
3	Kepala Sekolah			
	a. Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D-IV	117	108	225
	b. Belum Kualifikasi Pendidikan MinimalS1/D-IV	0	0	0
	c. Memiliki Sertifikat Pendidik.	117	108	225
	d. Belum Memiliki Sertifikat Pendidik	0	0	0
	e. Memiliki STTPP Calon Kepala Sekolah.	117	108	225
	f. Belum Memiliki STTPP Calon Kepala Sekolah.	0	0	0
4	Tenaga Penunjang Lainnya			
	a. Kualifikasi Pendidikan Minimal IjazahSMA/ Sederajat	139	270	409
	b. Belum Kualifikasi Pendidikan MinimalIjazah SMA/ Sederajat	18	4	22
B	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)			
1	Kualitas Pendidik PNS			
	a. Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D-IV	161	344	505
	b. Belum Kualifikasi Pendidikan MinimalS1/D-IV	5	6	11
	c. Memiliki Sertifikat Pendidik.	153	317	470
	d. Belum Memiliki Sertifikat Pendidik	13	33	46
2	Kualitas Pendidik Non PNS			
	a. Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D-IV	57	150	207
	b. Belum Kualifikasi Pendidikan MinimalS1/D-IV	0	1	1
	c. Memiliki Sertifikat Pendidik.	3	14	17
	d. Belum Memiliki Sertifikat Pendidik	55	136	191
3	Kepala Sekolah			
	a. Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D-IV	30	3	33
	b. Belum Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D-IV	0	0	0
	c. Memiliki Sertifikat Pendidik.	30	3	33
	d. Belum Memiliki Sertifikat Pendidik	0	0	0

NO	URAIAN	L	P	JML
	e. Memiliki STTPP Calon Kepala Sekolah.	30	3	33
	f. Belum Memiliki STTPP Calon Kepala Sekolah.	0	0	0
4	Tenaga Penujang Lainnya			
	a. Kualifikasi Pendidikan Minimal Ijazah SMA/ Sederajat	27	43	70
	b. Belum Kualifikasi Pendidikan Minimal Ijazah SMA/ Sederajat	5	0	5

Untuk menghitung standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan digunakan rumus berikut:

Rumus 1:

Pendidik Kualifikasi Minimal S1/D-IV

Jumlah Pendidik Yang Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D-IV (SD + SMP)

=

Jumlah Pendidik (SD + SMP)

x 100%

2.450 + 712

= ----- x 100%

2.597 + 724

3.162

= ----- x 100%

3.162

= 95,21 %

Rumus 2:

Pendidik Memiliki Sertifikat

Jumlah Pendidik Yang Memiliki Sertifikat Pendidik (SD + SMP)

=

Jumlah Pendidik (SD + SMP)

x 100%

1.049 + 487

= ----- x 100%

2.597 + 724

1.536

= ----- x 100%

3.321

= 46,25 %

Rumus 3:

Kepala Sekolah Kualifikasi Minimal S1/D-IV

Jumlah Kepala Sekolah Yang Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D-IV (SD + SMP)

=

Jumlah Pendidik (SD + SMP)

x 100%

225 + 33

= ----- x 100%

$$\begin{aligned}
 & 225 + 33 \\
 & 258 \\
 & = \frac{258}{258} \times 100\% \\
 & = 100 \%
 \end{aligned}$$

Rumus 4:

Kepala Sekolah Memiliki NUKS	Jumlah Kepala Sekolah Yang Memiliki Sertifikat Kepsek (NUKS) (SD + SMP) = $\frac{\text{Jumlah Kepala Sekolah Yang Memiliki Sertifikat Kepsek (NUKS) (SD + SMP)}}{\text{Jumlah Pendidik (SD + SMP)}} \times 100\%$ Jumlah Pendidik (SD + SMP)

$$\begin{aligned}
 & 225 + 33 \\
 & = \frac{258}{258} \times 100\% \\
 & 258 \\
 & 258 \\
 & = \frac{258}{258} \times 100\% \\
 & 258 \\
 & = 100 \%
 \end{aligned}$$

Rumus 5:

Kepala Sekolah Memiliki STTPP Cakep	Jumlah Kepala Sekolah Yang Memiliki STTPP Calon Kepala Sekolah = $\frac{\text{Jumlah Kepala Sekolah Yang Memiliki STTPP Calon Kepala Sekolah}}{\text{Jumlah Pendidik (SD + SMP)}} \times 100\%$ Jumlah Pendidik (SD + SMP)

$$\begin{aligned}
 & 225 + 33 \\
 & = \frac{258}{258} \times 100\% \\
 & 225 + 33 \\
 & 258 \\
 & = \frac{258}{258} \times 100\% \\
 & 258 \\
 & = 100 \%
 \end{aligned}$$

Rumus 6:

Kepala Sekolah Tenaga Penunjang	Jumlah Tenaga Penunjang Yang Berijazah Pendidikan Minimal SMA Sederajat (SD + SMP) = $\frac{\text{Jumlah Tenaga Penunjang Yang Berijazah Pendidikan Minimal SMA Sederajat (SD + SMP)}}{\text{Jumlah Tenaga Penunjang (SD + SMP)}} \times 100\%$ Jumlah Tenaga Penunjang (SD + SMP)

$$\begin{aligned}
 & 409 + 70 \\
 & = \frac{479}{506} \times 100\% \\
 & 431 + 75 \\
 & 479 \\
 & = \frac{479}{506} \times 100\% \\
 & 506 \\
 & = 94,66 \%
 \end{aligned}$$

c) Realisasi SPM Pendidikan Kesenjangan

Realisasi SPM Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, dijelaskan sebagai berikut:

1) Standar Jumlah dan Kualitas Barang/Jasa.

Untuk menghitung Standar Jumlah dan Kualitas Barang/Jasa menggunakan data pada tabel berikut:

Tabel 2.14
Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan
Penerima Standar Jumlah dan Kualitas Barang/Jasa

No	Nama Lembaga	Kecamatan	Penerima Standar Jumlah dan KualitasBarang/Jasa	
			1 Paket Modul BelajarSesuai Kurikulum PerPeserta Didik Per Tahun	1 Set Perlengkapan Belajar Berupa Buku Tulis dan Alat Tulis Dalam Kondisi Baru Per Peserta Didik Per Semester
1	SKB	Lalabata	51	51
2	PKBM Harapan Bangsa	Donri-Donri	58	58
3	PKBM Amalia	Lilirilau	42	42
4	PKBM Latemmamala	Lilirilau	15	15
5	PKBM Abbarugangnge	Liliriaja	119	119
6	PKBM Mario	Marioriwawo	56	56
7	PKBM AL-AMIN	Marioriawa	43	43
JUMLAH			384	384

Sumber: Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, 2021

Untuk menghitung penerima standar jumlah dan kualitas barang/jasa berupa 1 paket modul belajar, digunakan rumus berikut:

Rumus :

$$\begin{aligned} \text{Paket modul Belajar} &= \frac{\text{Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan dan Memperoleh 1 Paket Modul belajar}}{\text{Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan}} \times 100\% \\ &= \frac{384}{384} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Untuk menghitung penerima standar jumlah dan kualitas barang/jasa berupa 1 set perlengkapan belajar, digunakan rumus berikut:

Rumus :

$$\text{Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan}$$

2) Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Untuk menghitung Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan menggunakan data pada tabel berikut:

No	Wilayah	Tutor Paket A		
		Sudah Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D-IV	Belum Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D-IV	Jumlah
1	SKB	√	-	1
2	PKBM Harapan Bangsa	√	-	3
3	PKBM Amalia	√	-	2
4	PKBM Latemmamala	√	-	0
5	PKBM Abbarugangnge	√	-	1
6	PKBM Mario	√	-	1
7	PKBM AL-AMIN	√	-	1
	TOTAL			7

Sumber : Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Tahun 2021

No	Wilayah	Tutor Paket B		
		Sudah Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D-IV	Belum Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D-IV	Jumlah
1	SKB	√	-	4
2	PKBM HarapanBangsa	√	-	3
3	PKBM Amalia	√	-	5
4	PKBM Latemmamala	√	-	1
5	PKBM Abbarugangnge	√	-	3
6	PKBM Mario	√	-	2
7	PKBM AL-AMIN	√	-	3
	Total			21

Sumber : Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Tahun 2021

Tabel 2.17
Daftar Kualifikasi Pendidikan Tutor Paket C Kabupaten Soppeng

No	Wilayah	Tutor Paket C		
		Sudah Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D-IV	Belum Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D-IV	Jumlah
1	SKB	√	-	3
2	PKBM HarapanBangsa	√	-	1
3	PKBM Amalia	√	-	9
4	PKBM Latemmamala	√	-	3
5	PKBM Abbarugangnge	√	-	8
6	PKBM Mario	√	-	1
7	PKBM AL-AMIN	√	-	1
	Total			26

Sumber : Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Tahun 2021

Tabel 2.18
Daftar Kualifikasi Pendidikan Kepala Sekolah Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Soppeng

No	Nama Lembaga	Wilayah	Kepala Sekolah	
			Sudah Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D-IV	Belum Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D-IV
1	SKB	Lalabata	√	-
2	PKBM HarapanBangsa	Donri-Donri	√	-
3	PKBM Amalia	Lilirilau	√	-
4	PKBM Latemmamala	Lilirilau	√	-
5	PKBM Abbarugangnge	Liliriaja	√	-
6	PKBM Mario	Marioriwawo	√	-
7	PKBM AL-AMIN	Marioriawa	√	-

Tabel 2.19
Daftar Kualifikasi Pendidikan Tenaga Penunjang Lainnya Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Soppeng

No	Nama Lembaga	Wilayah	Kepala Sekolah	
			Sudah Kualifikasi Pendidikan Minimal SMA Sederajat	Belum Kualifikasi Pendidikan Minimal SMA Sederajat
1	SKB	Lalabata	√	-
2	PKBM HarapanBangsa	Donri-Donri	√	-
3	PKBM Amalia	Lilirilau	√	-

4.1.4 Alokasi anggaran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, alokasi anggaran untuk Pendidikan minimal 20% dari Belanja APBD. Data yang diperoleh dari Neraca Pendidikan Kabupaten Soppeng 5 tahun terakhir dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.20
Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan Tahun 2017-2021

No	Uraian	Anggaran Pendidikan(Rp.)	Total Belanja APBD (Rp.)	%
1	Tahun 2017	374.300.854.380,-	1.221.166.254.700,-	30,31
2	Tahun 2018	374.604.419.752,-	1.271.512.024.837,-	30,68
3	Tahun 2019	404.086.521.493,-	1.185.371.423.348,-	31,78
4	Tahun 2020	366.490.912.560,-	1.185.371.423.348,-	30,92
5	Tahun 2021	377.142.370.600,-		

Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Daerah sudah menggambarkan keseriusan dan komitmen yang tinggi dalam mengalokasikan anggaran dalam bidang pendidikan. Sedangkan Untuk alokasi Masing – Masing Anggaran Untuk SPM Pendidikan dapat diuraikan sebagai Berikut:

1. Alokasi Anggaran SPM PAUD

Untuk alokasi anggaran yang terkait dengan pencapaian SPM Pendidikan PAUD, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21
Alokasi Anggaran PAUD

No	Uraian	Alokasi Belanja PAUD (Rp.)	BelanjaOperasi dan Modal (Rp.)	%
1	Tahun 2021	6.210.673.000	72.254.113.070	8,59

Sumber: DPPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jika dilihat dari presentase alokasi anggaran untuk PAUD pada Tahun 2021, sebanyak 8,59 % dari total belanja operasi dan modal diluar belanja pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng

Tabel 2.22
Alokasi Anggaran SPM PAUD

No	Uraian	Alokasi Belanja PAUD (Rp.)	BelanjaOperasi dan Modal (Rp.)	%
1	Tahun 2021	5.990.375.000	72.254.113.070	8,29

Sumber: DPPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Persentase alokasi anggaran untuk SPM PAUD pada Tahun 2021 sebanyak 8,29 % dari total belanja operasi dan modal diluar belanja pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng

2. **Alokasi Anggaran SPM Pendidikan Dasar**

Untuk alokasi anggaran yang terkait dengan pencapaian SPM Pendidikan Dasar, dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.23
Alokasi Anggaran Pendidikan Dasar

No	Uraian	Alokasi Belanja Pendidikan Dasar (Rp.)	Belanja Operasi dan Modal (Rp.)	%
1	Tahun 2021	63.218.107.450	72.254.113.070	87,49

Sumber: DPPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jika dilihat dari prosentase alokasi anggaran untuk Pendidikan Dasar pada Tahun 2021 sebanyak 87,49 % dari total belanja operasi dan modal diluar belanja pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng.

Tabel 2.24
Alokasi Anggaran SPM Pendidikan Dasar

No	Uraian	Alokasi Belanja SPM Pendidikan Dasar (Rp.)	Belanja Operasi dan Modal (Rp.)	%
1	Tahun 2021	62.997.809.450	72.254.113.070	87,19

Sumber: DPPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jika dilihat dari prosentase alokasi anggaran untuk SPM Pendidikan Dasar pada Tahun 2021 sebanyak 87,19 % dari total belanja operasi dan modal diluar belanja pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng.

3. **SPM Pendidikan Kesetaraan**

Untuk alokasi anggaran yang terkait dengan pencapaian SPM Pendidikan Kesetaraan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25
Alokasi Anggaran Berdasarkan SPM Pendidikan Kesetaraan

No	Uraian	Alokasi Belanja Pendidikan Dasar (Rp.)	Belanja Operasi dan Modal (Rp.)	%
1	Tahun 2021	1.774.700.000	72.254.113.070	2,46

Sumber: DPPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jika dilihat dari prosentase alokasi anggaran untuk SPM Pendidikan Kesetaraan pada Tahun 2021 sebanyak 2,46 % dari total belanja operasi dan modal diluar belanja pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng.

4.1.5 **Dukungan personil**

1) **Dukungan Personil Untuk SPM PAUD**

Berdasarkan data pokok pendidikan Tahun 2020, jumlah personil guru untuk PAUD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.26
Daftar Guru PNS PAUD Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Wilayah	Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D4			Kualifikasi Pendidikan Belum S1/D4			Total Guru PNSD PAUD		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	Kec. Citta	0	1	1	0	0	0	0	1	1
2	Kec. Donri-Donri	0	8	8	0	0	0	0	8	8
3	Kec. Ganra	0	3	3	0	0	0	0	3	3
4	Kec. Lalabata	0	24	24	0	0	0	0	24	24
5	Kec. Liliraja	0	14	14	0	0	0	0	14	14
6	Kec. Lilirilau	0	3	3	0	0	0	0	3	3
7	Kec. Marioriawa	0	5	5	0	0	0	0	5	5
8	Kec. Maroriwawo	0	6	6	0	0	0	0	6	6
	Total	0	64	64	0	0	0	0	64	64

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2021

Tabel 2.27
Daftar Guru Non PNS PAUD Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Wilayah	Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D4			Kualifikasi Pendidikan Belum S1/D4			Total Guru Non PNSD PAUD		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	Kec. Citta	0	10	10	0	22	22	0	32	32
2	Kec. Donri-Donri	0	18	18	0	8	8	0	26	26
3	Kec. Ganra	0	4	4	0	5	5	0	9	9
4	Kec. Lalabata	0	53	53	0	22	22	0	75	75
5	Kec. Liliraja	0	28	28	0	17	17	0	45	45
6	Kec. Lilirilau	0	36	36	0	34	34	0	70	70
7	Kec. Marioriawa	0	9	9	0	7	7	0	16	16
8	Kec. Maroriwawo	0	45	45	0	34	34	0	79	79
	Total	0	203	203	0	149	149	0	352	352

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2021

Hal ini menunjukkan bahwa belum semua guru PAUD memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/D-IV. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik dimaksud yaitu setiap guru harus memiliki ijazah minimal S1/D-IV.

2) Dukungan Personil Untuk SPM Pendidikan Dasar

Berdasarkan data pokok pendidikan Tahun 2021, jumlah personil guru SD/MI dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.28
Daftar Guru PNS SD Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Wilayah	Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D4			Kualifikasi Pendidikan Belum S1/D4			Total Guru PNSD SD		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	Kec. Citta	12	40	52	1	1	2	13	41	54

2	Kec. Donri-Donri	40	115	155	2	6	8	42	121	163
3	Kec. Ganra	17	70	87	2	3	5	19	73	92
4	Kec. Lalabata	67	232	299	4	9	13	71	241	312
5	Kec. Liliraja	42	150	192	0	8	8	42	158	200
6	Kec. Lilirilau	72	169	241	4	13	17	76	182	258
7	Kec. Marioriawa	43	125	168	11	11	22	54	136	190
8	Kec. Marioriwawo	79	202	281	9	6	15	88	208	296
	Total	372	1.103	1.475	33	57	90	405	1.160	1.565

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2021

Tabel 2.29
Daftar Guru Non PNS SD Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Wilayah	Kualifikasi Pendidikan MinimalS1/D4			Kualifikasi Pendidikan Belum S1/D4			Total Guru Non PNSDSD		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	Kec. Citta	8	30	38	0	3	3	8	33	41
2	Kec. Donri-Donri	16	87	103	2	5	7	18	92	110
3	Kec. Ganra	11	34	45	0	10	10	11	44	55
4	Kec. Lalabata	52	180	232	4	10	14	56	190	246
5	Kec. Liliraja	14	82	96	1	5	6	15	87	102
6	Kec. Lilirilau	33	113	146	5	6	11	38	119	157
7	Kec. Marioriawa	21	63	84	1	10	11	22	73	95
8	Kec. Marioriwawo	26	172	198	3	18	21	29	190	219
	Total	181	761	942	16	67	83	184	853	1.025

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2021

Tabel 2.30
Daftar Guru PNS SMP Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Wilayah	Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D4			Kualifikasi Pendidikan Belum S1/D4			Total Guru PNSD SMP		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	Kec. Citta	11	14	25	1	0	1	12	14	26
2	Kec. Donri-Donri	21	41	62	1	2	3	22	43	65
3	Kec. Ganra	15	18	33	0	0	0	15	18	33
4	Kec. Lalabata	34	94	128	1	0	1	35	94	129
5	Kec. Liliraja	26	57	83	0	2	2	26	59	85
6	Kec. Lilirilau	32	57	89	0	2	2	32	59	91
7	Kec. Marioriawa	22	50	72	1	0	1	23	50	73
8	Kec. Marioriwawo	38	71	109	0	1	1	38	72	110
	Total	199	402	601	4	7	11	203	409	612

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2021

Tabel 2.31
Daftar Guru Non PNS SMP Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Wilayah	Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D4			Kualifikasi Pendidikan Belum S1/D4			Total Guru Non PNSD SMP		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	Kec. Citta	4	16	20	0	0	0	4	16	20
2	Kec. Donri-Donri	17	44	61	0	4	4	17	48	65

3	Kec. Ganra	16	36	52	0	0	0	16	36	52
4	Kec. Lalabata	39	91	130	6	8	14	45	99	144
5	Kec. Liliraja	24	60	84	1	1	2	25	61	86
6	Kec. Lilirilau	18	36	54	1	4	5	19	40	59
7	Kec. Marioriawa	18	43	61	0	0	0	18	43	61
8	Kec. Marioriwawo	37	82	119	1	2	3	38	84	122
	Total	173	408	581	9	19	28	182	427	609

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2021

Hal ini menunjukkan bahwa belum semua guru SD/MI memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/D-IV. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik dimaksud yaitu setiap guru harus memiliki ijazah minimal S1/D-IV.

3) Dukungan Personil SPM Pendidikan Kesetaraan

Berdasarkan data pokok pendidikan Tahun 2021, jumlah personil Tutor Pendidikan Kesetaraan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.32
Daftar Tutor Paket A Kabupaten Soppeng

No	Wilayah	Tutor Paket A		
		L	P	Jumlah
1	SKB	1	0	1
2	PKBM Harapan Bangsa	2	1	3
3	PKBM Amalia	0	1	1
4	PKBM Latemmamala	0	0	0
5	PKBM Abbarugangnge	0	1	1
6	PKBM Mario	0	1	1
7	PKBM Al-Amin	1	0	1
	Total	4	4	8

Sumber : Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Tahun 2021

Tabel 2.33
Daftar Tutor Paket B Kabupaten Soppeng

No	Wilayah	Tutor Paket B		
		L	P	Jumlah
1	SKB	2	2	4
2	PKBM Harapan Bangsa	1	3	4
3	PKBM Amalia	2	3	5
4	PKBM Latemmamala	0	1	1
5	PKBM Abbarugangnge	1	2	3
6	PKBM Mario	0	1	1
7	PKBM Al-Amin	0	3	3
	Total	6	15	21

Sumber : Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Tahun 2021

Tabel 2.34
Daftar Tutor Paket C Kabupaten Soppeng

No	Wilayah	Tutor Paket C		
		L	P	Jumlah
1	SKB	0	3	3
2	PKBM Harapan Bangsa	1	0	1
3	PKBM Amalia	7	2	9
4	PKBM Latemmamala	3	0	3
5	PKBM Abbarugangnge	3	5	8
6	PKBM Mario	0	1	1
7	PKBM Al-Amin	0	1	1
	Total	14	12	26

Sumber : Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Tahun 2021

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan dan Solusi SPM PAUD

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka telah dilakukan identifikasi permasalahan-permasalahan terkait dengan pencapaian SPM PAUD. Hal tersebut dapat dilihat pada table berikut:

Tabel. 2.35
Permasalahan Yang Mempengaruhi Capaian SPM PAUD

No	Masalah	Masalah Pokok	Akar Masalah
1	SPM PAUD Tahun 2021 masih rendah.	- Tingkat partisipasi sekolah penduduk usia 5-6 tahun pada PAUD belum maksimal .	- Rendahnya kesadaran orang tua untuk memasukkan anaknya pada layanan PAUD sebelum memasuki jenjang sekolah dasar - Masih terbatasnya sarana dan prasarana PAUD utamanya Alat Permainan Edukatif (APE), sehingga banyak anak yang kurang berminat memasuki Lembaga PAUD - Faktor geografis yang menyebabkan beberapa anak usia PAUD kesulitan untuk menjangkau fasilitas PAUD.

Untuk menjawab masalah ini, maka beberapa hal dapat dilakukan untuk memperbaiki capaian SPM PAUD, yakni:

- menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu, merata, terjangkau, setara, bebas pungutan dan berkeadilan di setiap desa dan kelurahan;
- mengupayakan lembaga PAUD swasta yang belum mampu mandiri untuk beralih status menjadi PAUD negeri dalam rangka menjamin ketersediaan sarana dan prasarana PAUD yang memadai;

- Memaksimalkan dukungan sarana prasarana pendukung bagi PAUD swasta yang belum mandiri,
 - Memberikan pendidikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Mempersyaratkan Surat Keterangan pernah belajar di Lembaga PAUD pada saat penerimaan calon peserta didik SD Sederajat.
 - Menyiapkan anggaran khusus pemenuhan SPM PAUD di dalam APBD.
2. **Permasalahan dan Solusi SPM Pendidikan Dasar**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka telah dilakukan iddentifikasi permasalahan-permasalahn terkait dengan pencapaian SPM Pendidikan Dasar. Analisis permasalahan yang ada diuraikan sebagaimana table berikut:

Tabel. 2.36

Permasalahan Yang Mempengaruhi Capaian SPM Pendidikan Dasar

No	Masalah	Masalah Pokok	Akar Masalah
1	SPM Pendidikan dasar belum maksimal, Tahun 2021	- Tingkat partisipasi sekolah pendidik usia 7-15 tahun pada Pendidikan Dasar belum maksimal	- Faktor Ekonomi Keluarga - Masih adanya siswa putus sekolah baik dalam jenjang SD dan SMP maupun putus antar jenjang SD dan SMP

Berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka indikator Pendidikan Dasar yang sesuai adalah indikator APM.

Angka Partisipasi Murni (APM) atau biasa disebut Net Enrollment Rate (NER) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan.

APM digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.

Faktor penyebab sehingga APM SD/MI sederajat dan APM SMP/MTs sederajat belum maksimal antara lain karena masih adanya peserta didik yang bersekolah pada jenjang SD/MI sederajat yang belum cukup usia yang diwajibkan yaitu 7 tahun pada jenjang SD/MI sederajat dan 13 tahun pada jenjang SMP/MTs. Untuk memperbaiki kondisi ini, maka pada kegiatan penerimaan siswa baru pemerintah sebaiknya menerapkan kebijakan penerimaan siswa baru sesuai usia wajib.

Faktor selanjutnya yang menyebabkan APM masih rendah yakni adanya peserta didik yang mengulang termasuk yang tidak lulus pada ujian akhir. Untuk memperbaiki kondisi ini, maka pemerintah daerah dapat melakukan intervensi pendidikan dalam bentuk peningkatan mutu

pendidik melalui pelatihan-pelatihan dan sejenisnya. Sedangkan untuk mendorong minat baca peserta didik dapat dilakukan bimbingan belajar bagi siswa. Selain dari itu, tentunya kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan harus menjadi prioritas.

Faktor lain yang menyebabkan APM masih rendah yakni Angka Putus Sekolah dan kondisi peserta didik yang bermukim di daerah perbatasan. Jika indikator Angka Melanjutkan rendah, hal ini juga membuat indikator angka putus sekolah ikut berpengaruh. Ini menggambarkan bahwa ada penduduk usia sekolah yang tidak lagi berpartisipasi dalam layanan pendidikan. Namun demikian tidak semua penduduk usia sekolah tersebut belum berpartisipasi dalam layanan pendidikan, hal ini bisa disebabkan karena peserta didik melanjutkan di luar wilayah Kabupaten Soppeng, sama halnya dengan peserta didik yang bermukim di daerah perbatasan yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Soppeng namun bersekolah di luar wilayah Kabupaten Soppeng, sehingga objek pembagi dalam formulasi indikator menjadi lebih kecil. Rata-rata peserta didik yang tidak melanjutkan dan putus sekolah disebabkan oleh faktor ekonomi, sehingga intervensi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah memberikan beasiswa khusus bagi peserta didik yang kurang mampu.

Kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam menerapkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Pendidikan Gratis sangat membantu penyelenggara pendidikan dan peserta didik, sehingga tatakelolanya perlu ditingkatkan terus menerus dan berkelanjutan.

Secara umum kebijakan yang harus dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah:

- menyelenggarakan Pendidikan Dasar yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan relevan;
- meningkatkan kualitas belajar peserta didik melalui kegiatan bimbingan belajar; dan menerapkan SPM Pendidikan Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. **Permasalahan dan Solusi SPM Pendidikan Kesetaraan**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka telah dilakukan identifikasi permasalahan-permasalahan terkait dengan pencapaian SPM Pendidikan Kesetaraan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah 100% dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.37
Permasalahan Yang Mempengaruhi Capaian SPM Kesetaraan

No	Masalah	Masalah Pokok	Akar Masalah
1	SPM Kesetaraan Tahun 2021 masih rendah	- Tingkat partisipasi sekolah penduduk 7-18 tahun yang tidak bersekolah pada Pendidikan Kesetaraan masih rendah.	- Masih rendahnya minat anak putus sekolah untuk mengikuti program Pendidikan kesetaraan - Masih banyaknya anak tidak sekolah yang tidak lagi berminat untuk melanjutkan Pendidikan - Factor ekonomi keluarga yang memaksa anak untuk mencari pekerjaan secara dini untuk memnuhi kebutuhan rumah tangga keluarganya.

Untuk menjawab masalah ini, maka beberapa hal dapat dilakukan untuk memperbaiki capaian SPM Pendidikan Kesenjangan, yakni:

- Penerapan SPM Pendidikan Kesenjangan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mendorong pembentukan PKBM baru oleh masyarakat, mengingat distribusi PKBM belum merata. Masih ada 2 (dua) Kecamatan yang belum ada PKBM, yaitu Kecamatan Ganra dan Kecamatan Citta.
- Masih perlu dilakukan sosialisasi, untuk memacu semangat dan animo masyarakat tentang pentingnya pendidikan kesetaraan.

4.2 URUSAN KESEHATAN

Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang pelaksanaan teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, dalam pelaksanaannya sebagai berikut:

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- d. Pelayanan Kesehatan Balita
- e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- j. Pelayanan Kesehatan dengan Gangguan Jiwa Berat
- k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

4.2.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Adapun target pencapaian SPM bidang urusan kesehatan diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.38
Capaian Trget, dan Pembiayaan Standar Pelayanan Minimal
Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

No	Capaian 2021 (%)				GAP (%)	Capaian TARGET, DAN RENCANA PEMBIAYAAN SPM		
	Pelayanan Dasar Indikator	Target (%) Nasional	Batas Waktu			TAHUN 2021		
						Target	Program/ Kegiatan	Pembiayaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,00	2021	100,00		100	Pelayanan Kesehatan Ibu	
2	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,00	2021	100,00		100	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik	
3	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,00	2021	100,00		100	Pelayanan Kesehatan Balita Dan Anak	
4	Cakupan Pelayanann Kesehatan Balita	100,00	2021	100,00		100	Pelayanan Kesehatan Balita Dan Anak	
5	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100,00	2021	100,00		100	Pelayanan Kesehatan Balita Dan Anak	
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100,00	2021	20.11		100	Pelayanan Pencegahan Penyakit Tidak Menular	
7	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100,00	2021	100,00		100	Pelayanan Kesehatan Lansia	
8	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100,00	2021	100,00		100	Pelayanan Pencegahan Penyakit Tidak Menular	
9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100,00	2021	100,00		100	Pelayanan Pencegahan Penyakit Tidak Menular	
10	Cakupan Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100,00	2021	100,00		100	Pelayanan Pencegahan Penyakit Tidak Menular	
11	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB	100,00	2021	100,00		100	Pelayanan Pencegahan Penyakit Menular	
12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan	100,00	2021	100,00		100	Pelayanan Pencegahan Penyakit Menular	

	Risiko Terinfeksi HIV							

4.2.3 Realisasi

Adapun realisasi penerapan SPM bidang urusan kesehatan berdasarkan indikator pencapaiannya yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.39
PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
DI KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Angka Absolut			%
		Indikator		Target (%)	Pembilang	Penyebut	
1	2	3		4	5	6	7
I	Pelayanan Kesehatan Dasar	1	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	3,085	3,085	100
		2	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	2,955	2,955	100
		3	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	2,938	2,938	100
		4	Cakupan pelayanana kesehatan balita	100	8,540	8,540	100
		5	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	7.279	7,279	100
		6	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	14.902	74.082	20.11
		7	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	10.433	10.433	100
		8	Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	24,118	24,118	100
		9	Cakupan pelayamnan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100	2,310	2,310	100
		10	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	507	507	100
		11	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB	100	277	277	100
		12	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100	14	14	100

1. Cakupan kunjungan Ibu Hamil

Kunjungan ibu hamil adalah pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga dengan memenuhi kriteria 10 T. Tahun 2020 jumlah sasaran 3.085 dengan capaian 3.085 (100%) dengan target (100%), jumlah sasaran bumil tahun 2019 adalah 3.280 dengan capaian 3.280 (100%), indikator ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019. adapun kegiatan yang dilakukan adalah :

- a) Adanya pelaksanaan pelatihan bagi tenaga bidan baik di puskesmas maupun poskesdes untuk meningkatkan kompetensi mereka
- b) Sosialisasi tanda bahaya kehamilan

- c) Monev bidan desa di poskesdes
- d) Kelas ibu hamil dan balita
- e) Timbang berat badan dan ukur tinggi badan
- f) Adanya bimbingan teknis yang rutin dilaksanakan ke 17 puskesmas

Yang disebut dengan standar pelayanan antenatal adalah pelayanan yang dilakukan kepada ibu hamil dengan memenuhi kriteria 10 T yaitu:

- a) Timbang berat badan dan ukur tinggi badan;
- b) Ukur tekanan darah;
- c) Nilai status gizi (Ukur Lingkar Lengan Atas/LILA)
- d) Ukur tinggi puncak rahim (fundus uteri);
- e) Tentukan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin

2. Cakupan Pertolongan Persalinan

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Pertolongan persalinan yang diberikan oleh tenaga terlatih akan membantu menurunkan kejadian kesakitan, kecacatan dan kematian pada bayi baru lahir. Tahun 2021 terdapat persalinan yang ditolong oleh nakes yang memiliki kompetensi kebidanan dengan sasaran 2.955 dan capaian 2.955 bulin dengan target (100%) dan realisasi (100%), adapun capaian indikator (100%). Tahun 2020 terjadi 2.978 persalinan yang di tolong oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan dari target 2.978 ibu bersalin. dan capaian indikator ini adalah (100%), adapun kiat-kiat yang dilakukan dalam pertolongan persalinan oleh bidan atau nakes yang memiliki kompetensi kebidanan adalah:

- a) Pendataan ibu bersalin
- b) Peningkatan SDM melalui pertemuan dan pembelajaran Audit Maternal Neonatal (AMP)
- c) Skreening Hypotiroid kongenital
- d) Asuhan persalinan normal
- e) Penanganan Asfiksia dan BBLR
- f) Kemitraan bidan dan dukun
- g) Kelas Ibu Hamil
- h) Sosialisasi rumah tunggu kelahiran (RKT)
- i) Melaksanakan Monev bidan desa di poskesdes
- j) Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Adapun untuk persalinan dengan komplikasi mengikuti acuan dari Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Rujukan.

3. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Cakupan kunjungan bayi setiap tahun di atas target yang direncanakan, hal tersebut tidak lepas dari kesadaran masyarakat yang tinggi akan kesehatan bayi, dimana

pengaruhnya sangat besar kepada masa depan bayi yang bersangkutan. Capaian tahun 2021 adalah (100%) dengan sasaran 2.938 dan 2.938 capaian, dengan target (100%) dan realisasi (100%) dan tahun 2020 (100%) dengan 2.742 sasaran dan 2.742 realisasi, target (100%) dan realisasi (100%), indikator ini mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun persentase capaian indikator tahun 2018 dan 2019 adalah (100%). Adapun kiat-kiat yang dilakukan adalah :

- a) Pendataan bayi baru lahir
- b) Penimbangan balita dan pemberian imunisasi
- c) Pelayanan kesehatan pada bayi melalui perawatan tali pusat
- d) Melakukan pijatan bayi setelah dimandikan
- e) Pemberian ASI eksklusif
- f) Pemberian makanan pendamping ASI pada bayi umur 6 bulan ke atas
- g) Adanya kelas ibu dan bayi di puskesmas
- h) Pencatatan dan Pelaporan sudah baik

4. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita

Cakupan pelayanan anak balita juga dimaksudkan untuk monitoring tumbuh kembang anak balita. Tahun 2021 cakupan pelayanan anak balita dengan sasaran 8.540 dan capaian 8.540 adapun targetnya (100%) dengan realisasi (100%) adapun capaian indikator ini (100%), tahun 2020 capaian pelayanan anak balita (100%) dengan sasaran 7.824 capaian 7.824 balita dengan target (100%) dan

indikator ini mencapai target hal ini disebabkan karena setelah anak balita mendapatkan semua imunisasi yang diberikan ibu balita menimbang anaknya di posyandu. Adapun kiat-kiat yang dilakukan dengan :

- a) Pendataan balita 0 – 59 bulan
- b) Mengaktifkan kembali untuk datang keposyandu walaupun pemberian imunisasinya sudah lengkap
- c) Defenisi operasional cakupan pelayanan kesehatan anak balita sudah dipahami dengan baik
- d) Pencatatan dan pelaporan kohort balita sudah per-posyandu
- e) Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM.

5. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah pemeriksaan kesehatan terhadap murid baru kelas 1 SD dan madrasah ibtidaiah dan SMP yang meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, pemeriksaan ketajaman mata, ketajaman pendengaran, kesehatan gigi, kelainan mental emosional dan kebugaran jasmani. Tahun

2021 target (100%) dan realisasi (100%) dengan persentase capaian indikator (100%), persentase capaian tahun 2019 dengan target (100%) dan realisasi (100%). Persentase pada indikator ini meningkat karena intensitas petugas ke sekolah yang sering, jumlah tenaga yang dalam pemeriksaan ataupun skrining pada anak sekolah sudah memadai dan aktifnya guru yang terlibat langsung untuk membantu kegiatan tersebut. adapun kegiatan yang dilakukan adalah :

- a) Penilaian status gizi (tinggi badan, berat badan, tanda klinis anemia)
- b) Penilaian kesehatan gigi mulut
- c) Pelatihan pada guru SD/Madrasah ibtdaiyah
- d) Pembinaan UKS
- e) Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor dalam penjangkaran anak sekolah

6. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar. Pelayanan skrining kesehatan usia 15-59 tahun dilakukan di Puskesmas dan jaringannya (Posbindu PTM) serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan pemerintah daerah . Tahun 2021 cakupan pelayanan anak pada usia produktif dengan sasaran 74.082 dan capaian 14.902 adapun targenya (100%) dengan realisasi (20.11%).

- a) Posbindu masyarakat belum semua berkunjung dan faktor ketenagan
- b) Solusinya lakukan Posbindu di kantor, sekolah, tempat kerja
- c) Perlunya tambahan tenaga kesehatan untuk mempercepat proses pemeriksaan untuk di Posbindu.

7. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Jumlah sasaran Usila pada tahun 2021 di Kabupaten Soppeng sebanyak 10.433 dan yang mendapatkan pelayanan sebanyak 10,433 (100%). Jumlah sasaran usila pada tahun 2020 sebanyak 15,761. Setiap warga negara Indonesia usia (60) tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar.

- a) Pelayanan skrining kesehatan warga negara usia 60 tahun ke atas sesuai standar adalah:
 - 1) Dilakukan sesuai kewenangan oleh:
 - Dokter;
 - Bidan;
 - Perawat;
 - Nutrisionis/TenagaGizi;
 - Kader Posyandulansia/Posbindu
 - 2) Pelayanan skrining kesehatan diberikan di Puskesmas dan jaringannya, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, maupun pada kelompok lansia,bekerja sama dengan pemerintahdaerah.
 - 3) Pelayanan skrining kesehatan minimal dilakukan sekali setahun.

- 4) Lingkup skrining adalah sebagai berikut:
- Deteksi hipertensi dengan mengukur tekanan darah.
 - Deteksi diabetes melitus dengan pemeriksaan kadar gula darah.
 - Deteksi kadar kolesterol dalam darah
 - Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku, termasuk kepikunan menggunakan Mini Cog atau Mini Mental Status Examination (MMSE)/Test Mental Mini atau Abbreviated Mental Test (AMT) dan Geriatric Depression Scale (GDS).
- 5) Pengunjung yang ditemukan memiliki faktor risiko wajib dilakukan intervensi secara dini
- 6) Pengunjung yang ditemukan menderita penyakit wajib ditangani atau dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menanganinya

8. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Jumlah sasaran penderita hipertensi pada tahun 2021 di Kabupaten Soppeng sebanyak 24,118 dan yang mendapatkan pelayanan sebanyak 24,118 (100%).

- a) Sasaran adalah penduduk usia 15 tahun keatas
- b) Penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar; dan upaya promosi kesehatan melalui modifikasi gaya hidup di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- c) Penderita hipertensi dengan komplikasi (jantung, stroke dan penyakit ginjal kronis, diabetes melitus) perlu dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) yang mempunyai kompetensi untuk penanganan komplikasi.
- d) Standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi adalah:
- e) Mengikuti Panduan Praktik Klinik Bagi Dokter di FKTP.
- f) Pelayanan kesehatan sesuai standar diberikan kepada penderita Hipertensi di FKTP.
- g) Pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar meliputi: pemeriksaan dan monitoring tekanan darah, edukasi, pengaturan diet seimbang, aktifitas fisik, dan pengelolaan farmakologis.
- h) Pelayanan kesehatan berstandar ini dilakukan untuk mempertahankan tekanan darah pada <140/90 mmHg untuk usia di bawah 60 th dan <150/90 mmHg untuk penderita 60 tahun ke atas dan untuk mencegah terjadinya komplikasi jantung, stroke, diabetes melitus dan penyakit ginjal kronis.
- i) Selama menjalani pelayanan kesehatan sesuai standar, jika tekanan darah penderita hipertensi tidak bisa dipertahankan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya atau mengalami komplikasi, maka penderita perlu dirujuk ke FKTL yang berkompeten.

9. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Jumlah sasaran penderita diabetes melitus pada tahun 2021 di Kabupaten Soppeng sebanyak 2.310 dan yang mendapatkan pelayanan sebanyak 2.310 (100%). Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

- a) Sasaran indikator ini adalah penyandang DM di wilayah kerja Puskesmas .
- b) Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotif dan preventif diFKTP.
- c) Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM dengan komplikasi perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan untuk penanganan selanjutnya.
- d) Pelayanan kesehatan penyandang DM diberikan sesuai kewenangannya oleh:
 - 1) Dokter/DLP
 - 2) Perawat
 - 3) Nutrisi/Tenaga Gizi
- e) Pelayanan kesehatan diberikan kepada penyandang DM di FKTP sesuai standar meliputi 4 (empat) pilar penatalaksanaan sebagai berikut:
 - 1) Edukasi
 - 2) Aktivitas fisik
 - 3) Terapi nutrisi medis
 - 4) Intervensi farmakologis
 - 5) Setiap penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar termasuk pemeriksaan HbA1C.
 - 6) Bagi penyandang DM yang belum menjadi peserta JKN diwajibkan menjadi peserta JKN.

10. Cakupan Pelayanan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Jumlah sasaran penderita diabetes melitus pada tahun 2021 di Kabupaten Soppeng sebanyak 507 dan yang mendapatkan pelayanan sebanyak 507 (100%). Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat diberikan oleh perawat dan dokter Puskesmas di wilayah kerja.

Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat adalah:

- a) Pelayanan promotif preventif yang bertujuan meningkatkan kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan.
- b) Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat diberikan oleh perawat dan dokter Puskesmas di wilayah kerjanya.

Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi:

- Edukasi dan evaluasi tentang: tanda dan gejala gangguan jiwa, kepatuhan minum obat dan informasi lain terkait obat, mencegah tindakan pemasangan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana, dan Tindakan kebersihan diri ODGJ berat

11. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan terduga TB BTA

Pelaksanaan program TB dengan DOTS di layanan selain puskesmas untuk meningkatkan cakupan penanganan pasien TB sesuai standar Penanggulangan penderita terduga TB BTA tahun 2021 277 orang , 100% dan target 100% bila dibandingkan dengan tahun 2019 381 orang terjadi penurunan hal ini disebabkan karena masih adanya masyarakat dengan TB yang berobat kelayanan swasta dengan layanan DOTS yang kurang berkualitas (masyarakat yang mempunyai perilaku pencarian layanan kesehatan ke swasta/dokter swasta), belum optimalnya peran PMO (pengawas menelan obat). Kunci sukses pengobatan TB adalah kepatuhan dalam minum obat TB. Adapun upaya yang dilakukan adalah penerapan strategi DOTS dan peningkatan jejaring TB dengan fasilitas kesehatan swasta (dokter dan apotik).

12. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

Jumlah Kasus HIV di Kabupaten Soppeng pada Tahun 2021 sebanyak 14 orang. Upaya pelayanan dalam rangka pemberantasan penyakit HIV di samping ditujukan pada penanganan penderita yang ditemukan juga diarahkan pada upaya pencegahan yang dilakukan melalui skrining HIV terhadap donor darah dan upaya pemantauan yang tidak hanya pada orang-orang yang beresiko akan tetapi luas pada masyarakat umum dan pengobatan penderita penyakit menular seksual (PMS).

4.2.4 Alokasi anggaran

Realisasi urusan kesehatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Tahun 2021 pada Dinas Kesehatan diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.40
Alokasi Anggaran urusan kesehatan

No	Pelayanan Dasar	Capaian 2021%	Capaian Target, dan Rencana Pembiayaan SPM		
			Program/Kegiatan	Pembiayaan	Realisasi
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	Pelayanan Kesehatan Ibu	6,000,000	6,000,000
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	0%	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik	0	0
3	Pelayanan kesehatan bayi baru Lahir	0%	Pelayanan Kesehatan Balita Dan Anak	0	0
4	Pelayanan kesehatan balita	0%	Pelayanan Kesehatan Balita Dan Anak	0	0
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	0%	Pelayanan Kesehatan Balita Dan Anak	0	0
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%	Pelayanan Pencegahan Penyakit Tidak Menular	4,200,000	4,200,000
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	99,99%	Pelayanan Kesehatan Lansia	56,000,000	55,994,400

8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	0%	Pelayanan Pencegahan Penyakit Tidak Menular	0	0
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	0%	Pelayanan Pencegahan Penyakit Tidak Menular	0	0
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	0%	Pelayanan Pencegahan Penyakit Tidak Menular	0	0
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100%	Pelayanan Pencegahan Penyakit Menular	4,200,000	4,200,000
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	83,33%	Pelayanan Pencegahan Penyakit Menular	4,200,000	3,500,000

4.2.5 Dukungan personil

Tabel 2.41
Data Kepegawaiaan

GOLONGAN/ PANGKAT	PENDIDIKAN									JUMLAH
	S-3	S-2	S-1	D-IV	D-III	DI	SLTA	SLTP	SD	
IV/e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/c	0	3	1	0	0	0	0	0	0	4
IV/b	0	5	8	0	0	0	0	0	0	3
IV/a	0	11	37	11	1	0	0	0	0	21
TOTAL GOL.IV	0	19	46	11	1	0	0	0	0	77
6III/d	0	19	63	11	36	5	4	2	0	40
III/c	0	12	124	25	28	4	2	0	0	70
III/b	0	1	127	13	75	3	7	1	0	104
III/a	0	0	60	1	72	0	0	0	0	57
TOTAL GOL.III	0	32	374	50	211	12	13	3	0	695
II/d	0	0	0	0	3	1	4	0	0	0
II/c	0	0	0	0	67	5	12	0	0	20
II/b	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1
II/a	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
TOTAL GOL.II	0	0	0	0	70	7	19	2	0	98
I/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/c	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2
I/b	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
I/a	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
TOTAL GOL.I	0	0	0	0	0	0	0	3	4	7
JUMLAH	0	51	420	61	282	19	32	8	4	877

Tabel 2.42
Kualifikasi pendidikan formal

PENDIDIKAN	JUMLAH
SD	1
SMP	5
SMA,SMAK, SPK,PEKARYA	40
Diploma-I (SPPH,SPAG)	15
Diploma-III	311
Diploma-IV	55
S-1	398
S-2	49
Total	877

Sumber data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.43

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

GOLONGAN	JUMLAH
I	7
II	98
III	692
IV	80
Total	877

1. Jabatan Struktural
- Eselon II b

= 1 orang
- Eselon IIIa

= 1 orang
- Eselon IIIb

= 8 orang
- Eselon IVa

= 26 orang
- Eselon IVb

= 2 orang
2. Jabatan Fungsional tertentu/umum
- Dinas Kesehatan

= 50 Orang
- RSUD Latemamala

= 316 Orang
- Puskesmas

= 403 Orang
- Labkesda

= 5 Orang
- PSC 119

= 11 Orang

4.2.6 Permasalahan dan solusi

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah, sumber daya manusia pelayanan masih belum memenuhi standarisasi pelayanan. Sehingga masih terdapat kendala khususnya dalam pemberian pelayanan.

Solusi, mengikut sertakan personil untuk pada bimbingan teknis, serta pelatihan-pelatihan/diklat standarisasi pelayanan dalam pekerjaan.

Tabel 2.44

Permasalahan dan Solusi

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MASALAH	PEMECAHAN MASALAH
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Masih banyak k1 yang terlambat yang mempengaruhi k4 rendah yang disebabkan hamil diluar nikah	• Perlunya kerja sama lintas sector ditingkatkan • Meningkatkan penyuluhan tentang akibat pernikahan dini
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Pemanfaatan rumah tunggu yang tidak maksimal	Sosialisasi tentang rumah tunggu kepada masyarakat
3	Pelayanan kesehatan bayi baru Lahir	Masih ada bayi baru lahir yang mengalami icterus (bayi kuning)	• Edukasi tentang pentingnya pemberian ASI • Tehnik menyusui yang baik dan benar
4	Pelayanan kesehatan balita	Masih banyak balita yang tidak datang keposyandu	Kerja sama lintas sector
5	Pelayanan kesehatan	• Kurangnya koordinasi guru	• Dilakukan koordinasi guru dan

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MASALAH	PEMECAHAN MASALAH
	pada usia pendidikan dasar	dan Petugas kesehatan terkait pelaksanaan penjangkauan siswa	petugas kesehatan terkait pelaksanaan penjangkauan siswa Dilakukan sweeping pasca penjangkauan bagi siswa yang belum mengikuti penjangkauan
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Sebagian masyarakat takut memeriksakan diri ke tenaga kesehatan atau sarana kesehatan	Melakukan screening kewilayah UPTD puskesmas Tajuncu
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	- Masih kurangnya lansia yang berkunjung di POSYANDU Lansia - Adanya pemahaman masyarakat bahwa mereka merasa dirinya masih sehat dan tidak perlu memeriksakan kesehatannya	- Kerjasama lintas Program dan lintas Sektor - Penyuluhan tentang pentingnya memeriksakan diri secara teratur untuk mengontrol/mengendalikan penyakit - Kerjasama Pustu dan Poskesdes untuk meningkatkan skreaning Lansia
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Kurangnya kesadaran Pasien untuk mau memeriksakan dirinya ke sarana kesehatan	- Dibutuhkan kesadaran pasien untuk mau memeriksakan kesehatannya ke sarana kesehatan - Dibutuhkan kesadaran pasien untuk mengkonsumsi obat secara teratur dan berkelanjutan - Rajin berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang sehat (kurang garam) - Dibutuhkan peran serta keluarga dalam memberikan dukungan yang penuh kepada pasien agar mau berobat dan mengkonsumsi obatnya secara teratur dan berkelanjutan
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Kurangnya kesadaran Pasien untuk mau memeriksakan dirinya ke sarana kesehatan	- Dibutuhkan kesadaran pasien untuk mau memeriksakan kesehatannya ke sarana kesehatan - Dibutuhkan kesadaran pasien untuk mengkonsumsi obat secara teratur dan berkelanjutan - Rajin berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang sehat - Dibutuhkan peran serta keluarga dalam memberikan dukungan yang penuh kepada pasien agar mau berobat dan mengkonsumsi obatnya secara teratur dan berkelanjutan
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Kurangnya dukungan dan peran aktif keluarga dalam memberikan dukungan penuh kepada pasien jiwa untuk bisa berobat ke sarana kesehatan	- Dibutuhkan peran serta keluarga agar lebih aktif dalam memberikan dukungan dan semangat yang penuh kepada pasien jiwa agar mau berobat ke sarana kesehatan - Keluarga pasien dan petugas kesehatan diharapkan untuk bias bekerja sama dalam memantau pasien untuk mendapatkan pengobatan lanjutan
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	- Kurangnya penemuan penderita TB - Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mau berobat ke sarana kesehatan	- Penjangkauan suspek lebih diperketat di poli umum,pustu dan poskesdes - Melakukan penyuluhan TB kepada Tokoh Masyarakat dan kader - Mengajarkan tehnik/cara

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MASALAH	PEMECAHAN MASALAH
		• Kualitas dahak yang kurang bagus •	mengeluarkan dahak
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	• Kurangnya kesadaran pasien untuk mau memeriksakan dirinya ke sarana kesehatan • Adanya stigma buruk dari masyarakat tentang penderita HIV	• Dibutuhkan kesadaran dan keterbukaan pasien agar mau memeriksakan kesehatannya ke sarana kesehatan tanpa harus malu dan khawatir akan dijauhi orang banyak • Dibutuhkan kesadaran pasien agar mau meminum obat secara rutin agar kekebalan tubuh meningkat dan menurunkan virus HIV • Dibutuhkan dukungan moril kepada keluarga agar bersedia mendampingi pasien untuk menjalani penobatannya • Dibutuhkan adanya Peran serta masyarakat kepada penderita HIV untuk mengubah stigma buruk tentang penderita agar mereka lebih terbuka dan mau berobat

4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang pelaksanaan teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam pelaksanaannya sebagai berikut:

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Dasar Hukum dan Jenis Pelayanan Dasar bidang Pekerjaan Umum diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor : 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum, terdiri dari 2 (dua) jenis Pelayanan Dasar yaitu :

1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari; dan
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

4.3.2 Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.

Jumlah penduduk di Kabupaten Soppeng yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari pada tahun 2019 baru mencapai 93,11% dengan jumlah rumah tangga pengguna air bersih adalah sebanyak 52.873 rumah tangga, sedangkan jumlah seluruh rumah tangga adalah adalah sebanyak 57.543 rumah tangga. Dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibanding pada tahun sebelumnya, dimana capaian kinerja berada pada kisaran 94,55 % dengan jumlah rumah tangga pengguna air bersih adalah sebanyak 55.825 rumah tangga, sedangkan jumlah seluruh rumah tangga adalah adalah sebanyak 58,054 rumah tangga, Hal ini berarti pula masih terdapat 5,45 % penduduk

Kabupaten Soppeng yang belum memperoleh akses pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.

2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.

Jumlah penduduk di Kabupaten Soppeng yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik pada tahun 2019 baru mencapai 100% dengan jumlah rumah tangga yang memiliki akses pengolaan air limbah domestik adalah sebanyak 57.543 rumah tangga, sedangkan jumlah seluruh rumah tangga adalah sebanyak 57.543 rumah tangga dan pada tahun 2020 mencapai target 100 % dengan jumlah rumah tangga pengguna sanitasi adalah sebanyak 58,054 rumah tangga, sedangkan jumlah seluruh rumah tangga adalah sebanyak 58,054 rumah tangga.

4.3.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Tabel 4.49
Realisasi

NO	Janis Layanan SPM	Indikator Capaian			
		Jumlah yang harus dilayani (rumah tangga)	Jumlah yang sudah terlayani (rumah tangga)	Jumlah yang belum terlayani (jiwa)	Capaian %
1.	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	57.543	52.873	4.670	94,55 %
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	57.543	57.543	0	100%

4.3.4 Alokasi anggaran

Alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD tahun 2020 adalah :

1. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih.

Pelaksanaan Program Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih terdiri dari 2 Kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 804.539.255,- terealisasi sebesar Rp. 803.870.255,- dengan rincian sebagai berikut :

a) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih.

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih adalah Rp. 804.539.255,- dengan realisasi sebesar Rp. 803.870.255,- yang menghasilkan Terbangunnya jembatan sehingga tersedianya Sarana Air Bersih bagi masyarakat.

b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (Program Nasional PAMSIMAS).

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (Program Nasional PAMSIMAS) adalah Rp. 540.000,- dengan realisasi

sebesar Rp. 540.000,- yang menghasilkan terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air bersih.

2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan dan Air Limbah.

Pelaksanaan Program Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan dan Air Limbah terdiri dari 3 Kegiatan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Rp. 2.840.812.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.816.618.500,- dengan rincian sebagai berikut :

a) Penyediaan Prasarana dan Sarana Air limbah (DAK).

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Prasarana dan Sarana Air limbah (DAK) adalah Rp. 2.840.812.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.816.618.500,- yang menghasilkan Tangki Septic Individual bagi masyarakat.

b) Penyediaan Prasarana dan Sarana Air limbah (DAK Penugasan).

Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Prasarana dan Sarana Air limbah (DAK Penugasan) adalah Rp. 250.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 248.974.000,- yang menghasilkan Kondisi jembatan terpelihara dengan baik.

Penyediaan Prasarana dan sarana Air Limbah- layanan Lumur Tinja. Realisasi anggaran yang ditetapkan pada Penyediaan Prasarana dan sarana Air Limbah- layanan Lumur Tinja adalah Rp. 142.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 142.185.300,- yang menghasilkan Tersedianya Tangki Septic Individual bagi masyarakat.

4.3.5 Dukungan personil

Dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Soppeng.

Tabel 4.50
Dukungan Personil

NO	JABATAN	BANYAKNYA	KET
1	2	3	4
1	Kepala Dinas	1 Orang	
2	Sekretaris	1 Orang	
3	Kepala Bidang	7 Orang	
4	Kepala Seksi	27 Orang	
5	Staf	114 Orang	
6	Operator Komputer, Mesin dan Sopir Mobil Tanki	11 Orang	
	Jumlah	160 Orang	

4.3.6 Permasalahan dan solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

1. Permasalahan

- a) Sulitnya mendapatkan lahan untuk lokasi pembangunan sarana dan prasarana air limbah pada Pelaksanaan program dan kegiatan yang berbasis masyarakat seperti Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM).

- b) Belum optimalnya kinerja PDAM dan Belum terinventarisasi dengan baik potensi air baku untuk air minum.
2. Solusi
- a) Mengusulkan program pemeliharaan jalan lingkungan, sarana air bersih dan saluran drainase agar diprioritaskan dalam rencana penganggaran dan dapat dijadikan program yang berkesinambungan.
 - b) Program saluran drainase sedapat mungkin mengacu kepada Master Plan yang telah ada, serta dibentuk forum lintas sektoral untuk perencanaan drainase yang terkini dan komprehensif.

4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman yang pelaksanaan teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam pelaksanaannya sebagai berikut:

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan Dasar Urusan Perumahan dan Pemukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman yang pelaksanaan teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam pelaksanaannya sebagai berikut:

- a. Cakupan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
- b. Cakupan Rehab Rumah Tidak Layak Huni

4.4.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

- a. Cakupan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana

Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang mengalami bencana yang di akibatkan adanya bencana alam yang terjadi yang mengakibatkan kerusakan total atau sebagian pada bangunan rumah masyarakat, adapun kegiatan yang dilakukan adalah :

- Melakukan sosialisasi kategori korban bencana yang bisa dibiayai
- Melakukan supervise dan monitoring terhadap masyarakat yang mengalami bencana
- Melaksanakan bangun baru/rehab terhadap masyarakat yang mengalami bencana sesuai kerusakan yang telah ditentukan oleh tim.

- b. Cakupan Rehab Rumah Tidak Layak Huni

Cakupan rehab rumah tidak layak huni adalah pelayanan terhadap perumahan rakyat yang tidak layak huni yang meliputi kerusakan ringan, sedang dan berat. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah :

- Sosialisasi rehab/pembangunan rumah yang tidak layak huni
- Pendataan rumah tidak layak huni

- Verifikasi terhadap data usulan rumah tidak layak huni
- Melaksanakan pembangunan/rehab rumah tidak layak huni melalui mekanisme pembiayaan belanja yang diserahkan kemasyarakat
- Monitoring dan evaluasi.

4.4.3 Realisasi

Target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh dinas perumahan dan kawasan permukiman kabupaten soppeng selama 1 tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang di tetapkan sebelumnya oleh pemerintah kota yang bersangkutan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.47
Rencana Target pencapaian SPM pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng Tahun 2021

NO	Jenis pelayanan dasar	Indikator Capaian	Jumlah Orang yang Berhak Mendapatkan layanan	Jumlah Orang yang akan terlayani	Capaian	RAPBD TAHUN 2021
1	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi borban bencana kabupaten/ kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	34 unit	32 unit	34/32x100% =106%	Rp. 123.043.900,-
2	Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/ kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	0	0	0	0

Tabel 2.48
target pencapaian standar pelayanan minimal oleh daerah pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman kabupaten soppeng tahun 2021

NO	Jenis pelayanan dasar	Indikator SPM	Target tahun 2021	Capaian tahun 2021 Dan perhitungannya	Perhitungan Pembiayaan (Rp)
1	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi borban bencana kabupaten/ kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n) / Jumlah total rencana unit korban bencana yang akan di tangani pada tahun. n) x 100% Rumus = 34/32x100% = 106%	Rp. 123.043.900,-

NO	Jenis pelayanan dasar	Indikator SPM	Target tahun 2021	Capaian tahun 2021 Dan perhitungannya	Perhitungan Pembiayaan (Rp)
2	Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100%	(Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau Bangunan +Rumah tangga penerima uang sewa+ rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni) / (Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan) x 100 Rumus = 0/0x100 =0%	0

Realisasi yang dicapai untuk Indikator Kinerja “ **Rata-rata capaian SPM Perumahan dan kawasan Permukiman “Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten soppeng Tahun 2021 adalah sebagai berikut:**

1. Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni

Rumus

$$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani tahun 2021}}{\text{Jumlah total rencana unit korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2021}}$$

$$\frac{34 \text{ Unit Rumah}}{32 \text{ Unit Rumah}} \times 100\% = 106\%$$

Sedangkan untuk tahun 2021 capaian kinerja adalah 106%

Tabel 2.49
Realisasi Pencapaian SPM

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Rencana Target Capaian Standar Pelayanan Minimal		Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal		Realisasi Capaian = (4)x(6)x100%
			Jumlah Org Yg Akan Terlayani	APBD 2021 (Rp)	Jumlah Org Yg Terlayani	APBDP 2021 (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kab./Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	32 Unit	123.039.000,-	34 Unit	123.043.000,-	106%
2.	Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi program Pemerintah	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang memperoleh	0	0	0	0	0

	Daerah Kabupaten / Kota	fasilitas penyediaan rumah yang layak huni					

Tabel 2.50
Perbandingan antara target dengan realisasi tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET THN 2021	REALISASI THN 2021	CAPAIAN THN 2021
1	Rata-rata capaian SPM Perumahan dan Kawasan Permukiman	91,19%	100%	106%	106%

Adapun desa/kelurahan yang mendapat rehab rumah korban bencana Pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Lalabatarilau = 4 Unit rumah
2. Desa Kessing = 11 Unit rumah
3. Maccile = 3 Unit rumah
4. Desa Parenring = 9 Unit rumah
- 5 . Desa Masing = 1 Unit rumah
- 6 . Kel. Salokaraja = 6 Unit rumah

JUMLAH 34 Unit Rumah

2. **“Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni “**Khusus untuk indikator kinerja ke dua ini **belum ada realisasinya** tapi yang ada hanya **target sebesar 100%** untuk tiap tahunnya.

4.4.4 Alokasi anggaran

Alokasi anggaran untuk program pengembangan perumahan adalah **Rp.123.043.900** dengan realisasi anggaran **Rp.113.044.100,-** atau **91,81%** dengan capaian kinerja sebesar **106%** yang tersalur dari dana APBD Kab.Soppeng yang terealisasi **34 Unit rumah** dari target **32 unit rumah**

4.4.5 Dukungan personil

Dukungan personil pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

Tabel 2.51

NO.	Golongan	Jumlah Pengawai
1.	Golongan I	0
2.	Golongan II	2
3.	Golongan III	13

4.	Golongan IV	5
Jumlah		20

Jumlah PNS adalah 20 Orang

Bidang yang menangani adalah sebagai berikut :

1. Kabid Perumahan dan PSU (1) Orang
2. Kasi, terdiri dari :
 - Kasi pembangunan, pengembangan dan PSU perumahan (1) Orang
 - Kasi penyediaan, rehabilitasi korban bencana dan relokasi (1) Orang
 - Kasi perizinan pembangunan, pengembangan perumahan dan PSKBG (1) Orang

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi adalah sebagai berikut :

1. Indikator standar pelayanan minimal : jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni, yaitu :

Permasalahan

- Kesulitan di dalam penentuan target jumlah rumah korban bencana yang akan di tangani untuk tahun kerja mendatang.

Solusi dan Tindak Lanjut

- Perlu adanya koordinasi dengan BPBD terkait peta daerah rawan bencana sehingga dapat dihitung jumlah perkiraan rumah terdampak rawan bencana Perlunya penambahan anggaran untuk pengadaan peralatan dan fasilitas untuk penanggulangan pasca bencana di Kabupaten Soppeng.

2. Indikator standar pelayanan minimal : Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni.

Permasalahan

- Kesulitan di dalam penentuan target jumlah warga negara yang terkena relokasi program pemerintah yang akan ditangani untuk tahun kerja mendatang.

Solusi dan Tindak Lanjut

- Perlu adanya koodinasi dengan Bappelitbanda terkait ada atau tidaknya rencana pembangunan yang akan memerlukan relokasi masyarakat..

4.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Untuk memenuhi Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng pada Tahun 2020, dilaksanakan pada 2 (dua) satuan perangkat daerah yaitu :

4.5.1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pelaksanaan teknis standar pelayanan minimal berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, dalam pelaksanaannya sebagai berikut:

4.5.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pada pelaksanaan pelayanan dasar urusan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahun 2020, melaksanakan pelayanan sebagai berikut:

1) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Program pencegahan dan kesiapsiagaan, oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam, yang meliputi sosialisasi penanganan bencana alam dan evakuasi bila terjadi bencana, dan sosialisasi potensi bencana alam yang terjadi di Daerah Kabupaten Soppeng. Hasil kegiatan tersebut menghasilkan 2 dokumen pelaksanaan kegiatan.

2) Program Tanggap Darurat dan Logistik.

Program tanggap darurat dan logistik, oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan kegiatan 3 (tiga) kegiatan yaitu:

3) Penyediaan Peralatan dan Logistik Bencana

Pada kegiatan penyediaan dan logistik bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendata persediaan logistik yang direncanakan untuk penanggulangan awal bila terjadi bencana di daerah. Hasil kegiatan tersebut menghasilkan 1 paket logistik yang disiapkan untuk penanggulangan awal bencana bila terjadi, berupa bahan makanan yang disiapkan untuk korban bencana alam, bantuan peralatan tenda dan perahu karet/boot.

4) Penanganan Darurat Bencana

Pada kegiatan penanganan darurat bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan penanganan awal darurat bencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Pada tahun 2021 kejadian bencana di Daerah Kabupaten Soppeng terdiri dari :

1. Bencana banjir yang melanda pada wilayah kecamatan Lilirilau dan Kecamatan Marioriawa. Dalam pelaksanaan penanganan bencana tersebut, Badan Penanggulangan Bencana melaksanakan pendataan kepala keluarga yang terkena dampak bencana tersebut dan menyalurkan bantuan makanan pada korban banjir pada wilayah tersebut.
2. Darurat bencana non alam yang ditetapkan darurat bencana nasional, oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan penanganan awal dengan mengkoordinasikan kepada Kepala Daerah dan Forkopinda untuk mengatur penanggulangan bencana tersebut. Penanganan tersebut dengan membuat surat edaran pembatasan masyarakat dalam melakukan aktifitas diluar rumah dan

berkoordinasi dengan Forkopinda dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam pelaksanaan penegakan surat edaran tersebut.

- Pemberdayaan TRC

Pada kegiatan pemberdayaan TRC, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan pemberdayaan Tim Riaksi Cepat dalam penanggulangan bencana dengan tugas penanganan cepat bencana yang terjadi di lokasi bencana, yaitu:

1. Pendataan keluarga yang terkena dampak bencana.
2. Pengevakuasian korban bencana pada wilayah bencana.
3. Penanganan pohon tumbang yang menghalangi aktifitas masyarakat dalam melaksanakan perekonomian.
4. Penanganan orang yang hilang atau tenggelam.

5) Program Rehabilitasi / Rekonstruksi Pasca Bencana.

Program tanggap darurat dan logistik, oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan kegiatan 2 (dua) kegiatan yaitu:

- Kegiatan pendataan dan pelaporan kerusakan akibat bencana

Pada kegiatan pendataan dan pelaporan kerusakan akibat bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan kegiatan pendataan kerusakan akibat bencana yang terjadi di wilayah bencana. Kegiatan tersebut menghasilkan 1 dokumen laporan kerusakan akibat bencana, termasuk mengkoordinasikan dampak ekonomi masyarakat pada penanganan bencana non alam pada kepala daerah dan perangkat daerah yang terlibat dalam pengembangan ekonomi di Daerah Kabupaten Soppeng.

- Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana

Pada kegiatan rehabilitasi pasca bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan rekonstruksi pasca bencana yang menghasilkan penanganan jalan transportasi pada wilayah terkena dampak bencana banjir di Desa Kebo dengan panjang jalan 7 Km.

4.5.1.2 Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian pelayanan minimal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, target yang ditetapkan pada pelayanan Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.52
Target Oatput dan Jumlah Pagu Pelayanan Ketentraman dan ketertiban Umum
Pada Badan Penaggulangan Bencana Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100.000.000,-
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	11.625.000.-
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	848.900.000,-

Sumber data BPBD

Tabel 2.53
Outcame Pelayanan Ketentraman dan ketertiban Umum
Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1	2	3	4
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	A. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%
		B. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	A. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100%
		B. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100%
		C. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	100%
		D. Persentase warga negara yang ikut pelatihan	100%
		E. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%
		F. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	100%
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	A. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%

4.5.1.3 Realisasi

Realisasi Indikator oatput dan oatcome pada pelayanan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.54
Realisasi Target Output dan Realisasi Jumlah Pagu Pelayanan Ketentraman dan ketertiban Umum Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Rincian Anggaran		
				Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100.000.000,-	99.880.000,-	99,88
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	11.625.000,-	11.625.000,-	100,00
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	848.900.000,-	845.072.900,-	99,95

Tabel 2.55
Realisasi Outcome Pelayanan Ketentraman dan ketertiban Umum Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Target Capaian
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	Pelayanan informasi rawan bencana	100 %	82,66 %
		A. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100 %	100 %
		B. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100 %	82,66 %
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	77,21 %
		A. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100 %	n/a
		B. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100 %	n/a
		C. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	100 %	n/a
		D. Persentase warga negara yang ikut pelatihan	100 %	n/a
		E. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan	100 %	n/a

		sarana prasarana penanggulangan bencana		
		F. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	100 %	100 %
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	n/a
		A. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100 %	n/a

4.5.1.4 Alokasi anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah. Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah pagu anggaran tetapkan dan realisasi anggaran pada tahun 2021 adalah sebagai berikut

1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah diuraikan dengan table berikut :

Tabel 2.56
Belanja Lansung dan Belanja Tidak Lansung Pelayanan Ketentraman dan ketertiban Umum
Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	4	5	
1.	Belanja Tidak Lasung	1.619.936.419,-	1.545.204.915,-	95,39
2.	Belanja Lansung	12.181.275.500,-	12.131.611.954,-	99,59
	A Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan	1.027.704.000,-	986.900.188,-	96,03
	B Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah	54.500.000,-	54.413.250,-	99,84
	C Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	111.625.000,-	111.505.000,-	99,89
	D Program tanggap darurat dan logistik	848.900.000,-	845.072.900,-	99,55
	E Program rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana	10.138.546.500,-	10.133.720.616,-	99,95

4.5.1.5 Dukungan personil

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Soppeng tahun 2021 dilandasi dengan peraturan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Soppeng dan didukung Sumber Daya Manusia :

- 1) Pegawai Negeri : 23 orang
- 2) Tenaga Kontrak : 37 orang
- 3) Tenaga Sukarela : orang

Aspek Sumber Daya Manusia

Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Badan Penanggulangan Bencana terdiri dari :

- 1) PNS : 23 orang
- 2) Non PNS : 37 orang
- 3) Jumlah : 59 orang

Jumlah pegawai tersebut diuraikan menurut jabatan, pangkat, golongan dan pendidikannya sebagai berikut:

Tabel 2.57
Rekapitulasi PNS

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SLTP	-
	SLTA	1
	D.3	1
	S.1	16
	S.2	5
	JUMLAH	23

Tabel 2.58
Rekapitulasi Non PNS

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SLTA	22
2	D.2	-
3	D.3	2
4	S.1	13
5.	S.2	-
	JUMLAH	37

Tabel 2..59
Rekapitulasi PNS Menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	-
2	Golongan II	1
3	Golongan III	14
4	Golongan IV	8
	JUMLAH	23

Tabel 2.60
Rekapitulasi menurut Eselon

No.	Golongan	Jumlah
1	Eselon II / b	1
2	Eselon III / a	-
3	Eselon III / b	4
4	Eselon IV / a	8
	JUMLAH	13

Tabel 2.61
Jumlah Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Terisi	Lowong	Jumlah	Ket
1.	II b	1	-	1	
2.	III a	-	-	-	
3.	III b	4	-	4	
4.	IV a	8	-	8	

Tabel 2.62 Pegawai Yang Sudah Mengikuti Diklat				
No	Jenis Diklat	Sudah Menduduki Jabatan	Belum Menduduki Jabatan	Ket
1.	Pim IV	4	-	
2.	Pim III		-	
3.	Pim II		-	

4.5.1.6 Permasalahan dan solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

1) Permasalahan

Permasalahan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a) Masih kurangnya SDM dalam pelaksanaan pelayanan SPM pada bidang penyelenggara urusan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- b) Masih kurangnya peralatan pendukung pelaksanaan penanganan bencana di lapangan.
- c) Masih minimnya anggaran untuk pelaksanaan penanganan bencana.
- d) Belum tersusunnya RPB dan RKB sebagai dasar pelaksanaan penanganan bencana di Daerah Kabupaten Soppeng.
- e) Belum adanya pusat data laporan bencana daerah untuk percepatan penyebaran informasi, komunikasi dan edukasi penanganan bencana daerah.

2) Solusi

Solusi dari permasalahan tersebut pada Badan Penaggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

- a) Perlunya penambahan tenaga professional dalam menanggulangi peyelenggaraan pelayanan SPM pada setiap urusan pada Badan Penaggulangan Bencana.
- b) Perlunya penambahan anggaran untuk pengadaan peralatan bencana untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Soppeng.
- c) Perlunya menyusun RPB dan RKB untuk dasar pelaksanaan penanganan bencana di Daerah Kabupaten Soppeng, untuk kedepannya di prioritaskan dalam penyusunan data RPB dan RKB
- d) Perlunya pusat data laporan bencana daerah sebagai pusat penyebaran informasi, komunikasi dan edukasi penanganan bencana daerah.
- e) Mengefektifkan petugas TRC dalam penaggulangan bencana daerah

4.5.1
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pelaksanaan teknis pada Bidang Pemadam Kebakaran adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal pada Sub Urusan Pemadam Kebakaran Kabupaten/Kota, sedangkan pada pelaksanaan standar pelayanan minimal pada Bidang Polisi Pamong Praja berdasar pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam pelaksanaannya sebagai berikut:

4.5.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pada pelaksanaan pelayanan dasar urusan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran pada Tahun 2021, melaksanakan pelayanan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program tersebut terdiri dari :

a) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota Peraturan Bupati/Wali Kota Kegiatan tersebut terdiri dari :

- Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

b) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Kegiatan tersebut terdiri dari :

1. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

c) Penangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan tersebut terdiri dari :

2. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
3. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

2. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

a) Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah/kota

Kegiatan tersebut terdiri dari :

1. Pencegahan kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

Untuk mendukung program kegiatan sub kegiatan pelayanan dasar tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran membuat program kegiatan dan sub kegiatan Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program tersebut terdiri dari :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan tersebut terdiri dari :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
6. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
7. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
8. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
9. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
13. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
14. Penyediaan Bahan/Material
15. Fasilitas Kunjungan Tamu
16. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
17. Pengadaan Mebel
18. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
19. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
22. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

4.5.2.2 Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada tahun 2021 adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu 1 (satu) tahun, termasuk perhitungan pembiayaannya dengan uraian sebagai berikut :

1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

a) Polisi Pamong Praja

Indikator output dan outcome pada pelayanan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran pada bidang kepomong prajaan diuraikan dengan table berikut :

Tabel 2.63
Target Output dan Jumlah Pagu Pelayanan Ketentraman dan ketertiban Umum
Pada Polisi Pamong Praja

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	4.116.772.550,-

Tabel 2.64
Outcome Pelayanan Ketentraman dan ketertiban Umum
Pada Polisi Pamong Praja

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1	2	3	4
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	A. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantribum dalam Kab/Kota yang ditangani	100 %
		B. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	1566 orng
		C. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	8
		D. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	11 Orang
		E. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantribum	11 SOP
		F. Tersedianya sarana prasarana minimal	tersedia
		G. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	67 jiwa
		H. Pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	100 %

b) Pemadam Kebakaran

Indikator Output dan outcome pada pelayanan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran pada bidang pemadam kebakarandiuraikan dengan table berikut :

Tabel 2.65
Output Pelayanan Ketentraman dan ketertiban Umum
Pada Pemadam Kebakaran

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	3.070.170.000,-

Tabel 2.66
Output Pelayanan Ketentraman dan ketertiban Umum
Pada Pemadam Kebakaran

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1	2	3	4
1.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	A Jumlah Warga Negara yang . memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	67

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1	2	3	4
		B. Tersedianya SOP pemadam kebakaran	100%
		C. Tersedianya sarana prasarana minimal	100%
		D. Pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran	100%
		E. Jumlah Pos Damkar dalam standar pelayanan minimal	8 Pos damkar

4.5.2.3 Realisasi

1) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

a) Polisi Pamong Praja

Indikator Output dan outcome pada pelayanan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran pada bidang kepomong prajaan diuraikan dengan table berikut :

Tabel 2.67
Realisasi Target Output danRealisasi Jumlah Pagu Pelayanan Ketentraman dan ketertiban Umum Pada Polisi Pamong Praja

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Rincian Anggaran		
				Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	4.116.772.550,-	4.098.597.550,-	99.56

Tabel 2.68
Realisasi Outcome Pelayanan Ketentraman dan ketertiban Umum Pada Polisi Pamong Praja

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Target Capaian
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	A. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	100 %	100 %
		B. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	1566 orgng	1566 orgng
		C. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	8	4
		D. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	11 Orang	2 Orang
		E. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta	11 SOP	11 SOP

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Target Capaian
1	2	3	4	5
		penanganan gangguan trantibum		
		F. Tersedianya sarana prasarana minimal	tersedia	tersedia
		G. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	81 jiwa	81 jiwa
		H. Pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100 %

b) Pemadam Kebakaran

Indikator Output dan outcome pada pelayanan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran pada bidang pemadam kebakaran diuraikan dengan table berikut :

Tabel 2.69
Output Pelayanan Ketentraman dan ketertiban Umum
Pada Pemadam Kebakaran

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	67 jiwa	3.070.170.600, -

Tabel 2.70
Output Pelayanan Ketentraman dan ketertiban Umum
Pada Pemadam Kebakaran

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Target Capaian
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	A. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	67
		B. Tersedianya SOP pemadam kebakaran	100%	100%
		C. Tersedianya sarana prasarana minimal	100%	100%
		D. Pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran	100%	100%
		E. Jumlah Pos Damkar dalam standar pelayanan minimal	8 Pos damkar	8 Pos damkar

4.5.2.4 Alokasi anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah. Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemdam Kebakaran pagu anggaran tetapkan dan realisasi anggaran pada tahun 2021 adalah adalah sebagai berikut:

1) Belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada tahun 2021 sebanyak Rp. 5.154.628.778,-,- dengan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.851.693.633 yang merupakan pendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal pelayanan dasar.

2) Belanja langsung

Belanja langsung Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada tahun 2021 Sebanyak Rp. 8.560.227.268,- dengan realisasi belanja langsung Rp. 8.458.783.175,-, dalam menunjang pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal untuk pelaksanaan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal mempunyai belanja langsung sebagai berikut :

a) Polisi Pamong Praja

Jumlah belanja langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM pada Polisi Pamong Praja diuraikan dengan table berikut :

Tabel 2.71
Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
Pelayanan Ketentraman dan ketertiban Umum
Pada Polisi Pamong Praja

NO	PRORAM KEGITAN		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		6.527.912.896	6.171.558.685	94,54
	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		17.609.036	13.480.000	76,55
	a..	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	4.600.000	3.900.000	84,78
	b.	Kordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	9.700.000	9.000.000	92,78
	c.	Kordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	3.309.036	580.000	17,53
	Kegiatan Adminsitasi keungan Perangkat Daerah		5.177.468.678	4.872.253.633	94,10
	a.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	5.154.628.778	4.851.693.633	94,12
	b.	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	4.000.000	4.000.000	100
	c.	Kordinasi dan pelaksanaan akutansi SKPD	18.839.900	16.560.000	87,90
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		11.509.600	9.509.700	82,62
	a.	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	11.509.600	9.509.700	82,62
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		31.900.000	24.082.500	75,49
	a.	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	15.500.000	15.482.500	99,89
	b.	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	16.400.000	8.600.000	52,44
	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah		493.806.477	471.652.433	95,51
	a.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.203.277	13.689.400	90,04
	b.	Penyediaan peralatan rumah tangga	6.114.000	3.082.000	50,41
	c.	Penyediaan bahan logistik kantor	264.460.000	263.750.000	99,73

NO	PRORAM KEGITAN		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	KET
	d.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	21.750.000	21.750.000	100
	e.	Penyediaan bahan material	94.205.400	77.422.950	82,19
	f.	Fasilitas kunjungan tamu	0	0.00	0,00
	g.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	92.073.800	91.958.083	99,87
	Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100.001.315	99.790.350	99,79
	a.	Pengadaan mebel	35.469.315	35.300.100	99,52
	b.	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	64.532.000	64.490.250	99,94
	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		93.287.170	88.598.621	95,19
	a.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	93.287.170	88.598.621	95,19
	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		602.330.620	591.993.421	98,28
	a	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	40.527.685	40.353.370	99,57
	B	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas oprasional atau lapangan	554.552.935	544.390.051	98,17
	C	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	7.250.000	7.250.000	100
2	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum		4.116.772.550	4.098.597.550	99,56
	Kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan keteriban umum dalam [satu] daerah kabupaten/kota		4.095.832.550	4.080.957.550	99,64
	a.	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan, dan pengawalan	407.600.000	404.925.000	99,34
	b.	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	3.000.000	3.000.000	100
	c.	Peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamongpraja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	3.685.232.550	3.673.032.550	99,67
	Kegiatan Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota		15.900.000	12.600.000	79,25
	a.	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	15.900.000	12.600.000	79,25
	Kegiatan Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil [ppns] kabupaten/kota		5.040.000	5.040.000	100
	a.	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	5.040.000	5.040.000	100

Pelaksanaan pada program pengembangan dan pembinaan PPNS Kabupaten/Kota pada pagu anggaran pokok sebesar Rp 11.300.000,- dalam pelaksanaan perubahan tidak

dilaksanakan akibat repocusing untuk pengalihan anggaran percepatan pelaksanaan penanganan covid 19 yang pada tahun 2020 menjadi bencana nasional.

b) Pemadam Kebakaran

Jumlah belanja langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM pada Pemadam Kebakaran diuraikan dengan table berikut :

Tabel 2.72 Belanja Lansung dan Belanja Tidak Langsung Pelayanan Ketentraman dan ketertiban Umum Pada Polisi Pamong Praja				
NO	PRORAM KEGITAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	KET
1	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	3.070.170.600	3.040.320.600	99,03
	Kegiatan Pencegahan,Pengendalian,Pemadam, Penyelamatan,dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.070.170.600	3.040.320.600	99,03
	A Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	3.009.414.350	2.986.344.350	99,23
	B Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penaggulanagan Kebakaran dan Alat Perlindung Diri	60.756.250	53.976.250	88,84

4.5.2.5 Dukungan personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

- Jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 - Pegawai menurut jenjang pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	S.3		
2	S.2	7 orang	
3	S.1	38 orang	
4	Diploma	-	
5	SMU/Sederajat	12 orang	
6	SMP/Sederajat	-	
7	SD/Sederajat	-	
	Jumlah	57 orang	

- Pegawai menurut pangkat dan golongan

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Gol. IV	7 orang	
2	Gol. III	40 orang	
3	Gol. II	10 orang	
4	Gol. I	-	
	Jumlah	57 orang	

- Pegawai menurut jabatan dan eselon

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Eselon 1	-	
2	Eselon 2	1 orang	
3	Eselon 3	4 orang	
4	Eselon 4	14 orang	
5	Pejabat Fungsional Umum	30 orang	
6	Pejabat Fungsional Khusus	8 orang	
	Jumlah	57 orang	

4.5.2.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

➤ **Permasalahan**

Permasalahan selama melaksanakan pelayanan dasar pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya SDM dalam pelaksanaan pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yaitu
 - **Polisi Pamong Praja**
 - Masih perlunya pelatihan dalam meningkatkan pengetahuan PPNS dalam penanganan penegakan PERDA/PERKADA.
 - Masih perlunya pelatihan dalam peningkatan kesemaptaan Polisi Pamong Praja agar selalu siap siaga dalam menaggulangi penegakan PERD/PERKADA bila dibutuhkam dan dalam menaggulangi ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 - **Pemadam Kebakaran**
 - Masih perlunya pelatihan dalam peningkatan kemampuan dalam penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang terjadi dimasyarakat yang bersertifikat.
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan tugas pelayanan ketentraman dan ketertiban umum pada sarana pelaksanaan pendukung patroli kemasyarakatan dan perlunya kelengkapan alat pendukung penyelamatan kebakaran dan non kebakaran yang masih perlu dilengkapi.
- c. Perlunya PERDA/PERKADA yang mengatur pelaksanaan ketentraman ketertiban masyarakat sebagai payung hukum pelaksanaan ketentraman ketertiban masyarakat.
- d. Perlunya PERDA/PERKADA yang mengatur pembinaan SATLINMAS di Desa/Kelurahan untuk mempercepat pelaksanaan pelayanan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

- e. Perlunya media center pengaduan trantibum untuk dapat mempercepat pelayanan masyarakat pada penanganan trantibum yang dilaporkan oleh masyarakat.

➤ **Solusi**

Solusi yang dilaksanakan dalam menanggulangi permasalahan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pelatihan dan atau mengutus pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, namun hal ini tidak bisa dilaksanakan diakibatkan adanya bencana nasional covid 19, sehingga pengumpulan orang banyak tidak bisa dilaksanakan.
- b. Pengusulan proposal pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum ke tingkat provinsi dan pusat.
- c. Menyusun rancangan PERDA/PERKADA pelaksanaan ketentraman ketertiban masyarakat.

Menyusun rancangan PERDA/PERKADA pembinaan SATLINMAS di Desa/Kelurahan dalam mempercepat pelaksanaan ketentraman, ketertiban masyarakat dan perlindungan masyarakat.

4.6 URUSAN SOSIAL

Pelayanan Dasar Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang pelaksanaan teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam pelaksanaannya sebagai berikut:

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar untuk Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial mengacu Pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten Kota, yaitu :

- 1) Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Sosial;
- 2) Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial;
- 3) Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial;
- 4) Rehabilitasi Sosial dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan pengemis Diluar Panti Sosial;
- 5) Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten / Kota

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Tabel 2.73
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Pagu Anggaran
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang Disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	67,640,000
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang emperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	24,076,000
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	0
4	Rehabilitasi social dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah warga Negara / Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	0
5	Perlindungan jaminan sosial pada saat tanggap darurat dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten / kota.	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	87,000,000

4.6.3 Realisasi

Tabel 2.74
Realisasi Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realis asi (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang Disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	67,640,000	65,140,000	90%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	24,076,000	24,076,000	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	0	0	0
4	Rehabilitasi social dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah warga Negara /Gelandangan dan Pengemis yangmemperoleh	100	0	0	0

		rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti				
5	Perlindungan jaminan sosial pada saat tanggap darurat dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten / kota.	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten / kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	87,000,000	87,000,000	100%

Dari table tersebut dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Jumlah disabilitas yang dilayani 50 Jiwa dari Targret 51 jiwa dengan dana APBD, Penerima Bantuan Alat Bantu Sebanyak 9 Jiwa dan penerima bantuan Permakanan 41 Jiwa.
- 2) Jumlah disabilitas yang dilayani 60 Jiwa dari Targret 60 jiwa dengan dana APBN, Penerima Bantuan Alat Bantu Sebanyak 15 Jiwa dan penerima bantuan Permakanan 45 Jiwa.
- 3) Jumlah Anak Terlantar di dalam Panti yang di layani sebanyak 245 jiwa dari 7 tujuh LKSA di kabupaten Soppeng, dan 9 Anak Terlantar di luar panti yang mendapatkan layanan Atensi dari Kementrian Sosial RI.
- 3) Jumlah lanjut usia yang dilayani sebanyak 0 jiwa dari dana APBD, pada dana APBN jumlah Lansia yang dijangkau 105 jiwa.
- 4) Jumlah korban bencana yang dilayani sebanyak 192 jiwa, diantaranya korban bencana alam sebanyak 162 jiwa dan korban bencana Sosial sebanyak 30 jiwa.
- 5) Gelandangan/Pengemis di Kabupaten Soppeng sebanyak 0 jiwa karena tidak adanya data Gelandangan/pengemis yang ada di Kabupaten Soppeng

4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran yang mendukung pencapaian SPM Bidang Sosial Soppeng adalah sebagai berikut:

- Belanja Daerah Rp.9.799.410.887,00 dengan realisasi Rp. 9.344.535.491,00 atau 95.36% terealisasi.
 1. Belanja Operasi Rp. 8.654.665.887,00 dengan realisasi Rp. 8.217.663.491,00
 2. Belanja Modal Rp. 1.144.745.000,00 dengan realisasi Rp.1.126.872.000,00

4.6.5 Dukungan Personil

Capaian SPM Dinas Sosial Kabupaten Soppeng tergantung juga dari dukungan personil sebagai pelaksana program / kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial. Untuk tahun 2021 Dinas Sosial Kabupaten Soppeng mempunyai personil sebagai berikut :

Tabel 2.75
Dukungan Personil Capaian SPM Dinas Sosial

No	Personil	Jumlah Personil	Ket
1	Pegawai	30 orang	
2	Tagana aktif	17 orang	
3	Pkh	35 orang	
4	Tksk	8 orang	
5	Slrt	70 orang	
6	Peksos	2 orang	
7	Pegawai Non PNS	58 Orang	

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

➤ **Permasalahan**

- Belum Sempurnanya Data Base Penyandang Masalah Sosial (PMKS)
- Terbatasnya kemampuan Pembiayaan pemerintah yang diperuntukkan penanganan kesejahteraan sosial
- Sarana dan prasarana pendukung pelayanan kurang memadai
- Terbatasnya pemahaman pelaksanaan tentang standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial.

➤ **Solusi**

- Melakukan pendataan dan verifikasi data minimal 1 kali dalam 3 bulan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
- Prioritas anggaran untuk verifikasi dan validasi data basis data terpadu dan peningkatan sarana dan prasarana.
- Mungusulkan / memaksimalkan anggaran untuk di tambahkan pada program dan kegiatan dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
- Peningkatan sarana dan prasarana yang memudahkan akses pelayanan kesejahteraan sosial.
- Peningkatan SDM yang memiliki kompetensi melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial.

BAB V PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 disusun sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 sebagai pedoman, yang mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, urusan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Dari penyelenggaraan urusan tersebut, dapat dilihat hasil dari capaian program dan kegiatan serta permasalahan dan pemecahan masalahnya. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program/kegiatan Penyusunan LPPD Tahun Anggaran 2022 ini akan menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya. Selain Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini, masukan dari masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, juga menjadi bahan pertimbangan sekaligus memberikan arti tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng kepada Menteri Dalam Negeri secara akuntabilitas disajikan dalam dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2021.

Keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2021 tersebut patut disyukuri, mengingat pencapaiannya diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, baik jajaran Eksekutif maupun Legislatif, serta masyarakat secara luas. Sedangkan ketidaktercapaian harus lebih diupayakan di tahun mendatang agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan menjadi optimal. Hasil-hasil yang telah dicapai selama ini mengindikasikan adanya komitmen yang kuat dari seluruh elemen Pemerintahan Daerah yang dapat dijadikan pondasi kokoh untuk meraih kinerja yang lebih optimal di masa mendatang. Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu saja masih terdapat celah kekurangan yang perlu diperbaiki.

Demikian penyampaian LPPD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021 ini, diiringi harapan semoga di tahun-tahun mendatang, keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan Kabupaten Soppeng. Semoga Allah SWT memberkati kita semua. Aamiin.

Watansoppeng, Maret 2022

BUPATI SOPPENG


H.A.KASWADI RAZAK, SE



PEMERINTAH KAB. SOPPENG

LPPD 2021

LAMPIRAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



**Tahun Anggaran
2022**

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB, URUSAN PILIHAN DAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN: SOPPENG

LAMPIRAN : FORMAT IKK OUTPUT DAN IKK OUTCOME UNTUK KABUPATEN

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
1	URUSAN PENDIDIKAN					
		1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD $\frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan}} \times 100\%$ $\frac{3435}{3060} \times 100\%$	112,25 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Data Jumlah Anak Uaia 5-6 Tahun yang susah tamat atau sedang belajar di asatuan PAUD Tahun 2021, Data pembagi dari data penduduk semester 1 tahun 2021 bersumber dari Dinas DUKCAPIL
		1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi (Negeri dan Swasta) 1 Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi (Negeri dan Swasta) akreditasi A 8 2 Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi (Negeri dan Swasta) akreditasi B 64 3 Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi (Negeri dan Swasta) akreditasi C 31	103 Sekolah 8 PAUD akreditasi A 64 PAUD akreditasi B 31 PAUD akreditasi C	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	akreditasi adalah suatu penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan satuan pendidikan usia dini dan non formal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan
		2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	4430 peserta didik PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
		3	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	779 peserta didik PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	daftar peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan
		4	Jumlah kebutuhan pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	Jumlah kebutuhan pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	516 kebutuhan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	daftar sarana prasarana pendidikan PAUD
		5	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	516 pendidik	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Data Guru PAUD
		6	Jumlah Pendidik PAUD yang memiliki Ijazah D IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik PAUD yang memiliki Ijazah D IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan PAUD	267 pendidik	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Data Guru PAUD yang berijazah D IV dan S1 dan sertifikat guru PAUD
		7	Jumlah Kepala Sekolah PAUD ijazah D-IV atau S.1 bersertifikat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD nonformal dari lembaga pemerintah	Jumlah Kepala Sekolah PAUD ijazah D-IV atau S.1 bersertifikat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD nonformal dari lembaga pemerintah	132 Kepala sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Data Kepala Sekolah PAUD ijazah D-IV atau S.1 bersertifikat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD nonformal dari lembaga pemerintah
	2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/Paket A}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn}} \times 100\%$ $\frac{18788}{17480} \times 100\%$		107,48 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	data pembagi dari data penduduk semester 1 tahun 2021 bersumber dari Dinas DUKCAPIL

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		1 Jumlah SD Negeri Terakreditasi	Jumlah SD Negeri dan swasta Terakreditasi Jumlah SD Negeri swasta Terakreditasi A 95 Jumlah SD Negeri swasta Terakreditasi B 154 Jumlah SD Negeri swasta Terakreditasi C 3	252 SD 95 SD akreditasi A 154 SD akreditasi B 3 SD akreditasi C	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	akreditasi adalah suatu penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan satuan pendidikan usia dini dan non formal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan
		2 Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	tidak ada Peserta didik	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	daftar peserta didik SD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah
		3 Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	17743 Peserta didik	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	daftar peserta didik SD yang menerima pembebasan biaya pendidikan
		4 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	2277 Kebutuhan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	daftar sarana prasarana pendidikan SD
		5 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	2590 Pendidik	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Data Guru SD
		6 Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	1012 Tenaga kependidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	daftar sarana prasarana pendukung tenaga pendidikan SD

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
			7 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	387 Tenaga kependidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Data Guru SD
			8 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2417 Pendidik	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Data Guru SD yang berijazah D IV dan S1 dan sertifikat guru SD
			9 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	225 Kepala Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Data Kepala Sekolah PAUD ijazah D-IV atau S.1 bersertifikat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk SD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan SD nonformal dari lembaga pemerintah
			10 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	375 Tenaga	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Daftar tenaga/staf administrasi perkantoran di sekolah SD
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	$\frac{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat dan sedang belajar di sekolah menengah pertama}}{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun di kabupaten}}$ $\frac{9004}{7465} \times 100\%$	120,62 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	- Data Jumlah anak usia 13-15 tahun yang tamat dan sedang belajar di sekolah menengah pertama - Data pembagi dari data penduduk semester 1 tahun 2021 bersumber dari Dinas DUKCAPIL

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		1 Jumlah SMP Negeri Terakreditasi	Jumlah SMP Negeri dan swasta Terakreditasi a Jumlah SMP Negeri swasta Terakreditasi A 26 b Jumlah SMP Negeri swasta Terakreditasi B 9 c Jumlah SMP Negeri swasta Terakreditasi C 3	38 SMP 26 SMP akreditasi A 9 SMP akreditasi B 3 SMP akreditasi C	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	akreditasi adalah suatu penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan satuan pendidikan usia dini dan non formal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan
		2 Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	tidak ada Peserta didik	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Surat pernyataan Nomor 421/813/DIKBUD/III/2022
		3 Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	5982 Peserta didik	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	daftar peserta didik SMP yang menerima pembebasan biaya pendidikan
		4 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	380 Kebutuhan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	daftar sarana prasarana pendidikan SMP
		5 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1221 Pendidik	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Data Guru SMP

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3		4	5	6	7	
			6	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	152 Tenaga kependidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	daftar sarana prasarana pendukung tenaga pendidikan SMP
			7	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	155 Tenaga kependidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Data Guru SMP
			8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1182 Pendidik	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Data Guru SMP yang berijazah D IV dan S1 dan sertifikat guru SMP
			9	Persentase kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	33 Kepala Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Data Kepala Sekolah PAUD ijazah D-IV atau S.1 bersertifikat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk SMP formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan SMP nonformal dari lembaga pemerintah
			10	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	136 Tenaga	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Daftar tenaga/staf administrasi perkantoran di sekolah SMP

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCOME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan pendidikan kesetaraan $\frac{\text{Jumlah warga negara usia 7-18 tahun di kabupaten}}{\text{Jumlah warga negara usia 7-18 tahun di kabupaten}} \times 100\%$	0,95 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	- Data warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan pendidikan kesetaraan - data pembagi dari data penduduk semester 1 tahun 2021 bersumber dari Dinas DUKCAPIL
		1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) a Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) Terakreditasi A 0 b Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) Terakreditasi B 4 c Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) Terakreditasi C 1	5 Sekolah Kesetaraan 0 Sekolah Kesetaraan agreditasi A 4 Sekolah Kesetaraan agreditasi B 1 Sekolah Kesetaraan agreditasi C	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	akreditasi adalah suatu penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan satuan pendidikan usia dini dan non formal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan
		2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Peserta didik	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	daftar peserta didik kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah
		3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	935 Peserta didik	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	daftar peserta didik kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3		4	5	6	7	
			4	Persentase kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	21 Kebutuhan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	daftar sarana prasarana pendidikan kesetaraan
			5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	75 Pendidik	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Data Guru kesetaraan
			6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	54 Pendidik	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Data Guru Kesetaraan yang berijazah D IV dan S1
			7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tidak Perlu Diisi
			8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tidak Perlu Diisi

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	
2	URUSAN KESEHATAN						
		1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	$\frac{\text{Jumlah daya tampung RS Rujukan}}{\text{Jumlah Penduduk Di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$ $\frac{300}{237875} \times 100\%$	0,13 %	DINAS KESEHATAN	- Rumah Sakit yang ditetapkan SK Bupati sebagai rujukan pasien - Data pembagi dari data penduduk semester 2 tahun 2021 bersumber dari Dinas DUKCAPIL
		1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	1 RS	DINAS KESEHATAN	Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 8/J.09/PTSP/2020 SK Gubernur Nomor 955/II/TAHUN 2020
		2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang teraakreditasi	$\frac{\text{Jumlah RS Rujukan yang ter akreditasi}}{\text{Jumlah RS di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$ $\frac{1}{1} \times 100\%$	100 %	DINAS KESEHATAN	Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Paripurna Bintang 5
		1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	1 RS	DINAS KESEHATAN	Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit paripurna bintang 5
		3	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{\text{Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah Ibu Hamil di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$ $\frac{2574}{2574} \times 100\%$	100,00 %	DINAS KESEHATAN	Data Ibu hamil di Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Pembagi jumlah Ibu hamil di Kabupaten Soppeng tahun 2021 Perbup No.43 Tahun 2018 tentang Persalinan di Fasilitas Kesehatan
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	245353 Logistik	DINAS KESEHATAN	Data Logistik (Obat-obatan) untuk ibu hamil

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
			2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	51 SDM	DINAS KESEHATAN	Data Petugas (Dokter/Suster/Perawat/Bidan) yang melayani ibu hamil termasuk di layanan kesehatan negeri dan swasta
		4	Mengukur tingkat ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan}}{\text{Jumlah ibu bersalin di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$ $\frac{2811}{2811} \times 100\%$	100,00 %	DINAS KESEHATAN	Data Ibu bersalin di Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Pembagi jumlah Ibu bersalin di Kabupaten Soppeng tahun 2021 Perbup No.43 Tahun 2018 tentang Persalinan di Fasilitas Kesehatan
			1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	8196 Logistik	DINAS KESEHATAN	Data Logistik (Obat-obatan) untuk ibu bersalin
			2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	51 SDM	DINAS KESEHATAN	Data Petugas (Dokter/Suster/Perawat/Bidan) yang melayani ibu bersalin termasuk di puskesmas, polindes dan pustu
		5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{\text{Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan standar pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah Bayi baru lahir di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$ $\frac{2790}{2790} \times 100\%$	100,00 %	DINAS KESEHATAN	Data bayi baru lahir 0-28 hari di Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Pembagi jumlah bayi baru lahir 0-28 hari di Kabupaten Soppeng tahun 2021

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCOME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
			1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	22104 Logistik	DINAS KESEHATAN	Data Logistik (Obat-obatan) untuk bayi baru lahir
			2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	51 SDM	DINAS KESEHATAN	Data Petugas (Dokter/Suster/Perawat/Bidan) yang melayani bayi baru lahir di layanan kesehatan negeri dan swasta
		6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan standar}}{\text{Jumlah Balita di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$ $\frac{9846}{9846} \times 100\%$	100,00 %	DINAS KESEHATAN	- Data balita berusia 12-59 bulan tahun 2021 di Kabupaten Soppeng Tahun 2021 - Pembagi jumlah balita berusia 12-59 bulan di Kabupaten Soppeng tahun 2021
			1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	81846 Logistik	DINAS KESEHATAN	Data Logistik (Obat-obatan) untuk balita
			2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	68 SDM	DINAS KESEHATAN	Data Petugas (Dokter/Suster/Perawat/kader posyandu) yang melayani balita termasuk di puskesmas, polindes dan pustu
		7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$ $\frac{5637}{28640} \times 100\%$	19,68 %	DINAS KESEHATAN	Data anak berusia 7-15 tahun 2021 yang mendapatkan pelayanan di Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Pembagi jumlah anak berusia 7-15 semester 1 di Kabupaten Soppeng tahun 2021 yang bersumber dari DUKCAPIL
			1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	16911 Logistik	DINAS KESEHATAN	Data Logistik (Obat-obatan) untuk anak usia pendidikan dasar untuk anak berusia 7-15

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
			2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	85 SDM	DINAS KESEHATAN	Data Petugas (Dokter/Suster/Perawat) yang melayani balita termasuk di layanan kesehatan negeri dan swasta
		8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 yang mendapatkan skrining sesuai standar}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$ $\frac{76987}{148451} \times 100\%$	51,86 %	DINAS KESEHATAN	- Data orang usia 15-59 tahun 2021 yang mendapatkan pelayanan di Kabupaten Soppeng Tahun 2021 - Pembagi warga negara usia 15-59 semester 2 di Kabupaten Soppeng tahun 2021 yang bersumber dari DUKCAPIL
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	167106 Logistik	DINAS KESEHATAN	Data Logistik (Obat-obatan) untuk anak usia pendidikan dasar untuk skrening warga negara usia 15-59
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	85 SDM	DINAS KESEHATAN	Data Petugas (Dokter/Suster/Perawat) yang melayani skrening warga negara usia 15-59 termasuk di Layanan kesehatan negeri dan swasta
		9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$ $\frac{20317}{39710} \times 100\%$	51,16 %	DINAS KESEHATAN	Data orang usia 60 tahun keatas tahun 2021 yang mendapatkan pelayanan di Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Pembagi warga negara usia 60 tahun keatas di Kabupaten Soppeng tahun 2021 yang bersumber dari DUKCAPIL

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
			1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	60961 Logistik	DINAS KESEHATAN	Data Logistik (Obat-obatan) untuk anak usia pendidikan dasar untuk skrining warga negara usia 60 tahun keatas
			2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	85 SDM	DINAS KESEHATAN	Data Petugas (Dokter/Suster/Perawat) yang melayani skrining warga negara usia 60 tahun keatas termasuk di layanan kesehatan negeri dan swasta
		10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{penderita hipertensi di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$ $\frac{4170}{190780} \times 100\%$	2,19 %	DINAS KESEHATAN	Data penderita hipertensi di Kabupaten Soppeng tahun 2021
			1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4221 Logistik	DINAS KESEHATAN	Data Logistik (Obat-obatan) untuk anak usia pendidikan dasar untuk penderita hipertensi
			2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	85 SDM	DINAS KESEHATAN	Data Petugas (Dokter/Suster/Perawat) yang melayani skrining warga negara penderita hipertensi di layanan kesehatan negeri dan swasta
		11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita DM di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$ $\frac{1238}{1238} \times 100\%$	100,00 %	DINAS KESEHATAN	Data penderita DM di Kabupaten Soppeng tahun 2021

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCOME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
			1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2510 Logistik	DINAS KESEHATAN	Data Logistik (Obat-obatan) untuk anak usia pendidikan dasar untuk penderita DM
			2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	85 SDM	DINAS KESEHATAN	Data Petugas (Dokter/Suster/Perawat) yang melayani skrining warga negara penderita DM di layanan kesehatan negeri dan swasta
		12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita ODGJ berat di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$ $\frac{424}{424} \times 100\%$	100,00 %	DINAS KESEHATAN	Data penderita ODGJ tahun 2021 yang mendapatkan pelayanan di Kabupaten Soppeng Tahun 2021 dan Pembagi penderita ODGJ di Kabupaten Soppeng tahun 2021
			1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	68 Logistik	DINAS KESEHATAN	Data Logistik (Obat-obatan) untuk anak usia pendidikan dasar untuk penderita ODGJ
			2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	34 SDM	DINAS KESEHATAN	Data Petugas (Dokter/Suster/Perawat) yang melayani skrining warga negara penderita ODGJ di layanan kesehatan negeri dan swasta
		13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang penderita TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar}}{\text{Jumlah orangpenderita TBC di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$ $\frac{595}{595} \times 100\%$	100,00 %	DINAS KESEHATAN	Data penderita TBC tahun 2021 yang mendapatkan pelayanan di Kabupaten Soppeng Tahun 2021 dan Pembagi penderita TBC di Kabupaten Soppeng tahun 2021

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
			1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	502745 Logistik	DINAS KESEHATAN	Data Logistik (Obat-obatan) untuk anak usia pendidikan dasar untuk penderita TBC
			2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	70 SDM	DINAS KESEHATAN	Data Petugas (Dokter/Suster/Perawat) yang melayani skrining warga negara penderita TBC di layanan kesehatan negeri dan swasta
		14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten/Kota 3103 3103 x 100%	100,00 %	DINAS KESEHATAN	Data penderita HIV tahun 2021 yang mendapatkan pelayanan di Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Pembagi penderita HIV di Kabupaten Soppeng tahun 2021
			1 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	23034 Logistik	DINAS KESEHATAN	Data Logistik (Obat-obatan) untuk anak usia pendidikan dasar untuk penderita HIV
			2 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	85 SDM	DINAS KESEHATAN	Data Petugas (Dokter/Suster/Perawat) yang melayani skrining warga negara penderita HIV di layanan kesehatan negeri dan swasta
3 URUSAN PEKERJAAN UMUM							
		1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) 69,72 717,54 x 100%	9,72 %	DINAS PUPR	Data Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi dan Data keseluruhan kawasan permukiman yang rawan banjir

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		1 Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	717,54 ha	DINAS PUPR	Data keseluruhan kawasan permukiman yang rawan banjir yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
		2 Panjang sungai dikawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Panjang sungai dikawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	62388,6 m	DINAS PUPR	Data panjang sungai kawasan permukiman yang rawan banjir yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
		3 Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	TIDAK ADA GARIS PANTAI	DINAS PUPR	tidak memiliki garis pantai surat keterangan nomor 034/LPPD/PI-PR/II/2022
		4 Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	TIDAK ADA GARIS PANTAI	DINAS PUPR	tidak memiliki garis pantai surat keterangan nomor 035/LPPD/PI-PR/II/2022
		5 Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	kalau ada sebutkan : TIDAK ADA	TIDAK ADA	DINAS PUPR	tidak memiliki garis pantai surat keterangan nomor 036/LPPD/PI-PR/II/2022

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		6 Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	kalau ada sebutkan : TIDAK ADA	TIDAK ADA	DINAS PUPR	tidak memiliki garis pantai surat keterangan nomor 037/LPPD/PI-PR/II/2022
		7 Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota 1. Bangunan perkuatan tebing (m) 5.150,00 m 2. Tanggul sungai (m) 3.097,00 m 3. Kanal bajir (m) - m 4. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit) 30,00 5. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) - unit 6. Polder/Kolam Retensi (Unit) - unit 7. Breakwater (m) - m 8. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m) -	8.277,00 m/unit Bangunan perkuatan tebing (m) 5.150,00 m Tanggul sungai (m) 3.097,00 m Kanal bajir (m) 0,00 m Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit) 30,00 unit Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) 0,00 unit Polder/Kolam Retensi (Unit) 0,00 unit Breakwater (m) 0,00 m Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m) 0,00 m	DINAS PUPR	Data Sarana dan Prasarana pengaman sungai milik PEMDA

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
		2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kab/Kota}}{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan Kab/Kota}} \times 100\%$	0 %	DINAS PUPR	tidak memiliki garis pantai surat keterangan nomor 038/LPPD/PI-PR/II/2022
			1 Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	TIDAK ADA GARIS PANTAI	DINAS PUPR	tidak memiliki garis pantai surat keterangan nomor 038/LPPD/PI-PR/II/2022
			2 Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota(m)	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	TIDAK ADA GARIS PANTAI	DINAS PUPR	tidak memiliki garis pantai surat keterangan nomor 038/LPPD/PI-PR/II/2022
			3 Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	TIDAK ADA GARIS PANTAI	DINAS PUPR	tidak memiliki garis pantai surat keterangan nomor 038/LPPD/PI-PR/II/2022

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
			4 Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	TIDAK ADA GARIS PANTAI	DINAS PUPR	tidak memiliki garis pantai surat keterangan nomor 038/LPPD/PI-PR/II/2022
			5 Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	kalau ada sebutkan :	TIDAK ADA	DINAS PUPR	tidak memiliki garis pantai surat keterangan nomor 038/LPPD/PI-PR/II/2022
			6 Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan	kalau ada sebutkan :	TIDA ADA	DINAS PUPR	tidak memiliki garis pantai surat keterangan nomor 038/LPPD/PI-PR/II/2022
			7 Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik 1. Bangunan perkuatan tebing (m) m 2. Tanggul sungai (m) m 3. Kanal bajir (m) m 4. Pintu air/bendung pengendali unit 5. Pompa banjir (Unit dan unit 6. Polder/Kolam Retensi (Unit) unit 7. Breakwater (m) m 8. Seawall dan Bangunan m	bukan kawasan pantai	DINAS PUPR	tidak memiliki garis pantai surat keterangan nomor 038/LPPD/PI-PR/II/2022

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
		3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{\text{Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha) ditingkat (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha)}}{\text{Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota}} \times 100\%$ $\frac{6.001,34}{96.666,00} \times 100\%$	6,21 %	DINAS PUPR	Data jaringan irigasi yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi, dioperasikan dan dipelihara Data Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten
		1	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik}}{\text{Panjang keseluruhan jaringan irigasi primer di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$ $\frac{35.428,90}{54.189,20} \times 100\%$	65,38 %	DINAS PUPR	Data jaringan irigasi primer di kabupaten
		2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik}}{\text{Panjang keseluruhan jaringan irigasi sekunder di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$ $\frac{73.333,89}{122.878,51} \times 100\%$	59,68 %	DINAS PUPR	Data jaringan irigasi sekunder di kabupaten
		3	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik}}{\text{Panjang keseluruhan jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik}} \times 100\%$ $\frac{17.922,41}{27.855,78} \times 100\%$	64,34 %	DINAS PUPR	Data jaringan irigasi tersier di kabupaten

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota $\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota}}{\text{Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota}} \times 100\%$ $\frac{56492}{57632} \times 100\%$	98,02 %	DINAS PUPR	Data rumah tangga yang mendapatkan layanan air minum SPAM di Kab. Soppeng diuraikan tiap kecamatan Data Jumlah rumah di Kab. Soppeng
		1 Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	kalau ada sebutkan : TIDAK ADA	TIDAK ADA	DINAS PUPR	Penetapan Dokumen RISPAM Kabupaten/Kota tidak terdapat data karena Perencanaan Penyusunan Dokumen RISPAM sementara diusulkan untuk dianggarkan sesuai dengan Surat Keterangan Dinas PUPR Nomor 030/LPPD/PU-PR/II/2022
		2 Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	kalau ada sebutkan : TIDAK ADA	TIDAK ADA	DINAS PUPR	Penetapan JAKSTRADA Kab/Kota tidak terdapat data karena perencanaan penyusunan JAKSTRADA sementara diusulkan untuk dianggarkan berdasarkan Surat Keterangan Dinas PUPR Nomor 031/LPPD/PU-PR/II/2022
		3 Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	1 BUMD	DINAS PUPR	Data BUMD yang mengelola SPAM yaitu PDAM Kab.Soppeng
		4 Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	TIDAK ADA IZIN	DINAS PUPR	tidak ada izin yang dikeluarkan BU untuk SPAM Surat Keterangan Dinas PU-PR Nomor 033/LPPD/PI-PR/II/2022

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
			5 Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	TIDAK ADA KERJASAMA	DINAS PUPR	belum ada data
		5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki akses pengolahan berupa cupluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah oleh PLT + jumlah rumah memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPAL}}{\text{Jumlah rumah di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$ $\frac{57605}{57632} \times 100\%$	99,95 %	DINAS PUPR	Data rumah tangga yang memiliki akses pengolahan berupa cupluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah oleh PLT + jumlah rumah memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPAL dan Data Jumlah rumah di Kab. Soppeng
		1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	57260 rumah	DINAS PUPR	Data belum jelas
		2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	345 rumah	DINAS PUPR	Data belum jelas
		3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	57605 rumah	DINAS PUPR	Data belum jelas

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		4 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	32 rumah	DINAS PUPR	Data rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja
		5 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	32 rumah	DINAS PUPR	Data rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja
		6 Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	32 rumah	DINAS PUPR	Data rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik
		7 Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cupluk atau tanki septik}}{\sum \text{rumah wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun > 25 Jiwa/ha}} \times 100\%$	0,00 %	DINAS PUPR	Tidak tersedia pelayanan SPALD-S Surat Keterangan Dinas PU-PR Nomor 026/LPPD/PU-PR/II/2022
		8 Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	$\frac{\sum \text{rumah yang lumpur tenijanya telah diolah di IPLT}}{\sum \text{rumah wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun > 25 Jiwa/ha}} \times 100\%$	0,00 %	DINAS PUPR	Tidak tersedia pelayanan SPALD-T Surat Keterangan Dinas PU-PR Nomor 039/LPPD/PU-PR/II/2022

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		9 Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki sabungan rumah dan air limbahnya diolah di IPAL}}{\sum \text{rumah wilayah pengembangan SPALD T}} \times 100\%$ $\frac{0}{1} \times 100\%$	0,00 %	DINAS PUPR	tidak menyediakan pelayanan SPALD_T Surat Keterangan Dinas PU-PR Nomor 027/LPPD/PI-PR/II/2022
		10 Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki akses unit pengelolaan setempat}}{\sum \text{rumah yang termasuk dalam pengembangan SPALD-S}} \times 100\%$ $\frac{0}{1} \times 100\%$	0,00 %	DINAS PUPR	tidak menyediakan pelayanan SPALD_T Surat Keterangan Dinas PU-PR Nomor 040/LPPD/PI-PR/II/2022
		11 Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{Jumlah sarana pengangkutan yang tersedia}}{\sum \text{Jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$ $\frac{3}{4} \times 100\%$	75,00 %	DINAS PUPR	Dokumentasi sarana pengangkutan yang tersedia
		12 Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{Jumlah kapasitas pengelolaan lumpur tinja yang tersedia}}{\sum \text{Jumlah kapasitas pengelolaan lumpur tinja yang dibutuhkan Kabupaten/Kota}} \times 100\%$ $\frac{9}{9} \times 100\%$	100,00 %	DINAS PUPR	Dokumentasi kapasitas pengelolaan lumpur tinja yang tersedia dengan kapasitas 9 m³/hari

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
			13 Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	$\frac{\sum \text{Jumlah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPAL}}{\sum \text{Jumlah rumah yang dilayani dengan SPAL-T pada Kabupaten}} \times 100\%$ $\frac{0}{1} \times 100\%$	0,00 %	DINAS PUPR	tidak terdapat data penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPAL-D surat keterangan Dinas PU-PR nomor 028/LPPD/PI-PR/II/2022
			14 Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{Jumlah rumah yang tangki septiknya yang sudah disedot}}{\sum \text{Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPAL-T}} \times 100\%$ $\frac{32}{0} \times 100\%$	0,00 %	DINAS PUPR	tidak terdapat data rumah yang tangki septiknya yang sudah disedot surat keterangan Dinas PU-PR nomor 029/LPPD/PI-PR/II/2022
		6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai dengan peruntukannya}}{\text{Jumlah IMB yang berlaku}} \times 100\%$ $\frac{392}{392} \times 100\%$	100,00 %	DINAS PUPR	Data Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai dengan peruntukannya Data Jumlah IMB yang berlaku
			1 Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	$\frac{\sum \text{Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi}}{\sum \text{Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)}} \times 100\%$ $\frac{47}{392} \times 100\%$	11,99 %	DINAS PUPR	data tidak jelas

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		2 Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	392 IMB	DINAS PUPR	Data IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting
		3 Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	kalau ada sebutkan : ADA PERDA KAB. SOPPENG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG BANGUNAN GEDUNG	ADA PERDA KAB. SOPPENG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG BANGUNAN GEDUNG	DINAS PUPR	PERDA KAB. SOPPENG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
		4 Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	kalau ada sebutkan : TIDAK ADA	TIDAK ADA	DINAS PUPR	tidak penetapan keputusan Bupati surat keterangan Dinas PU-PR nomor 023/LPPD/PI-PR/II/2022
		5 Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	tidak ada Unit	DINAS PUPR	tidak ketetapan bangunan gedung yang ditetapkan surat keterangan Dinas PU-PR nomor 024/LPPD/PI-PR/II/2022
		6 Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi/Daerah	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi/Daerah	tidak ada Unit	DINAS PUPR	tidak ketetapan bangunan gedung yang ditetapkan surat keterangan nomor 025/LPPD/PI-PR/II/2022
		7 Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	2952 Unit	DINAS PUPR	Data Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota
		8 Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	2952 Unit	DINAS PUPR	Data Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
		7	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/kota	$\frac{\text{Sepanjang jalan kewenangan kabupaten yang mantap}}{\text{Panjang jalan keseluruhan Kabupaten/Kota}} \times 100\%$ $\frac{516,03}{900,34} \times 100\%$	57,32 %	DINAS PUPR	Data jalan kewenangan kabupaten yang mantap Data Panjang jalan keseluruhan Kabupaten/Kota
		1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	898881 Km	DINAS PUPR	SK BUPATI Nomor 882/IX/2017 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten dan Jalan Desa Di Kabupaten Soppeng
		2	Panjang jalan yang dibangun	Panjang jalan yang dibangun	1,45 Km	DINAS PUPR	Data Panjang jalan yang dibangun
		3	Panjang jembatan yang dibangun	Panjang jembatan yang dibangun	41 Meter	DINAS PUPR	Data Panjang jembatan yang dibangun
		4	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	4,26 Km	DINAS PUPR	Data Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)
		5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	tidak ada	DINAS PUPR	tidak ada jembatan yang diganti/dilebarkan surat keterangan Dinas PU-PR nomor 020/LPPD/PI-PR/II/2022
		6	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	tidak ada	DINAS PUPR	tidak ada jembatan yang diganti/dilebarkan surat keterangan Dinas PU-PR nomor 021/LPPD/PI-PR/II/2022

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIA KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
			7 Panjang jembatan yang direhabilitasi	Panjang jembatan yang direhabilitasi	tidak ada	DINAS PUPR	tidak ada jembatan yang diganti/dilebarkan surat keterangan nomor 022/LPPD/PI-PR/II/2022
			8 Panjang jalan yang dipelihara	Panjang jalan yang dipelihara	11,81 Km	DINAS PUPR	Data Panjang jalan yang dipelihara
			9 Panjang jembatan yang dipelihara	Panjang jembatan yang dipelihara	58,4 Meter	DINAS PUPR	Data Panjang jembatan yang dipelihara
		8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga operator/teknisi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis}}{\text{Jumlah tenaga operator/teknisi/analisis Kab/kota}} \times 100\%$	0,00 %	DINAS PUPR	tidak ada data Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi surat keterangan Dinas PU-PR nomor 001/LPPD/PI-PR/II/2022
		1	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	tidak ada Tenaga	DINAS PUPR	tidak ada data jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten surat keterangan Dinas PU-PR nomor 002/LPPD/PI-PR/II/2022
		2	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	74 Tenaga	DINAS PUPR	Data Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah Kab. Soppeng

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		3 Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	Jumlah tenaga operator/teknisi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	tidak ada Tenaga	DINAS PUPR	tidak ada data jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten surat keterangan Dinas PU-PR nomor 003/LPPD/PI-PR/II/2022
		4 Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	kalau ada sebutkan : ADA 1 Pembekalan dan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi 2 Pelatihan Kerja Tukang Batu	ADA 1 Pembekalan dan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi 2 Pelatihan Kerja Tukang Batu	DINAS PUPR	Dokumentasi kegiatan pembinaan jasa konstruksi (pelatihan/bintek) yang diselenggarakan oleh pemerintah/lembaga lainnya di Kab. Soppeng
		5 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	kalau ada sebutkan : TIDAK ADA	TIDAK ADA	DINAS PUPR	tidak Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab surat keterangan nomor 004/LPPD/PI-PR/II/2022
		6 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	kalau ada sebutkan : TIDAK ADA	TIDAK ADA	DINAS PUPR	Tidak tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN surat keterangan nomor 005/LPPD/PI-PR/II/2022

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
			7 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	kalau ada sebutkan : TIDAK ADA	TIDAK ADA	DINAS PUPR	tidak Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya surat keterangan nomor 006/LPPD/PI-PR/II/2022
			8 Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	kalau ada sebutkan : TIDAK ADA	TIDAK ADA	DINAS PUPR	tidak Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala surat keterangan nomor 007/LPPD/PI-PR/II/2022
			9 Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	kalau ada sebutkan : TIDAK ADA	TIDAK ADA	DINAS PUPR	tidak Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten surat keterangan nomor 008/LPPD/PI-PR/II/2022

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		12 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	kalau ada sebutkan : TIDAK ADA	TIDAK ADA	DINAS PUPR	tidak Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab surat keterangan nomor 011/LPPD/PI-PR/II/2022
		13 Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	kalau ada sebutkan : TIDAK ADA	TIDAK ADA	DINAS PUPR	tidak Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten surat keterangan nomor 012/LPPD/PI-PR/II/2022
		14 Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	kalau ada sebutkan : Laporan Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi	ADA Laporan Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi	DINAS PUPR	Data Laporan Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
			15 Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	kalau ada sebutkan : TIDAK ADA	TIDAK ADA	DINAS PUPR	tidak Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya surat keterangan nomor 013/LPPD/PI-PR/II/2022
			16 Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	kalau ada sebutkan : TIDAK ADA	TIDAK ADA	DINAS PUPR	tidak Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya surat keterangan nomor 014/LPPD/PI-PR/II/2022
			17 Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	kalau ada sebutkan : TIDAK ADA	TIDAK ADA	DINAS PUPR	Belum pernah dilaksanakan pendataan terkait Badan Usaha yang memiliki IUJKN surat keterangan Dinas PU-PR Nomor 015/LPPD/PU-PR/II/2022

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
			18 Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	tidak ada BU	DINAS PUPR	tidak Tersedianya data Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota surat keterangan Dinas PU-PR nomor 016/LPPD/PI-PR/II/2022
			19 Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	tidak ada BU	DINAS PUPR	tidak Tersedianya data Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota surat keterangan Dinas PU-PR nomor 017/LPPD/PI-PR/II/2022
			20 Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	tidak ada BU	DINAS PUPR	tidak Tersedianya data Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota surat keterangan Dinas PU-PR nomor 018/LPPD/PI-PR/II/2022
			21 Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	tidak ada BU	DINAS PUPR	tidak Tersedianya data Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota surat keterangan Dinas PU-PR nomor 019/LPPD/PI-PR/II/2022
			22 Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	tidak ada BU dan TDUP	DINAS PUPR	data tidak ada

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
			23 Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	35 paket	DINAS PUPR	Data Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya
			24 Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	tidak ada kecelakaan	DINAS PUPR	data kecelakaan konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasan
			25 Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	35 paket	DINAS PUPR	Data umlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya
		9 Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan tanpa kecelakaan konstruksi _____ jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya 0 35 x 100%	0,00 %	DINAS PUPR	Data Jumlah proyek yang menjadi kewenangan tanpa kecelakaan konstruksi Data jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	
4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT							
		1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2021 Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2021 34 32 x 100%	106,25 %	DINAS PERKIM	Data Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2021 Data Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2021
		1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	32 unit rumah	DINAS PERKIM	Data Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya
		2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	287 unit rumah	DINAS PERKIM	Data Jumlah rumah yang terkena bencana alam
		3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam 1 . Jumlah RT 287 RT 2 . Jumlah KK 287 KK 3 . Jumlah Jiwa 0 Jiwa	1 . Jumlah RT 0 RT 2 . Jumlah KK 287 KK 3 . Jumlah Jiwa 0 Jiwa	DINAS PERKIM	Data Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam
		4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	34 unit rumah	DINAS PERKIM	Data Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3		4	5	6	7	
			5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	tidak ada unit rumah	DINAS PERKIM	Tidak ada rumah korban dibangun kembali di kawasan bencana sesuai rencana aksi, surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/54/PKP/II/2022
			6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	tidak ada unit rumah	DINAS PERKIM	Tidak ada rumah korban dibangun baru/relokasi sesuai rencana aksi, surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/56/PKP/II/2022
			7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	tidak ada lokasi	DINAS PERKIM	Tidak ada Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana, surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/55/PKP/II/2022
			8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	1 . Jumlah RT		

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
		2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	$\frac{\text{RT penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan atau Bangunan + RT Penerima Subsidi Uang Sewa + RT Penerima Penyedia Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah total RT terkena relokasi program Pemda yang memenuhi kriteria penerima pelayanan}} \times 100\%$	0,00 %	DINAS PERKIM	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/58/PKP/II/2022 tidak ada RT terkena relokasi program Pemda yang memenuhi kriteria penerima pelayanan surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/59/PKP/II/2022
		1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	tidak ada unit rumah	DINAS PERKIM	Tidak ada rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/60/PKP/II/2022
		2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM}}{\text{Jumlah total rumah tangga terkena bencana}} \times 100\%$	0,00 %	DINAS PERKIM	Tidak ada rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/61/PKP/II/2022

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3		4	5	6	7	
			3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	tidak ada rumah tangga	DINAS PERKIM	Tidak ada rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/62/PKP/II/2022
			4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	tidak ada rumah tangga	DINAS PERKIM	Tidak ada rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/63/PKP/II/2022
			5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	tidak ada rumah tangga	DINAS PERKIM	Tidak ada rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/64/PKP/II/2022
			6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	tidak ada lahan	DINAS PERKIM	Tidak ada pengadaan tanah untuk relokasi rumah tangga yang terkena bencana alam surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/65/PKP/II/2021
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha}} \times 100\%$ $\frac{0}{16,53} \times 100\%$	0,00 %	DINAS PERKIM	Tidak ada kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/66/PKP/II/2022	

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
			1 Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	16,53 ha	DINAS PERKIM	SK Bupati nomor 664/X/2019
			2 Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Tidak ada unit rumah	DINAS PERKIM	Tidak ada unit peningkatan kualitas RTLH surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/67/PKP/II/2022
			3 Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Tidak ada ha	DINAS PERKIM	Tidak ada luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/68/PKP/II/2022
		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$\frac{\text{Jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)}}{\text{Jumlah total unit rumah di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$ $\frac{6710}{56899} \times 100\%$	11,79 %	DINAS PERKIM	- Data Jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) - Data Jumlah total unit rumah di Kab. Soppeng
			1 Jumlah rumah di kab/kota	Jumlah rumah di kab/kota	56899 unit rumah	DINAS PERKIM	Data Jumlah rumah di Kab. Soppeng
			2 Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	735 unit rumah	DINAS PERKIM	Data Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH
			3 Jumlah rumah tidak layak huni	Jumlah rumah tidak layak huni	6.710 unit rumah	DINAS PERKIM	Data Jumlah rumah tidak layak huni

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
			4 Jumlah rumah yang tidak dihuni	Jumlah rumah yang tidak dihuni	tidak ada unit rumah	DINAS PERKIM	Tidak ada data rumah yang tidak dihuni surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/69/PKP/II/2022
			5 Rasio rumah dan KK	Jumlah KK Jumlah total unit rumah 79714 56899	1 : 1,4	DINAS PERKIM	- Data Jumlah KK di Wilayah Kab. Soppeng bersumber dari DUKCAPIL - Data Jumlah total unit rumah di Kab. Soppeng
			6 Jumlah rumah pembangunan baru	Jumlah rumah pembangunan baru	244 unit rumah	DINAS PERKIM	Data Jumlah rumah pembangunan baru
		5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU Jumlah total unit rumah di Kabupaten/Kota 244 56899 x 100%	0,43 %	DINAS PERKIM	- Data Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU - Data Jumlah total unit rumah di Kab. Soppeng
			1 Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	46 perumahan	DINAS PERKIM	Data Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		2 Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	244 unit rumah	DINAS PERKIM	Data Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum
		3 Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	244 unit rumah	DINAS PERKIM	Data Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan
		4 Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	244 unit rumah	DINAS PERKIM	Data Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)
		5 Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	244 unit rumah	DINAS PERKIM	Data Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH
		6 Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	244 unit rumah	DINAS PERKIM	Data Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU
		7 Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	tidak ada pengembang	DINAS PERKIM	Tidak ada data pengembang yang tersertifikasi surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/70/PKP/II/2022

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
			8 Jumlah pengembang yang teregistrasi	Jumlah pengembang yang teregistrasi	tidak ada pengembang	DINAS PERKIM	Tidak ada data pengembang yang teregistrasi surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/71/PKP/II/2022
			9 Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	tidak ada pengembang	DINAS PERKIM	Tidak ada data pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan surat pernyataan Dinas PERKIM nomor 045.2/72/PKP/II/2022
5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM dan PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
		1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$ $\frac{12}{12} \times 100\%$	100,00 %	SAT.POL.PP & DAMKAR	Data pengaduan yang ditangani dan Data pengaduan yang masuk
		1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	12 pelanggaran dan pengaduan	SAT.POL.PP & DAMKAR	Data pengaduan yang ditangani dan Data pengaduan yang masuk
		2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	1566 orang	SAT.POL.PP & DAMKAR	SK BUPATI SOPPENG NOMOR 01/II/2019
		3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	1 Perda	SAT.POL.PP & DAMKAR	Perda yang ditegakkan 1)Perda No.6 Tahun 2014

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		4 Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	2 ASN Pol.PP	SAT.POL.PP & DAMKAR	1)SK KEMENKUMHAM-RI Nomor: AHU-39.AH.09.01 Tahun 2019 An. MUHAMMAD ZAINAL, S.IP dan An. ADI MULIADI, SH
		5 Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	kalau ada sebutkan : ADA 1 SOP PELAKSANAAN PENGENDALIAN MASSA 2 SOP PELAKSANAAN OPERASIONAL PATROLI WILAYAH 3 SOP PENYULUHAN PERATURAN DAERAH DANPERATURAN BUPATI 4 SOP PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PELANGGARAN PERDA NON YUSTISI (PEMBINAAN) 5 SOP PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PELANGGARAN PERDA NON YUSTISI (PERNYATAAN) 6 SOP PEMBINAAN FISIK, MENTAL DAN DISIPLIN 7 SOP PEMBINAAN FISIK, MENTAL DAN DISIPLIN (KESEMAPTAAN) 8 SOP PEMBINAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN (PEMBINAAN POS KAMLING) 9 SOP PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN KEGIATAN USAHA YANG MEMUAT SANKSI TIPIRING 9 SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEJADIAN	9 SOP 1 SOP PELAKSANAAN PENGENDALIAN MASSA 2 SOP PELAKSANAAN OPERASIONAL PATROLI WILAYAH 3 SOP PENYULUHAN PERATURAN DAERAH DANPERATURAN BUPATI 4 SOP PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PELANGGARAN PERDA NON YUSTISI (PEMBINAAN) 5 SOP PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PELANGGARAN PERDA NON YUSTISI (PERNYATAAN) 6 SOP PEMBINAAN FISIK, MENTAL DAN DISIPLIN 7 SOP PEMBINAAN FISIK, MENTAL DAN DISIPLIN (KESEMAPTAAN) 8 SOP PEMBINAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN (PEMBINAAN POS KAMLING) 9 SOP PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN KEGIATAN USAHA YANG MEMUAT SANKSI TIPIRING 9 SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEJADIAN	SAT.POL.PP & DAMKAR	Data SOP penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
			2 Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana 53426 53426 x 100%	100,00 %	BPBD	data jumlah penduduk di kawasan rawan bencana
		4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	53426 Jiwa	BPBD	
		1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan 1 1 x 100%	100,00 %	BPBD	
		2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun Jumlah satu dokumen Renkon yang lengkap dan sudah disahkan 0 1 x 100%	0,00 %	BPBD	surat pernyataan nomor 050/20.B/BPBD/2022

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan $\frac{\text{Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah aparatur dan warga negara dikawasan bencana}} \times 100\%$ $\frac{0}{53426} \times 100\%$	0,00 %	BPBD	surat pernyataan nomor 050/20.B/BPBD/2022
		4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan $\frac{\text{Jumlah warga negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah warga negara yang berada dikawasan bencana}} \times 100\%$ $\frac{0}{53426} \times 100\%$	0,00 %	BPBD	surat pernyataan nomor 050/20.B/BPBD/2022
		5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana $\frac{\text{Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops}}{\text{Jumlah warga negara yang berada dikawasan bencana}} \times 100\%$ $\frac{0}{53426} \times 100\%$	0,00 %	BPBD	
		6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan $\frac{\text{Jumlah warga negara yang mendapat peralatan perlindungan}}{\text{Jumlah warga negara yang berada dikawasan bencana}} \times 100\%$ $\frac{0}{1} \times 100\%$	0,00 %	BPBD	

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCOME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
		5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	123456 Jiwa	BPBD / SAT.POL.PP & DAMKAR	
		1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$\frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk penetapan KLB}}{\text{Jumlah seluruh penetapan kasus KLB}} \times 100\%$ $\frac{0}{1} \times 100\%$	0,00 %	BPBD / SAT.POL.PP & DAMKAR	- Surat Pernyataan Sat.Pol.PP & PMK Nomor 57/POL.PP&PMK/II/2022 surat pernyataan BPBD nomor 050/20.A/BPBD/II/2022
		2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	$\frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk penetapan darurat bencana}}{\text{Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana}} \times 100\%$ $\frac{0}{1} \times 100\%$	0,00 %	BPBD / SAT.POL.PP & DAMKAR	- Surat Pernyataan Sat.Pol.PP & PMK Nomor 57/POL.PP&PMK/II/2022 surat pernyataan BPBD nomor 050/20.A/BPBD/II/2022
		3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	$\frac{\text{Jumlah petugas yang aktif dalam menangani darurat bencana}}{\text{Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana}} \times 100\%$ $\frac{57}{95} \times 100\%$	60,00 %	BPBD / SAT.POL.PP & DAMKAR	Surat Keputusan Bupati Soppeng nomor 74/II/2021 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3		4	5	6	7	
			4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	$\frac{\text{Jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana}}{\text{Perkiraan jumlah korban korban seluruh dari bencana}} \times 100\%$ $\frac{0}{1} \times 100\%$	0,00 %	BPBD / SAT.POL.PP & DAMKAR	surat pernyataan BPBD nomor 050/20.A/BPBD/II/2022
		6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$\frac{\text{Jumlah pemadam, pelayanan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di Kabupaten Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + Jumlah layanan pemadaman di Kabupaten Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk atau dibawa pembinaan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah Kebakaran di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$ $\frac{32}{72} \times 100\%$	44,44 %	SAT.POL.PP & DAMKAR	- DATA BUKU INVENTARIS PERMENDAGRI NOMOR 108 LAPORAN SEMESTER 2 - DATA LAPORAN JUMLAH KEBAKARAN SELAMA 1 TAHUN DI WILAYAH KAB. SOPPENG	

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		1 Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	Jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) : 1 SOP ANIMAL RESCUE 2 SOP LAPORAN KEJADIAN	ADA SOP ANIMAL RESCUE SOP LAPORAN KEJADIAN	SAT.POL.PP & DAMKAR	- SOP ANIMAL RESCUE - SOP LAPORAN KEJADIAN - DATA LAPORAN KEJADIAN NON KEBAKARAN
		2 Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	kalau ada sebutkan : 1 Pos Sektor Damkar Lalabata 32 unit 2 Pos Sektor Damkar Ganra 1 unit 3 Pos Sektor Damkar Donri-Donri 9 unit 4 Pos Sektor Damkar Lilirilau 10 unit 5 Pos Sektor Damkar liliriaja 5 unit 6 Pos Sektor Damkar Marioriwawo 7 unit 7 Pos Sektor Damkar Marioriawa 10 unit 8 Pos Sektor Damkar Citta 8 unit	ADA 1 Pos Sektor Damkar Lalabata 32 unit 2 Pos Sektor Damkar Ganra 1 unit 3 Pos Sektor Damkar Donri-Donri 9 unit 4 Pos Sektor Damkar Lilirilau 10 unit 5 Pos Sektor Damkar liliriaja 5 unit 6 Pos Sektor Damkar Marioriwawo 7 unit 7 Pos Sektor Damkar Marioriawa 10 unit 8 Pos Sektor Damkar Citta 8 unit	SAT.POL.PP & DAMKAR	

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		3 Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	kalau ada sebutkan : 1 Surat Tugas Nomor 24/Sat.Pol.Pp dan PMK/I/2021 2 Surat Tugas Nomor 58/Sat.Pol.Pp dan PMK/II/2021 3 Surat Tugas Nomor 100/Sat.Pol.Pp dan PMK/III/2021 4 Surat Tugas Nomor 133/Sat.Pol.Pp dan PMK/IV/2021 5 Surat Tugas Nomor 165/Sat.Pol.Pp dan PMK/V/2021 6 Surat Tugas Nomor 205/Sat.Pol.Pp dan PMK/VI/2021 7 Surat Tugas Nomor 259/Sat.Pol.Pp dan PMK/VII/2021 8 Surat Tugas Nomor 307/Sat.Pol.Pp dan PMK/VIII/2021 9 Surat Tugas Nomor 346/Sat.Pol.Pp dan PMK/IX/2021 10 Surat Tugas Nomor 401/Sat.Pol.Pp dan PMK/X/2021 11 Surat Tugas Nomor 407/Sat.Pol.Pp dan PMK/XI/2021 12 Surat Tugas Nomor 510/Sat.Pol.Pp dan PMK/XII/2021	ADA 1 Surat Tugas Nomor 24/Sat.Pol.Pp dan PMK/I/2021 2 Surat Tugas Nomor 58/Sat.Pol.Pp dan PMK/II/2021 3 Surat Tugas Nomor 100/Sat.Pol.Pp dan PMK/III/2021 4 Surat Tugas Nomor 133/Sat.Pol.Pp dan PMK/IV/2021 5 Surat Tugas Nomor 165/Sat.Pol.Pp dan PMK/V/2021 6 Surat Tugas Nomor 205/Sat.Pol.Pp dan PMK/VI/2021 7 Surat Tugas Nomor 259/Sat.Pol.Pp dan PMK/VII/2021 8 Surat Tugas Nomor 307/Sat.Pol.Pp dan PMK/VIII/2021 9 Surat Tugas Nomor 346/Sat.Pol.Pp dan PMK/IX/2021 10 Surat Tugas Nomor 401/Sat.Pol.Pp dan PMK/X/2021 11 Surat Tugas Nomor 407/Sat.Pol.Pp dan PMK/XI/2021 12 Surat Tugas Nomor 510/Sat.Pol.Pp dan PMK/XII/2021	SAT.POL.PP & DAMKAR	Data Surat Tugas tahun 2021

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		4 Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	sebutkan : 1 POS BALAKAR DESA CITTA 1 unit 2 POS BALAKAR DESA PESSE 1 unit 3 POS BALAKAR DESA KESSING 1 unit 4 POS BALAKAR DESA DESA SERING 1 unit 5 POS BALAKAR DESA BARANG 1 unit 6 POS BALAKAR DESA TELLULIMPOE 1 unit 7 POS BALAKAR DESA PATAMPANUA 1 unit 8 POS BALAKAR DESA LEWORENG 1 unit 9 POS BALAKAR DESA PANINCONG 1 unit 10 POS BALAKAR DESA BULUE 1 unit	ADA 1 POS BALAKAR DESA CITTA 1 unit 2 POS BALAKAR DESA PESSE 1 unit 3 POS BALAKAR DESA KESSING 1 unit 4 POS BALAKAR DESA DESA SERING 1 unit 5 POS BALAKAR DESA BARANG 1 unit 6 POS BALAKAR DESA TELLULIMPOE 1 unit 7 POS BALAKAR DESA PATAMPANUA 1 unit 8 POS BALAKAR DESA LEWORENG 1 unit 9 POS BALAKAR DESA PANINCONG 1 unit 10 POS BALAKAR DESA BULUE 1 unit	SAT.POL.PP & DAMKAR	
		5 Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	sebutkan : 1 Mobil Penyemprot 11 unit 2 Mobil Penyuplay 2 unit 3 Ambulance 1 unit 4 Mini Bus 1 unit 5 Alat Kebakaran 23 unit	5 Jenis 1 Mobil Penyemprot 2 Mobil Penyuplay 3 Ambulance 4 Mini Bus 5 Alat Kebakaran	SAT.POL.PP & DAMKAR	Jumlah sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evaluasi sebanyak 38 Unit Jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evaluasi sebanyak 5 Jenis

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
		6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	1 ASN	SAT.POL.PP & DAMKAR	Sertifikat Kompetensi No. 00163-LSP/-PEMDA/2014 an. UFIANTO
			Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	belum ada relawan dibentuk	SAT.POL.PP & DAMKAR	Belum dilaksanakan karena terkait kebijakan penganggaran Surat Pernyataan Sat.Pol.Pp dan PMK Nomor : 58/POL.PP&PMK/I/2022
			Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran 1 Surat Perintah Nomor 102/SP.POL.PP&PMK/III/2021 2 Surat Perintah Nomor 436/SP.POL.PP&PMK/XI/2021 3 Surat Perintah Nomor 338/SP.POL.PP&PMK/IX/2021	3 Surat Tugas 1 Surat Perintah Nomor 102/SP.POL.PP&PMK/III/2021 2 Surat Perintah Nomor 436/SP.POL.PP&PMK/XI/2021 3 Surat Perintah Nomor 338/SP.POL.PP&PMK/IX/2021	SAT.POL.PP & DAMKAR	Surat Perintah Kesempataan Tahun 2021
		7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Jumlah total waktu tanggap seluruh kejadian kebakaran dalam waktu 1 tahun Jumlah keseluruhan kejadian kebakaran di kab/kota 398 72	5,53 menit/kejadian	SAT.POL.PP & DAMKAR	Data Laporan Kejadian Kebakaran per Tahun 2021

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
6 URUSAN SOSIAL						
		1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis $\frac{250}{503} \times 100\%$	49,70 %	DINAS SOSIAL	- Data Populasi Sosial yang tertangani Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Data Populasi Sosial yang tertangani pada Tabel Tertangani Diluar Panti
		1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki sebutkan : 1 BPJS 2 BPNT	2 Layanan 1 BPJS 2 BPNT	DINAS SOSIAL	Dokumentasi pelayanan
		2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM 1 Penyandang Disabilitas Terlantar 1 2 Anak Terlantar 32 3 Lanjut Usia Terlantar 4 Gepeng	33 Jiwa 1 Penyandang Disabilitas Terlantar 1 2 Anak Terlantar 32 3 Lanjut Usia Terlantar 0 4 Gepeng 0	DINAS SOSIAL	Data Populasi Sosial yang masuk Data Terpadu FM dan OTM
		3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk sebutkan : 1 TAGANA 12 Orng 2 TRC 96 Orng 3 PSC 79 Orng	187 TAGANA 12 orng TRC 96 orng PSC 79 orng	DINAS SOSIAL	SK Tagana No.02KPTS/DINSOS/II/2021 SK TRC No.195/DK/SEK/XI/2021 SK PSC No.74/II/2021

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		4 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau 1 Penyandang Disabilitas Terlantar 153 2 Anak Terlantar 234 3 Lanjut Usia Terlantar 107 4 Gepeng 0	494 Jiwa 1 Penyandang Disabilitas Terlantar 153 2 Anak Terlantar 234 3 Lanjut Usia Terlantar 107 4 Gepeng 0	DINAS SOSIAL	Data Populasi Sosial yang tertangani pada Tabel Data Yang Ditangani
		5 Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	4 Unit	DINAS SOSIAL	Dokumentasi Kendaraan Roda 4 yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki Dinas Sosial Kab. Soppeng
		6 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi 1 Penyandang Disabilitas Terlantar 82 2 Anak Terlantar 203 3 Lanjut Usia Terlantar 0 4 Gepeng 0	285 Jiwa 1 Penyandang Disabilitas Terlantar 82 2 Anak Terlantar 203 3 Lanjut Usia Terlantar 0 4 Gepeng 0	DINAS SOSIAL	Data Populasi Sosial yang tertangani pada Tabel Data Yang Menerima Paket Makanan
		7 Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	tidak ada	DINAS SOSIAL	Belum ada Rumah singgah Di Kabupaten soppeng untuk PMKS, Surat Pernyataan Dinas Sosial No. 804/96/Dinsos/II/2022

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		8 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang 1 Penyandang Disabilitas Terlantar 2 Anak Terlantar 3 Lanjut Usia Terlantar 4 Gepeng	0 Jiwa 1 Penyandang Disabilitas Terlantar 0 2 Anak Terlantar 0 3 Lanjut Usia Terlantar 0 4 Gepeng 0	DINAS SOSIAL	Surat Pernyataan No.804/248/Dinsos/II/2021
		9 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu 1 Penyandang Disabilitas Terlantar 26 2 Anak Terlantar 0 3 Lanjut Usia Terlantar 0 4 Gepeng 0	26 Jiwa 1 Penyandang Disabilitas Terlantar 26 2 Anak Terlantar 0 3 Lanjut Usia Terlantar 0 4 Gepeng 0	DINAS SOSIAL	Data Populasi Sosial yang tertangani pada Tabel Data Yang Menerima Alat Bantu
		10 Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	tidak ada	DINAS SOSIAL	Belum ada Rumah Singgah di Kabupaten Soppeng Surat Pernyataan Dinsos No.804/96/Dinsos/II/2021
		11 Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	sebutkan :	tidak ada	DINAS SOSIAL	Belum ada Rumah Singgah di Kabupaten Soppeng Surat Pernyataan Dinsos No.804/96/Dinsos/II/2021

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		12 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan 1 Penyandang Disabilitas Terlantar 20 2 Anak Terlantar 3 Lanjut Usia Terlantar 4 4 Gepeng	24 Jiwa 1 Penyandang Disabilitas 20 2 Anak Terlantar 0 3 Lanjut Usia Terlantar 4 4 Gepeng 0	DINAS SOSIAL	Daftar Penerima Bantuan Alat Bantu Disabilitas dan Daftar Penerima Alat Bantu Lansia
		13 Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	tidak ada	DINAS SOSIAL	Belum ada Rumah Singgah di Kabupaten Soppeng Surat Pernyataan Dinsos No.804/96/Dinsos/II/2021
		14 Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan 1 TKSK 8	8 orang 1 TKSK 8	DINAS SOSIAL	8) Keputusan Kepala Dinas sosial No. 22/KPTS/Dinsos/I/2021
		15 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial 1 Penyandang Disabilitas Terlantar 26 2 Anak Terlantar 20 3 Lanjut Usia Terlantar 107 4 Gepeng 0	153 Jiwa 1 Penyandang Disabilitas Terlantar 26 2 Anak Terlantar 20 3 Lanjut Usia Terlantar 107 4 Gepeng 0	DINAS SOSIAL	Data Populasi Sosial yang tertangani pada Tabel Data Yang Menerima Bimbingan Fisik dan Mental

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		16 Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	sebutkan : bimbingan sosial a.n RUSDAYA	1 bimbingan sosial a.n RUSDAYA	DINAS SOSIAL	dokumentasi bimbingan sosial
		17 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan 1 Penyandang Disabilitas Terlantar 0 2 Anak Terlantar 0 3 Lanjut Usia Terlantar 1 4 Gepeng 0	1 Jiwa 1 Penyandang Disabilitas Terlantar 0 2 Anak Terlantar 0 3 Lanjut Usia Terlantar 1 4 Gepeng 0	DINAS SOSIAL	Kartu Keluarga an. RUSDAYA
		18 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar 1 Penyandang Disabilitas Terlantar 2 Anak Terlantar 3 Lanjut Usia Terlantar 1 4 Gepeng	1 Jiwa 1 Penyandang Disabilitas Terlantar 0 2 Anak Terlantar 0 3 Lanjut Usia Terlantar 1 4 Gepeng 0	DINAS SOSIAL	dokumentasi pemeriksaan kesehatan a.n RUSDAYA
		19 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga 1 Penyandang Disabilitas Terlantar 0 2 Anak Terlantar 22 3 Lanjut Usia Terlantar 4 4 Gepeng 0	26 Jiwa 1 Penyandang Disabilitas Terlantar 0 2 Anak Terlantar 22 3 Lanjut Usia Terlantar 4 4 Gepeng 0	DINAS SOSIAL	Data Populasi Sosial yang tertangani pada Tabel Penelusuran Keluarga

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS		CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4		5		6	7
			20 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga 1 Penyandang Disabilitas Terlantar 2 Anak Terlantar 3 Lanjut Usia Terlantar 4 Gepeng	1	1 Jiwa 1 Penyandang Disabilitas 2 Anak Terlantar 3 Lanjut Usia Terlantar 4 Gepeng	0 0 1 0	DINAS SOSIAL	Reunifikasi a.n MIMA
			21 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk 1 Penyandang Disabilitas Terlantar 2 Anak Terlantar 3 Lanjut Usia Terlantar 4 Gepeng	2 2	4 Jiwa 1 Penyandang Disabilitas Terlantar 2 Anak Terlantar 3 Lanjut Usia Terlantar 4 Gepeng	0 2 2 0	DINAS SOSIAL	Data Populasi Sosial yang tertangani pada Tabel Yang Dirujuk
		2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota $\frac{192}{192} \times 100\%$		100,00 %		DINAS SOSIAL	- Daftar Nama Penerima Bantuan Bencana Alam dan Sosial Tahun 2021 - Jumlah Data Bencana Alam dan Sosial Tahun 2021

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		1 Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan 1 Bencana Alam 162 2 Bencana Kebakaran 30	192 Jiwa 1 Bencana Alam 162 2 Bencana Kebakaran 30	DINAS SOSIAL	- Daftar Nama Penerima Bantuan Bencana Alam Tahun 2021 - Daftar Nama Penerima Bantuan Bencana Sosial Tahun 2021
		2 Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang 1 Bencana Alam 162 2 Bencana Kebakaran 30	1 Bencana Alam 162 2 Bencana Kebakaran 30	DINAS SOSIAL	- Daftar Nama Penerima Bantuan Bencana Alam Tahun 2021 - Daftar Nama Penerima Bantuan Bencana Sosial Tahun 2021
		3 Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Tidak ada Jiwa	DINAS SOSIAL	Surat pernyataan No.804/252/DINSOS/II/2022
		4 Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan 1 Bencana Alam 2 Bencana Kebakaran	1 Bencana Alam 0 2 Bencana Kebakaran 0	DINAS SOSIAL	Surat pernyataan No.804/252/DINSOS/II/2022
		5 Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial 1 Bencana Alam 2 Bencana Kebakaran	1 Bencana Alam 0 2 Bencana Kebakaran 0	DINAS SOSIAL	Surat pernyataan No.804/242/DINSOS/II/2022
		6 Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia 1 Tskk 8 orang 2 Pkh 35 orang 4 Pendamping Anak 1 orang 5 Pendamping Disabilitas 1 orang 6 Pendamping Bpnt 1 orang 7 TAGANA 17 orang	63 Orang 1 Tskk 8 org 2 Pkh 35 org 4 Pendamping Anak 1 org 5 Pendamping Disabilitas 1 org 6 Pendamping Bpnt 1 org 7 TAGANA 17 org	DINAS SOSIAL	1)Keputusan Dirjen Rehabilitasi Sosial No. 06/4/HK.01/1/2021, 2)Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin 3)Keputusan Direktur Jaminan Sosial 4) Keputusan Direktur Jaminan Sosial 5) Keputusan Direktur Jaminan Sosial 6) Keputusan Direktur Jaminan Sosial

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR						
7 URUSAN KETENAGA KERJAAN						
		1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan Jumlah pencaker (pencari kerja) yang terdaftar 447 729 x 100% 61,32 % <td>DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI</td> <td>Data penempatan pencari kerja tahun 2021</td>	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	Data penempatan pencari kerja tahun 2021	
		1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota. Mengidentifikasi/membandingkan kesesuaian dokumen RTK yang telah tersusun dengan peraturan perundangan yang berlaku tidak ada RTK yang disusun <td>DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI</td> <td>Surat Pernyataan Nomor 50/MPTSP-NAKERTRANS/II/2022</td>	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	Surat Pernyataan Nomor 50/MPTSP-NAKERTRANS/II/2022	
		2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja (Realisasi indikator - target indikator) Realisasi 0 1 x 100% 0,00 % <td>DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI</td> <td>Surat Pernyataan Nomor 51/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2022</td>	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	Surat Pernyataan Nomor 51/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2022	
		3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota Jumlah seluruh perusahaan yang melaporkan penyusunan RTK pada tahun pelaporan tidak ada <td>DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI</td> <td>Surat Pernyataan Nomor 74/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2022</td>	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	Surat Pernyataan Nomor 74/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2022	
		2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Junlah tenaga Kerja yang memiliki sertifikat Jumlah Tenaga Keseluruhan 5 1069 x 100% 0,47 % <td>DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI</td> <td>Sertifikat "on The Job Training Competency of Barista"</td>	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	Sertifikat "on The Job Training Competency of Barista"	

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3		4	5	6	7	
			1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	$\frac{\text{Jumlah penerapan PBK kualifikasi KKNi atau okupasi pada tahun 2021}}{\text{keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun 2021}} \times 100\%$	100,00 %	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	- Dokumentasi Pelatihan Barista Tahun 2021
			2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah Instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun 2021}}{\text{jumlah instruktur keseluruhan pada tahun 2021}} \times 100\%$	50,00 %	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	Sertifikat Kompetensi No 56303512300004082017
			3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	$\frac{\text{Jumlah Instruktur pada tahun 2021}}{\text{Jumlah peserta pelatihan pada tahun 2021}} \times 100\%$	40,00 %	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	- Sertifikat Kompetensi No 56303512300004082017 - Daftar Pelatihan dan Magang Kompetensi Barista

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		4 Persentase LPK yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun 2021}}{\text{jumlah seluruh LPK pada tahun 2021}} \times 100\%$	28,57 %	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	- Sertifikat Akreditasi LPK no 79/L.A-LPK/XII/2020, - Sertifikat Akreditasi no 110/L.A-LPK/XII/2020
		5 Persentase LPK yang memiliki perizinan	$\frac{\text{Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun 2020}}{\text{jumlah LPK yang terdata pada tahun 2020}} \times 100\%$	100,00 %	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	1) LPK Aqilah Tekno Edukasi Nomor 12/DPMTSP_NAKERTRANS/II/2020 2) LPK Lembaga Pelatihan Kerja STEKOM Nomor 28/NAKERTRANS/IX/2017 3) LPK BLK Komunitas Pondok Pesantren Perguruan Ganra Nomor 14/PTSP-NAKERTRANS/II/2020 4) LPK Wiliana, Calio Kel.Ujung Kec.Lilirilau Kab. Soppeng Nomor 2/LPK/PMPTSP-NAKERTRANS/V/2021 5) LPK Workshop Las BLK Komunitas Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Sering Kab. Soppeng Nomor 13/DPMTSP-NAKERTRANS/II/2020 6) LPK Komunitas Pondok Pesantren Darussalam Berru Kab. Soppeng Nomor 1/LPK/DPMTSP-NAKERTRANS/V/2021 7) LPK YP.AN-NAILAH Nomor 27/NAKERTRANS/IX/2017

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		6 Jumlah penganggur yang dilatih	Jumlah penganggur yang dilatih	5 Orang	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	Daftar Pelatihan dan Magang Kompetensi Barista
		7 Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	$\frac{\text{Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun 2021}}{\text{jumlah orang yang dilatih pada tahun 2021}} \times 100\%$ $\frac{5}{5} \times 100\%$	100,00 %	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	1)Sertifikat peserta pelatihan Barista 2) Daftar hadir pelatihan barista 3) Dokumentasi pelatihan barista
		8 Persentase penyerapan lulusan	$\frac{\text{jumlah lulusan yang bekerja pada tahun 2021}}{\text{jumlah lulusan pada tahun 2021}} \times 100\%$ $\frac{5}{5} \times 100\%$	100,00 %	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	Sertifikat peserta pelatihan Barista
		9 Lulusan bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun 2021}}{\text{jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun 2021}} \times 100\%$ $\frac{0}{5} \times 100\%$	0,00 %	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	Surat Pernyataan Nomor 52/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
		10 Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	$\frac{\sum \text{CPMI yang dilatih}}{\sum \text{CPMI terdaftar}} \times 100\%$ $\frac{0}{1} \times 100\%$	0,00 %	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	Surat Pernyataan Nomor 53/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
			11 Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	tidak ada	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	Surat Pernyataan Nomor 54/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
		3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	$\frac{\text{PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} \times 100\%$ $\frac{6.150.000}{1061} \times 100\%$	579.642 %	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	Tingkat Produktivitas tenaga kerja
		1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun 2021}}{\text{jumlah perusahaan pada tahun 2021}} \times 100\%$ $\frac{0}{502} \times 100\%$	0,00 %	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	Surat Pernyataan Nomor 55/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
		2	Data tingkat produktivitas total	Pertumbuhan ekonomi - (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja) Pertumbuhan ekonomi 0,00 Pertumbuhan modal 0,00 Pertumbuhan tenaga kerja 0,00	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	Surat Pernyataan Nomor 66/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
		4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{jumlah perusahaan}} \times 100\%$ $\frac{20}{502} \times 100\%$	3,98 %	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	Data jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		1 Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun 2021}}{\text{Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih}} \times 100\%$ $\frac{0}{1} \times 100\%$	0,00 %	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	Surat Pernyataan Nomor 56/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
		2 Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	$\frac{\text{jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun 2021}}{\text{jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB}} \times 100\%$ $\frac{8}{8} \times 100\%$	100,00 %	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	Data jumlah perusahaan yang memiliki perjanjian kerja bersama (PKB)
		3. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	tidak ada	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	Surat Pernyataan Nomor 57/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
		4 Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah}}{\text{jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB)}} \times 100\%$ $\frac{7}{7} \times 100\%$	100 %	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	Data jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		5 Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor}} \times 100\%$ $\frac{120}{502} \times 100\%$	23,90 %	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	data jumlah perusahaan yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan
		6 Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang berselisih}}{\text{jumlah perusahaan pada tahun 2021}} \times 100\%$ $\frac{1}{502} \times 100\%$	0,20 %	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	Surat Perjanjian Bersama
		7 Jumlah mogok kerja	Jumlah mogok kerja	TIDAK ADA	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	Surat Pernyataan Nomor 58/DPMPSTP-NAKERTRANS/II/2002
		8 Jumlah penutupan perusahaan	Jumlah penutupan perusahaan	TIDAK ADA	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	Surat Pernyataan Nomor 59/DPMPSTP-NAKERTRANS/II/2002
		9 Jumlah perselisihan kepentingan	Jumlah perselisihan kepentingan	TIDAK ADA	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	Surat Pernyataan Nomor 60/DPMPSTP-NAKERTRANS/II/2002

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		10 Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	TIDAK ADA	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	Surat Pernyataan Nomor 61/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
		11 Jumlah perselisihan PHK	Jumlah perselisihan PHK	TIDAK ADA	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA	Surat Pernyataan Nomor 62/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
		12 Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	33	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU	Data jumlah pekerja ter-PHK melalui aplikasi SISNAKER tahun 2021
		13 Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	1	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	Surat Perjanjian Bersama
		14 Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	ada/tidak ada TIDAK ADA	TIDAK ADA	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	Surat Pernyataan Nomor 63/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3		4	5	6	7	
			15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh mediator Hubungan Industria	$\frac{\text{Jumlah perjanjian bersama}}{\text{Jumlah kasus perselisihan}} \times 100\%$ $\frac{1}{1} \times 100\%$	100,00 %	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	Data Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perjanjian Bersama
		5	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencaker yang terdaftar}} \times 100\%$ $\frac{447}{729} \times 100\%$	61,32 %	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	Data jumlah pencari kerja yang ditempatkan tahun 2021	
		1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	tidak ada	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	Surat Pernyataan Nomor 64/DPMPSTP-NAKERTRANS/II/2002	
		2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	729	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	Data pencari kerja tahun 2021	
		3	Jumlah Bursa Kerja Khusus(BKK) wilayah kab/kota	Jumlah Bursa Kerja Khusus(BKK) wilayah kab/kota	1 BKK	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	Data jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK)	

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		4 Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	tidak ada	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	Surat Pernyataan Nomor 65/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
		5 Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	1 ASN	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	Surat Keputusan Bupati Nomor : 565/XII/2021 tentang pemberhentian pejabat administrasi dan pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui penyetaraan jabatan lingkup pemerintah kabupaten soppeng
		6 Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	tidak ada	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	Surat Pernyataan Nomor 67/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
			7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	tidak ada	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Surat Pernyataan Nomor 68/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
			8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	tidak ada	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Surat Pernyataan Nomor 69/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
			9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja	$\frac{\sum \text{CPM/CTKI yang mendapatkan sosialisasi}}{\sum \text{CPMI/CTKI}} \times 100\%$	0 %	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & Surat Pernyataan Nomor 70/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		10 Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	9	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	data Jumlah CPMI tahun 2021
		11 Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitas kepulangan	$\frac{\sum \text{fasilitasi PMI yang dipulangkan}}{\sum \text{PMI yang pulang}} \times 100\%$	100,00 %	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	Data jumlah Pekerja Migran indonesia yang mendapatkan fasilitas kepulangan
		12 Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	$\frac{\sum \text{PMI/TKI yang mendapatkan penddidkan dan pelatihan kerja}}{\sum \text{PMI / TKI}} \times 100\%$	0,00 %	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	Surat Pernyataan Nomor 71/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
		13 Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	$\frac{\sum \text{PMI/TKI yang purna dan keluarganya yang diberdayakan}}{\sum \text{PMI / TKI purna dan keluarganya}} \times 100\%$	0,00 %	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	Surat Pernyataan Nomor 72/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIA KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
			14	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	$\frac{\sum \text{LTSA yang dibentuk}}{\sum \text{jumlah daerah kantong PMI / TKI}} \times 100\%$ $\frac{0}{1} \times 100\%$	0,00 %	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI Surat Pernyataan Nomor 73/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2002
8 URUSAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
		1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja langsung APBD}}{\text{Jumlah seluruh belanja langsung di APBD}} \times 100\%$ $\frac{\text{Rp } 18.426.860.137}{\text{Rp } 1.179.969.834.205} \times 100\%$	1,56 %	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	sumber data pembilang berasal dari BPKPD
		1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	34 SKPD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN	Data Jumlah Lembaga tingkat daerah kabupaten yang terlatih PUG
		2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	57 Kegiatan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	Data Jumlah kegiatan PUG pada perangkat daerah

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
		2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah anak (penduduk kurang 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten/Kota yang didampingi}}{\text{Jumlah anak (penduduk kurang 18 tahun)}} \times 100$ $\frac{15}{58390} \times 100$	0,03 %	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	sumber data pembilang berasal dari DINAS DUKCAPIL
		1	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	6 Media Massa	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	media massa yang mengadakan kerjasama dengan PEMDA Tahun 2021
		2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	45 Lembaga	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	Data Jumlah Lembaga Layanan Anak yang telah memiliki SPM tahun 2021
		3	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani}}{\text{Jumlah korban kekerasan anak tingkat Kabupaten/Kota}} \times 100\%$ $\frac{15}{15} \times 100\%$	100,00 %	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	Data Jumlah Korban Kekerasan anak Tahun 2021

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
			4 Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	3 lembaga	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	Data Jumlah Lembaga Layanan Anak yang medapatkan pelatihan
			5 Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	Tidak Ada lembaga	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	Surat Pernyataan Dinas P3APPKB
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100000$ $\frac{10}{123191} \times 100000$	8,12 %	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	Data jumlah perempuan yang mengalami kekerasan
			1 Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	18 ormas	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	Data Ormas perempuan yang sudah mendapatkan pelatihan
			2 Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	Tidak ada	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,	Surat Pernyataan Dinas P3APPKB

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Tidak ada	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,	Surat Pernyataan Dinas P3APPKB
		4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	Tidak ada	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	Surat Pernyataan Dinas P3APPKB
		5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1 Program	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	Kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan tahun 2021
		6	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	7 lembaga	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	Data Jumlah Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tahun 2021
		7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100,00 %	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	Data Jumlah Korban kekerasan perempuan yang terlayani tahun 2021
			$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan}}{\text{Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan}} \times 100\%$ $\frac{10}{10} \times 100\%$			

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	
9 URUSAN PANGAN							
		1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan Jumlah kebutuhan pangan 25340 98150 x 100%	25,82 %	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	Persentase ketersediaan pangan tahun 2021
		1	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	kalau ada sebutkan : ADA GUDANG CADANGAN PANGAN	ADA GUDANG CADANGAN PANGAN	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	Dokumentasi Gudang Pangan
		2	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	kalau ada sebutkan : ADA Data penyaluran Bahan Pangan (Beras dan Telur) Ke TTIC/TTI Tahun 2021	ADA Data penyaluran Bahan Pangan (Beras dan Telur) Ke TTIC/TTI Tahun 2021	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	Data penyaluran Bahan Pangan (Beras dan Telur) Ke TTIC/TTI Tahun 2021

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		3 Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	kalau ada sebutkan : TIDAK ADA	TIDAK ADA	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	Belum tersedianyan regulasi untuk penentuan harga minimum pangan okal di kabupaten Soppeng Surat Pernyataan Dinas TPHPKP
		4 Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan komsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	kalau ada sebutkan : ADA Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Perkebunan dan Ketahanan Kabupaten Soppeng Nomor 800/2505/DTPHPKP/XI/2021 tentang Penetapan Calon Penerima/Calon Lokasi Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Kabupaten Soppeng Tahun 2021	ADA Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Perkebunan dan Ketahanan Kabupaten Soppeng Nomor 800/2505/DTPHPKP/XI/2021 tentang Penetapan Calon Penerima/Calon Lokasi Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Kabupaten Soppeng Tahun 2021	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Perkebunan dan Ketahanan Kabupaten Soppeng Nomor 800/2505/DTPHPKP/XI/2021
		5 Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	kalau ada sebutkan : PETA KETAHAN DAN KERENTANAN PANGAN	ADA PETA KETAHAN DAN KERENTANAN PANGAN	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	Peta Ketahanan dan Kerentangan Pangan

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		6 Tertanganinya kerawanan pangan	kalau ada sebutkan : ADA Data Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Soppeng Tahun 2021	ADA Data Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Soppeng Tahun 2021	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	Data Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Soppeng Tahun 2021
		7 Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	kalau ada sebutkan : ADA 1 Penyerahan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Korban Kebakaran Di Kel.Lemba Kec. Lalabata 2 Penyerahan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Korban Kebakaran Di Desa Kampiri Kec. Citta 3 Penyerahan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Korban Banjir Di Kel.Limpomajang Kec. Mariotiawa 4 Penyerahan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Korban Kebakaran Di Desa Bulue Kec. Marioriawa 5 Penyerahan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Korban Kebakaran Di Desa Bulue Kec. Marioriawa	ADA 1 Penyerahan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Korban Kebakaran Di Kel.Lemba Kec. Lalabata 2 Penyerahan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Korban Kebakaran Di Desa Kampiri Kec. Citta 3 Penyerahan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Korban Banjir Di Kel.Limpomajang Kec. Mariotiawa 4 Penyerahan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Korban Kebakaran Di Desa Bulue Kec. Marioriawa 5 Penyerahan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Korban Kebakaran Di Desa Bulue Kec. Marioriawa	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	Dokumentasi Penyaluran Cadangan Pangan pada daerah rentang rawan pangan

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		8 Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	kalau ada sebutkan : ADA 1 .Nomor: 5633/FOOD/X/21 2 .Nomor: 5634/FOOD/X/21 3 .Nomor: 5635/FOOD/X/21 4 .Nomor: 5635/FOOD/X/21 5 .Nomor: 5636/FOOD/X/21 6 .Nomor: 5637/FOOD/X/21 7 .Nomor: 5855/FOOD/X/21 8 .Nomor: 5855/FOOD/X/21 9 .Nomor: 5857/FOOD/X/21	ADA 1 .Nomor: 5633/FOOD/X/21 2 .Nomor: 5634/FOOD/X/21 3 .Nomor: 5635/FOOD/X/21 4 .Nomor: 5635/FOOD/X/21 5 .Nomor: 5636/FOOD/X/21 6 .Nomor: 5637/FOOD/X/21 7 .Nomor: 5855/FOOD/X/21 8 .Nomor: 5855/FOOD/X/21 9 .Nomor: 5857/FOOD/X/21	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	Data hasil pengawasan keamanan pangan segar
URUSAN PERTANAHAN						
		1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan $\frac{\text{Luas tanah untuk peruntukan ijin lokasi (ha)}}{\text{Seluruh luas tanah yang diberikan ijin (ha)}} \times 100\%$ $\frac{120699}{120699} \times 100\%$	100,00 %	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	- Data LuasTanah Izin Lokasi Tahun 2021 - Data Laporan Penerbitan Izin Lokasi
		1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota $\frac{\text{Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)}}{\text{Jumlah permohonan izin lokasi dalam satu tahun}} \times 100\%$ $\frac{4}{4} \times 100\%$	100,00 %	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	- Data Jumlah Izin Lokasi yang diterbitkan tahun 2021 - Data Laporan Penerbitan Izin Lokasi

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		2 SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	$\frac{\text{Jumlah penerbitan SK penetapan tanah Obyek Lanreform yang bersumber dari kelebihan tanah maksimum Absentee}}{\text{Jumlah pemohon yang diusulkan panitia pertimbangan Lanreform}} \times 100\%$	100,00 %	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	- Data Pemohon yang diusulkan panitia pertimbangan landreform tahun 2021 - Surat BPN Kabupaten Soppeng No. HP.02.01/252-73.12/I/2022 Perihal Permintaan Data
		3 SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	$\frac{\text{Jumlah luas tanah yang dbayarkan ganti rugi pada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee}}{\text{Jumlah luas tanah yang ditetapkan sebagai Obyek Landreform yang bersal dari tanah kelebihan maksimum Absentee}} \times 100\%$	100,00 %	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	- Data penetapan besarnya ganti rugi tanah kelebihan maksimum/absentee tahun 2021 - Surat BPN Kabupaten Soppeng No. HP.02.01/252-73.12/I/2022 Perihal Permintaan Data
		4 Dokumen Izin membuka tanah	$\frac{\text{Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui + Jumlah izin membuka tanah yang ditolak}}{\text{Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam satu tahun}} \times 100\%$	100,00 %	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	- Data Jumlah Izin Lokasi yang diterbitkan tahun 2021 - Data Laporan Penerbitan Izin Lokasi
		5 Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik}}{\text{Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam satu tahun}} \times 100\%$	100,00 %	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Data penetapan site lokasi pembangunan fisik

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
		2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	$\frac{\text{Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}}{\text{Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}} \times 100\%$ $\frac{6,75}{6,75} \times 100\%$	100,00 %	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	67471 m di konversi menjadi Ha menjadi 6.75 ha Data daftar prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman
		3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya di atas izin lokasi}}{\text{Luas izin lokasi yang diterbitkan}} \times 100\%$ $\frac{120699}{120699} \times 100\%$	100,00 %	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Data Luas Tanah Izin Lokasi Tahun 2021 dan Data Laporan Penerbitan Izin Lokasi
		4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	$\frac{\text{Jumlah penerima Tanah Obyek Landreform dengan luas yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha}}{\text{Jumlah penerima Tanah Obyek Landreform}} \times 100\%$ $\frac{1367}{1367} \times 100\%$	100,00 %	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	- Data Tersedianya Tanah Objek Landreform (TOL) Tahun 2021 - Surat BPN Kabupaten Soppeng No. HP.02.01/252-73.12/II/2022 Perihal Permintaan Data
		5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	$\frac{\text{Luas tanah yang dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah}}{\text{Luas izin membuka tanah yang diterbitkan}} \times 100\%$ $\frac{9,01}{9,01} \times 100\%$	100,00 %	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Data tersedianya tanah untuk masyarakat tahun 2021

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
		6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan}} \times 100\%$ $\frac{3}{6} \times 100\%$	50,00 %	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Surat Pernyataan Dinas PERKIM Nomor 045.2/73/PKP/II/2022 Junlah Sengketa Tanah yang ditangani pada tahun 2021 sebanyak 3 Kasus dan Data Hasil Identifikasi Aset Bermasalah Pemerintah Kabupaten Soppeng
11 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP							
		1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	IKLH Kab/Kota = (0.376xIKA) + (0.405xIKD) + (0.219xITH) IKA = Indeks Kualitas Air x 0.376 = 22,5600 IKA IKU= Indeks Kualitas Udara x 0.405 = 38,0174 IKU ITH = Indeks Tutupan Hutan x 0.219 = 8,9462 ITH	69,52 IKLH	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Berdasarkan Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kwalitas Lingkungan Hidup
		1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks Kualitas Air (IKA) 60,00 b. Indeks Kualitas Udara (IKU) 93,87 c. Indeks Tutupan Hutan (ITH) 40,85	60,00 IKA 93,87 IKU 40,85 ITH	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Berdasarkan Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kwalitas Lingkungan Hidup
		2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	$\frac{\text{Total volume sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total volume timbunan sampah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$ $\frac{25703,12}{34707,12} \times 100\%$	74,06 %	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Neraca Pengelolaan Sampah Tahun 2021 Kabupaten Soppeng

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
			1 Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbunan sampah 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbunan sampah 3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing-masing lingkungan	64,44 % 22364,12 overcapacity Tidak ada	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	- Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Tahun 2021 - Data Ruas Jalan/Pengangkutan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng Tahun 2021 - Data Jumlah Sampah yang masukdi TPA -Data Jumlah pembatasan sampah per hari di kabupaten Soppeng
		3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota $\frac{\text{Usaha atau kegiatan dilakukan pemeriksaan}}{8} \times 100\%$	11,43 %	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	- Data Jumlah Penanggung Jawab Usaha dan atau Kegiatan yang melanggar - Data Rekapitulasi Pengawasan Usaha Tahun 2021 - Berita Acara Pengawasan Lingkungan Hidup
		1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota $\frac{\text{Jumlah usulan permohonan yang terintegrasi}}{14} \times 100\%$	100,00 %	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Data Izin Lingkungan Hidup Tahun 2020

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		2 Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah PPLHD yang ada}}{\text{Jumlah kegiatan dan atau izin usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota}} \times 100\%$ $\frac{2}{14} \times 100\%$	14,29 %	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	- Data Pejabat Pengawas LH di Daerah (PPLHD) di Kabupaten Soppeng terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan Tahun 2021 - SK Bupati Soppeng Nomor 142/II/2021 tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng - Data Izin Lingkungan Tahun 2020 s/d 2021
		3 Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah MHA yang di akui}}{\text{Jumlah usulan MHA}} \times 100\%$ $\frac{0}{1} \times 100\%$	0,00 %	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Belum ada Kelembagaan Masyarakat Hukum adat (MHA) di Kabupaten Soppeng, Surat Pernyataan Dinas Lingkungan Hidup Nomor 49.a/DLH/2022
		4 Terasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	$\frac{\text{Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan}}{\text{Jumlah MHA yang ada}} \times 100\%$ $\frac{0}{1} \times 100\%$	0,00 %	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Belum ada Kelembagaan Masyarakat Hukum adat (MHA) di Kabupaten Soppeng, Surat Pernyataan Dinas Lingkungan Hidup Nomor 49.a/DLH/2022
		5 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	$\frac{\text{Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberikan diklat/rencana}}{\text{Target Lembaga Kemasyarakatan yang akan diberikan diklat}} \times 100\%$ $\frac{0}{1} \times 100\%$	0,00 %	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Belum ada Kelembagaan Masyarakat Hukum adat (MHA) di Kabupaten Soppeng, Surat Pernyataan Dinas Lingkungan Hidup Nomor 49.a/DLH/2022

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
			6	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani Pengaduan masyarakat yang tangani Total jumlah pengaduan masyarakat yang terintegrasi $\frac{0}{1} \times 100\%$	0,00 %	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Tidak adanya pengaduan dari masyarakat tentang pelanggaran lingkungan hidup, Surat Pernyataan Dinas Lingkungan Hidup Nomor 44.a/DLH/I/2022
12 URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
		1	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah penduduk yang berumur 17 tahun keatas yang memiliki KTP Jumlah penduduk yang berumur 17 tahun keatas di Kab/Kota $\frac{182524}{183282} \times 100\%$	99,59 %	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Data penduduk yang berumur 17 tahun ke atas yang memiliki E-KTP sebanyak 182.524 orang, degan uraian sebagai berikut: 1)LK = 86.028 orang 2)PR = 96.496 orang
			1	Penerbitan akta perkawinan Jumlah Akte perkawinan yang diterbitkan Peristiwa perkawinan yang dilaporkan $\frac{73580}{111706} \times 100\%$	65,87 %	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Data penduduk yang mempunyai akta perkawinan sebanyak 73.580 orang dengan uraian sebagai berikut: 1)LK = 36.228 orang 2)PR = 37.352 orang
			2	Penerbitan akta perceraian Jumlah penerbitan akta perceraian Peristiwa perceraian yang dilaporkan $\frac{2600}{111706} \times 100\%$	2,33 %	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Data penduduk yang mempunyai akta perceraian sebanyak 2.600 orang dengan uraian sebagai berikut: 1)LK = 1.076 orang 2)PR = 1.524 orang

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
			3 Penerbitan akta kematian	Jumlah Akta kematian diterbitkan Peristiwa kematian yang dilaporkan 2600 5570 x 100%	46,68 %	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Data kepemilikan akta kematian sebanyak 10.862 orang dengan uraian sebagai berikut: 1)LK = 5.854 orang 2)PR = 5.008 orang
			4 Penyajian data kependudukan	Jumlah penyajian data penduduk di Kab/Kota dalam satu tahun Jumlah penyajian data penduduk di Kab/Kota dalam dua tahun 2 2 x 100%	100,00 %	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	dokumentasi Buku Penyajian data Kabupaten Soppeng DKB.Idan DKB.II
		2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) tahun yang sudah memiliki KIA Jumlah anak usia 0-17 tahun 35076 54593 x 100%	64,25 %	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Data kepemilikan KIA anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) tahun sebanyak 35.076 orang dengan uraian sebagai berikut: 1)LK = 35.076 orang 2)PR = 54.593 orang
		3	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta kelahiran Jumlah anak usia 0-18 tahun 62219 62504 x 100%	99,54 %	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Data kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun sebanyak62.219 orang dengan uraian sebagai berikut: 1)LK = 32.097 orang 2)PR = 30.122 orang

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
		4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	$\frac{\text{Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$ $\frac{8}{34} \times 100\%$	23,53 %	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Data jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kinerja sebanyak 8 OPD, yaitu 1)DP3APPKB, 2)DIKBUD, 3)DINKES, 4)BAPPELITBANGDA, 5)BPKPD, 6)DISKOMINFO, 7)DINSOS, 8)DPMD
13 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
		1	Persentase pengentasan desa tertinggal	$\frac{\text{Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang pertahun berdasarkan indeks desa membangun}}{\text{Jumlah desa tertinggal per awal tahun (per awal tahun-N)}} \times 100\%$ $\frac{1}{5} \times 100\%$	20,00 %	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA	
		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	22 desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA	
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan	47 desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA	
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	47 LKD/LAD	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA	- Data Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan - Undangan Kegiatan - Dokumentasi Kegiatan

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	3 LKD/LAD	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA	- Data Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan - Undangan Kegiatan Dokumentasi Kegiatan
		2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	$\frac{\text{jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri berdasarkan indeks desa membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa berkembang (per awal tahun-n)}} \times 100\%$	3,85 %	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA	
		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	0 desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA	
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	47 desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA	
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	47 LKD/LAD	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA	- Data Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan - Undangan Kegiatan Dokumentasi Kegiatan

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
			4 Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	3 LKD/LAD	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA	- Data Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan - Undangan Kegiatan Dokumentasi Kegiatan
14 URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
		1	TFR (Angka Kelahiran Total)	$TFR = \frac{\text{Angka Kelahiran Total}}{\text{Total}}$	2,16 %	DINAS PEMEBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	data SUSENAS 2019
			1 Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	kalau ada sebutkan : TIDAK ADA	TIDAK ADA	DINAS PEMEBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	surat pernyataan Dinas P3APKB nomor 212/DP3APKB/I/2022
			2 Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	1026 jiwa	DINAS PEMEBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	Daftar laporan perincian usia NTCR

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) $ASFR_i = \frac{b_i}{P_i} \times k$ angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun	16,1 %	DINAS PEMEBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	Data Masih berpedoman pada SENSUNAS 2019
		4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE) $\frac{\text{Jumlah masyarakat terpapar isi program KKBPK (advokasi KIE)}}{\text{Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi KIE)}} \times 100\%$ $\frac{36408}{36408} \times 100\%$	100,00 %	DINAS PEMEBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	Data Jumlah Masyarakat terpapar program KKBK
		5	Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	15 lembaga/organisasi	DINAS PEMEBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	data stakeholders dan mitra kerja dalam pengelolaan KKBPK
		2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) $\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif modern}}{\text{Pasangan usia subur}} \times 100\%$ $\frac{27458}{36408} \times 100\%$	75,42 %	DINAS PEMEBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	Data pencapaian jumlah peserta KB Aktif Modern Tahun 2021

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		1	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP $\frac{\text{Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP}}{\text{Jumlah faskes}} \times 100\%$ $\frac{18}{18} \times 100\%$	100,00 %	DINAS PEMEBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	1)Data Faskes yang siap melayani KB MKJP 2)Nama Faskes KB di Kab.Soppeng 3)Kesepahaman Bersama antara Dinas P3APPKB dengan Faskes di Kab.Soppeng
		2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) $\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$ $\frac{27463}{36429} \times 100\%$	75,39 %	DINAS PEMEBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	Data Persentase Peserta KB Aktif Kontraepsi Jangka Panjang (MJKPJ) Tahun 2021 Tingkat Kecamatan Se Kabupaten Soppeng
		3	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif $\frac{\text{Jumlah Kelompok Kerja KKBPK yang efektif}}{\text{Jumlah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	13 kelompok	DINAS PEMEBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,	Daftar kelompok kerja yang aktif
		4	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan $\frac{\text{Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern}}{\text{Jumlah sasaran peserta Kab pasca persalinan}} \times 100\%$ $\frac{2861}{14909} \times 100\%$	19,19 %	DINAS PEMEBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	Data peserta KB pasca bersalin tingkat Kabupaten Soppeng Tahun 2021
		3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) $\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah pasangan PUS}} \times 100\%$ $\frac{5188}{36429} \times 100\%$	14,24 %	DINAS PEMEBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	Data Jumlah penduduk dan pasangan usia subur (PUS) tingkat kecamatan se Kabupaten Soppeng tahun 2021

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
		1	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Daftar Desa/Kelurahan yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Kabupaten/Kota. Data/informasi yang diambil adalah 50% dari total seluruh Desa/Kelurahan dengan persentase kesertaan KB paling rendah	Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau dengan persentase kepesertaan KB sebanyak 45,17%	DINAS PEMEBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	Data Persentase Kepesertaan KB di Desa/Kelurahan
		2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	$\frac{\text{Jumlah peserta KB yang menerima PBI}}{\text{Jumlah keluarga PBI}} \times 100\%$ $\frac{18163}{18163} \times 100\%$	100,00 %	DINAS PEMEBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
15 URUSAN PERHUBUNGAN							
		1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	$(\text{IK1} \times \text{bobot angkutan jalan}) + (\text{IK2} \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$ IK1 x bobot angkutan jalan 62 IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan 1	63 RKT	DINAS PERHUBUNGAN	
		1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	$\frac{\text{Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C yang tersedia}}{\text{Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan}} \times 100\%$ $\frac{0}{2} \times 100\%$	0,00 %	DINAS PERHUBUNGAN	Surat pernyataan No.23.97/Dishub/II/2022

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
			2 Terlaksananya pelayanan uji berkala	$\frac{\text{Jumlah kendaraan yang diuji per tahun}}{\text{Jumlah kendaraan wajib uji}} \times 100\%$	#DIV/0! %	DINAS PERHUBUNGAN	Surat pernyataan No.23.98/Dishub/II/2022
			3 Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	$\frac{\text{Jumlah penetapan tarif lintas penyebrangan}}{\text{Jumlah lintas penyebrangan dalam Kabupaten/Kota}} \times 100\%$ $\frac{22}{119} \times 100\%$	18,49 %	DINAS PERHUBUNGAN	- Data penetapan tarif angkutan jalan penyebrangan antar kabupaten - Data penetapan tarif angkutan jalan penyebrangan dalam kabupaten
			4 Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	$\frac{\text{Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota}} \times 100\%$ $\frac{186}{203} \times 100\%$	91,63 %	DINAS PERHUBUNGAN	Data jumlah Pemasangan Perlengkapan Jalan Tahun 2021
		2 V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	$\frac{\text{V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota : Jumlah total V/C Rasio jalan di Kabupaten}}{\text{Jumlah keseluruhan jalan V/C Rasio}} \times 100\%$ $\frac{2}{222} \times 100\%$	0,90 %	DINAS PERHUBUNGAN	Data V/C Ratio Jalan Kabupaten Soppeng	

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
			1	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untu jaringan jalan Kabupaten/Kota Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota Jumlah kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota 186 203 x 100%	91,63 %	DINAS PERHUBUNGAN	Dat jumlah Pemasangan Perlengkapan Jalan Tahun 2021
16 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
		1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung yang disediakan internet oleh Dinas Kominfo Jumlah OPD 33 34 x 100%	97,06 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Data Jumlah yang terhubung yang disediakan internet oleh Dinas Kominfo
			1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan intra Pemerintahan atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo Jumlah perangkat daerah 33 34 x 100%	97,06 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3		4	5	6	7	
			2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$ $\frac{33}{34} \times 100\%$	97,06 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Data Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo
			3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Kalau Ya lampirkan data kelengkapannya : Peraturan Bupati Soppeng Nomor 87 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Website dan Media Sosial Pemerintah Daerah	YA Peraturan Bupati Soppeng Nomor 87 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Website dan Media Sosial Pemerintah Daerah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Peraturan Bupati Soppeng Nomor 87 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Website dan Media Sosial Pemerintah Daerah
		2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$\frac{\text{Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{jumlah layanan publik}} \times 100\%$ $\frac{36}{36} \times 100\%$	100,00 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Data Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara o	

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		1 Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	$\frac{\text{Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan layanan publik pada pemerintahan daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015}}{\text{Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan layanan publik pada pemerintahan daerah}} \times 100\%$	100,00 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Data Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan layanan publik pada pemerintahan daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015
		2 Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang mempunyai portal dan sistus web yang sesuai dengan standar}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	82,35 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Data Jumlah perangkat daerah yang mempunyai portal dan sistus web yang sesuai dengan standar
		3 Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	100,00 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Data Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		4 Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	$\frac{\text{Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan}} \times 100\%$ $\frac{28}{34} \times 100\%$	82,35 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Data Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik
		5 Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	$\frac{\text{Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik}}{\text{Jumlah layanan}} \times 100\%$ $\frac{1}{34} \times 100\%$	2,94 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Data Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik
		6 Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan}}{\text{Jumlah sistem elektronik}} \times 100\%$ $\frac{34}{34} \times 100\%$	100,00 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Data Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		7 Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	$\frac{\text{Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah}}{\text{Jumlah layanan publik dan layanan administrasi}} \times 100\%$ $\frac{3}{3} \times 100\%$	100,00 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Data Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layana

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		8 Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$ $\frac{3}{34} \times 100\%$	8,82 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Data Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah
		9 Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$ $\frac{34}{34} \times 100\%$	100,00 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Data Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah
		10 Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$ $\frac{34}{34} \times 100\%$	100,00 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Data Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data
		11 Persentase data yang dapat berbagi pakai	$\frac{\text{Jumlah data yang dapat berbagi pakai}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$ $\frac{3}{34} \times 100\%$	8,82 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Data Jumlah data yang dapat berbagi pakai
		12 Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$ $\frac{5}{34} \times 100\%$	14,71 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Data Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		13 Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah ASN pengelola TIK}} \times 100\%$ $\frac{2}{15} \times 100\%$	13,33 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Data Jumlah ASN pengelola TIK dan piagam pegelola TIK
		14 Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi egovernment	kalau ada sebutkan : Dokumen Master Plan - Poin dalam master plan paling sedikit memuat: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Penganggaran Strategi Peta Jalan Arah Kebijakan Cetak biru teknis/Peta rencana strategi Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah paling sedikit memuat tentang GCIO (Government Chief of Information Officer):	Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
		3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota}} \times 100\%$ $\frac{100496}{237875} \times 100\%$	42,25 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Data Jumlah Pengunjung Webside
		1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	$\frac{\sum \text{komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi}}{\sum \text{komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi (KIM, FK Metra, JRKI, PWI, Blogger Daerah, Satgas Medsos)}} \times 100\%$ $\frac{156}{156} \times 100\%$	100,00 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Data Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi dengan uraian Kelompok Informasi Masyarakat sebanyak 54 KIM, Media Cetak sebanyak 47 MC dan Media Online sebanyak 55 MO
		2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	$\frac{\sum \text{konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)}}{\sum \text{konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi}} \times 100\%$ $\frac{941}{941} \times 100\%$	100,00 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Data Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi dengan uraian FB PEMKAB sebanyak 388 postingan, Youtube sebanyak 38 postingan, dan Instagram sebanyak 388 postingan

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
			3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan $\frac{\sum \text{diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan}}{\sum \text{diseminasi dan layanan informasi publik}} \times 100\%$	100,00 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Data Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi dengan uraian PPID dan LAPOR, melampirkan 1)SK Bupati Soppeng Nomor 126/I/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Soppeng 2)SK Bupati Soppeng Nomor 152/II/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Soppeng 3)SK Bupati Soppeng Nomor 319/VI/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrastrator Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021
17 URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							
		1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset}}{\text{Jumlah seluruh Koperasi}} \times 100\%$	45,18 %	DINAS PERDAGANGA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL & MENEGAH	Data Koperasi yang meningkat kualitas berdasarkan RAT, Volume usaha dan aset
		1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah	$\frac{\text{Jumlah penerbitan ijin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun dilaporkan}}{\text{Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam}} \times 100\%$	17,69 %	DINAS PERDAGANGA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL & MENEGAH	Data penerbitan ijin usaha simpan pinjam koperasi

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		2 Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam yang dilaporkan}}{\text{Jumlah pemohon izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam yang dilaporkan}} \times 100\%$ $\frac{0}{1} \times 100\%$	0,00 %	DINAS PERDAGANGA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL & MENEGAH	jumlah penerbitan izin membuka kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam tidak ada yang dikeluarkan karena tidak ada yang mengajukan permohonan izin Surat Pernyataan Dinas P2K-UKM nomor 01/KUM-1-PPK&UKM/III/2022
		3 Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi}}{\text{Jumlah Koperasi yang ada}} \times 100\%$ $\frac{43}{166} \times 100\%$	25,90 %	DINAS PERDAGANGA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL & MENEGAH	Data Koperasi yang diperiksa dan diawasi
		4 Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya}}{\text{Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi}} \times 100\%$ $\frac{65}{153} \times 100\%$	42,48 %	DINAS PERDAGANGA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL & MENEGAH	Data rekapitulasi penilaian kesehatan koperasi Kabupaten Soppeng
		5 Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$ $\frac{60}{166} \times 100\%$	36,14 %	DINAS PERDAGANGA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL & MENEGAH	Daftar nama koperasi yang mengikuti pelatihan dan pendidikan koperasi tahun 2021

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		6 Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah	$\frac{\text{jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian}}{\text{jumlah anggota operasi yang ada}} \times 100\%$ $\frac{120}{661} \times 100\%$	18,15 %	DINAS PERDAGANGA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL & MENEGAH	-Daftar nama anggota koperasi yang mengikuti pelatihan dan pendidikan koperasi tahun 2021 -Daftar nama anggota koperasi
		7 Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$ $\frac{5}{166} \times 100\%$	3,01 %	DINAS PERDAGANGA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL & MENEGAH	- Daftar nama koperasi yang menyelenggraakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian tahun 2021 -Data Jumlah Koperasi Kabupaten Soppeng
		8 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan			data tidak perlu di isi
		9 Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$ $\frac{75}{166} \times 100\%$	45,18 %	DINAS PERDAGANGA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL & MENEGAH	- Daftar koperasi telah menerima Sertifikat NIK - Data Jumlah Koperasi Kabupaten Soppeng
		10 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$ $\frac{62}{166} \times 100\%$	37,35 %	DINAS PERDAGANGA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL & MENEGAH	- Daftar Koperasi yang diberi dukungan fasilitas pembiayaan - Data Jumlah Koperasi Kabupaten Soppeng

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota $\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$ $\frac{0}{166} \times 100\%$	0,00 %	DINAS PERDAGANGA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL & MENEGAH	Data koperasi yang diberi dukungan fasilitas pemasaran belum ada karena usaha koperasi hanya simpan pinjam dan pertokoan serta tidak adanya koperasi produksi Surat Keterangan Dinas P2K-UKM Nomor 02/KUM-2-PPK&UKM/II/2022
		12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota $\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$ $\frac{166}{166} \times 100\%$	100,00 %	DINAS PERDAGANGA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL & MENEGAH	Jumlah Koperasi Tahun 2021 di Kabupaten Soppeng
		13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota $\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$ $\frac{0}{166} \times 100\%$	0,00 %	DINAS PERDAGANGA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL & MENEGAH	Data Jumlah Koperasi yang diberikan fasilitas kemitraan UKM pada tahun 2021 tidak ada karena koperasi hanya simpan pinjam dan pertokoan Surat Pernyataan Dinas P2K-UKM nomor 03/KUM-1-PPK&UKM/II/2022
		2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha $\frac{\text{Jumlah usaha mikro menjadi wirausaha}}{\text{Jumlah usaha mikro keseluruhan}} \times 100\%$ $\frac{535}{7129} \times 100\%$	7,50 %	DINAS PERDAGANGA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL & MENEGAH	Data Usaha Mikro dan Wirauasaha Tahun 2016-2021 di Kabupaten Soppeng

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		1 Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	$\frac{\text{Jumlah pertumbuhan wirausaha baru}}{\text{Jumlah wirausaha yang ada}} \times 100\%$ $\frac{150}{535} \times 100\%$	28,04 %	DINAS PERDAGANGA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL & MENEGAH	Data Usaha Mikro dan Wirauasaha Tahun 2016-2021 di Kabupaten Soppeng untuk mendapatkan pertumbuhan usaha mikro di Kabupaten Soppeng yaitu (Jumlah Wirausaha 2021 - Jumlah Wrausaha 2020)
		2 Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)}}{\text{Jumlah Usaha mikro yang ada}} \times 100\%$ $\frac{0}{7129} \times 100\%$	0,00 %	DINAS PERDAGANGA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL & MENEGAH	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS) belum ada, karena belum ada aplikasi online data system (ODS) pada SKPD bersangkutan, Surat Keterangan Dinas P2K-UKM nomor 01/KUM.3/PPK&UKM/II/2021
		3 Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang bermitra}}{\text{Jumlah Usaha mikro yang ada}} \times 100\%$ $\frac{1079}{7129} \times 100\%$	15,14 %	DINAS PERDAGANGA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL & MENEGAH	- Data Usaha Mikro yang bermitra dengan perbankan - Data Usaha Mikro
		4 Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi}}{\text{Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standarisasi dan sertifikasi produk}} \times 100\%$ $\frac{124}{756} \times 100\%$	16,40 %	DINAS PERDAGANGA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL & MENEGAH	Usaha Mikro yang terfasilitasi standarisasi dan belum difasilitasi standarisasi Tahun 2021

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		5 Persentase jumlah usaha mikro yang dberikan dukungan fasilitasi nemasaran	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang dberikan dukungan fasilitasi pemasaran}}{\text{Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran}} \times 100\%$ $\frac{115}{644} \times 100\%$	17,86 %	DINAS PERDAGANGA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL & MENEGAH	
		6 Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan}}{\text{Jumlah Usaha mikro yang ada}} \times 100\%$ $\frac{535}{7129} \times 100\%$	7,50 %	DINAS PERDAGANGA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL & MENEGAH	- Data Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan tahun 2016-2021 - Data Usaha Mikro Tahun 2016-2021
		7 Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingankelembagaan dan usaha}}{\text{Jumlah Usaha mikro yang ada}} \times 100\%$ $\frac{0}{7129} \times 100\%$	0,00 %	DINAS PERDAGANGA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL & MENEGAH	Jumlah Usaha Mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha tidak terdapat data kerena kegiatan pendampingan melalui lembaga pendampingan belum pernah dilakukan dan belum adanya usulan dari Desa/Kelurahan dan para pelaku usaha untuk difasilitasi pendampingan usaha, Surat Pernyataan Dinas P2K-UKM Nomor 02/Kum.3/PPK&UKM/ II/2022
18 URUSAN PENANAMAN MODAL						
		1 Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	$\frac{(\text{Jumlah investasi tahun n} - \text{jumlah investasi tahun -n})}{\text{jumlah investasi tahun -n Kabupaten/Kota}} \times 100\%$ $\frac{\text{Rp } 66.029.477.044}{\text{Rp } 57.658.667.253} \times 100\%$	114,52 %	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Data Jumlah Investasi tahun 2021 dan Data Jumlah Investasi tahun 2020 di Kabupaten Soppeng

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		1 PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor	tidak ada	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Surat Pernyataan Dinas PMPTSP-NAKERTRANS Nomor : 40/DPMPSTP-NAKERTRANS/II/2022
		2 Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal 1 SOP Perencanaan Kebijakan Teknis Penanaman Modal 2 SOP Koordinasi Pengawasan Penanaman Modal 3 SOP Koornasi Pengawasan Kewajiban Kepatuhan Ketentuan Peraturan Perusahaan 4 SOP Koordinasi Penyelenggaraan Corporate Social Resfonsibility (CSR) Perusahaan 5 Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan Penanaman Modal dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah 6 SOP Penyusunan Data Bace Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menegah, dan Koerasia 7 SOP Penyusunan Direktori Usaha Mikro, Kecil, Menegah, dan Koperasi 8 Kegiatan Sosialisasi, Bimbingan dan Wrkshop bagi PDKPM, PDPPM dan Perusahaan 9 SOP Kemitraan Usaha Mikro, Kecil, Menegah dan Koperasi 10 SOP Kajian Teknis Izin Pendaftaran Penanaman Modal	31 SOP 1 SOP Perencanaan Kebijakan Teknis Penanaman Modal 2 SOP Koordinasi Pengawasan Penanaman Modal 3 SOP Koornasi Pengawasan Kewajiban Kepatuhan Ketentuan Peraturan 4 SOP Koordinasi Penyelenggaraan Corporate Social Resfonsibility (CSR) 5 Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan Penanaman Modal dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah 6 SOP Penyusunan Data Bace Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menegah, dan 7 SOP Penyusunan Direktori Usaha Mikro, Kecil, Menegah, dan Koperasi 8 Kegiatan Sosialisasi, Bimbingan dan Wrkshop bagi PDKPM, PDPPM dan 9 SOP Kemitraan Usaha Mikro, Kecil, Menegah dan Koperasi 10 SOP Kajian Teknis Izin Pendaftaran Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Data SOP Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif penanaman modal

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
				11 SOP Kajian Teknis Izin Perinsip Penggabungan Penanaman Modal 12 SOP Kajian Teknis Izin Perluasan Penanaman Modal 13 SOP Kajian Teknis Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 14 SOP Kajian Teknis Izin Usaha Penanaman Modal 15 SOP Kajian Teknis Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal 16 SOP Kajian Teknis Izin Usahan Perluasan Penanaman Modal 17 SOP kajian Teknis Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal 18 SOP Pengelolaan IZIN Pendaftaran Penanaman Modal 19 SOP Pengelolaan Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal 20 SOP Pengelolaan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 21 SOP Pengelolaan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 22 SOP Pengelolaan Izin Usaha Penanaman Modal 23 SOP Pengelolaan Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal 24 SOP Pengelolaan Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal 25 SOP Pengelolaan Izin Usaha Perubahan Pendaftaran Penanaman Modal	11 SOP Kajian Teknis Izin Perinsip Penggabungan Penanaman Modal 12 SOP Kajian Teknis Izin Perluasan Penanaman Modal 13 SOP Kajian Teknis Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 14 SOP Kajian Teknis Izin Usaha Penanaman Modal 15 SOP Kajian Teknis Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal 16 SOP Kajian Teknis Izin Usahan Perluasan Penanaman Modal 17 SOP kajian Teknis Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal 18 SOP Pengelolaan IZIN Pendaftaran Penanaman Modal 19 SOP Pengelolaan Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal 20 SOP Pengelolaan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 21 SOP Pengelolaan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 22 SOP Pengelolaan Izin Usaha Penanaman Modal 23 SOP Pengelolaan Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal 24 SOP Pengelolaan Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal 25 SOP Pengelolaan Izin Usaha Perubahan Pendaftaran Penanaman Modal		

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIA KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
				26 SOP Penyelenggaraan Pameran Investasi 27 SOP Perencanaan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal 28 SOP Perencanaan Promosi Berdasarkan Sektor Usaha dan Wilayah 29 Pemetaan Daerah/Negara Tujuan Promosi Penanaman Modal 30 Pelayanan Informasi dan Kebijakan Promosi Penanaman Modal yang Prospektif 31 SOP Promosi dan Terpadu Lintas Instansi dan Dunia Usaha	26 SOP Penyelenggaraan Pameran Investasi 27 SOP Perencanaan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal 28 SOP Perencanaan Promosi Berdasarkan Sektor Usaha dan Wilayah 29 Pemetaan Daerah/Negara Tujuan Promosi Penanaman Modal 30 Pelayanan Informasi dan Kebijakan Promosi Penanaman Modal yang 31 SOP Promosi dan Terpadu Lintas Instansi dan Dunia Usaha		
		3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal pertahun	40 LKPM	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Data Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal Per Tahun Di Kabupaten Soppeng Tahun 2021
		4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting	TIDAK ADA	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Surat Pernyataan Dinas PMPTSP-NAKERTRANS Nomor : 42/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2022
		5	Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	TIDAK ADA	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Surat Pernyataan Dinas PMPTSP-NAKERTRANS Nomor : 43/DPMPTSP-NAKERTRANS/II/2022

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCOME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
		6	Kegiatan penerimaan misipenanaman modal	Jumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modal	TIDAK ADA	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Surat Pernyataan Dinas PMPTSP-NAKERTRANS Nomor : 44/DPMTSP-NAKERTRANS/II/2022
		7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal	19 kali	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Data Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan
		8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan 1. Penerbitan Izin 1648 2. Penerbitan No Izin 24	1672 pnerbitan Izin dan Non 1648 Perizinan 24 Non Perizinan	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Data Jumlah penerbitan Perizinan dan Non Perizinan
		9	Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten/Kota	Rp 41.945.880.375,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Data Jumlah Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Terpantau di Kabupaten Soppeng Tahun 2021
		10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal	7 ASN	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Sertifikat ASNpenanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		11 Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal	199 Perusahaan	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Data Jumlah Perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Soppeng
		12 Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi}}{\text{Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima}} \times 100\%$ $\frac{1672}{1812} \times 100\%$	92,27 %	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	- Data Laporan Penerbitan Surat Izin yang telah diserahkan Tahun 2021 - Data Jumlah Pendaftaran Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2021
19 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
		1 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{\text{jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah pemuda usia 16-30 tahun di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$ $\frac{547}{53278} \times 100\%$	1,03 %	DINAS PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA	Data jumlah pemuda usia 16-30 tahun yang berwirausaha di Kabupaten Soppeng
		1 Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	tidak ada pemuda	DINAS PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA	tidak terdapat data akibat pembatasan kegiatan masyarakat dan refocusing anggaran dengan Surat Pernyataan DISPARPORA nomor:556/61.d/DISPARPORA/II/2022

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
			2 Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	tidak ada pemuda	DINAS PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA	tidak terdapat data akibat pembatasan kegiatan masyarakat dan refocusing anggaran dengan Surat Pernyataan DISPARPORA nomor:556/61.d/DISPARPORA/II/2022
		2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	$\frac{\text{(jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten/Kota)}}{\text{Jumlah pemuda usia 16-30 tahun di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$ $\frac{2925}{53278} \times 100\%$	5,49 %	DINAS PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA	Data pemuda usia 16-30 tahun yang aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan
		1	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	tidak ada pemuda	DINAS PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA	tidak terdapat data akibat pembatasan kegiatan masyarakat dan refocusing anggaran dengan Surat Pernyataan DISPARPORA nomor:556/61.c/DISPARPORA/II/2022
		2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	tidak ada pemuda	DINAS PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA	tidak terdapat data akibat pembatasan kegiatan masyarakat dan refocusing anggaran dengan Surat Pernyataan DISPARPORA nomor:556/61.c/DISPARPORA/II/2022
		3	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	2 medali	DINAS PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA	Daftar atlit berprestasi peraih medali tahun 2021
		1	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	46 pelatih	DINAS PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA	Daftar pelatih olahraga tahun 2021

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
			2 Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	tidak ada event olahraga	DINAS PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA	tidak terdapat data akibat pembatasan kegiatan masyarakat dan refocusing anggaran dengan Surat Pernyataan DISPARPORA nomor:556/61.b/DISPARPORA/II/2022
20 URUSAN STATISTIK							
		1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$ $\frac{34}{34} \times 100\%$	100,00 %	DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA	Data Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
		1	Tersedianya buku profil daerah	Kalau ada sebutkan : ADA SOPPENG DALAM ANGKA 2022	ADA SOPPENG DALAM ANGKA 2022	DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA	Dokumentasi Buku Soppeng Dalam Angka 2022
		2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan 1 . Ekonomi 2 . Geografis 3 . Pemerintahan 4 . Kependudukan 5 . Sosial 6 . Industri 7 . Pariwisata 8 . Perdagangan	8 sektoral 1 . Ekonomi 2 . Geografis 3 . Pemerintahan 4 . Kependudukan 5 . Sosial 6 . Industri 7 . Pariwisata 8 . Perdagangan	DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA	Screenshoot Web Kabupaten Soppeng (soppeng.kab.go.id pada laman satatistik)

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3		4	5	6	7	
			3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	2 Ssektoral	DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA	Data Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan oleh Kominfo
			4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Jumlah Survei Statistik Sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	TIDAK ADA	DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA	Surat Pernyataan Dinas KOMINFO Nomor :
			5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	2 sektoral	DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA	Surat BPS Kab. Soppeng Nomor: B-081/BPS/7312/06/12/2021
			6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	$\frac{\text{Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral}}{\text{Jumlah kegiatan statistik sektoral}} \times 100\%$	#DIV/0! %	DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA	Surat Pernyataan Dinas KOMINFO Nomor :
			7	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	$\frac{\text{Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral}}{\text{Jumlah indikator statistik sektoral}} \times 100\%$	#DIV/0! %	DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA	Surat Pernyataan Dinas KOMINFO Nomor :
		2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$ 34 34	100,00 %	DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA	Data Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
21 URUSAN PERSANDIAN						
		1	Tingkat keamanan informasi pemerintah $\frac{\text{Jumlah nilai areal keamanan informasi}}{\text{Jumlah areal penilaian}} \times 100\%$ $\frac{249}{5} \times 100\%$	49,80 %	DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA	Indeks KAMI
		1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan $\frac{\text{Jumlah kegiatan strategis teramankan}}{\text{Jumlah strategis yang ada}} \times 100\%$ $\frac{128}{128} \times 100\%$	100,00 %	DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA	
		2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah $\frac{\text{Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi persandian}}{\text{Jumlah SE yang ada}} \times 100\%$ $\frac{539}{539} \times 100\%$	100,00 %	DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA	Data Surat Sandi Tahun 2021
		3	Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah $\frac{\text{Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah}}{\text{Jumlah SE yang ada}} \times 100\%$ $\frac{0}{1} \times 100\%$	0,00 %	DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA	Surat Keterangan Dis KOMINFO Nomor

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3		4	5	6	7	
			4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	Jumlah titik teramankan Jumlah titik pada PHKS 1 1 x 100%	100,00 %	DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA	Penerapan mail sanpati (JKS) "Sanapati.net"
22 URUSAN KEBUDAYAAN								
		1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan Jumlah cagar budaya yang terdata 8 32 x 100%	25,00 %	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN		
		1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi	menunjukkan Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi dengan rumus sebagai berikut : Pemajuan Kebudayaan yang diinventaris 52 kbd Pemajuan Kebudayaan yang diamankan 52 kbd Pemajuan Kebudayaan yang dipelihara 52 kbd Pemajuan Kebudayaan yang diselamatkan 52 kbd Pemajuan Kebudayaan yang dipublikasikan 52 kbd	Pemajuan Kebudayaan yang diinventaris 52 kbd Pemajuan Kebudayaan yang diamankan 52 kbd Pemajuan Kebudayaan yang dipelihara 52 kbd Pemajuan Kebudayaan yang diselamatkan 52 kbd Pemajuan Kebudayaan yang dipublikasikan 52 kbd	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN		

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		2 Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Menunjukkan Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang Jumlah objek PK disebarluaskan 49 PK Jumlah objek PK dikaji 49 PK Jumlah objek PK dikayakan keberagamannya 49 PK	Jumlah objek PK disebarluaskan 49 PK Jumlah objek PK dikaji 49 PK Jumlah objek PK dikayakan 49 PK	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	
		3 Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	sebutkan Jumlah objek dimanfaatkan	0 0 0 0 0	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	
		4 Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi 405 SDM Jumlah sdm disertifikasi 0 SDM Jumlah lembaga distandarisasi 0 SDM Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola 0 SDM Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola 0 SDM	405 SDM Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi 405 SDM Jumlah sdm disertifikasi 0 SDM Jumlah lembaga distandarisasi 0 SDM Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola 0 SDM Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola 0 SDM	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		5 Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	RCB = (JML CB DITETAPKAN - JML CB DIHAPUS) Jumlah CB ditetapkan CB Jumlah CB dihapuskan CB	0 CB	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	
		6 Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran Jumlah Cagar Budaya diselamatkan 0 CB Jumlah Cagar Budaya diamankan 8 CB Jumlah Cagar Budaya dizonasi 0 CB Jumlah Cagar Budaya dipelihara 8 CB Jumlah Cagar Budaya dipugar 1 CB	17 SDM Jumlah Cagar Budaya 0 SDM Jumlah Cagar Budaya diamankan 8 SDM Jumlah Cagar Budaya dizonasi 0 SDM Jumlah Cagar Budaya dipelihara 8 SDM Jumlah Cagar Budaya dipugar 1 SDM	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	
		7 Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	
		8 Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah Cagar Budaya di teliti 28 CB Jumlah Cagar Budaya direvitalisasi 0 CB Jumlah Cagar Budaya diadaptasi 0 CB	28 CB Jumlah Cagar Budaya di teliti 28 CB Jumlah Cagar Budaya direvitalisasi 0 CB Jumlah Cagar Budaya diadaptasi 0 CB	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		9 Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan ;	CB	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	
		10 Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum Jumlah Koleksi museum dikelola 0 KL Jumlah Koleksi museum diamankan 348 KL Jumlah Koleksi museum dikembangkan 0 KL Jumlah Koleksi museum dimanfaatkan 0 KL	348 CB Jumlah Koleksi museum dikelola 0 KL Jumlah Koleksi museum diamankan 348 KL Jumlah Koleksi museum dikembangkan 0 KL Jumlah Koleksi museum dimanfaatkan 0 KL	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	
		11 Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan	Jumlah pengunjung museum 3524 Org Jumlah berpartisipasi dalam pengelolaan museum Org	Jumlah pengunjung museum 3524 Org Jumlah berpartisipasi dalam 0 Org	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	
		12 Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum			tidak perlu di isi

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		13 Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	
		14 Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	Jumlah pembentukan tim ahli CB		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	
		15 Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi		DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	
		16 Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm CB + jumlah sdm Museum Jumlah sdm CB 9 Orng Jumlah sdm Museum 17 Orng	26 Orng	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	
		17 Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum) Jumlah sdm CB yang ditingkatkan kompetensinya Orng Jumlah sdm Museum yang ditingkatkan kompetensinya Orng	0 Orng	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	
		18 Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum) Jumlah sarana dan prasarana unit Jumlah sarana dan prasarana unit	0 unit	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	
		19 Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0 kegiatan 0 0 0 0	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
23 URUSAN PERPUSTAKAAN						
		1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat Sampel (5% dari total populasi usia membaca penduduk berusia 15-70 tahun di Kabupaten) Menghitung tingkat kegemaran membaca masyarakat melalui pengukuran indikator sebagai berikut : - Indikator Frekuensi Membaca 180 kali - Indikator Durasi Membaca 225 menit - Indikator Jumlah Bahan Bacaan 101112 judul	27077 150 Kali 120 Menit 4 : 1 orang	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	Data pendukung nilai tingkat kegemaran membaca yang diukur menggunakan survey/kajian kekegemaran membaca masyarakat
		1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk Koleksi perpustakaan yang tersedia diberbagai perpustakaan diwilayahnya (dalam esamplar) $\frac{\text{Jumlah penduduk diwilayahnya (jiwa)}}{298149} \times 100\%$ 203957	1 orang : 1,46	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	data koleksi buku diperpustakaan dibagi Data Jumlah Penduduk usia 6-70 tahun 2021 di Kabupaten Soppeng
		2	Pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat Jumlah kunjungan pemustakaan yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun opside $\frac{\text{Jumlah penduduk diwilayahnya (jiwa)}}{27162} \times 100\%$ 203957	13,32 %	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	data kunjungan masyarakat diperpustakaan dibagi Data Jumlah Penduduk usia 6-70 tahun 2021 di Kabupaten Soppeng
		3	Ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya $\frac{\text{Jumlah penduduk diwilayahnya (jiwa)}}{252} \times 100\%$ 203957	0,12 %	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	data jumlah pemustakaan di kabupaten soppeng dibagi Data Jumlah Penduduk usia 6-70 tahun 2021 di Kabupaten Soppeng

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
			2 UPLM Ketercukupan Koleksi Buku $\frac{\text{Jumlah Judul Buku di Perpustakaan}}{\text{Jumlah Penduduk usia 6-70 di Kabupaten}} \times 100\%$ $\frac{\text{JML UPLM}}{\text{JML ALM}} \times 100\%$ $\frac{101112}{222358} \times 100\%$	45,47 %		Data Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan di Kabupaten Soppeng
			3 UPLM Ketercukupan tenaga perpustakaan $\frac{\text{Jumlah Pemustakaan}}{\text{Jumlah Penduduk usia 6-70 di Kabupaten}} \times 100\%$ $\frac{\text{JML UPLM}}{\text{JML ALM}} \times 100\%$ $\frac{252}{222358} \times 100\%$	0,11 %		Data Jumlah tenaga perpustakaan di Kabupaten Soppeng
			4 UPLM Kunjungan Masyarakat ke perpustakaan $\frac{\text{Jumlah kunjungan diperpustakaan}}{\text{Jumlah Penduduk usia 6-70 di Kabupaten}} \times 100\%$ $\frac{\text{JML UPLM}}{\text{JML ALM}} \times 100\%$ $\frac{27077}{203957} \times 100\%$	13,28 %		Data jumlah kunjungan masyarakat diperpustakaan di Kabupaten Soppeng
			5 UPLM Perpustakaan ber SNP $\frac{\text{Jumlah Perpustakaan Ber SNP}}{\text{Jumlah Perpustakaan di Kabupaten}} \times 100\%$ $\frac{\text{JML UPLM}}{\text{JML ALM}} \times 100\%$ $\frac{19}{45} \times 100\%$	42,22 %		Data jumlah Perpustakaan yang ber SNP di Kabupaten Soppeng

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
				6 UPLM Keterlibatan Masyarakat dalam kegiatan perpustakaan $\frac{\text{Jumlah KLP Baca aktif}}{\text{Jumlah KLP Baca di Kabupaten}} \times 100\%$ $\frac{\text{JML UPLM}}{\text{JML ALM}} \times 100\%$	100,00 %		Data jumlah kelompok masyarakat membaca di Kabupaten Soppeng
				7 UPLM Anggota Perpustakaan $\frac{\text{Jumlah anggota Perpustakaan}}{\text{Jumlah Penduduk usia 6-70 di Kabupaten}} \times 100\%$ $\frac{\text{JML UPLM}}{\text{JML ALM}} \times 100\%$	0,06 %		Data jumlah masyarakat menjadi anggota perpustakaan di Kabupaten Soppeng
		1	Naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilavahnva	$\frac{\text{Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)}}{\text{Jumlah naska konu terdaftar yang ada di wilayahnya}} \times 100\%$	0,00 %	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	jumlah naska kuno yang dialih bahasakan tidak ada Surat Pernyataan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nomor 34.a/DPK/II/2022
		2	Naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa, sebutkan:	tidak ada Naska Kuno	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	jumlah naska kuno yang dialih bahasakan tidak ada Surat Pernyataan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nomor 34.a/DPK/II/2022
		3	Koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	0 Koleksi	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	jumlah naska kuno yang dialih bahasakan tidak ada Surat Pernyataan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nomor 34.a/DPK/II/2022

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS		CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5		6	7
24 URUSAN KEARSIPAN								
		1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	T = (a + i + s + j)/4 a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0 0 0 0 0	Tingkat ketersediaan arsip0 % Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip0 % Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip0 % Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik0 % Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN0 %	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	
			1	Arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif yang telah dibuat daftar arsip Jumlah keseluruhan arsip aktif 544544 x 100%	0,00 %	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	Arsip Aktif yang telah dibuatkan daftar arsip
			2	Arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip Jumlah keseluruhan arsip in-aktif 05 x 100%	0,00 %	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5		6	7
			3	Arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	$\frac{\text{Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik}}{\text{Jumlah keseluruhan arsip statis}} \times 100\%$ $\frac{0}{544} \times 100\%$	0,00 %	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	
			4	Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	$\frac{\text{Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN}}{\text{Jumlah keseluruhan arsip dinamis dan arsip statis pemerintah kabupaten}} \times 100\%$ $\frac{0}{2799} \times 100\%$	0,00 %	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	
		2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		$T = (m + b + g + a + c + i)/6$ m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK	0 0,00 0,00	Tingkat ketersediaan arsip 0 % Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK 0 % Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK 0 %	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS		CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4		5		6	7
				g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK	0,00	Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK	0 %	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	
				a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK	0,00	Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK	0 %		
				c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK	0,00	Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK	0 %		
				l = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	0,00	Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	0 %		
		1	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	$\frac{\text{Jumlah kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK}}{\text{Jumlah keseluruhan arsip}} \times 100\%$ $\frac{0}{2799} \times 100\%$		0,00 %		DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	Surat Pernyataan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nomor 34b/DPK/II/2022
		2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	$\frac{\text{Jumlah Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK}}{\text{Jumlah keseluruhan arsip}} \times 100\%$ $\frac{0}{2799} \times 100\%$		0,00 %		DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		3 Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	$\frac{\text{Jumlah Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi}}{\text{Jumlah keseluruhan arsip}} \times 100\%$ $\frac{0}{2799} \times 100\%$	0,00 %	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	Surat Pernyataan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nomor 34b/DPK/II/2022
		4 Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	$\frac{\text{Jumlah Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK}}{\text{Jumlah keseluruhan arsip}} \times 100\%$ $\frac{0}{2799} \times 100\%$	0,00 %	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	
		5 Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan	$\frac{\text{Jumlah Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan}}{\text{Jumlah keseluruhan arsip}} \times 100\%$ $\frac{0}{2799} \times 100\%$	0,00 %	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	Surat Pernyataan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nomor 34b/DPK/II/2022
		6 Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang	$\frac{\text{Jumlah Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang}}{\text{Jumlah keseluruhan arsip sesuai NSPK}} \times 100\%$ $\frac{0}{2799} \times 100\%$	0,00 %	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN WAJIB PILIHAN						
25 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN						
		1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)	3425,7 Ton	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN Data Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Tahun 2021
		1	Rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	120 RTN	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN RTP Nelayan yang melakukan diversifikasi usaha tahun 2021
		2	Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	$\frac{\text{Jumlah Tempat Pelelangan Ikan yang operasional}}{\text{Jumlah Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten/kota}} \times 100\%$	0,00 %	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN Daftar Nama Pendaratan Ikan Tahun 2021
		3	Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/kota yang diterbitkan	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/kota yang diterbitkan	tidak ada izin	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN data tidak ada disebabkan karena tidak ada pembudidaya ikan yang mengajukan permohonan izin, Surat Pernyataan Dinas PKHP Nomor 804/66.1/DPKHP/I/2022

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5		6	7
			4 Pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan ...)	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan	15 izin		DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN	Data Daftar Nama Kelompok Pembudidaya lakan yang Dibina Tahun 2021
			5 Benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi per tahun	8,7 ton		DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN	Data Pembenihan Budidaya Tahun 2021
26 URUSAN PARIWISATA								
		1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per	$\frac{\text{wisatawan mancanegara tahun 2020)}}{\text{Jumlah wisatawan mancanegara tahun 2020}} \times 100\%$ $\frac{0}{1}$	0,00 %		DINAS PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA	data wisatawan mancanegara tidak terdapat data surat pernyataan DISPARPORA nomor 556/61.b/DISPARPORA/II/2022
		1	Entitas pengelolaan destinasi	Jumlah pengelola destinasi pariwisata, baik negeri maupun swasta	52 orang		DINAS PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA	SK Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Nomor 88/DISPARPORA/XII/2021
		2	Kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 1. Jumlah Infrastruktur dasar 12 2. Jumlah Fasilitas Umum 42 3. Jumlah Fasilitas pariwisata 66	Jumlah Infrastruktur dasar 12 unit Jumlah Fasilitas Umum 42 unit Jumlah Fasilitas pariwisata 66 unit	DINAS PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA		Data Jumlah kengkapan infarastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di Kabupaten Soppeng

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS		CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4		5		6	7
			3 Tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten/Kota yaitu :		565 buah		DINAS PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA	Data Usaha Pariwisata Tahun 2021
				1. Jumlah Daya Tarik usaha Wisata	60	1. Jumlah Daya Tarik usaha	60 buah		
				2. Jumlah Kawasan pariwisata	2	2. Jumlah Kawasan	2 buah		
				3. Jumlah Jasa transportasi wisata	0	3. Jumlah Jasa transportasi	0 buah		
				4. Jumlah Jasa perjalanan wisata	0	4. Jumlah Jasa perjalanan	0 buah		
				5. Jumlah Jasa makanan dan minuman	230	5. Jumlah Jasa makanan dan minuman	230 buah		
				6. Jumlah Penyediaan akomodasi	271	6. Jumlah Penyediaan	271 buah		
				7. Jumlah Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi	0	7. Jumlah Penyelenggaraa n kegiatan	0 buah		
				8. Jumlah Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran	0	8. Jumlah Penyelenggaraa n pertemuan,	0 buah		
				9. Jumlah Jasa informasi pariwisata	0	9. Jumlah Jasa informasi	0 buah		
				10. Jumlah Jasa konsultan pariwisata	0	10. Jumlah Jasa konsultan	0 buah		
				11. Jumlah Jasa pramuwisata	0	11. Jumlah Jasa pramuwisata	0 buah		
				12. Jumlah Wisata tirta	0	12. Jumlah Wisata tirta	0 buah		
				13. Jumlah Spa	2	13. Jumlah Spa	2 buah		

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		4 Wisatawan mancanegara	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 1. 2.	tidak ada orang	DINAS PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA	data wisatawan mancanegara yang berkunjung di Kabupaten soppeng tidak terdapat data diakibatkan pembatasan berkunjung wisatawan luar negeri ke Kabupaten Soppeng sesuai dengan Surat Pernyataan DISPARPORA nomor 556/61.f/DISPARPORA/II/2012
		5 Promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	tidak ada promosi event	DINAS PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA	data wisatawan mancanegara yang berkunjung di Kabupaten soppeng tidak terdapat data diakibatkan pembatasan berkunjung wisatawan luar negeri ke Kabupaten Soppeng sesuai dengan Surat Pernyataan DISPARPORA nomor 556/61.f/DISPARPORA/II/2012
		6 Event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten/Kota	tidak ada promosi event	DINAS PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA	data wisatawan mancanegara yang berkunjung di Kabupaten soppeng tidak terdapat data diakibatkan pembatasan berkunjung wisatawan luar negeri ke Kabupaten Soppeng sesuai dengan Surat Pernyataan DISPARPORA nomor 556/61.f/DISPARPORA/II/2012

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		7 Industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	tidak ada partisipasi	DINAS PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA	data wisatawan mancanegara yang berkunjung di Kabupaten soppeng tidak terdapat data diakibatkan pembatasan berkunjung wisatawan luar negeri ke Kabupaten Soppeng sesuai dengan Surat Pernyataan DISPARPORA nomor 556/61.g/DISPARPORA/II/2012
		8 Tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja pariwisata bersertifikat}}{\text{Jumlah tenaga kerja pariwisata}} \times 100\%$ $\frac{0}{104} \times 100\%$	0,00 %	DINAS PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA	data tidak tenaga kerja pariwisata bersertifikat Surat Pernyataan DISPARPORA nomor 556/61.g/DISPARPORA/II/2012
		9 SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	$\frac{\text{Jumlah peserta pembekalan sektor pariwisata}}{\text{Jumlah sasara pembekalan sektor pariwisata}} \times 100\%$ $\frac{24}{24} \times 100\%$	100,00 %	DINAS PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA	Data peserta pembekalan pariwisata pada duta wisata Kabupaten Soppeng dan duta pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan dibuktikan dengan sertifikat
		10 Lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	tidak ada lokasi	DINAS PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA	data wisatawan mancanegara yang berkunjung di Kabupaten soppeng tidak terdapat data diakibatkan pembatasan kegiatan masyarakat di Kabupaten Soppeng sesuai dengan Surat Pernyataan DISPARPORA nomor 556/61.e/DISPARPORA/II/2012

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
		2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	$\frac{(\text{Jumlah wisatawan nusantara tahun 2021}) - (\text{Jumlah wisatawan nusantara tahun 2020})}{\text{Jumlah wisatawan nusantara tahun 2020}} \times 100\%$ $\frac{177753}{48574} \times 100\%$	365,94 %	DINAS PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA	data jumlah kunjungan wisatawan nusantara pada tahun 2021 di Kab. Soppeng naik 3,66% dari tahun 2020
		3	Tingkat Hunian Akomodasi	$\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\%$ $\frac{5919}{271} \times 100\%$	2184,13 %	DINAS PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA	Data jumlah kamar yang terjual sebanyak 21,84%
		4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	$\frac{\text{Jumlah PDRB Sektor Pariwisata}}{\text{Jumlah Keseluruhan PDRB Kab/Kota}} \times 100\%$ $\frac{\text{Rp } 617.440.000}{\text{Rp } 12.426.780.000} \times 100\%$	4,97 %	DINAS PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA	Data PDRB Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Soppeng Tahun 2021
		5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	$\frac{\text{Jumlah PAD Sektor Pariwisata 2021}}{\text{Jumlah Keseluruhan PAD Kabupaten 2021}} \times 100\%$ $\frac{\text{Rp } 276.697.000}{\text{Rp } 155.453.702.844} \times 100\%$	0,18 %	DINAS PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA	Data PAD Pariwisata Tahun 2021
27 URUSAN PERTANIAN							
		1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun}}{\text{Luas panen}} \times 100\%$ $\frac{280.911,0}{51.274,8} \times 100\%$	547,85 %	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, PERKEBUNAN & KETAHANAN PANGAN	Data Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi dan Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Di Kabupaten Soppeng Tahun 2021

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		1 Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan 1 . Sarana 213 Paket 2 . Prasarana 74 Paket	287 paket 1 . Sarana 213 Paket 2 . Prasarana 74 Paket	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, PERKEBUNAN & KETAHANAN PANGAN	Data Jumlah Sarana Prasarana yang diberikan tahun 2021
		2 Prasarana pertanian yang digunakan	Jumlah Prasarana pertanian yang digunakan	231 Paket	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, PERKEBUNAN & KETAHANAN PANGAN	Data Jumlah Sarana Prasarana yang diberikan tahun 2021
		3 Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian tahun 2020	25 Izin	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, PERKEBUNAN & KETAHANAN PANGAN	Data Daftar Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Pertanian (IUP) Tahun 2021
		4 Prasarana yang digunakan	$\frac{\text{Jumlah prasarana yang aktif digunakan}}{\text{Jumlah prasarana yang dibangun}} \times 100\%$ $\frac{74}{74} \times 100\%$	100,00 %	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, PERKEBUNAN & KETAHANAN PANGAN	Data Jumlah Sarana Prasarana yang diberikan tahun 2021
		5 Jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	$\frac{\text{Jumlah usulan pertanian yang difasilitasi}}{\text{Jumlah usulan usaha pertanian}} \times 100\%$ $\frac{25}{25} \times 100\%$	100,00 %	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, PERKEBUNAN & KETAHANAN PANGAN	Data Daftar Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Pertanian (IUP) Tahun 2021

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
		2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	$\frac{\text{Jumlah kejadian penyakit kasus tahun 2021 - jumlah kasus kejadian/kasus hewan manular tahun 2020}}{\text{jumlah kasus kejadian/kasus hewan manular tahun 2020}} \times 100\%$ $\frac{-9}{21} \times 100\%$	-42,86 %	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, PERKEBUNAN & KETAHANAN PANGAN	Data kasus kejadian/kasus hewan menular tahun 2021 dan tahun 2020
		1	Fasilitasi penanggulangan bencana	$\frac{\text{Jumlah areal yang dapat ditanggulangi}}{\text{jumlah areal yang terkena bencana}} \times 100\%$ $\frac{1524}{1524} \times 100\%$	100,00 %	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, PERKEBUNAN & KETAHANAN PANGAN	Daftar Lokasi Penanggulangan Bencana Padi Puso Akibat Banjir Di Kabupaten Soppeng
28 URUSAN KEHUTANAN							
		1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura , sebutkan:	tidak ada	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi	tidak ada	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		3	Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi	tidak ada	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun	tidak ada	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
29 URUSAN PERDAGANGAN						
		1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) $\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang mempunyai izin sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah pelaku usaha wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$ $\frac{177}{4691} \times 100\%$	3,77 %	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI & UKM	- Data rekapan penerbitan surat izin usaha (SIUP) perdagangan tahun 2021 - Data pelaku Usaha wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2021
		1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan izin $\frac{\text{Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :}}{\text{Jumlah pemohon izin pusat belanja yang dokumennya sudah lengkap dan benar}} \times 100\%$ $\frac{0}{1} \times 100\%$	0,00 %	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI & UKM	- tidak ada data jumlah izin belanja yang diterbitkan Surat Pernyataan Dinas P2K-UKM Nomor 14/PERDAG PPKMUKM/II/2022 tidak ada data pemohon izin pusat belanja yang mengajukan Surat Pernyataan Dinas P2K-UKM Nomor 18/PERDAG PPKUKM/II/2022
			$\frac{\text{Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan } \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah pemohon izin swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar}} \times 100\%$ $\frac{10}{10} \times 100\%$	100,00 %	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI & UKM	- Data Toko Modern Swalayan Dalam Wilayah Kabupaten Soppeng yang diterbitkan pada Tahun 2021 -Data Toko Modern/Swalayan dalam wilayah Kabupaten Soppeng Pemohon Izin Swalayan yang sudah lengkap dan benar tahun 2021
		2	Penerbitan TDG $\frac{\text{Jumlah Penerbitan TDG } \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah pemohon penerbitan TDG}} \times 100\%$ $\frac{7}{7} \times 100\%$	100,00 %	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI & UKM	- Data Gudang yang terbit pada tahun 2021 -Data Nama Pemohon penerbitan tanda daftar gudang (TDG) Tahun 2021

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		3 Gudang yang tidak mempunyai TDG	$\frac{\text{Jumlah Penerbitan TDG}}{\text{Jumlah gudang yang ada di kabupaten/kota}} \times 100\%$ $\frac{7}{39} \times 100\%$	17,95 %	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI & UKM	- Data Gudang yang terbit pada tahun 2021 -Laporan Penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG) Tahun 2021
		4 Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah STPW yang menerima waralaba dari waralaba dalam negeri terbit } \leq 2 \text{ hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap atau benar}}{\text{Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri}} \times 100\%$ $\frac{0}{1} \times 100\%$	0,00 %	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI & UKM	tidak ada data penerima waralaba dari waralaba yang bermohon untuk STPW Waralaba Surat Pernyataan Dinas P2K-UKM Nomor 13/Perdag PPK-UKM/II/2022
			$\frac{\text{Jumlah STPW yang menerima waralaba lanjut dari waralaba dalam negeri terbit } \leq 2 \text{ hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap atau benar}}{\text{Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjut dari waralaba dalam negeri}} \times 100\%$ $\frac{0}{1} \times 100\%$	0,00 %	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI & UKM	tidak ada data penerima waralaba dari waralaba yang bermohon untuk STPW Waralaba Surat Pernyataan Dinas P2K-UKM Nomor 13/Perdag PPK-UKM/II/2022
			$\frac{\text{Jumlah STPW yang menerima waralaba lanjut dari waralaba luar negeri terbit } \leq 2 \text{ hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap atau benar}}{\text{Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjut dari waralaba luar negeri}} \times 100\%$ $\frac{0}{1} \times 100\%$	0,00 %	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI & UKM	tidak ada data penerima waralaba dari waralaba yang bermohon untuk STPW Waralaba Surat Pernyataan Dinas P2K-UKM Nomor 13/Perdag PPK-UKM/II/2022

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		5 Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota Jumlah Permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer $\frac{0}{1} \times 100\%$	0,00 %	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI & UKM	- Tidak ada data jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kabupaten, karean tidak ada pengusaha yang mengajukan izin bahan berbahaya, Surat Pernyataan Dinas P2K-UKM Nomor 17/PERDAG PPKUKM/II/2022 - Tidak ada prnerbitan surat SIUP bahan berbahaya karena tidak ada pemohon untuk penerbitan SIUP bagi pengecer Surat Pernyataan Dinas P2K-UKM Nomor 11/PERDAG ppkukm/ii/2021
		6 Penerbitan SKA yang tepat waktu	Jumlah SKA yang terbit≤ 1 hari (1 x 24 jam) Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya diterima dengan lengkap dan benar $\frac{0}{1} \times 100\%$	0,00 %	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI & UKM	Tidak terlaksana kerana belum terdaftar sebagai instansi penerbit surat keterangan asal (IPSKA) sebagai mana tercantum dalam KEPMENDAG-RI Nomor 896 Tahun 2019, Surat Pernyataan Dinas P2K-UKM Nomor 15/PERDAG PPKUKM/II/2022
		7 Pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K = (a + b) \times 100\%$ a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5) 2 b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5) 18	20 %	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI & UKM	- Data Pasar yang telah direvitalisasi tahun 2021 -Data Pasar Rakyat Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4		5	6	7
			8 Koefisien variasi harga antar waktu	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok		3,36 %	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI & UKM	Data Perkembangan Harga Rata-Rata Kebutuhan Pokok Masyarakat Di Tingkat Perdagangan Bulan Januari-Desember 2021
		2	Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{RDKK}} \times 100\%$ $\frac{30,827}{115,001} \times 100\%$		26,81 %	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI & UKM	- Data Realisasi Pupuk yang tersalurkan tahun 2021 - Data Targer Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) (RDKK) Tahun 2022
			1 Pupuk dan pestisida yang tersalurkan	a = Jumlah pupuk yang disalurkan b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK) c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)	30,827 103,501 115,001	Jumlah pupuk yang disalurkan 30,827 ton target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK) 103,501 ton RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) 115,001 ton	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI & UKM	- Data Realisasi Pupuk yang tersalurkan - Data Targer Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) (RDKK) Tahun 2022 - Data E-RDKK (Ton)

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
		3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$ $\frac{1919}{2720} \times 100\%$	70,55 %	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI & UKM	- Data Hasil Pelayanan Sidang Tera fan Tera Ualang Kabupaten Soppeng Tahun 2021 -Data Potensi Alat-Alat UTTP Wilayah Kerja Kabupaten Soppeng
		1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	$\frac{\text{Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$ $\frac{1919}{2720} \times 100\%$	70,55 %	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI & UKM	- Data Hasil Pelayanan Sidang Tera fan Tera Ualang Kabupaten Soppeng Tahun 2021 -Data Potensi Alat-Alat UTTP Wilayah Kerja Kabupaten Soppeng
		2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah sampel BDKT yang di awasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku}}{\text{Total sampel BDKT yang di awasi dalam tahun berjalan}} \times 100\%$ $\frac{6559}{6559} \times 100\%$	100,00 %	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI & UKM	Dat Jumlah Sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku tahun 202
30 URUSAN PERINDUSTRIAN							
		1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah industri menengah tahun 2021 - Jumlah industri menengah tahun 2020}}{\text{Jumlah industri menengah tahun 2020}} \times 100\%$ $\frac{10}{21} \times 100\%$	47,62 %	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI & UKM	- Data industri tahun 2021 sebanyak 31 industri -Data industri tahun 2020 sebanyak 21 industri

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5		6	7
			1 Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perindustrian kawasan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk 31 31 x 100%	100,00 %		DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI & UKM	Data Jumlah Izin yang diterbitkan tahun 2021
		2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Jumlah RIPIN yang diterapkan di Kabupaten/Kota Jumlah RIPIN menurut PP Nomor 14 Tahun2015 2 10 x 100%	20,00 %		DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI & UKM	- Lampiran Data RIPIN yang diterapkan di Kabupaten -Lampiran Data RIPIN menurut PP Nomor 14 Tahun 2015
		1	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK yaitu : a. Tersusunnya naskah akademik30% b. Tersusunnya Draft Raperda RPIK20% c. Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi25% d. Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi15% e. Penetapan Perda RPIK10%	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK100% a. Tersusunnya naskah akademik30% b. Tersusunnya Draft Raperda RPIK20% c. Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi25% d. Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi15% e. Penetapan Perda RPIK10%	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI & UKM	Dokumentasi RPIK yang telah disetujui oleh DPRD dan disahkan oleh Gubernur	

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
		3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan di analisa dalam laporan hasil pemantaun}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$ $\frac{31}{31} \times 100\%$	100,00 %	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI & UKM	Data Jumlah Izin yang dipatau dan dikeluarkan tahun 2021
		1	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$ $\frac{31}{31} \times 100\%$	100,00 %	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI & UKM	Data Jumlah Izin yang dipatau dan dikeluarkan tahun 2021
		4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan di analisa dalam laporan hasil pemantaun}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$ $\frac{0}{31} \times 100\%$	0,00 %	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI & UKM	Data tidak ada data di sebabkan tidak adanya pemohon/pengajuan izin yang masuk Surat Pernyataan Dinas P2K-UKM Nomor 87.a/IND/PPKUKM/I/2022
		1	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$ $\frac{0}{31} \times 100\%$	0,00 %	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI & UKM	
		5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan di analisa dalam laporan hasil pemantaun}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$ $\frac{31}{31} \times 100\%$	100,00 %	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI & UKM	

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
31 URUSAN TRANSMIGRASI						
		1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya yaitu: 1. UPT WATU	1 UPT WATU	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	KEPMENDES-PDT-TRANS Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021
		2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	85 KK	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	
		3	Jumlah satuan pemukiman yang dibina Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang dibina	1 Pemukiman	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	
URUSAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
1 PERENCANAAN DAN KEUANGAN							
		1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan Jumlah APBD 2021 Rp 180.202.991.639 Rp 1.307.375.584.577 x 100%	13,78 %	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	Data Jumlah belanja pegawai tahun 2021
		2	Rasio PAD	Jumlah PAD 2020 Jumlah PDRB non migas Rp 155.453.702.844 Rp 10.636.682.010.000 x 100%	1,46 %	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	Data Rasio PAD Tahun 2021 bersumber dari BPS (Soppeng Dalam Angka 2022) PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Soppeng (miliar rupiah) 2017-2021
		3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3	INSPEKTORAT	
		4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3	INSPEKTORAT	

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan - transfer expenditure Jumlah APBD 2020 Rp169.480.563.879 Rp1.186.545.478.840 x 100%	14,28 %	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	transfer expenditures adalah hibah, bantuan sosial, subsidi, pembayaran bunga, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga dan data belanja urusan pemerintahan adalah seluruh belanja daerah di luar belanja modal
		6	Opini Laporan Keuangan	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2021 Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2020 Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2019 Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2018 Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2017 Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2016 Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2015 Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2014 Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2013 Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2012	menunggu hasil audit WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Disclaimer	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
2 PENGADAAN							
		1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah konstruksi infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n Jumlah kontrak tahun n 0 84 x 100%	0,00 %	SEKRETARIAT DAERAH BAG. PENGADAAN BARANG DAN JASA	Berdasarkan data kontrak pengadaan barang jasa konstruksi tahun 2021, tidak ada kontrak jasa konstruksi yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal, surat pernyataan Nomor 80/B.BPJ/II/2022

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
		2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	$\frac{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode konpetitif}}{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif}} \times 100\%$ $\frac{84}{1} \times 100\%$	84,00 %	SEKRETARIAT DAERAH BAG. PENGADAAN BARANG DAN JASA	Data kontrak paket pekerjaan pengadaan jasa konstruksi kabupaten soppeng tahun 2021 sebanyak 84 paket Data pengadaan barang/jasa melalui metode penunjukan langsung Pemerintah Kabupaten Soppeng tahun 2021 sebanyak 1 paket
		3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{\text{Jumlah belanja langsung yang melalui pengadaan}}{\text{total belanja langsung}} \times 100\%$ $\frac{\text{Rp } 290.348.896.182}{\text{Rp } 583.431.549.766} \times 100\%$	49,77 %	SEKRETARIAT DAERAH BAG. PENGADAAN BARANG DAN JASA	Laporan realisasi dan kativasi pengadaan Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021 per bulan Desember 2021 pada belanja langsung sebanyak Rp.583.431.549.766 dan belanja modal Rp.290.348.896.182
3 KEPEGAWAIAN							
		1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas}}{\text{seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah}} \times 100\%$ $\frac{1629}{241} \times 100\%$	675,93 %	BADAN KEPEGAWAIAN, PENGEMBANGAN SUMABER DAYA MANUSIA	Data Jumlah Pegawai menurut pendidikan PT ke atas sebanyak 1.629 ASN dan pembagi Data Jumlah Pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah sebanyak 241 ASN
		2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai PNS fungsional (tidak termasuk PNS Guru dan Tenaga Kesehatan)}}{\text{Jumlah pegawai pemerintahan (diluar PNS Guru dan Tenaga Kesehatan)}} \times 100\%$ $\frac{400}{1870} \times 100\%$	21,39 %	BADAN KEPEGAWAIAN, PENGEMBANGAN SUMABER DAYA MANUSIA	Data Jumlah pegawai PNS fungsional (tidak termasuk PNS Guru dan Tenaga Kesehatan) dengan jumlah 416 ASN dan pembagi Data pegawai pemerintahan (diluar PNS Guru dan Tenaga Kesehatan) dengan jumlah 1870 ASN

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
		3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang mempunyai sertifikat kompetensi Seluruh Jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) $\frac{159}{400} \times 100\%$	39,75 %	BADAN KEPEGAWAIAN, PENGEMBANGAN SUMABER DAYA MANUSIA	Data Jumlah pegawai fungsional yang mempunyai sertifikat kompetensi dengan jumlah 159 ASN dan pembagi Data Seluruh Jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) dengan jumlah 416 ASN
4 MANAJEMEN KEUANGAN							
		1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi $\{(\frac{\text{Total Belanja APBD}}{\text{Total Belanja APBD}}) - 1\}$ $\{(\frac{\text{Rp } 1.115.036.916.234,37}{\text{Rp } 1.202.604.425.314,00}) - 1\} \times 100\%$	-7,28 %	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	kurang dari 7,28% anggaran yang tidak terialisasi atau 92,72% anggaran sudah terialisasi dari target yang telah ditetapkan sebelum perubahan
		2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi $\{(\frac{\text{Total PAD dalam PAD}}{\text{Total PAD dalam PAD}}) - 1\}$ $\{(\frac{\text{Rp } 155.453.702.843}{\text{Rp } 127.827.066.724}) - 1\} \times 100\%$	21,61 %	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
		3	Assets Management	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	Ya Ya Ya tidak	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	

NO	URUSAN	IKK OUTPUT/ IKK OUTCAME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
		4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	$\frac{\text{Nilai realisasi SiLPA}}{\text{Total belanja tahun sebelumnya (2020)}} \times 100\%$ $\frac{\text{Rp } 160.306.659.678}{\text{Rp } 1.251.860.939.170} \times 100\%$	12,81 %	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5 TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK							
		1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	$\frac{\text{Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses webside Pemda}}{\text{Realisasi anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses webside Pemda}} \times 100\%$ $\frac{10}{10} \times 100\%$	100,00 %	DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA / DPMPSTP/ KECAMATAN	Data bersumber dari: 1)Belanja web pelayanan Dinas Kominfo, 2)Belanja pelayanan perizinan Dinas PMPTSP, 3)Belanja Paten Kecamatan Lalabata, 4)Belanja Paten Kecamatan Lilirilau, 5)Belanja Paten Kecamatan Liliraja, 6)Belanja Paten Kecamatan Marioriawa, 7)Belanja Paten Kecamatan Marioriwawo, 8)Belanja Paten Kecamatan Donri-Donri, 9)Belanja Paten Kecamatan Ganra, 10)Belanja Paten Kecamatan Citta
		2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	$\frac{\text{Jumlah dokumen yang dipublikasikan dalam webside Pemda}}{\text{Total dokumen yang telah dirinci}} \times 100\%$ $\frac{105}{105} \times 100\%$	100 %	DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA	Screenshot dokumen di webside pemda